

TIDAK DIPERDAGANGKAN UNTUK UMUM

Kongres Bahasa Indonesia IV

1

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

TIDAK DIPERDAGANGKAN UNTUK UMUM

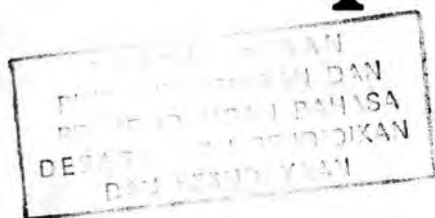
Kongres Bahasa Indonesia IV

1

H A D I A H
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

Kongres Bahasa Indonesia IV

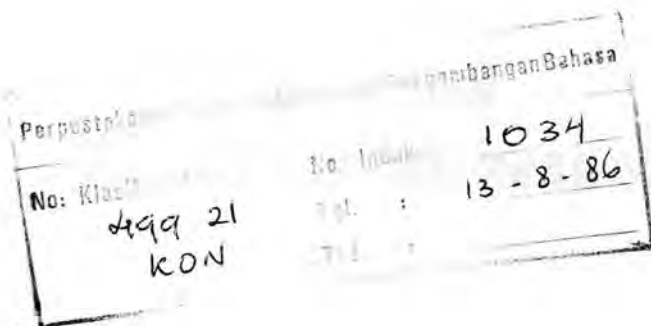
1



**Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta 1985**

PB
199 210 6
KON
K

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Cetakan Pertama

Semula merupakan kumpulan makalah yang dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia IV tahun 1983 yang diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Staf inti Proyek: Drs. Hans Lapoliwa, M.Phil. (Pemimpin), Yusnan Yunus (Bendaharawan), Drs. Nafron Hasjim, Drs. Dendy Sugono (Sekretaris), Drs. Farid Hadi, Drs. S.R.H. Sitanggang, Drs. S. Amran Tasai, dan Drs. A. Patoni (para asisten).

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang dipergunakan atau diperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal kutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Alamat penerbit :

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun
Jakarta Timur 13220

PRAKATA

Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun II (1974), telah digariskan kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam berbagai seginya. Dalam garis haluan ini, masalah kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah, termasuk sastranya, dapat tercapai. Tujuan akhir pembinaan dan pengembangan, antara lain, adalah meningkatkan mutu kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional, sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Untuk mencapai tujuan itu, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan dan kesastraan, seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan; (2) penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa daerah serta kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu; (3) penyusunan buku-buku pedoman; (4) penerjemahan karya kebahasaan dan buku acuan serta karya sastra daerah dan karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia; (5) penyuluhan bahasa Indonesia melalui berbagai media, antara lain televisi dan radio; (6) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui inventarisasi, penelitian, dokumentasi, dan pembinaan jaringan informasi kebahasaan; dan (7) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian beasiswa dan hadiah penghargaan.

Sebagai salah satu tindak lanjut kebijakan itu, dibentuklah oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1974. Setelah Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah berjalan selama sepuluh tahun, pada tahun 1984 Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah itu dipecah menjadi dua proyek yang juga berkedudukan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yaitu (1) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah.

Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kebahasaan yang bertujuan meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyempurnakan sandi (kode) bahasa Indonesia, mendorong pertumbuhan sastra Indonesia, dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia.

Dalam rangka penyediaan sarana kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, dosen, guru, tenaga peneliti, tenaga ahli, dan masyarakat umum, makalah kongres Bahasa Indonesia IV yang diselenggarakan pada tanggal 21–26 November 1983 di Jakarta diterbitkan dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Buku *Kongres Bahasa Indonesia I* ini berisi sebagian dari makalah yang disajikan dalam Kongres Bahasa Indonesia IV. Makalah lain akan diterbitkan dalam *Kongres Bahasa Indonesia 2*.

Akhirnya kepada Sdr. Hans Lapoliwa, M. Phil., Pemimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia, beserta seluruh staf sekretariat Proyek, tenaga pelaksana, dan semua pihak yang memungkinkan terwujudnya penerbitan buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan bagi masyarakat luas.

Jakarta, Mei 1985

Anton M. Moeliono
Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa

DAFTAR ISI

PRAKATA	V
DAFTAR ISI	VII
PIDATO PENGARAHAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROF. DR. NUGROHO NOTOSUSANTO PADA UPACARA PEMBUKAAN KONGRES BAHASA INDONESIA IV JAKARTA, 21 NOVEMBER 1983	1
1. Membangun Bahasa Pembangunan Emil Salim	7 ✓
2. Peranan Pemuda dalam Pembinaan Bahasa Indonesia A. Gafur	27 ✓
3. Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Komunikasi Pemerintah dan Pembangunan Soepardjo	35 ✓
4. Bahasa Hukum Sebagai Objek dan Subjek Pembangunan Nasional Ali Said	51 ✓
5. Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pembinaan Kehidupan Beragama H. Ahmad Ludjito	59 ✓
6. Pengembangan Bahasa Indonesia di dalam Dunia Penerangan di Indonesia Harmoko	71 ✓
✓ <u>7.</u> Penggunaan Bahasa Indonesia di Lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, dan di dalam Lalu Lintas Kegiatan Sehari-hari Achmat Tahir	87 ✓
8. Antara Kenyataan dan Harapan Ki Soeratman	105 ✓

9.	Peranan Guru Bahasa Indonesia dalam Menyukkseskan Pembangunan Nasional	
	I. Umar Suparno	117
10.	Bahasa Administrasi Sebagai Bahasa Pelayanan	
	Bambang Sugema	139
11.	Pengembangan Bahasa Indonesia dan Pembangunan Buku	
	Harris M. Nasution	151
12.	Berlakukn Pepatah "Sambil Menyelam Minum Air" dalam Pembinaan Ilmu dan Teknologi Melalui Pembakuan Istilah?	
	Mien A. Rifai	161
13.	Bahasa Indonesia Menghadapi Penterjemahan	
	Ali Audah	173
14.	Bahasa Nasional sebagai Sarana Komunikasi untuk Mencapai Tujuan Nasional	
	Jusuf A. Feisal	187
15.	Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi Masyarakat	
	P.W.J. Nababan	199
16.	Kesesuaian Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi dan Teknologi Masa Kini	
	M.M. Purbo — Hadiwidjoyo	217
17.	Dengan Bahasa (Indonesia) sebagai Sarana Kita Naikkan Derajat Bangsa (Indonesia)	
	B.M. Diah	233
18.	Meningkatkan Bobot dan Kadar Pengamalan Kesadaran Nasional Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia secara Baik dan Benar	
	Imam Sukarsono	249
19.	Mari Kita Laksanakan Cita-Cita Sumpah Pemuda	
	Samsuri	263
20.	Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah Dilihat dari Segi Sisiopolitologuistik	
	Jos Daniel Parena	277
21.	Disiplin Nasional dan Pemakaian Bahasa Indonesia	
	Nurdin Yatim	291

22.	Angka Statistik sebagai Salah Satu Indikator Masalah Kebahasaan : dengan Menampilkan Perkembangan Bahasa Indonesia Sebagai Kasus Khusus Husen Abas	301
23.	Reaksi Subjektif terhadap Bahasa Indonesia Baku dan Non baku : Sebuah Pengkajian Sikap Bahasa Asim Gunarwan	319
24.	Peranan Koran-Koran Indonesia dalam Pengembangan Bahasa Indonesia Sayuti Kurnia	335
25.	Pemanfaatan Potensi Ungkapan Bahasa Daerah dalam Rangka Pemantapan Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi Massa Suwito	349
26.	Keputusan Kongres Bahasa IV	365 ✓
	SAMBUTAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA PADA UPACARA PENUTUPAN KONGRES BAHASA INDONESIA IV DI JAKARTA PADA TANGGAL 26 NOVEMBER 1983.	375
	SUSUNAN PANITIA KONGRES BAHASA INDONESIA IV JAKARTA, 21 – 26 NOVEMBER 1983	379
	DAFTAR PESERTA KONGRES BAHASA INDONESIA IV	389

PIDATO

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROF. DR. NUGROHO NOTOSUSANTO
PADA UPACARA PEMBUKAAN
KONGRES BAHASA INDONESIA IV
JAKARTA, 21 NOVEMBER 1983**

Marilah kita mengucapkan puji dan syukur yang tulus ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah, dan rido-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Mudahan-mudahan niat baik dan usaha pembangunan bangsa kita di rahmati-Nya.

Hasil Keputusan Politik

Hadirin yang saya muliakan,

Kongres Bahasa Indonesia IV, yang insya'Allah akan kita mulai pada hari ini, diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda. Masalah bahasa Indonesia memang berkaitan erat dengan keputusan politik dalam bentuk Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh Kongres Pemuda-pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda memang beralasan.

Sumpah Pemuda pada dasarnya adalah keputusan politik yang diambil oleh para pemuda dan bukan oleh para ahli bahasa atau ahli sastra. Keputusan politik itu memantapkan perjuangan Generasi 1908 dengan menyatakan kebulatan tekad mengenai tunggalnya tanah tumpah darah kita, tunggalnya bangsa kita, dan tunggalnya bahasa persatuan kita. Keputusan itu menentukan identitas kita sebagai bangsa, yang mencerminkan ciri-ciri khas kita sebagai bangsa dan yang membedakan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, pencetus Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu merupakan

peristiwa yang sangat menentukan di dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa kita.

Sebagai peristiwa sejarah, pencetus Sumpah Pemuda itu tentulah tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan lanjutan peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya, terutama perjuangan nasional sejak tahun 1908 dengan terbentuknya Budi Utomo. Ia berkaitan dengan keputusan politik tahun 1918 yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia (pada waktu itu, disebut bahasa Melayu) dapat digunakan sebagai bahasa kerja Dewan Rakyat (*Volksraad*). Selanjutnya, ia juga berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa nasional sesudah tahun 1928. Penerbitan majalah *Pujangga Baru* oleh Sutan Takdir Alisjahbana dan kawan-kawan pada tahun 1933, misalnya, memantapkan dan menjabarkan unsur ketiga Sumpah Pemuda, yaitu "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Dengan majalah itu bahasa Indonesia dibina dan dikembangkan di kalangan masyarakat.

Keputusan politik tahun 1928 itu diperkuat lagi dengan keputusan politik tahun 1945. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "bahasa negara ialah bahasa Indonesia". Dengan demikian, kita lihat bahwa Sumpah Pemuda 1928 memberikan kepada bahasa Indonesia kedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional kita dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kepada bahasa Indonesia kedudukan sebagai bahasa negara.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai sarana identitas nasional kita, sarana pemersatuan kita sebagai bangsa, dan sarana perhubungan antardaerah dan antarbudaya. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa pemerintahan, bahasa pengantar kependidikan, bahasa pengantar media massa, dan sarana pendukung pengembangan ilmu dan teknologi.

Selain itu, bahasa Indonesia sebagai unsur budaya nasional memungkinkan kita membina dan mengembangkan budaya nasional kita. Kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa negara, berarti kedudukan sebagai sarana perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Struktur Kekeluargaan

Sebagai sarana perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara kita yang didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia memperlihatkan suatu struktur sosial yang bercorak *kekeluargaan*. Menurut ketentuan di dalam batang-tubuh maupun penjelasan Undang-Undang Dasar

1945, dapat kita simpulkan, bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan atau bersifat kekeluargaan. Karena itulah amat menarik, bahwa menurut kenyataannya struktur sosial bahasa Indonesia bercorak kekeluargaan.

Yang saya maksudkan adalah, bahwa dalam bahasa Indonesia sebutan-sebutan bagi sesama warga masyarakat menggunakan peristilahan kekeluargaan, seperti bapak, ibu, kakak, abang, adik; dari bahasa daerah diambil sebutan mas, mbakyu, diajeng, uni, akang, ceu; dari bahasa asing diambil sebutan oom dan tante. Dan sebutan itu digunakan juga terhadap mereka yang bukan kerabat! Seorang anak penjual surat kabar tidak ragu-ragu untuk menyebutkan seseorang yang naik mobil bagus: oom atau tante.

Juga di dalam lingkungan yang secara resmi memakai sebutan "burgerlijk" seperti tuan, nyonya dan nona, seperti dalam penerbangan pesawat Garuda, begitu pramugari meletakkan alat bicaranya dan bertatap-muka dengan para penumpang, ia memakai sebutan bapak, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Dulu dalam lingkungan ABRI juga dipergunakan sebutan resmi tuan-tuan dalam pelbagai lembaga pendidikan. Tetapi sejak jaman Orde Baru, sebutan itu secara resmi disesuaikan dengan praktek nonformalnya, dan dipakailah sebutan saudara-saudara.

Sudah jelas bahwa bahasa Indonesia tidak mengenal sebutan feodalistik seperti bendoro, gusti, duli tuanku, hamba, patik, dan lain sebagainya.

Baik dalam Kongres Bahasa yang lalu, maupun dalam pelbagai pertemuan di bidang linguistik maupun pertemuan yang membahas bahasa Indonesia, secara berulang-ulang diusulkan, agar-supaya kita meninggalkan sebutan-sebutan kekeluargaan seperti bapak, ibu, saudara, dan lain sebagainya dan sebagai gantinya menggunakan sebutan tuan, nyonya, nona, dan lain sebagainya. Namun, usaha itu setiap kali pula tidak diterima, karena memang tidak sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat kita yang berjiwa kekeluargaan.

Bahkan ada yang mencoba mendiskreditkan semangat kekeluargaan itu dengan menyebutkan bahwa kekeluargaan adalah feodalistik! Sudah barang-tentu pihak yang berkata demikian mengalami alinea dari masyarakat Indonesia dan menjadi orang asing di negeri sendiri. Semangat kekeluargaan lain dari semangat feodalistik dan lain pula dari semangat berjuasi atau *burgerlijk*.

Berdasarkan kenyataan seperti itu, kita semua harus bertindak dengan hati-hati dan cermat di dalam usaha pembinaan bahasa Indonesia. Jangan sampai pembinaan bahasa Indonesia itu dilakukan dengan tidak mengindahkan watak bahasa Indonesia itu dan hendak membengkokkan pertumbuh-

annya secara paksa ke arah yang tidak alamiah. Harus ada keselarasan dan keseimbangan antara *dasar* dan *ajar*, atau dalam bahasa asingnya, antara *nature* and *nurture*.

Calon Bahasa Dunia

Bahasa Indonesia tumbuh dari bahasa Melayu dan berkembang sesuai dengan kebahasaan, yaitu keadaan yang multilingual, di Indonesia. Unsur serapan, baik unsur serapan dari berbagai bahasa daerah maupun unsur serapan dari bahasa asing, yang ada di dalam bahasa Indonesia sekarang merupakan ciri khas yang membedakannya dari bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu. Namun, ciri dasar bahasa asalnya itu tetap menonjol di dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Dalam kaitan ini, kita dapat meninjau peranan bahasa kita itu dari segi kawasan yang lebih luas, yaitu kawasan bangsa serumpun di Asia Tenggara.

Selain di Indonesia, dengan nama bahasa Indonesia, bahasa Melayu telah berkembang juga sebagai bahasa nasional dengan nama bahasa Malaysia di Malaysia. Bahasa Melayu juga digunakan di Singapura dan Brunei. Dalam waktu yang tidak lama lagi Brunei sebagai negara merdeka akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kenegaraannya. Dengan demikian, bahasa Melayu secara umum merupakan bahasa perhubungan antarnegara dan antarbangsa di kawasan bangsa serumpun di Asia Tenggara. Selanjutnya berdasarkan kekayaan budaya yang melatarbelakanginya, besarnya jumlah penuturnya, dan luasnya kawasan penggunaannya dapatlah dikatakan bahwa bahasa kita memiliki potensi berkembang menjadi salah satu bahasa dunia pada waktu yang akan datang.

Sarana Pembangunan Nasional

Kongres Bahasa Indonesia IV ini diselenggarakan dengan tujuan menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional dan temanya adalah "Dengan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Kita Sukseskan Pembangunan Nasional". Dalam hubungan ini, sejalan dengan kedudukan, fungsi, dan potensi perkembangan bahasa Indonesia seperti yang telah saya kemukakan, kita perlu membina bahasa Indonesia dan mutu penggunaannya di dalam segenap lapisan masyarakat kita. Dengan kata lain, kita perlu meningkatkan usaha pengejawantahan unsur ketiga Sumpah

Pemuda 1928, yaitu "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Kita perlu menempatkan bahasa Indonesia pada kedudukan yang terhormat di dalam kehidupan kita sebagai bangsa.

Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983) mengarahkan bahwa "pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar" dan bahwa "pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu sarana identitas nasional." Garis-garis Besar Haluan Negara juga menetapkan bahwa "pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia perlu makin ditingkatkan dan diperluas sehingga mencakup semua lembaga pendidikan dan menjangkau masyarakat luas." Sesuai pula dengan tujuan dan tema Kongres Bahasa Indonesia IV ini, kita dan setiap warga negara Indonesia berkewajiban melaksanakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Di samping membina bahasa Indonesia dan mutu penggunaannya di dalam masyarakat kita, kita perlu pula mengembangkannya dari segala segi, seperti fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis, dan semantik, sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia itu benar-benar memiliki kemampuan sebagai sarana pengungkapan perasaan yang sehalus-halusnya serta sebagai bahasa pemerintahan, bahasa pendukung ilmu dan teknologi modern, bahasa pengantar kependidikan, dan bahasa media massa yang dapat diandalkan. Bahasa Indonesia perlu kita per kaya dengan mengembangkan unsur-unsurnya sendiri dan, apabila perlu, dengan menyerap unsur-unsur bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing.

Kongres ini merupakan forum yang tepat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan operasional mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa nasional kita itu. Apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu? Faktor-faktor apa yang menghambat usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia selama ini? Jalan apakah yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan itu? Program, strategi, dan sarana apa yang diperlukan? Faktor-faktor apa yang menunjang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia selama ini? Bagaimana usaha itu dapat ditingkatkan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bertalian dengannya merupakan bahan masukan yang sangat berharga bukan saja bagi Pemerintah, terutama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan juga bagi segenap lapisan masyarakat kita. Pembinaan dan pengembangan bahasa

Indonesia sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan potensi perkembangannya adalah tanggung jawab kita semua.

Purnakata

Mudah-mudahan Kongres Bahasa Indonesia IV ini mencapai hasil yang sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan kita semua. Mudah-mudahan usaha kita selama kongres ini berlangsung diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita diberi-Nya kekuatan lahir dan batin serta petunjuk di dalam usaha kita membangun bangsa kita pada waktu di hadapan kita.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan bahwa Kongres Bahasa Indonesia IV dibuka dengan resmi.

Saya ucapan selamat berkongres.

Terima kasih.

Prof. Dr. Nugroho Notosusanto

MEMBANGUN BAHASA PEMBANGUNAN

**Makalah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup
dalam Kongres Bahasa Indonesia Keempat, 22 November 1983
di Jakarta.**

Oleh : Emil Salim.

Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengambil keputusan politik dengan menugaskan mandataris MPR menyusun rencana pembangunan supaya tahap tinggal landas tercapai dalam Pelita Keenam pada tahun 2000 nanti. Untuk mewujudkan keputusan politik ini, berbagai kegiatan perlu diarahkan ke tujuan ini.

Berbagai kegiatan ini menghadapi tantangan permasalahan yang cukup besar. Menjelang tahun 2000 ini jumlah penduduk akan bertambah besar, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang harus dihasilkan dari sumber daya alam Indonesia yang persediannya tidak bertambah besar.

Untuk menjawab tantangan permasalahan ini maka penduduk harus bisa diubah menjadi unsur pendorong pembangunan. Sedangkan sumber daya alam diarahkan pengelolaannya agar mampu menopang pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan.

Perubahan penduduk dan pola pengelolaan sumber daya alam seperti ini memerlukan peran serta dan keterlibatan penduduk dalam arus perubahan ini.

Untuk ini diperlukan arus komunikasi secara intensip dan terus-menerus dalam masyarakat menumbuhkan pengertian, dan pemahaman tentang cara penyelesaian masalah, dorongan motivasi berbuat dan langkah bertindak. Dalam berkomunikasi ini bahasa memegang peranan menentukan.

Dalam makalah ini akan ditelusuri keadaan bahasa Indonesia dalam masyarakat kita dan kebutuhan mengembangkan bahasa Indonesia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan di masa depan.

Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Masyarakat

Sungguhpun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara kita, namun pemakaian bahasa Indonesia dalam rumahtangga sehari-hari belumlah terlalu luas. Sebanyak 12% dari penduduk berjumlah 146,7 juta (1980) memakai bahasa Indonesia sehari-hari.

Sebanyak 59,4 juta jiwa (40%) menggunakan bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari. Disusul dengan bahasa Sunda digunakan oleh sebanyak 22,1 juta jiwa (15%). Bahasa Madura dipakai oleh 6,9 juta jiwa (5%) disusul oleh bahasa Minang oleh 3,5 juta jiwa (2%), bahasa Bugis oleh 3,3 juta jiwa (2%), bahasa Batak oleh 3,1 juta jiwa (2%), bahasa Bali oleh 2,5 juta jiwa (2%) dan bahasa Banjar oleh sebanyak 1,7 juta jiwa (1%), seperti tampak pada tabel 1.

Bahasa Jawa dan Sunda dipakai oleh lebih dari separoh (55%) jumlah penduduk. Hal ini masuk akal karena jumlah penduduk pulau Jawa adalah 62% dari seluruh jumlah penduduk.

Bahasa Madura, Minang, Bugis, Batak dan Bali mempunyai satu ciri yang sama, yaitu bahasa-bahasa daerah ini dipakai oleh suku bangsa yang suka merantau dan berlayar ke luar daerah asalnya. Dengan begitu bahasa-bahasa daerah para perantau ini ikut tersebar ke luar daerah asalnya.

Yang menarik adalah bahwa bahasa daerah ini masih banyak dipakai oleh penduduk di bawah umur 15 tahun, sehingga bahasa daerah ini diperkirakan masih terpelihara sampai tahun 2000. Sebanyak 41,1 juta anak di bawah umur 15 tahun masih memakai bahasa daerah dalam pergaulannya sehari-hari. Jumlah ini merupakan 68% dari seluruh jumlah penduduk berumur di bawah 15 tahun yaitu 60,0 juta jiwa di tahun 1980.

Pemakaian bahasa Batak oleh anak-anak di bawah umur 15 tahun ini tercatat lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan pemakaian bahasa daerah lain oleh kelompok umur yang sama. Sehingga kedudukan bahasa Batak dalam urutan bahasa daerah cenderung naik dari urutan tujuh sekarang menjadi enam di tahun 2000 nanti.

Selama dasawarsa tujuh puluhan jumlah penduduk yang dapat berbahasa Indonesia bertambah, baik dalam persentase maupun dalam jumlah, seperti tampak pada tabel 3.

Kemampuan berbahasa Indonesia lebih tinggi di kalangan laki-laki dari pada perempuan dan lebih tinggi di kota dari pada di desa. Secara keseluruhan di tahun 1980 jumlah penduduk Indonesia yang tidak paham berbahasa Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 39% dari jumlah penduduk Indonesia. Keadaan tahun 1980 sudah lebih maju dibandingkan dengan keadaan

tahun 1971 ketika sebanyak 59% jumlah penduduk tidak memahami bahasa Indonesia.

Jumlah penduduk yang tidak paham berbahasa Indonesia tersebar di berbagai daerah seperti tampak di tabel 4. Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara mempunyai persentase penduduk paling tinggi (48%) yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Sedangkan kepulauan Maluku merupakan persentase penduduk terendah (11%) yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Jika daerah disusun menurut urutan ketidakpahaman berbahasa Indonesia seperti dalam tabel 5, maka enam daerah memiliki persentase ketidakpahaman berbahasa Indonesia di atas rata-rata nasional (39%). Daerah-daerah ini adalah Nusa Tenggara Barat (53%), Jawa Tengah (50%), Jawa Timur (49%), Nusa Tenggara Timur (43%) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (41%).

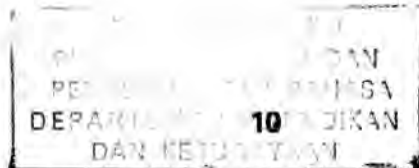
Daerah yang paling rendah persentase ketidakpahaman berbahasa Indonesia di atas rata-rata nasional (39%), mempunyai pula beberapa persamaan. *Pertama*, taraf keniraksaraannyapun menunjukkan persentase tinggi di atas rata-rata nasional (29%); *kedua*, produk domestik regional bruto propinsi per penduduk di tahun 1978 juga tergolong rendah.

Ketidakpahaman berbahasa Indonesia untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur diimbangi oleh kepeahaman berbahasa Jawa. Keadaan ini pula mungkin menerangkan mengapa banyak kata-kata Jawa dan kata-kata Sanskerta masuk dalam perbendaharaan kata-kata bahasa Indonesia.

Ketidakpahaman berbahasa Indonesia untuk daerah Nusa Tenggara Barat berjalan sejajar dengan indikator kesejahteraan rakyat lainnya seperti tingginya tingkat fertilitas penduduk, tingginya tingkat kematian penduduk termasuk tingkat kematian bayi, tingginya tingkat keniraksaraan, dan rendahnya tingkat pendapatan domestik regional bruto propinsi per jiwa penduduk.

Keadaan Nusa Tenggara Timur agak sedikit lebih baik dari Nusa Tenggara Barat, namun juga menderita berbagai kekurangan di bidang kependudukan seperti tingkat kematian termasuk kematian bayi, tingkat fertilitas, dan lain-lain.

Dua daerah Nusa Tenggara ini memiliki kondisi lingkungan hidup yang paling tidak menguntungkan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Musim kemarau yang panjang, rata-rata sembilan bulan, dengan gangguan hawa kering dari daratan padang pasir Australia, keadaan lahan yang kurang subur dan persediaan air permukaan yang terbatas, mempengaruhi tingkat kesejahteraan di daerah ini. Sehingga agaknya turut berpengaruh pada kemampuan berbahasa Indonesia yang masih rendah.



Berdasarkan data statistik tahun 1980 beberapa kesimpulan bisa ditarik tentang keadaan bahasa Indonesia di tanah air kita. *Pertama*, bahasa Jawa dan Sunda masih luas dipakai melebihi jumlah penduduk berbahasa Indonesia. Pemakaian bahasa daerah masih akan berlanjut, karena 68% dari jumlah penduduk berumur di bawah 15 tahun diketahui menggunakan bahasa daerahnya dalam percakapan sehari-hari; *kedua*, angka persentase penduduk Indonesia yang tidak berbahasa Indonesia cukup tinggi, yaitu 39% dari seluruh jumlah penduduk di tahun 1980. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan 59% tidak paham berbahasa Indonesia di tahun 1971; *ketiga*, ketidakpahaman berbahasa Indonesia terdapat di daerah-daerah yang tinggi tingkat keniraksaraannya dan rendah pendapatan regional per jiwa penduduknya. Sebaliknya juga menarik bahwa daerah yang rendah ketidakpahaman berbahasa Indonesia, rendah pula tingkat keniraksaraannya dalam persentase, dan tinggi pula pendapatan regional per jiwa penduduk.

Antara pemahaman berbahasa Indonesia, tingkat keniraksaraan dan pendapatan daerah per jiwa penduduk nampaknya terdapat hubungan. Semakin besar jumlah penduduk di daerah yang memahami bahasa Indonesia, semakin rendah pula tingkat keniraksaraannya dan semakin besar pula pendapatan daerah per jiwa penduduk.

Dari gambaran ini kentalah bahwa pemahaman bahasa daerah sungguhpun penting, namun tidaklah cukup. Bahasa Indonesia perlu dipahami pula. Pandai membaca dan menulis huruf Latin nampaknya berkaitan dengan pemahaman berbahasa Indonesia. Oleh karena persentase keniraksaraan di daerah umumnya lebih rendah dari pada persentase ketidakpahaman berbahasa Indonesia, bisalah disimpulkan bahwa mereka yang bisa membaca dan menulis huruf Latin umumnya bisa pula berbahasa Indonesia. Tetapi sebaliknya mereka yang bisa berbahasa Indonesia tidak selalu bisa pula membaca dan menulis huruf Latin.

Tingkat keniraksaraan yang rendah dan kepahaman berbahasa Indonesia yang tinggi mempengaruhi tingkat pendapatan daerah per jiwa penduduk. Kecakapan membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia agaknya membuka kemungkinan lebih luas untuk meningkatkan pendapatan. Sebaliknya pendapatan daerah yang tinggi membuka kemungkinan perluasan fasilitas pemberantasan buta huruf dan pendidikan menurunkan ketidakpahaman berbahasa Indonesia.

Dari gambaran ini kentalah bahwa bahasa berkaitan erat dengan pembangunan dalam hubungan timbal-balik.

Menuju Tinggal Landas Tahun 2000

Dengan keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (1983) supaya bangsa Indonesia mencapai tahapan tinggal landas dalam Pelita Keenam (2000), maka berbagai kegiatan Pelita Keempat dan Kelima, harus ditujukan ke jurusan ini.

Untuk mencapai tahapan tinggal landas ini maka kegiatan pembangunan perlu diperluas supaya lebih beraneka-ragam. Sampai sekarang kegiatan masyarakat terletak terutama di bidang pengolahan bahan mentah, terutama di sektor pertanian dan pertambangan. Bagian terbesar ekspor kita pun terdiri dari bahan mentah, seperti minyak bumi, karet, kopi, teh, timah, dan sebagainya.

Dengan kegiatan mengolah bahan mentah seperti ini, maka bagian terbesar penduduk kita atau 82% jumlah penduduk tinggal di daerah pedesaan (1980).

Dengan perlunya kegiatan pembangunan diperluas dan lebih beranekaragam akan lahir berbagai kegiatan baru. Sektor industri dan sektor jasa perlu semakin ditingkatkan, sehingga bahan mentah dan bahan baku bisa diolah di dalam negeri.

Kegiatan industri dan jasa biasanya berlangsung lebih banyak di kota. Lalu terjadilah gerak pindah penduduk ke kota menawarkan jasa-jasanya di luar sektor pertanian. Jumlah penduduk kota cenderung bertambah, sehingga lahir pula berbagai kelakuan hidup perkotaan yang semula belum banyak menonjol dalam kelakuan hidup masyarakat pedesaan.

Meluasnya kegiatan pembangunan mencakup sektor pertanian, industri, jasa dan sebagainya mempengaruhi perubahan struktur ekonomi. Apabila semula peranan sektor pertanian sangat besar dalam struktur ekonomi Indonesia, maka lambat-laun peranan ini diimbangi oleh sektor industri, jasa dan lain-lain.

Munculnya sektor-sektor baru ini juga melahirkan kelompok-kelompok masyarakat baru, seperti kelompok industriawan, penjual jasa asuransi, perbankan, angkutan, perdagangan, dan lain-lain pelayanan jasa. Penduduk kota semakin bertambah mendorong lahirnya desa menjadi kota kecil, kota kecil menjadi kota besar dan kota besar menjadi kota metropolitan.

Beranekaragam kegiatan ini menimbulkan naiknya mobilitas penduduk, secara horisontal dari desa ke kota atau dari daerah satu ke daerah lain dan secara vertikal dari tingkat kedudukan satu ke tingkat kedudukan lebih tinggi.

Semua ini berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Sehingga

bisalah diramalkan bahwa masyarakat Indonesia di tahun 2000 memiliki banyak hal-hal baru yang belum kita ketahui di tahun 1950 atau 1980 ini.

Mungkin timbul pertanyaan apakah berbagai perubahan ini perlu, mengapa kita tidak bertahan pada struktur ekonomi dan struktur kehidupan sosial yang lama dan sama.

Perubahan perlu kita laksanakan karena sesungguhnya didesak oleh kenyataan yang berubah. Menjelang tahun 2000 Indonesia akan mengalami pertambahan penduduk antara 60 juta (taksiran rendah) dan 70 juta (taksiran tinggi) dalam masa 1980 - 2000 dan membawa jumlah penduduk Indonesia dari 150 juta jiwa sekarang menjadi 216 atau 222 juta jiwa di tahun 2000.

Pertambahan penduduk ini bukan diakibatkan oleh kegagalan pelaksanaan program keluarga berencana. Bahkan dalam perkiraan jumlah penduduk di tahun 2000 sudah tersimpul perkiraan bahwa tingkat kelahiran akan terus turun dengan rata-rata 2 - 2,5% setahun, sebagai hasil pelaksanaan program Keluarga Berencana.

Yang menjadi masalah bahwa tingkat kematian, khususnya tingkat kematian bayi Indonesia masih tergolong tinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar 98 bayi per 1000 jiwa kelahiran. Thailand dan Filipina berhasil mencapai tingkat kematian bayi menjadi 53 bayi per 1.000 kelahiran di tahun 1981. Malaysia berhasil menurunkannya menjadi 30 bayi per 1.000 kelahiran, sedangkan Singapura mencapai 12 bayi per 1.000 kelahiran. Karena negara-negara tetangga bisa mencapai angka lebih rendah, jelaslah bahwa hal ini secara ilmiah bisa pula dicapai Indonesia. Dan kita harus berusaha keras supaya tingkat kematian bayinya bisa lebih diturunkan pula.

Tingkat kematian bayi adalah indikator yang peka sekali terhadap keadaan lingkungan hidup yang kotor, keadaan konsumsi makanan tidak bergizi, lingkungan pemukiman yang tidak sehat, tingkat pendidikan yang rendah, dan sebagainya. Sehingga wajar pula apabila menurunnya tingkat kematian bayi merupakan hasil dari pada kegiatan pembangunan yang secara menyeluruh mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Tetapi pengaruh dari menurunnya tingkat kematian bayi adalah bertambah penduduk secara menyolok pula. Penduduk yang bertambah ini terdapat kebanyakan di pulau Jawa, sehingga masalah penyebaran penduduk secara lebih merata menjadi semakin penting.

Penduduk yang bertambah juga memberi tekanan kepada daya dukung lingkungan yang memang sudah jenuh. Sehingga ancaman terhadap kerusakan lingkungan semakin besar. Maka perlu diusahakan cara-cara berproduksi lain

yang tidak terlalu banyak bergantung pada pengolahan sumber daya alam tanah dan air. Ini berarti perlu digesernya kegiatan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.

Kedudukan Indonesia di simpang lintas internasional mengakibatkan Indonesia menghadapi saingan internasional yang gencar. Untuk mengatasi semua ini, kita perlu meningkatkan daya saing Indonesia di bidang ekonomi, teknologi dan pembangunan umumnya.

Berbagai desakan keadaan ini, seperti penambahan penduduk, tekanan pada daya dukung alam yang sudah jenuh, semakin gencarnya saingan internasional, — semua ini mengakibatkan bahwa Indonesia harus merombak struktur ekonominya menuju keanekaragaman kegiatan ekonomi di bidang pertanian, industri dan jasa.

Dan perubahan struktur sosial itu menyertai proses perombakan struktur ekonomi ini.

Dampak negatif proses pembangunan banyak sekali. Khusus di bidang lingkungan hidup dapat diperkirakan timbulnya dampak negatif seperti (1) rusaknya lingkungan alam akibat terkurasnya sumber daya alam; (2) teknologi dan proses produksi yang menghasilkan produk sampingan berupa limbah industri, pencemaran air, udara, tanah dan kebisingan; (3) pemusatan penduduk dalam pemukiman yang padat sehingga menimbulkan pemusatan sampah dan tinja rumah tangga, kotornya air, rumah-rumah yang pengap, berjangkitnya penyakit menular, dan sebagainya.

Dampak positif pembangunan kepada lingkungan hidup adalah (1) meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan kemungkinan memperbaiki tingkat kesejahteraan sehingga memungkinkan perbaikan lingkungan hidup; (2) semakin beranekaragamnya kegiatan membuka kesempatan memilih pekerjaan yang lebih luas bagi penduduk, dan berkat keanekaragaman lapangan kerja seperti ini memungkinkan lebih stabilnya ekosistem tanah-air; (3) kemungkinan menaikkan mutu hidup semakin terbuka sehingga mengangkat pula kadar mutu lingkungan hidup.

Khusus di bidang kependudukan bisa pula diperkirakan timbulnya dampak negatifnya seperti: (1) meningkatnya wilayah pergeseran dan pertikaian (konflik) antar penduduk yang semakin banyak jumlahnya; (2) hilangnya kepercayaan diri, timbulnya rasa keterasingan diri dalam masyarakat, dan kecenderungan untuk melarikan diri dari kenyataan melalui penghisapan ganja, alkohol, bunuh-diri, atau rasa berontak terhadap tekanan kehidupan sehingga mendorong perbuatan melanggar norma susila, pembunuhan dan lain-lain kelakuan pembangkangan; (3) timbulnya kesenjangan antara tingkat pendapatan

dan kehidupan antara kota dan desa, antara karyawan perindustrian serta jasa dengan pertanian, antara yang berpendidikan tinggi dengan yang tidak, antara Jawa dan luar-Jawa, antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur, dan seterusnya.

Dampak positif pembangunan di bidang kependudukan adalah (1) meningkat pendapatan dan kesempatan memperoleh pendidikan, perbaikan kesehatan dan mutu hidup pada umumnya; (2) meningkatnya mobilitas penduduk antar daerah sehingga memperkuat rasa persatuan, kesadaran berbangsa serta kerukunan nasional; (3) tumbuhnya rasa percaya pada diri sendiri, kualitas fisik dan non-fisik meningkat, harga diri dan martabat kemanusiaannya semakin berkembang.

Masalah pokok sekarang adalah bagaimana mengusahakan kegiatan pembangunan dengan memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positif pada masyarakat.

Peranan Bahasa Dalam Pembangunan

Indonesia beruntung memulai kegiatan pembangunan agak lambat, baru di permulaan tahun tujuh puluhan. Dengan demikian Indonesia bisa belajar dari kekeliruan pola pembangunan negara berkembang lainnya.

Berdasarkan pelajaran dari pembangunan negara-negara berkembang lahir kebutuhan memadukan segi lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH nomor 4 Tahun 1982) mengungkapkan keharusan kita melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Makna pokok pembangunan seperti ini adalah *pertama*, penggunaan sumber daya alam sebijaksana mungkin, memperhitungkan berbagai kemungkinan penggunaannya dengan anekaragam teknologi serta proses produksi yang memperhitungkan dampaknya kepada masyarakat; *kedua*, memperhitungkan dimensi jangka panjang supaya sumberdaya alam bisa digunakan menunjang pembangunan secara berkelanjutan dan berguna bagi generasi sekarang dan nanti; *ketiga*, arah tujuan pembangunan adalah meningkatkan mutu hidup, mengangkat derajat manusia dalam keselarasan hubungan antara diri manusia dengan Tuhan Maha Pencipta, antara manusia dengan masyarakat dan antara manusia dengan lingkungan alam.

Peranan penduduk yang semulanya dilihat lebih berat sebagai faktor penghambat pembangunan, perlu dikembangkan menjadi faktor penunjang pembangunan. Untuk ini pembangunan tidak hanya menjadikan manusia

sebagai sasaran pembangunan, mengusahakan terpenuhinya berbagai keperluan hidupnya, tetapi menjadikan manusia juga sebagai subjek penentu pembangunan. Dalam kaitan ini nilai kualitas manusia perlu ditumbuhkan, sehingga dengan pengembangan segala kemampuan fisik dan non-fisik sang manusia Indonesia bisa menjadi penggerak pembangunan.

Pembangunan berwawasan lingkungan dan penduduk yang berkembang kemampuan kualitasnya, memerlukan perubahan penglihatan manusia terhadap pembangunan. Pembangunan bukan lagi merupakan usaha peningkatan barang dan kemajuan lahiriah saja, tidak pula merupakan usaha mengejar kepuasan batiniah saja, tetapi merupakan keselarasan antara keduanya.

Kedudukan manusia tidaklah lagi menjadi pusat kehidupan alam, tetapi manusia merupakan bagian dari kehidupan alam, dengan Tuhan Maha Pencipta sebagai titik-pusat kehidupan alamiah dan rohaniah.

Perubahan penglihatan manusia seperti ini memerlukan pemahaman, pengertian, penghayatan dan pembangkitan motivasi dalam diri manusia dan masyarakat mau menerima dan melaksanakan perubahan ini.

Untuk memungkinkan ini komunikasi memegang peranan sentral. Gagasan dan faham baru harus bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Dan bahasa menjadi wahana komunikasi ampuh untuk memungkinkan proses pengasilan pengertian, penumbuhan pemahaman, pendalaman penghayatan dan pembangkitan motivasi manusia dan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan perubahan dan pembaharuan.

Dalam kaitan ini lingkungan hidup memerlukan perbendaharaan kata dan bahasa yang mudah dicernakan masyarakat umum. Lingkungan hidup di satu pihak bukan bidang baru bagi masyarakat bangsa kita. Falsafah hidup yang terdapat dalam hati sanubari masyarakat kita di daerah sudah banyak memuat prinsip-prinsip yang dianut lingkungan hidup.

Daerah Minangkabau mengenal "alam takambang sebagai guru". Daerah Bali mengenal keserasian hidup segitiga antara Tuhan, Manusia dan Alam. Ungkapan Sosrokartono tentang kehidupan, ketentuan-ketentuan hukum adat masyarakat korps Kewang di Maluku, pandangan hidup masyarakat Baduy di daerah Banten — semua ini membuktikan bahwa hakikat lingkungan hidup sudah dipahami masyarakat kita.

Sementara itu lahir ancaman baru terhadap lingkungan berpangkal pada teknologi modern yang serba baru dan belum kita kenal. Sehingga lahir kebutuhan menampung permasalahan lingkungan hidup yang baru ini dalam perbendaharaan kata-kata dan bahasa Indonesia. Pencemaran, pencagaran, daur-ulang, daya lenting, plasma nutfah, adalah beberapa di antara banyak

kata-kata yang tumbuh dalam kamus bahasa lingkungan hidup.

Menurut pengalaman maka berbagai kata baru ini tidak mempunyai masalah apabila kata-kata itu berdiri lepas dan tidak dalam kaitan dengan hubungan antar manusia sehingga tidak memiliki bobot nilai tertentu.

Salah satu contoh adalah pengertian "dampak", yang bisa berkembang menjadi "dampak negatif" maupun "dampak positif". Di tanah-air kita tumbuh suatu citra bahwa "dampak" selalu mengandung makna negatif. Sehingga ada gagasan untuk menukarnya dengan kata lain.

Kata "lestari" yang sering dipakai dalam lingkungan hidup melahirkan citra seolah-olah lingkungan hidup menentang perubahan dan pembangunan.

Tumbuhnya makna berbobot-nilai tertentu terhadap kata-kata yang semulanya netral, semakin kentara jika kita ikuti perkembangan makna kata-kata di bidang kependudukan.

Pembangunan menimbulkan pelapisan sosial dalam masyarakat, sehingga menghasilkan penggunaan kata-kata yang semulanya netral tetapi tumbuh memiliki makna dan bobot nilai tertentu. Kata "bapak" tidak lagi memiliki makna "kepala rumah-tangga", tetapi sudah beralih menjadi "pemimpin" atau "pihak atasan".

Akhir-akhir ini semakin sering dipakai kata "berkenan" yang mencerminkan pembedaan kedudukan antara pihak atasan dengan bawahan. Menarik pula mengikuti pemakaian kata "barangkali" sebagai usaha memperlunak kalimat atau menyelubungi ketajaman pikiran.

Gejala ini melukiskan bahwa bahasa Indonesia mampu menyeraskan diri dengan perkembangan kelakuan hidup sosial. Masalahnya sekarang adalah apakah bahasa Indonesia mampu pula memperkecil kesenjangan yang diperkirakan bakal timbul dalam proses pembangunan, melalui pengembangan istilah-istilah dan kata-kata yang lebih serasi.

Perkembangan bahasa di Kanada, Srilangka, India, Irlandia, Belgia dan lain-lain membuktikan bahwa bahasa bisa menjadi alat pemecah persatuan. Kesenjangan yang tumbuh dalam masyarakat diperkuat oleh bahasa.

Bagi Indonesia dengan bahasa daerah yang cukup banyak menjadi tantangan, bisakah bahasa Indonesia mempertahankan kedudukannya sebagai alat pemersatu. Sering diperoleh kesan bahwa bahasa daerah lebih mampu menumbuhkan suasana keakraban ketimbang bahasa Indonesia. Mungkinkah keakraban bisa pula ditumbuhkan dalam penggunaan bahasa Indonesia?

Apabila diikuti penggunaan bahasa "prokem" oleh generasi muda, yang sulit dipahami generasi tua, timbullah pertanyaan apakah ini tidak melukis-

kan keterasingan yang menimpa generasi muda sebagai produk sampingan dari perubahan sosial?

Bahaya keterasingan kelompok juga bisa muncul apabila bahasa Indonesia banyak menggunakan kata-kata Sanskerta dalam berbagai perbendaharaan kata-kata di bidang sosial politik. Seorang dari luar-Jawa akan merasa terpesona dan sekaligus ganjil membaca berbagai nama dalam ruangan gedung MPR di Jakarta. Sehingga ini memberi petunjuk supaya peng-Indonesiaan kata-kata dari bahasa daerah lain perlu memperhitungkan gejala keterasingan.

Perkembangan masyarakat kita di masa depan penuh dengan tantangan permasalahan yang tidak kecil. Perubahan struktur ekonomi dan struktur masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk yang cukup besar, meningkatnya tingkat mobilitas horisontal dan vertikal dalam lingkungan masyarakat kita, membuka kemungkinan timbulnya goncangan dan perbenturan-perbenturan dalam masyarakat.

Masyarakat Indonesia memiliki bahasa persatuan di samping bahasa daerah yang cukup besar pemakaiannya dalam masyarakat kita. Pemakaian bahasa Indonesia yang meningkat diikuti oleh meningkatnya kemampuan membaca dan menulis huruf Latin dan meningkatnya pendapatan daerah per jiwa penduduk. Antara kemampuan berbahasa Indonesia, tingkat keniraksaraan penduduk serta pendapatan daerah per jiwa penduduk terdapat hubungan timbal balik.

Bahasa memegang peranan penting dalam proses pembangunan dengan perubahan ini. Khusus di bidang lingkungan hidup dan kependudukan tumbuh kebutuhan untuk mengembangkan gagasan dan penglihatan pembangunan berwawasan lingkungan dan penduduk dengan bobot kualitas yang meningkat.

Untuk ini perlu dikembangkan perbendaharaan kata dan bahasa Indonesia yang turut memperbesar dampak positif dan memperkecil dampak negatif pembangunan kepada masyarakat. Dalam kaitan ini perlu diusahakan:

- (1) berkembangnya bahasa Indonesia menjadi bahasa pembangunan, mampu mengalihkan pengertian, menumbuhkan pemahaman dan motivasi untuk mengembangkan pembangunan berwawasan lingkungan dan penduduk berkualitas hidup melalui wahana bahasa dalam masyarakat;
- (2) mencegah berkembangnya bahasa Indonesia sebagai alat yang mempertajam perbedaan dan kesenjangan antara kelompok masyarakat, antara desa dan kota dan sebagainya, dan mengembangkan bahasa Indonesia

sebagai alat pemersatu di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya ganda;

- (3) bahasa daerah dan budaya bahasa perlu dikembangkan mengisi semangat "bhinneka tunggal ika", menghasilkan keanekaragaman ekosistem yang mempertinggi stabilitas sistem ini. Di atas semua ini bahasa Indonesia menjadi pemacu pembangunan daerah dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa.
- (4) dalam rangka pengisian ini tanggung jawab sosial para pengasuh dan peminah bahasa Indonesia perlu mengembangkan keahlian dan kepehaman berbahasa Indonesia ini.

Jakarta, 22 November 1983

Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan
Hidup,

Emil Salim

TABEL 1

PENDUDUK MENURUT BAHASA YANG DIPAKAI SEHARI-HARI,
LAKI-LAKI PEREMPUAN, DI KOTA DAN DESA 1980

BAHASA	PENDUDUK	
	BAHASA DIPAKAI SEHARI-HARI DI RUMAH, DALAM RIBUAN JIWA	DALAM PRESENTASE TERHADAP JUMLAH SELURUH PENDUDUK INDONESIA
1. J A W A	59.357	40
2. SUNDA	22.110	15
3. INDONESIA	17.505	12
4. MADURA	6.914	5
5. MINANG	3.546	2
6. BUGIS	3.322	2
7. BATAK	3.107	2
8. BALI	2.481	2
9. BANJAR	1.662	1
10. LAIN-LAIN	25.653	18
11. TAK JELAS	1.118	1
JUMLAH :	146.775	100

SUMBER : BIRO PUSAT STATISTIK, SERI S NO. 2, 1983

TABEL 2

**PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR DAN BAHASA YANG DIPAKAI SEHARI-HARI
DALAM RIBUAN JIWA, 1980.**

BAHASA	U S I A							Jumlah (%)
	0-4	5-9	10-14	15-24	25-49	50 +	tak ter-jawab	
1. JAWA	7.904	8.217	7.145	11.429	17.003	7.650	9	59.357 (40)
2. SUNDA	3.335	3.324	2.682	4.045	6.241	2.479	4	22.110 (15)
3. INDONESIA	2.692	2.446	2.145	4.103	4.874	1.243	2	17.505 (12)
4. MADURA	880	951	648	1.117	2.391	926	1	6.914 (5)
5. MINANG	544	519	434	684	893	472	—	3.546 (2)
6. BUGIS	466	531	405	573	971	376	—	3.322 (2)
7. BATAK	516	495	435	587	740	334	—	3.107 (2)
8. BALI	317	363	297	459	707	338	—	2.481 (2)
9. BANJAR	242	259	195	317	475	174	—	1.662 (1)
10. TAK TERJAWAB	185	178	132	204	311	108	—	1.118 (1)
11. LAIN-LAIN	4.109	3.949	3.102	4.767	7.025	2.698	3	25.653 (18)

Sumber : Biro Pusat Statistik, seri S Nomor 2, 1983

TABEL 3

**PERSENTASE PENDUDUK DAPAT BERBAHASA INDONESIA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI KOTA DAN DESA 1970- 1980**

	1971	1980
1. KOTA :	72	81
Laki-laki	75	84
Perempuan	68	
2. DESA :	34	55
Laki-laki	39	60
Perempuan	29	49
3. KOTA DAN DESA	41	61
Laki-laki	46	66
Perempuan	36	56

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1983

TABEL 4

**PENDUDUK MENURUT PROPINSI DAN TIDAK BISA
BERBAHASA INDONESIA DALAM RIBUAN JIWA, 1980**

	Jumlah Penduduk Tidak bisa Ber- bahasa Indonesia	Dalam Per- sentase	Jumlah Penduduk
1. Daerah Istimewa Aceh	947	36	2.610
2. Sumatera Utara	1.861	22	8.351
3. Sumatera Barat	1.235	17	3.406
4. R i a u	576	27	2.164
5. Jambi	458	32	1.444
6. Sumatera Selatan	1.397	30	4.628
7. Bengkulu	282	37	768
8. Lampung	1.504	32	4.624
Sumatera :	8.260	29	27.995
8. DKI Jakarta Raya	34	05	6.481
9. Jawa Barat	10.638	39	27.995
10. Jawa Tengah	12.419	50	25.367
11. Daerah Istimewa Yogyakarta	1.130	41	2.750
12. Jawa Timur	14.322	49	29.169
J a w a :	38.543	42	91.217
14. B a l i	1.178	48	2.470
15. Nusa Tenggara Barat	1.454	53	2.724
16. Nusa Tenggara Timur	1.171	43	2.737
Bali — Nusa Tenggara :	3.803	48	7.931

TABEL 4 (SAMBUNGAN)

	Jumlah Penduduk Tidak bisa Ber- bahasa Indonesia	Dalam Persen tase	Jumlah Penduduk
17. Kalimantan Barat	909	37	2.485
18. Kalimantan Tengah	365	38	954
19. Kalimantan Selatan	812	39	2.063
20. Kalimantan Timur	261	21	1.215
Kalimantan :	2.347	35	6.717
21. Sulawesi Utara	381	18	2.115
22. Sulawesi Tengah	293	23	1.284
23. Sulawesi Selatan	1.600	22	7.416
24. Sulawesi Tenggara	363	38	942
Sulawesi :	2.637	22	11.757
25. Maluku	162	11	1.408
Maluku :	162	11	1.408
26. Irian Jaya	401	36	1.107
Irian Jaya	401	36	1.107
J U M L A H	56.153	39	148.132

Sumber : Biro Pusat Statistik, Seri S Nomor 2, 1983

TABEL 5

**URUTAN PROPINSI YANG TIDAK BISA BERBAHASA INDONESIA
DALAM PERSENTASE JUMLAH, PENDUDUK PROPINSI
DIHADAPKAN DENGAN TARAF KENIRAKSARAAN DAN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI**

	Tidak bisa Berbahasa Indonesia, 1980 Dalam persentase	Taraf Kenirak- saraan Dalam Persen- tase (1980)	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 1978 Dalam Ribuan Rupiah
1. Nusa Tenggara Barat	53	45	50
2. Jawa Tengah	50	34	75
3. Jawa Timur	49	37	75
4. B a l i	48	38	84
5. Nusa Tenggara Timur	43	35	44
6. Daerah Istimewa Yogyakarta	41	30	62
7. Jawa Barat	39	26	86
8. Kalimantan Selatan	39	22	86
9. Sulawesi Tenggara	38	31	66
10. Kalimantan Tengah	38	21	106
11. Kalimantan Barat	37	42	91
12. Bengkulu	37	25	—
13. Daerah Istimewa Aceh	36	25	69
14. Irian Jaya	36	48	105
15. Jambi	32	24	82
16. Lampung	32	22	81

TABEL 5 (SAMBUNGAN)

	Tidak bisa Berbahasa Indonesia, 1980 Dalam persentase	Taraf Kenirak- saraan Da- lam Persen- tase (1980)	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 1978 — Dalam Ribuan Rupiah
17. Sumatera Selatan	30	18	112
18. R i a u	27	23	99
19. Sulawesi Tengah	23	18	66
20. Sumatera Utara	22	16	111
21. Sulawesi Selatan	22	38	86
22. Kalimantan Timur	21	24	272
23. Sulawesi Utara	18	—	—
24. Sulawesi Barat	17	18	—
25. Maluku	11	17	95
26. Dki Jakarta Raya	—	12	224
INDONESIA	38	29	—

Sumber : Biro Pusat Statistik, seri S Nomor 2, 1983

PERANAN PEMUDA DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

A. Gafur

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga

Pendahuluan

Kongres Bahasa Indonesia IV ini, seperti juga halnya dengan Kongres Bahasa Indonesia III pada tahun 1978 yang lalu, diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda. Kaitan antara penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia dan peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda bukanlah kaitan secara kebetulan. Kaitan antara kedua peristiwa itu memiliki nilai dan makna yang tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Nilai dan makna itu adalah nilai dan makna politik, nilai dan makna sosial, serta nilai dan makna budaya.

Masalah yang ingin saya ketengahkan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah masalah kaitan antara Kongres Bahasa Indonesia dan Sumpah Pemuda serta masalah peranan pemuda dalam pembinaan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara kita. Kedua masalah ini memiliki hubungan yang erat sekali dan merupakan masalah nasional kita.

Kongres Bahasa Indonesia dan Sumpah Pemuda

Kongres Bahasa Indonesia adalah salah satu usaha pengejawantahan isi dan semangat Sumpah Pemuda, yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai putusan Kongres Pemuda-pemuda Indonesia tahun 1928 di Jakarta. Khususnya, Kongres Bahasa Indonesia adalah salah satu usaha pengejawantahan ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928, yang menyatakan kebulatan tekad kebahasaan para pemuda, yaitu "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia".

Di samping Kongres Bahasa Indonesia, usaha-usaha pengejawantahan ikrar ketiga Sumpah Pemuda itu mencakup pendidikan dan pengajaran, teru-

tama pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, pembinaan bahasa Indonesia melalui media massa, terutama melalui radio dan televisi, penyuluhan bahasa Indonesia di berbagai instansi pemerintah dan swasta, masyarakat umum, organisasi massa, dan organisasi kepemudaan, termasuk organisasi kesiswaan dan organisasi kemahasiswaan. Sebagian usaha-usaha itu dilaksanakan secara nasional dan terpadu; sebagian lagi dilaksanakan sendiri-sendiri atas dasar kemauan dan kesadaran sendiri dengan mengingat bahwa Sumpah Pemuda 1928 itu menyangkut kepentingan kita bersama sebagai bangsa, kepentingan setiap golongan, kepentingan setiap generasi, baik generasi deasa maupun generasi muda, dan kepentingan setiap warga negara Indonesia.

Pada tahun 1978 Kongres Bahasa Indonesia untuk pertama kali diselenggarakan dalam kaitan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, yang sejak tahun itu pula dijadikan sekaligus Hari Pemuda dengan persetujuan Presiden Soeharto. Kongres itu adalah Kongres Bahasa Indonesia III. Pada tahun 1980 Pemerintah (dalam hal ini, Menteri Muda Urusan Pemuda) menetapkan bahwa bulan Oktober setiap tahun dijadikan Bulan Bahasa dengan tidak bermakna bahwa kegiatan pembinaan dan pengembangan tidak dilaksanakan dalam bulan-bulan yang lain. Penetapan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa bertujuan menonjolkan kaitan yang erat antara Sumpah Pemuda dan masalah bahasa Indonesia.

Berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan selama bulan Oktober sejak bulan Oktober 1980 itu di seluruh Indonesia — baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. — Dalam hal ini, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bertindak sebagai koordinator.

Kegiatan Bulan Bahasa tahun 1983 bertema "Melalui Bahasa Indonesia sebagai Sarana, Kita Sukseskan Pembangunan Nasional". Sejalan dengan isi dan semangat Sumpah Pemuda 1928, tujuan Bulan Bahasa 1983 adalah (1) menumbuhkan dan meningkatkan sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia, (2) meningkatkan kegairahan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, dan (3) meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan apresiasi sastra dalam segenap lapisan masyarakat. Tujuan Bulan Bahasa itu sejalan pula dengan amanat yang digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983) baik mengenai pembinaan, pengembangan, dan pengajaran bahasa Indonesia maupun mengenai pengembangan bahasa daerah.

Dua di antara sepuluh kegiatan Bulan Bahasa 1983 adalah pertemuan Bahasa dan Sastra untuk Guru Sekolah Dasar dan Kongres Bahasa Indonesia IV ini. Pertemuan Bahasa dan Sastra untuk Guru Sekolah Dasar itu, khususnya di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diselenggarakan dengan keyakinan bahwa pembinaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda harus dimulai sedini mungkin, mulai dari tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun berada dalam masa yang peka dan subur bagi pembentukan watak, kepribadian dan tingkah lakunya, termasuk tingkah, kebiasaan, dan keterampilan berbahasa secara baik dan benar. Selain itu, guru sekolah dasar berada pada kedudukan dan kesempatan yang istimewa karena guru sekolah dasar pada umumnya adalah guru kelas. Mereka adalah guru yang mengasuh mata pelajaran bahasa Indonesia dan sekaligus mengasuh mata pelajaran lain. Dengan demikian, mereka benar-benar dapat berfungsi sebagai panutan dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Apa yang diajarkan mereka melalui mata pelajaran bahasa Indonesia diterapkan mereka sebagai bahasa pengantar dalam mengajarkan mata pelajaran lain. Murid mereka memperoleh pengetahuan kognitif mengenai bahasa Indonesia, memperoleh latihan keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan sekaligus memiliki model penutur bahasa Indonesia yang baik sekurang-kurangnya selama murid mereka itu berada di sekolah. Guru sekolah dasar terhindar dari ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesia dan bahasa yang digunakan oleh guru mata pelajaran lain, seperti yang sering terjadi pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Ketidaksesuaian itu harus kita atasi karena semua guru, apa pun mata pelajaran yang diasuhnya, adalah pengajar dan pembina bahasa Indonesia. Akhirnya, dalam hubungan dengan pelaksanaan program wajib belajar, yang insya Allah akan kita mulai pada tahun depan, yaitu tahun pertama masa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) IV, guru sekolah dasar memainkan peranan yang menentukan.

Kongres Pemuda-pemuda Indonesia tahun 1928 merupakan arena politik dan dihadiri oleh para pemuda Indonesia. Putusan itu merupakan pernyataan kebulatan tekad politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, putusan Kongres Pemuda-pemuda Indonesia tahun 1928 itu, yaitu putusan mengenai tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan kita, adalah putusan politik yang diprakarsai dan diambil oleh para pemuda Indonesia untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Putusan tidak saja mencerminkan tetapi juga membuktikan adanya jiwa dan semangat kepeloporan pemuda. Dengan demikian, jelaslah bahwa putusan mengenai bahasa, adalah putusan

nasional bangsa kita, bukan putusan para ahli bahasa atau para guru bahasa saja. Oleh karena itu, masalah bahasa Indonesia adalah masalah nasional kita, masalah segenap lapisan masyarakat kita, masalah yang menyangkut kepentingan kita semua.

Sejalan dengan Kongres Pemuda-pemuda Indonesia tahun 1928 itu, Kongres Bahasa Indonesia adalah peristiwa nasional. Kita amati kenyataan bahwa Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo, Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan, Kongres bahasa Indonesia III pada tahun 1978 di Jakarta, dan Kongres Bahasa Indonesia IV ini diikuti oleh para peserta yang mewakili berbagai lapisan masyarakat kita, berbagai profesi, dan berbagai keahlian. Sebagai peristiwa nasional, Kongres Bahasa Indonesia bukanlah peristiwa kebahasaan semata-mata. Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia menarik perhatian segenap lapisan masyarakat kita baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan menarik minat pengamat dari negara lain, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di kawasan lain di dunia. Kongres Bahasa Indonesia merupakan forum yang memungkinkan kita sebagai bangsa menelaah dan menelaah kembali masalah bahasa Indonesia serta pembinaan dan pengembangannya dengan meninjaunya dari segala segi dan dalam hubungan dengan kehidupan kita sebagai bangsa. Kongres Bahasa Indonesia merupakan forum yang memungkinkan kita memberikan sumbangan dan bahan masukan yang amat berharga kepada usaha kita membina dan mengembangkan bahasa nasional dan bahasa negara kita itu sehingga ia benar-benar menjadi bahasa nasional yang dapat diandalkan dan bahasa negara yang ampuh. Di sinilah letak kaitan kesenyawaan antara Kongres Bahasa Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928.

Peranan Pemuda dalam Pembinaan Bahasa Indonesia

Peranan pemuda dalam pembinaan bahasa Indonesia sejalan dengan jiwa dan semangat kepeloporannya. Seperti saya kemukakan tadi, Sumpah Pemuda 1928 itu sendiri adalah putusan yang diprakarsai dan diambil oleh para pemuda, yang sekaligus mendokumentasikan sumbangan dan peranan pemuda dalam pembinaan bahasa Indonesia. Hingga saat ini jiwa dan semangat kepeloporan pemuda itu tetap menyala dalam melaksanakan pembangunan dalam segala bidang dan dalam mempersiapkan diri sebagai generasi yang akan melanjutkan dan meningkatkan pembangunan bangsa kita pada waktu yang akan datang.

Jiwa dan semangat kepeloporan pemuda itu kita bina dan kita kembangkan melalui berbagai program kepemudaan, baik program nasional maupun program internasional. Program nasional kepemudaan mencakup program dalam hubungan dengan organisasi kesiswaan, seperti organisasi siswa intra-sekolah (OSIS), gerakan Pramuka, organisasi kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus, organisasi kepemudaan non-mahasiswa, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), organisasi keolahragaan, dan program pembauran bangsa.

Pemuda sebagai generasi penerus, dalam usahanya mempersiapkan diri, tentu tidak dapat mengembangkan kepribadian, kemampuan, dan pengalamannya dengan hidup menyendiri dalam lingkungan bangsa sendiri dan mengabaikan pergaulan dengan para pemuda sebagai generasi penerus dari negara lain di dunia. Pemuda memerlukan pergaulan pemuda antar-bangsa tidak hanya demi pergaulan itu sendiri tetapi juga karena pergaulan itu memberikan kesempatan kepadanya mengadakan studi perbandingan, belajar dari pengalaman pemuda negara lain, memperluas cakrawala pandangannya di dalam forum internasional, mengembangkan kepribadian dan kepemimpinannya di panggung antarbangsa, dan berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai pandangan hidup dasar negara, dan sekaligus ideologi serta Undang-Undang Dasar 1945.

Kebutuhan dalam hubungan dengan pergaulan antarbangsa itu dipenuhi dengan melaksanakan program internasional kepemudaan, seperti program pertukaran kunjungan pemuda, program pertukaran duta seni dan budaya, program keolahragaan, dan keikutsertaan dalam berbagai forum atau pertemuan internasional kepemudaan.

Dalam kaitan dengan pembinaan bahasa Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983) menggariskan bahwa "pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar." Ini adalah ketetapan nasional yang harus dilaksanakan secara nasional pula. Pemuda, baik secara nyata maupun secara potensial, dapat memainkan peranan yang menentukan di dalam pelaksanaan ketetapan nasional itu.

Kegiatan pemuda dalam hubungan dengan berbagai program kepemudaan, baik nasional maupun internasional, menghendaki kemampuan berkomunikasi, yang berarti kemampuan menggunakan bahasa seefektif dan seefisien mungkin. Pada tingkat nasional pemuda harus mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Pada tingkat internasional pemuda harus mampu berkomunikasi dengan menggunakan

salah satu bahasa yang dilazimkan di dalam pergaulan antarbangsa juga secara baik dan benar. Penggunaan kedua bahasa itu harus dikuasainya sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencampuradukan kedua bahasa itu dan, khususnya, bahasa Indonesia yang digunakannya tidak dipengaruhi secara negatif oleh bahasa asing itu.

Kemampuan berpikir dan bernalar dengan cermat dan tepat, yang harus dimiliki oleh pemuda sebagai generasi penerus, dicerminkan oleh kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tidak saja secara baik dan benar tetapi juga secara cermat dan tepat. Di dalam berkomunikasi dan mengembangkan kemampuannya berkomunikasi itu, pemuda secara tidak langsung memainkan peranannya dalam pembinaan bahasa Indonesia. Peranan yang sama dimainkan oleh pemuda melalui berbagai kegiatan kepemudaan, seperti kegiatan kesenian —terutama drama, deklamasi, dan membaca puisi—, sayembara mengarang, dan lomba pidato, baik yang dilaksanakan dalam hubungan dengan kegiatan lembaga pendidikan dan Bulan Bahasa maupun yang dilaksanakan dalam kaitan dengan organisasi kepemudaan. Lomba pidato yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda ke-55 tahun 1983 —bulan yang lalu— memperlihatkan bukan saja minat yang besar melainkan juga kesungguhan peserta lomba pidato itu di dalam usahanya mengembangkan kemampuannya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Secara potensial, pemuda dapat memainkan peranan yang menentukan di dalam pembinaan bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaannya di dalam masyarakat kita. Potensi itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Jiwa dan semangat kepeloporan pemuda dapat mendobrak gejala negatif dalam bentuk penggunaan kata-kata asing yang tidak diperlukan di dalam masyarakat kita dewasa ini, terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta. Gejala negatif itu terlihat dengan jelas di dalam penggunaan kata-kata asing di dalam nama pusat pertokoan, nama toko, nama gedung, dan nama badan usaha lain. Gejala negatif itu harus didobrak dan —sebagai gantinya— penggunaan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita sendiri, harus ditingkatkan sejalan dengan usaha kita meningkatkan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri. Dalam hubungan ini, pemuda memerlukan dukungan dan kerja sama berbagai pihak dan segenap lapisan masyarakat kita. Seperti saya kemukakan tadi, masalah pembinaan bahasa Indonesia memang bukan masalah golongan atau profesi tertentu saja atau masalah generasi muda saja. Oleh karena itu, pemuda dapat dan harus merupakan salah satu komponen di da-

lam keseluruhan sistem pembinaan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemuda dapat dan harus dilibatkan secara aktif di dalam pembinaan bahasa nasional kita itu. Dalam kaitan ini, peranan lembaga pendidikan —mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat perguruan tinggi—, baik formal maupun nonformal, dan peranan organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan, dan peranan organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan. Jiwa dan semangat kepeloporan pemuda perlu dimanfaatkan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya demi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, demi pembinaan dan pengembangan kebudayaan kita, dan demi pembangunan bangsa dan negara kita pada umumnya.

Penutup

Kongres Bahasa Indonesia IV ini perlu merumuskan sistem pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sedemikian rupa sehingga terdapat mekanisme kerja sama nasional dengan melibatkan pemuda sebagai generasi penerus pembangunan bangsa kita. Mekanisme itu harus memungkinkan pemuda dan lapisan masyarakat kita yang lain memainkan peranan yang menentukan di dalam usaha kita melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda 1928.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Soepardjo
Menteri Dalam Negeri

- Presiden Soeharto : Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1981
"KALAU PEMBANGUNAN INGIN SUKSES JE-
LASKAN SEJELAS-JELASNYA KEPADA MA-
SYARAKAT".
- Menteri Dalam Negeri : Mekanisme pelaksanaan tugas segenap jajaran De-
partemen Dalam Negeri dari Pusat sampai ke Dae-
rah
"LAPORAN KE ATAS"
"KOORDINASI KE SAMPING"
"INSTRUKSI KE BAWAH DAN PENGAWASAN"

Pendahuluan

Memenuhi maksud surat Panitia Kongres Bahasa Indonesia ke IV Nomor 5/KBI/1983 tanggal 18 Agustus 1983 insya Allah bersama ini telah dapat kami sampaikan suatu kertas kerja yang mengemukakan masalah-masalah bahasa Indonesia yang berkaitan erat dengan tugas-tugas pokok dan fungsi Departemen Dalam Negeri dan kasus-kasus yang kami hadapi disebabkan salah tafsir, perbedaan pengertian dan tidak atau belum memahami bahasa Indonesia dengan baik dan sebagainya di dalam bahasa komunikasi Pemerintahan dan Pembangunan. Di samping itu kami kemukakan pula tentang pentingnya peranan bahasa Indonesia di dalam mensukseskan pelaksanaan tugas tugas pembinaan umum pemerintahan dalam negeri, meningkatkan stabilitas politik dan Kesatuan Bangsa dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional. Oleh sebab itu maka atas perhatian Panitia Kongres dan kesempatan

yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kertas kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pembahasan dilakukan pada masalah-masalah yang kami temui dan alami di lapangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan peraturan perundang-undangan;
- b) Pendekatan kemasyarakatan;
- c) Pendekatan pembangunan;
- d) Pendekatan kebiasaan dan tingkah laku;
- e) Pendekatan proses perubahan ekologi.

Bertindak tolak dari Tema Kongres serta pedoman dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kongres maka kertas kerja ini kami beri judul "BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN".

Untuk dapat memahami masalah-masalah yang akan kami ketengahkan lebih lanjut baik kiranya dijelaskan terlebih dahulu tentang tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsi Departemen Dalam Negeri, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, beberapa pengertian dan peristilahan bahasa pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Beberapa pengertian

- 1) *Desentralisasi* adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya;
- 2) *Dekonsentrasi*, adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di Daerah;
- 3) *Tugas Pembantuan* adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan;

- 4) *Otonomi Daerah* adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) *Daerah Otonom*, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) *Pemerintah Daerah* adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7) *Pemerintahan di Daerah* adalah meliputi segala usaha dan kegiatan Pemerintah Daerah dan segala usaha dan kegiatan Aparatur Pemerintahan Pusat yang bertugas di Daerah;
- 8) *Urusan Pemerintahan Umum* adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketenteraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Dalam Negeri

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No: 44 - 45 Tahun 1974 maka tugas pokok Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Apabila dijabarkan lebih lanjut tugas-tugas termaksud meliputi bidang pembinaan sosial politik dalam negeri, pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan ideologi Pancasila, bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah, Pembangunan Masyarakat Desa dan Agraria.

Dalam hubungannya dengan Pemerintahan Daerah maka dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan lebih lanjut bahwa Departemen Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya baik yang mengenai urusan rumah tangga Daerah maupun mengenai tugas pembantuan. Oleh karenanya maka Menteri Dalam Negeri selaku pembantu Presiden dan selaku pimpinan Departemen Dalam Negeri ber-

wenang melakukan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan Daerah yaitu menerima dan mengolah pertanggung jawaban Kepala Daerah serta mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan wewenangnya dan melaporkannya kepada Presiden mengenai hal yang prinsipil dan penting.

c. **Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan Otonomi Daerah**

Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan Otonomi Daerah, adalah untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam membina stabilitas politik dan kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan-perkembangan dan pembangunan Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditarik beberapa intisari dari pada pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai berikut:

1) *Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab*

Nyata dalam arti bahwa pemberian tonomi kepada Daerah haruslah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin Daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

Bertanggung jawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air atau tidak bertentangan dengan pengarah-pengarah yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dapat menjamin perkembangan-perkembangan dan pembangunan Daerah.

2) *Harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya*

Di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah digariskan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah agar berorien-

tasi kepada pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Jadi pada hakekatnya otonomi Daerah itu adalah merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

3) *Harus dilaksanakan sesuai dengan pengarah-pengarah*

Pengarah-pengarah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah itu sebenarnya merupakan perwujudan dari pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dan meliputi tiga hal sebagai berikut :

- (a) Serasi dengan pembinaan politik dan Kesatuan Bangsa;
- (b) Menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan;
- (c) Menjamin perkembangan dan Pembangunan Daerah.

4) *Harus dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.*

Rumusan ini secara prinsipil berbeda dengan rumusan yang terkandung dalam penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/MPRS/ 1966, dimana dekonsentrasi dinyatakan sebagai komplemen saja. Maka oleh sebab itu di dalam kebijaksanaan Orde Baru, azas dekonsentrasi bukan sekedar komplemen atau pelengkap terhadap azas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian maka akan terjaminlah keserasian hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan serta peningkatan stabilitas politik dan Ketahanan Nasional yang tinggi.

d. **Prinsip-prinsip pokok tentang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah**

Sebagai konsekwensi dari pada prinsip sama pentingnya azas desentralisasi dan dekonsentrasi dilaksanakan bersama-sama di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah maka berikut ini kami jelaskan tentang prinsip penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri di Daerah sebagai berikut :

- 1) Harus dapat menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkuat Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya;
- 2) Harus dapat dilaksanakan prinsip otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab;
- 3) Harus dapat melaksanakan azas desentralisasi bersama-sama dengan azas konsentrasi dengan memberi kemungkinan pula bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan;
- 4) Harus dapat mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian;
- 5) Harus dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pembinaan stabilitas politik dan kesatuan Bangsa.

e. Pelaksanaan Tugas-tugas Instansi Vertikal berada di bawah Koordinasi Kepala Wilayah

Di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah sebagai mana dijelaskan di atas maka dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi yaitu pertama fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah, kedua fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah. Di dalam hal yang terakhir inilah terdapat hubungan kerja Instansi-Instansi Vertikal dan Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah. Dalam prakteknya antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh masing-masing Instansi Vertikal itu begitu juga antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal, sangat erat hubungannya satu sama lain. Maka untuk mencapai daya guna dan hasil guna sangat perlu sekali penyelenggaraan urusan-urusan itu dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya. Pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk menyelenggarakan koordinasi tersebut adalah Kepala Wilayah. Berhubung dengan itu di dalam melaksanakan tugasnya Instansi-Instansi Vertikal Departemen-

Departemen dan bukan Departemen yang ditempatkan di Daerah berada di bawah koordinasi Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerahnya. Maka oleh sebab itulah di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa Kepala Wilayah dalam semua tingkat adalah sebagai Penguasa Tunggal di bidang Pemerintahan di Daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai mata uang dan sebagainya. Ia berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas Instansi-Instansi Vertikal Departemen-Departemen dan bukan Departemen serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan perkataan lain bahwa Penguasa Tunggal adalah Administrator Pemerintahan, Administrator Pembangunan dan Administrator Kemasyarakatan.

2. Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Pemerintahan

a. Pengembangan bahasa Indonesia dalam rangka Ketahanan Nasional

Di dalam membicarakan masalah peningkatan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai sarana Pembangunan Nasional maka ingatan kita kembali kepada sejarah lahirnya Budi Utomo (1908), yang pada mulanya hanya membawakan aspirasi nasional dan aspirasi kesejahteraan yang terbatas, tetapi setelah melalui tahap-tahap perkembangan yang penuh perjuangan aspirasi itu bermuara pada aspirasi "Sumpah Pemuda" dan lagu kebangsaan Indonesia Raya (1928), yang berisi pengakuan atas satunya Bangsa, satunya Tanah Air, dan satunya bahasa Kebangsaan yaitu bahasa Indonesia merupakan wujud perpautan kembali dari pada Bangsa Indonesia, setelah berabad-abad tercerai berai.

Namun sebagai pengaruh sampingan dari pada pembangunan nasional yang sedang kita lakukan pada waktu ini tidaklah dapat dimungkiri pula timbulnya proses komunikasi dan integrasi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam suku bangsa, agama dan adat istiadat dapat menimbulkan beberapa kemungkinan. Bila diarahkan dengan cepat, proses ini akan dapat memperkaya perbendaharaan budaya bangsa dengan unsur yang dinamik, serta membuka wawasan budaya yang lebih luas. Tetapi bila tanpa diarahkan akan dapat pula menumbuhkan sikap eksklusivisme ke-

daerahan, dan cenderung menjurus kepada desintegrasi dalam kehidupan kebudayaan, dan membahayakan kelestarian kesatuan dan persatuan bangsa, yang akan lebih terasa, jika penguasaan serta penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan dan persatuan dengan benar dan baik mulai menunjukkan kemundurannya.

Dalam mencari pedoman kongkrit bagi pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa dan identitas nasional perlu adanya suatu azas untuk menjadi landasan dalam menyusun langkah-langkah serta kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pembinaannya. Azas termaksud tidak dapat lain adalah Pancasila yang ada dasarnya merupakan hasil keseluruhan perenungan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia terhadap kenyataan-kenyataan sosial, yang diangkat menjadi dasar kehidupan bangsa dan negara, dan oleh karenanya akan mampu memberikan landasan, motivasi, serta pengarahan dalam pengembangan bahasa Indonesia sebagai bagian dari pada kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan menurut Pancasila itu dalam mencapai wujud masyarakat yang dicita-citakan secara konsepsional berorientasi kepada azas-azas keseimbangan, azas-azas kekeluargaan dan azas-azas kerakyatan.

Maka oleh karena itu untuk mencapai sasaran pengembangan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional masih sangat perlu sekali dibarengi dengan peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa dengan sistem pendidikan yang mampu menunjang usaha mengejar ketinggalan teknologi, ilmu dan management, serta usaha merangsang partisipasi masyarakat untuk turut serta aktif dalam pembangunan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing dengan kerja asama yang nyata dalam mencapai tujuan nasional. Dengan demikian dapatlah diharapkan terwujudnya Ketahanan Nasional di bidang sosial budaya khususnya bahasa Indonesia, yaitu kondisi dinamika suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial Bangsa dan Negara.

b. Masalah Bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri

- 1) Di dalam mengikuti seminar-seminar, rapat-rapat kerja atau rapat-rapat kordinasi di Tingkat Pusat dengan Departemen-Departemen atau bukan Departemen pengalaman menunjukkan bahwa pada umumnya para Aparatur Pemerintahan masih banyak yang belum mempunyai penafsiran yang sama, apalagi memahami dan menghayati akan prinsip-prinsip, istilah-istilah, pengertian-pengertian yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Malahan ada yang berpendapat lebih tegas lagi dengan mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undangnyanya Departemen Dalam Negeri, masih banyak kekosongan dan kekurangannya, sedangkan pihak lainnya menilai bahwa Undang-Undang itu perlu ditinjau kembali dan sebagainya. Menurut hemat kami bahwa pemikiran demikian itu perlu dipertanyakan apakah penafsirannya dikaitkan dengan sesuatu kepentingan tertentu dalam pola sikap yang masih berkotak-kotak atau mungkin juga pemakaian istilah-istilah atau perumusan-perumusan bahasa Indonesia di dalam Undang-Undang itu yang belum baik benar.

Oleh karena yang mempunyai perbedaan pengertian itu adalah Aparatur Pemerintah sendiri yang dalam kedudukannya selaku tenaga pemikir, perencana dan pelaksana dalam semua pembangunan maka bukanlah tidak mungkin pula hal itu akan menjadi hambatan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sangat terasa sekali apabila pembicaraan dan komunikasi dengan Departemen-Departemen teknis itu mengenai masalah penyerahan urusan-urusan kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Sebab jika suatu urusan itu telah diserahkan oleh Departemen teknis kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya, maka urusan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah Daerah baik mengenai perencanaan dan pelaksanaan maupun mengenai pembiayaannya. Sedangkan kedudukan Departemen teknis tersebut dalam urusan itu hanyalah tinggal semata-mata melakukan

pembinaan di dalam pengembangannya lebih lanjut.

Berhubung dengan itu kiranya dapatlah kami tegaskan bahwa kesalahan penafsiran dan perbedaan pengertian yang dimaksud di atas tidak saja terdapat pada tingkat Pusat tetapi juga dialami oleh Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dalam melaksanakan koordinasi terhadap Instansi-Instansi Vertikal, meminta laporan dan keterangannya tentang segala rencana dan kegiatan yang dilakukannya, sehingga wewenang koordinasi Kepala Wilayah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam perkembangan selanjutnya hal itu ada yang berakibat tidak tercapainya sasaran suatu proyek pembangunan ataupun pelaksanaannya yang tidak serasi dengan pembangunan Daerah, sedangkan yang lainnya lagi terdapat pula bahwa suatu pembangunan itu sudah selesai dikerjakan tetapi belum dapat dimanfaatkan dan sebagainya.

Menurut hemat kami bahwa timbulnya hambatan-hambatan itu karena perbedaan penafsiran dan perbedaan pengertian serta hakikat dari pada penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu selain banyak disebabkan aspek-aspek lainnya, menurut pengalaman kami mungkin juga disebabkan karena pengaruh bahasa Indonesia yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu kami memandang hal demikian itu adalah merupakan masalah prinsipil bagi Departemen Dalam Negeri karena menimbulkan hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan tugasnya. Maka atas dasar pengalaman yang terurai di atas kiranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mempunyai nasib sama, seyogianya perlu dimasyarakatkan melalui pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dipahami dan dihayati oleh semua Aparatur Pemerintah dari Pusat sampai ke Daerah-daerah.

- 2) Dalam rangka pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa Departemen Dalam Negeri melaksanakan program pembauran antara golongan pribumi dan non pribumi (Cina, Arab, India, Pakistan) dengan wadahnya lokasi RT/RW. Sasaran yang hendak dicapai ialah untuk menciptakan kondisi saling pengertian, agar terjalin

kerja sama yang erat, guna memperlancar pertumbuhan kerukunan, kebersamaan dan kesetiakawanan antara semua unsur bangsa. Selain itu adalah untuk mewujudkan terselenggaranya komunikasi lahir bathin antara pribadi dan kelompok yang berkembang secara alamiah atas dasar motivasi yang sama. Pelaksanaan program itu banyak mengalami kesulitan oleh karena golongan non pribumi tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, sedangkan yang lainnya ada pula yang tidak mengerti bahasa Indonesia sama sekali. Apabila mereka berada dalam golongannya, mereka menggunakan bahasa golongannya masing-masing.

- 3) Masalah komunikasi antara Pemerintah dengan rakyat pedesaan terdapat pula hambatan-hambatan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Hal ini kami alami di lapangan antara lain, ketika diadakan ujian para calon Kepala Desa. Para calon tersebut tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengisi formulir-formulir yang diajukan kepada mereka karena tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik, kadang-kadang jawaban mereka tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, jadi tidak menyambung, sehingga mereka tidak lulus, sedangkan mereka ini adalah figur yang disegani dan mendapat dukungan masyarakatnya. Sebaliknya jika dipilih yang muda-muda yang mampu berbahasa Indonesia tetapi tidak mendapat dukungan sama sekali, jadi hambatannya dalam hal ini adalah masalah bahasa Indonesia.
- 4) Karena rakyat pedesaan tidak/belum memahami bahasa Indonesia dengan baik maka banyaklah kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh kiranya dapat kami berikan suatu pengalaman lapangan tentang pengumuman Pemerintah Kecamatan untuk wajib lapor bagi orang-orang yang lebih dari 24 jam bertamu di suatu rumah warga. Dalam hubungan ini kebetulan tertangkap seorang yang tidak melaporkan diri karena telah bertamu lebih dari 24 jam.
Ketika ditanya kepada warga di mana ia bertamu, mengapa ia tidak melaporkan tamunya itu maka ia hanya menjawab

bahwa ia tidak tahu dan tidak mengerti adanya pengumuman Pemerintah itu. Di samping jawabannya itu terbayang pada air mukanya bahwa ia tidak merasa bersalah apa-apa dan tidak merasa menyesal atas keadaan itu, dan hal ini terjadinya ialah karena masalah bahasa Indonesia yang belum mereka pahami. Kalau kita menyatakan kepada masyarakat pedesaan sehubungan dengan suatu permohonan mereka, "akan dipertimbangkan", maka bagi masyarakat pedesaan hal itu dipahami sebagai suatu janji yang telah pasti dan akan menuntutnya terus-menerus pada setiap kesempatan; maka di sini terdapat masalah bahasa Indonesia yang belum baik pemahamannya.

Hambatan-hambatan yang kami uraian di atas itu hanya baru mengenai pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan belum lagi jika pembicara mempergunakan istilah-istilah asing atau dengan kependekaan-kependekan seperti *approach*, partisipasi, koordinasi, Mendikbud, Depdagri dan sebagainya. Maka dalam hal ini aparaturnya seolah-olah berbicara hanya untuk dirinya sendiri.

Komunikasi pemerintahan dengan rakyat terasing seperti rakyat-rakyat di Irian Jaya, Timor Timur di Kepulauan Mentawai dan sebagainya tentunya lebih berat lagi dari pada rakyat di pedesaan tersebut di atas, karena mereka itu sama sekali tidak mengetahui bahasa Indonesia.

Hubungan Pemerintah dengan mereka-mereka itu dilakukan melalui penterjemah bahasa daerahnya masing-masing. Selain dari hal-hal yang terurai di atas kami kemukakan pula bahasa-bahasa yang telah mantap dipahami oleh masyarakat luas baik di kota-kota maupun di pedesaan yaitu istilah "Land-reform, Landuse dan Agraria". Pemakaian ketiga istilah-istilah termaksud telah berjalan dengan baik dan lancar sebagai sarana dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Departemen Dalam Negeri di bidang Pertahanan. Kalau kita menyebut "Landreform" maka rakyat telah menyerap artinya yaitu pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah, dan begitu pula jika disebut "Land-use" akan segera dipahami rakyat bahwa itu adalah tata penggunaan tanah, demikian pula dengan istilah "Agraria" sudah populer dan mungkin telah membudaya.

Apakah mengenai istilah-istilah tersebut sudah waktunya

untuk dibakukan kami mohonkan pertimbangan forum kongres yang mulia.

- 5) Kiranya perlu juga kami kemukakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ialah terdapatnya suatu kenyataan bahwa di daerah-daerah perkotaan masyarakat berbicara dalam bahasa campuran yaitu bahasa Indonesia dan bercampur dengan bahasa daerah dan bahasa asing misalnya dengan bahasa Cina *cepek, nopek, lu* dan *gua* dan sebagainya, sedangkan jika kita datang di daerah-daerah pedesaan masyarakat berkomunikasi dengan bahasa daerah masing-masing. Apakah hal demikian itu merupakan suatu hambatan atau tantangan bagi kita semua di dalam pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seyogianya permasalahan ini kami serahkan kepada penilaian para ilmuwan bahasa, namun kami melihat hal ini dari sudut pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri mengenai penghayatan kesatuan dan persatuan bangsa adalah suatu hambatan.

3. Kesimpulan dan saran

a. Kesimpulan

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia yang belum baik dan benar telah menimbulkan perbedaan penafsiran dan perbedaan pengertian terhadap prinsip-prinsip serta hakikat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur Pemerintah sendiri baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah;
- 2) Komunikasi pemerintahan dengan rakyat-rakyat di pedesaan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena mereka belum memahami atau sama sekali tidak memahami bahasa Indonesia;
- 3) Keadaan-keadaan yang tersebut di atas banyak sedikitnya telah menimbulkan hambatan-hambatan bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Departemen Dalam Negeri.

b. **Saran,**

- 1) Agar sebaiknya melalui rencana pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dimasukkan pula rencana upaya pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan landasan Pokok bagi peningkatan kesatuan dan persatuan bangsa, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air di dalam rangka pemantapan ketahanan Nasional;
- 2) Agar sebaiknya di dalam rencana upaya pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu diprioritaskan terlebih dahulu kepada para aparatur pemerintah dari Pusat sampai ke Daerah, sehingga tercipta suatu pengertian dan pemahaman yang seragam mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 3) Agar sebaiknya diadakan pembakuan mengenai istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang telah diserap oleh rakyat banyak di samping melakukan penertiban terhadap kependekan-kependekan (akronim) dan pemakaian istilah-istilah asing yang belum populer penggunaannya;
- 4) Agar sebaiknya diadakan penelitian yang mendalam mengenai bahasa-bahasa daerah guna menciptakan suatu bahasa komunikasi pemerintahan yang serasi antara bahasa-bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga dapat menyentuh serta menyerap inspirasi dan aspirasi rakyat pedesaan serta memperkokoh penghayatan kesatuan dan persatuan Bangsa.

Kepustakaan:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
7. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974;
8. Pidato Kenegaraan Presiden RI, tanggal 16 Agustus 1981;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1984;
10. Tata Bahasa Indonesia oleh St. Takdir Alisyahbana, Prof. 1956;
11. Membangun Politik Dalam Negeri Indonesia Tahun 1982 oleh Departemen Dalam Negeri;
12. Pokok-pokok Kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri dalam Hubungan Pencapaian Peningkatan Ketahanan Nasional 1982 oleh Departemen Dalam Negeri;
13. Penghayatan Kesatuan Bangsa, Buku I dan II 1978 oleh Departemen Dalam Negeri;
14. Program Peningkatan Peranan RT/RW dalam proses Pembauran, Buku I dan II Tahun 1982 oleh Departemen Dalam Negeri;

15. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dalam Negeri 1982 oleh Departemen Dalam Negeri;
16. Pokok-pokok Rumusan Hasil Pekan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Tingkat Nasional dan Wilayah 1979 oleh Departemen Dalam Negeri;
17. Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1980 oleh Departemen Dalam Negeri.

BAHASA HUKUM SEBAGAI OBJEK DAN SUBJEK PEMBANGUNAN NASIONAL

Ali Said
Menteri Kehakiman

Pengantar

Merupakan kewajiban mutlak bagi kita selaku manusia-manusia yang ber-KETUHANAN YANG MAHA ESA untuk di dalam menyongsong Kongres Bahasa Indonesia IV ini mendahulukan sembah puji syukur kehadlirat-Nya serta memohon kiranya pertemuan akan tertuntun ke arah diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya.

Kemudian, izinkanlah saya untuk selain berucap tulus terima kasih kepada para penyelenggara atas undangannya, menyampaikan pula penghargaan yang tinggi atas diacarakannya secara khusus pembahasan suatu segi dari bahasa Indonesia yang erat kaitannya dengan tugas-tugas yang dibeban pertanggung jawaban kepada Departemen Kehakiman.

Hubungan dan kedudukan Departemen Kehakiman dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan baik, memang mempunyai arti tersendiri. Karena, selain sebagai sarana komunikasi pemerintahan, bahasa Indonesia merupakan bahasa hukum Nasional. Bahasa yang digunakan di bidang hukum, baik dalam perumusan peraturan perundang-undangan, dalam keputusan-keputusan badan peradilan, dalam penyusunan kontrak maupun perumusan akta-akta lainnya.

Selanjutnya, marilah kita sentuh masalah yang akan dibahas oleh Kongres ini yang bertemakan "BAHASA HUKUM SEBAGAI OBJEK DAN SUBJEK PEMBANGUNAN NASIONAL".

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Hukum

Sejarah hukum di negara kita sempat mencatat bahwa pada masa penjajahan Belanda di samping hukum adat yang hidup di berbagai lingkungan dan menggunakan bahasa daerah masing-masing, terdapat perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda dalam bahasa Belanda.

Namun, berkat Rachmat Tuhan Yang Maha Kuasa, gerakan kebangkitan nasional yang bermula di tahun 1908 telah mencetuskan "Sumpah Pemuda" pada tahun 1928, sehingga baik Proklamasi Kemerdekaan maupun Undang-Undang Dasar 1945 telah langsung terumus dalam bahasa Indonesia dan tidak lagi dalam bahasa asing/Belanda yang pada dasarnya lebih dikuasai oleh para pemimpin revolusi kemerdekaan kita.

Perumusan pasal 36 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa Negara, telah menyebabkan komunikasi dibidang Pemerintahan, termasuk penuangan rumusan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan UUD 1945, langsung menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga bahasa hukum dalam perundang-undangan nasional dalam kenyataan adalah bahasa Indonesia sejak Proklamasi. Lebih dari itu, bagi peraturan perundang-undangan produk kolonial yang masih diperlakukan dan terumus dalam bahasa Belanda, berangsur-angsur diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekalipun tidak dilakukan secara resmi.

Dengan dipergunakannya bahasa Indonesia di lapangan pengadilan, maka keputusan hakim pun dituangkan dalam bahasa Indonesia. Demikian pula dengan bahasa hukum dalam bidang perjanjian dan penyusunan akta oleh pihak-pihak yang berkontrak atau dalam akta notaris.

Pelajaran ilmu dan tata hukum di Fakultas Hukum, sudah sejak didirikannya Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (1946) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1950), menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan yang paling menggembirakan adalah bahwa sejak dekade 70-an, penulisan-penulisan dalam ilmu dan tata hukum Indonesia sudah berkembang dengan cepat dan telah dibuat dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah digunakan dan menjadi bahasa hukum negara kita sejak kurang lebih 38 tahun yang lalu.

Bahasa Hukum Indonesia

Simposium Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai Bahasa dan Hukum pada tahun 1974, telah berhasil mencatat pandangan yang menyatu

mengenai arti dan kedudukan Bahasa Hukum Indonesia. Beberapa catatan di antaranya adalah: *pertama*, bahwa Bahasa Hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang digunakan di dalam kehidupan hukum Indonesia dan karena fungsinya memiliki karakteristik tersendiri. *Kedua*, sebagai bahasa maka Bahasa Hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat estetika. *Ketiga*, bahwa sifat khas dari Bahasa Hukum itu, terletak pada kekhususan istilahnya misalnya penciptaan istilah-istilah Badan Hukum, Zona Otonomi Eksklusif dan lain-lain), komposisi serta gayanya, antara lain komposisi dan gaya dalam perundang-undangan, keputusan Hakim, akta Notaris atau dalam konvensi internasional. *Keempat*, bahwa bahasa hukum itu milik seluruh masyarakat dan bukan semata-mata milik para ahli hukum, karenanya Bahasa Hukum Indonesia dalam peraturan perundang-undangan itu harus mudah difahami oleh para anggota masyarakat.

Inventarisasi Permasalahan

Dalam upaya pembangunan hukum nasional sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, terdapat setidaknya-tidaknya 3 program utama yang meminta prioritas penanganannya, yaitu pembinaan hukum, penyempurnaan sarana dan prasarana penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum. Untuk mudahnya, maka di dalam memasalahkan bahasa hukum ini akan diikuti urutan program-program utama tersebut.

Dalam kaitan dengan pembangunan dan pembinaan hukum, baik dalam kegiatan melalui perancangan undang-undang ataupun melalui hurisprudensi dan perjanjian, maka masalah bahasa hukum yang perlu memperoleh perhatian adalah masalah *pembakuan istilah*. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan sarana dan prasarana penegakan hukum masalah penterjemahan menjadi penting sekali, sedangkan dalam kaitannya dengan program peningkatan kesadaran hukum maka masalah *penguasaan bahasa Indonesia* yang perlu diperhatikan.

1. Masalah pembakuan istilah.

Dari kegiatan inventarisasi peristilahan hukum, masih banyak dijumpai bahwa tidak setiap istilah menafsirkan satu konsep pemikiran. Masih ditemui adanya satu istilah yang menafsirkan lebih dari satu konsep pemikiran, misalnya kata/istilah "pertanggungan" dalam arti jaminan/borg dan sebagai terjemahan asuransi. Sebaliknya, bahwa untuk satu konsep pemikiran dipergunakan lebih dari satu istilah, misalnya

"tindak pidana" atau "perbuatan pidana" untuk menggantikan/men-terjemahkan istilah *strafbaarfeit*.

Bagi dunia ilmu pengetahuan keadaan sedemikian itu cukup menarik untuk dijadikan bahan diskusi.

Namun, dilihat dari segi praktis, lebih-lebih bagi suatu negara yang sedang membangun, maka dalam kondisi tidak atau belum ada pembakuan dalam peristilahan (standarisasi), akan merupakan pemborosan waktu, tenaga dan dana, baik bagi para pejabat administrasi pemerintahan maupun bagi para pihak yang berperkara di muka pengadilan. Karenanya upaya pembakuan istilah harus merupakan kegiatan yang diprioritaskan.

2. Upaya terjemahan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlandaskan pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, maka pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan belum diubah atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai tetap berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah peninggalan Pemerintah Hindia Belanda dan berbahasa Belanda, yang sebagian besar materinya berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan lainnya berkaitan dengan kodifikasi yaitu AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*), BW (*Burgerlijke Wetboek*), WvK (*Metboek van Koophandel*), WvS (*Wetboek van Strafrecht*), HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*).

Para pejabat pemerintah, jaksa dan hakim, pada masa pertama Pemerintah RI pada umumnya sempat memperoleh pendidikan sebelum Perang Dunia II dan menguasai bahasa Belanda. Tetapi para pejabat generasi baru yang dilahirkan setelah tahun 1935 dan mulai mendapat pendidikannya pada masa Pemerintahan Jepang, sama sekali tidak berkesempatan memperoleh pendidikan dengan bahasa pengantar Belanda.

Masalah yang timbul adalah kesulitan penerapan ketentuan-ketentuan hukum yang terumuskan dalam bahasa Belanda itu di dalam praktek. Upaya penterjemahan disatu pihak ternyata lamban dan tidak dilakukan secara resmi oleh Pemerintah. Dilain pihak upaya mewajibkan para pejabat untuk belajar lagi bahasa Belanda, mengalami kesulitan pula. Upaya memasukkan pelajaran penguasaan bahasa hukum Belanda ke dalam kurikulum Fakultas Hukum pun, baru diterima dalam dekade 70-an.

Karena pihak Pemerintah tidak secara resmi membakukan penterjemahan, maka upaya dilakukan oleh para ahli secara perorangan. Hasil-hasil terjemahan inilah yang kemudian dipergunakan oleh para pejabat dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam keadaan dimana terdapat terjemahan undang-undang yang berlainan arti di maknanya, dan dalam hal yang bersangkutan sama sekali tidak dapat mengkaji rumusan bahasa aslinya, timbullah permasalahan terjemahan mana yang akan dipilih oleh para pengambil keputusan itu.

Sebenarnya ada alternatif bagi Pemerintah untuk memilih salah satu terjemahan yang terbaik, atau untuk kembali melakukan terjemahan bersama. Telah diupayakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional penterjemahan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Algemene Bepalingen van Wetgeving*, (A.B.) dan sejumlah peraturan lainnya. Terjemahan yang disebut pertama bahkan telah diterbitkan.

Dalam pada itu Garis-garis Besar Haluan Negara telah memilih kebijaksanaan untuk langsung memperbaharui kodifikasi-kodifikasi yang telah ada itu. Dengan upaya pembaharuan ini dimaksudkan agar masalah terjemahanpun dapat sekaligus dilaksanakan.

3. Keterbatasan daya penerimaan bahasa hukum oleh masyarakat desa

Masalah ini sebenarnya masalah umum dalam sarana komunikasi pemerintahan, yaitu penguasaan bahasa Indonesia yang sangat terbatas oleh penduduk di pedesaan. Banyak di antara mereka yang masih "buta" bahasa Indonesia di samping "bukta aksara". Upaya yang telah ditempuh adalah dengan mempergunakan bahasa daerah/bahasa setempat sebagai alat terjemahan yang dilakukan oleh dan melalui kepala-kepala desa atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Untuk pemerataan pengetahuan mengenai hukum nasional, kegiatan penyuluhan hukum yang telah dikembangkan sejak PELITA III ini, sewajarnya mempertimbangkan dan karenanya memberikan perhatian yang lebih kepada masalah buta aksara dan buta bahasa Indonesia pada PELITA-PELITA mendatang.

Penetapan Kebijakan Langkah Kegiatan

1. Pembakuan istilah hukum.

Dalam kaitannya dengan program nasional di bidang pembangunan dan pembinaan hukum sebagaimana digariskan untuk PELITA IV, khusus dalam upaya pembaharuan kodifikasi dan penyusunan perundang-undangan lainnya, maka kegiatan pembakuan istilah hukum semakin menuntut prioritas penanganannya.

Dengan berlandaskan pada Pedoman Umum Pembentukan Istilah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebenarnya langkah-langkah maju telah dapat diambil dengan derap yang mantap. Hanya masalah personalia para petugas pembakuan dan sarana penunjangnya hingga kini masih menjadi penghambat yang tidak mudah untuk diatasi.

Pemikiran untuk lebih memantapkan upaya pembakuan istilah hukum ini, dengan mewadahi kegiatannya secara struktural dalam tubuh Badan Pembinaan Hukum Nasional, (dewasa ini sedang dipelajari) perlu mendapat perhatian kita bersama. Karena ternyata sudah bahwa kegiatan termaksud benar-benar memerlukan sarana dan prasarana penunjang yang memadai demi terlaksananya tugas secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

2. Upaya penterjemahan

Dewasa ini, sambil menunggu berhasilnya program pembinaan hukum nasional secara menyeluruh, kebijaksanaan untuk menterjemahkan peraturan perundang-undangan dari masa lampau masih tetap dirasakan sebagai kebutuhan yang bermanfaat. Tentu saja harus dilakukan secara pilihan, terbatas pada jenis-jenis peraturan yang dalam praktek sangat diperlukan bagi perkembangan hak dan kewajiban asasi warga negara.

Sejalan dengan tingkat pertumbuhan hubungan regional maupun internasional kini dan memperkirakan perkembangannya di waktu yang akan datang, upaya penterjemahan berbagai konvensi internasional atau peraturan perundang-undangan tertentu dari negara tetangga dan negara sahabat (khususnya di bidang lalu lintas perekonomian) akan sangat bermanfaat bagi program peningkatan kemampuan penegakan hukum maupun bagi program pembinaan hukum melalui perundang-undangan. Akan sangat bermanfaat pula kiranya untuk menterjemahkan ke dalam bahasa asing (Inggris) Hukum Nasional kita yang baru.

3. Bahasa Indonesia dalam Penerangan/Penyuluhan Hukum

Bertolak dari kenyataan masih cukup banyaknya anggota masyarakat yang buta aksara dan buta bahasa nasional, perlu diberikan perhatian khusus oleh para ahli dan petugas penerangan serta para ahli dan petugas penyuluhan hukum. Untuk meningkatkan keberhasilan komunikasi di bidang hukum dan pemerintahan, maka perlu ditingkatkan program penerangan dan penyuluhan hukum agar kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang buta aksara dan buta bahasa nasional di pelosok-pelosok pedalaman dan pedesaan. Selain melalui publikasi tertulis, kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan nasional perlu dilakukan pula melalui media lisan dan media gambar, dijelaskan melalui tokoh-tokoh masyarakat dengan terjemahan dalam bahasa daerah atau bahasa lokal masing-masing agar lebih berhasil.

Penutup

Saya telah mencoba untuk mengetengahkan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi oleh Departemen Kehakiman dalam melaksanakan isi pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara dan bahasa hukum.

Mudah-mudahan penyajian masalah ini dapat menggugah para hadirin peserta kongres untuk mengkajinya lebih mendalam dan mengembangkannya lebih jauh.

Semoga Tuhan Seru Sekalian Alam senantiasa memberikan petunjuk-Nya dan melimpahkan Ridho-Nya. Amien.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA PEMBINAAN KEHIDUPAN BERAGAMA

H. Ahmad Ludjito
Departemen Agama

Pendahuluan

1. Kenyataan sosial budaya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa yang beragama, sehubungan dengan itu kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran dan perkembangan agama-agama besar: Hindu, Budha, Islam, Kristen (Protestan dan Katolik). Oleh karena itu pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial-budaya bangsa Indonesia juga sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama.

Agama merupakan ketentuan-ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung nilai-nilai luhur, mulia dan suci yang dihayati dan diamalkan oleh para pemeluknya masing-masing, dan merupakan faktor yang berpengaruh dalam usaha bangsa Indonesia untuk mensukseskan pembangunan nasional.

2. Agama di Indonesia mempunyai arti/posisi dan peranan serta fungsi yang sangat penting dalam pembangunan nasional, yaitu :
 - a) sebagai *faktor motivatif*, agama memberi dorongan batin/motif, akhlak dan moral yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan manusia dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan, termasuk usaha dalam pembangunan bangsa.
 - b) Agama sebagai *faktor kreatif dan inovatif*, memberikan dorongan semangat untuk bekerja kreatif dan produktif dengan penuh dedikasi

untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik sebagai sarana kehidupan akherat yang baik pula. Oleh karena itu di samping bekerja kreatif dan produktif, agama mendorong pula terhadap pembaharuan dan penyempurnaan (innovatif).

- c) Agama merupakan *faktor integratif*, baik individual maupun sosial, dalam arti bahwa agama mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktifitas manusia, baik sebagai orang seorang maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam fungsinya yang integratif ini, serta dalam konteks pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama mempunyai peranan sebagai faktor pemantap stabilitas dan ketahanan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa demi keberhasilan pembangunan nasional di samping akan lebih memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa juga peningkatan kehidupan beragama.
 - d) Dalam fungsinya sebagai *faktor sublimatif*, agama berfungsi menyahdukan dan mengkoduskan perbuatan manusia, sehingga segala perbuatan manusia, bukan saja yang bersifat agamis, tetapi juga setiap perbuatan yang dijalankan dengan tulus ikhlas dan penuh pengabdian karena keyakinan agama, akan merupakan bagian pelaksanaan ibadah dari insani terhadap Sang Pencipta/Al-Khaliq/Tuhan Yang Maha Esa. Dan atas dasar itu maka membangun juga berarti beribadah.
 - e) Agama sebagai *sumber inspirasi* budaya bangsa Indonesia telah melahirkan berbagai hasil budaya fisik maupun non fisik antara lain berupa gaya arsitektur bangunan, tata cara pergaulan, seni budaya di samping sumbangannya terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Kelima arti dan peranan agama tersebut merupakan kekuatan transendental yang menuntut para pemeluknya untuk mewujudkannya secara nyata dalam kehidupannya sehari-hari termasuk melaksanakan pembangunan nasional.
3. Dalam upaya pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama bagi seluruh penghuni kepulauan Nusantara yang terdiri dari pelbagai suku dan keturunan dengan bahasa dan adat-istiadat serta budaya yang ber-

aneka ragam, maka peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (sesuai dengan Sumpah Pemuda) dan sekaligus sebagai bahasa negara (pasal 36 UUD 1945) serta sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan (UUD No. 4 tahun 1950 jo UU No. 12 tahun 1954) adalah merupakan faktor penentu; dan bahasa sebagai alat komunikasi antar manusia baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat merupakan sarana dominant bagi berhasilnya pembinaan kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam uraian selanjutnya secara berurutan akan disampaikan gambaran mengenai Pembinaan Kehidupan Beragama, Peranan dan Perkembangan Bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan Pembinaan Kehidupan Beragama, Beberapa Masalah tentang Penggunaan bahasa Indonesia dalam Kehidupan beragama dan Kesimpulan serta Saran-saran sebagai penutup.

Pembinaan Kehidupan Beragama

1. Kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional ditegaskan dalam rumusan Pancasila dalam Pembukaan dan pasal 29 UUD 1945. Landasan idiil Negara Republik adalah Pancasila, yang sila pertamanya adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai Sila Pertama ini ditegaskan bahwa "Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna kewajiban Pemerintah dan para Penyelenggara Negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur". Dan untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945 itu, maka pemeliharaan budi pekerti kemanusiaan yang luhur tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama bangsa kita, karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan bahkan merupakan sasaran pokok ajaran agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".
2. Sehubungan dengan itu maka dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama, Negara/Pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, melainkan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang,

bergairah dan bersemarak, serasi dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam membina kehidupan beragama dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Bapak Presiden Republik Indonesia Soeharto telah menegaskan bahwa "Bangsa kita adalah bangsa yang beragama, Masyarakat Pancasila yang ingin kita bangun bersama, bukanlah masyarakat tanpa agama, lebih-lebih bukan masyarakat yang anti agama. Sebagai negara Pancasila kita tidak menganut paham sekuler, sehingga Negara dan Pemerintah sama sekali bersikap tidak memperdulikan prikehidupan beragama bangsa kita. Karena itu pemerintah tidak menempatkan usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama sebagai masalah masyarakat dan umat beragama semata-mata. Di lain pihak negara kita juga bukan Negara agama dalam arti didasarkan atas salah satu agama".

3. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbhineka, berbeda dalam suku bangsa yang memiliki bahasa, kebudayaan dan kesenian daerah adat-istiadat setempat, juga berbeda dalam agama yang kita peluk dan kita yakini masing-masing. Namun perbedaan-perbedaan itu bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan harus diserasikan untuk mencapai cita-cita bersama menuju kebahagiaan sebagai satu bangsa, karena di dalam kebhinekaannya itu bangsa Indonesia juga telah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia; mempunyai satu bahasa persatuan bangsa yaitu bahasa Indoonesia; hidup dalam satu negara ialah negara Republik Indonesia; mempunyai satu Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk maksud-maksud di atas itulah maka Departemen Agama didirikan, sebagai salah satu ciri dari negara Pancasila yang walaupun bukan theocratis namun juga bukan sekuler.

Perkembangan Bahasa Indonesia dan Pembinaan Kehidupan Beragama.

Bahasa Indonesia telah dikenal sejak dipergunakan oleh penduduk pantai Timur Sumatera, Maluku dan pulau-pulau sekitarnya yang mula-mula dikenal sebagai bahasa Melayu yang dipergunakan secara lisan secara turun-temurun. Tulisan yang mula-mula dikenal dan dipergunakan untuk menuliskan bahasa Indonesia pada permulaan abad Masehi adalah berasal dari India selatan yang dikenal dengan nama huruf Palawa. Dan bersamaan dengan itu pula bahasa Sanskerta dan Poli yang mengikuti masuknya agama Hindu dan Budha ke Indonesia ikut menyumbang perkembangan bahasa Melayu.

Ketika Agama Islam masuk ke Indonesia, bahasa Arab dan tulisannya

ikut juga memperkaya bahasa Indonesia, demikian juga bahasa Parsi. Tulisan Arab dipergunakan untuk menuliskan bahasa Melayu, menggantikan tulisan atau huruf Palawa. Dan bersamaan waktu dengan penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara, bahasa Indonesia juga ikut tersebar karena bahasa itu dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam perkembangan agama tersebut. Di samping itu, ketika perdagangan sudah mulai ramai, kapal-kapal yang pergi ke Asia Selatan dan Asia Timur atau sebaliknya, selalu melewati selat Malaka dan singgah di kota-kota sekitarnya. Kaum pedagang itu pun dengan demikian, ikut juga mengambil bagian dalam pengembangan bahasa Melayu, karena sedikit ataupun banyak, mereka berhubungan dengan penduduk asli kota-kota itu dan mengetahui bahasanya.

Pada abad ke-16 penyebaran bahasa Melayu sudah demikian luasnya. Ini dibuktikan oleh catatan yang dibuat oleh Pigafetta, seorang awak kapal pimpinan Magelhaenz. Dalam perjalanan menuju Indonesia melalui Amerika, kapal dari Eropa itu berlabuh di Maluku. Pigafetta membuat catatan tentang keadaan setempat. Di antara yang dicatat itu ialah bahasa yang dipergunakan oleh penduduk di tempat itu. Dari catatan itu kemudian diketahui bahwa bahasa yang dipergunakan oleh penduduk Maluku pada waktu itu tidak lain adalah bahasa Melayu juga. Kata-kata yang dicatat oleh Pigafetta itu mirip benar, kalau tidak boleh dikatakan sama, dengan kata-kata bahasa Indonesia yang sekarang. Dari catatan-catatan yang dibuat sesudahnya oleh orang-orang lain, kemudian juga diketahui bahwa bahasa Melayu memang penyebarannya sudah jauh dari daerah asalnya di sekitar selat Malaka. Bahasa itu sudah dikenal dan dipergunakan di kota-kota pantai di seluruh wilayah Indonesia, dan bahkan di beberapa kota di luar wilayah Indonesia dan Malaysia.

Kita ketahui bahwa bangsa Eropa yang mula-mula datang dan menjajah Indonesia adalah bangsa Portugis. Itu terjadi pada abad ke-16. Pada akhir abad itu datang pula bangsa Belanda dan sejak itu kedudukan Portugis di Indonesia makin terdesak oleh Belanda, sampai akhirnya tinggal sebagian dari sebuah pulau kecil (Timor) saja yang masih dijajah oleh Portugis. Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Indonesia.

Demikianlah, maka bahasa Melayu oleh pemerintah kolonial Belanda disahkan pemakaiannya sebagai bahasa penghubung di wilayah Indonesia yang waktu itu sebagai wilayah Hindia Belanda. Langkah itu diikuti dengan pembakuan. Ditentukan bahwa bahasa Melayu yang dianggap baku (standard) ialah bahasa Melayu yang dipergunakan di kepulauan Riau, atau yang pada waktu itu dikenal dengan nama bahasa Melayu Tinggi. Jadi kalau ada perbedaan antara kata-kata setempat, misalnya lain di Palembang lain pula di Ban-

jarmasin, maka yang diambil adalah yang dipakai di kepulauan Riau itu.

Kecuali pembakuan dalam bentuk lisan, juga dan terutama, pembakuan dalam tulisan. Diketahui, karena bahasa Melayu sudah secara luas digunakan oleh masyarakat di berbagai tempat dan diperbagai suku, maka tidak jarang terdapat perbedaan dalam tulisan dan ejaannya. Maka oleh pemerintah Belanda ditunjuk Ch. Van Ophuysen untuk menyusun dan membakukan ejaannya, dan karena sebelumnya bahasa Melayu sudah dituliskan dengan huruf Arab Melayu, Ch. Van Ophuysen tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Ia tinggal menggantikan huruf Arab Melayu itu dengan huruf Latin dan menambah huruf hidup yang dalam sistim ejaan dengan huruf Arab Melayu tidak ada. Hasil karya Ch. Van Ophuysen itu kemudian dinyatakan berlaku oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1901. Pada tahun 1947 Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ejaan yang berlaku untuk menuliskan bahasa Indonesia adalah Ejaan Republik Indonesia, bukan lagi ejaan Ch. Van Ophuysen. Ejaan itu sekarang dikenal dengan nama Ejaan RI atau Ejaan Suwandi (pada waktu itu Mr. Suwandi adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang menandatangani surat keputusan yang meresmikan ejaan tersebut).

Kemudian ejaan Suwandi ini disempurnakan dengan Ejaan Baru (Yang Disempurnakan) yang dipergunakan juga di Malaysia. Dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia seperti dikemukakan di atas, menunjukkan adanya partisipasi agama di dalam perkembangan bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, baik dari segi percepatannya maupun dari luas daerah yang dijangkaunya.

Contoh-contoh di bawah ini merupakan beberapa bukti sejarah yang lebih Kongkrit :

1. Tersebar nya kitab-kitab agama Islam semacam : "Sabilah Muhtadin" karangan Syekh Arsyad Al-Banjari dan kitab "Sairus Salikin" karangan Abdus Samad Al-Palembani yang ditulis sekitar abad 18 telah dibaca oleh umat Islam Indonesia dan Malaysia; kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Melayu huruf Arab, yang disebut *huruf Melayu* (di daerah-daerah yang berbahasa Melayu) atau huruf *Pegon* (di Jawa) dan huruf Jawi (di Malaysia).
2. Juga Bible pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Abdullah bin Abdulkadir Munshi di Malaka. Tentulah paling kurang telah menjadi bacaan kalangan Kristen di Indonesia.

3. Lahirnya organisasi-organisasi yang membawa aspirasi Islam seperti: Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain-lain yang bersifat lokal, lewat kongres, brosur-brosur, khotbah dan ceramah telah pula secara intensif menyebarkan dan memasyarakatkan bahasa Melayu/Indonesia, semenjak sebelum kemerdekaan.
4. Secara tidak langsung lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara yang sampai abad 16 pada umumnya berada di tangan orang-orang Islam, lewat hubungan dagang mereka juga telah ikut menyebarkan bahasa Melayu, sehingga ketika orang-orang Portugis, Inggris dan Belanda masuk ke Nusantara mereka mendapatkan bahwa bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di wilayah tersebut.
5. Dan pada waktu ini sudah jelas pemakaian bahasa Indonesia dalam pembinaan agama baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga agama swasta dan perorangan (para juru da'wah, missionaris, pendeta, pedanda) semakin intensif dan meluas, baik dalam bentuk khotbah, ceramah di berbagai tempat dan lewat mass media TV RI maupun radio, maupun yang tertulis dalam berbagai media. Intensitas dan meluasnya pemakaian bahasa Indonesia dalam pembinaan kehidupan agama itu berjalan secepat dan seluas pembangunan nasional, sehingga tanpa disadari kadang-kadang terlibat dalam pemakaian yang dapat menyebabkan kerawanan dalam pergaulan antar umat beragama.
6. Kenyataan menunjukkan bahwa cukup banyak "kata-kata agama" yang telah memperkaya kosa kata bahasa Indonesia, terutama bahasa al-Qur'an di samping juga bahasa-bahasa kitab suci lainnya. Hanya penyesuaian kosa kata ini dengan ejaan bahasa Indonesia kadang-kala menimbulkan berbagai kejanggalan, terutama di kalangan para pembina agama.

Beberapa Masalah Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Beragama.

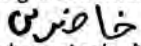
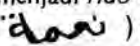
Sebagaimana disampaikan di muka bahasa merupakan sarana pokok dalam komunikasi antar manusia. Bahasa itu akan sangat komunikatif bila antara penutur dan penerima terdapat kesepakatan dalam makna dan arti setiap kata yang dipakainya. Sebaliknya, perbedaan tanggapan, dan pemahaman terhadap makna arti kata-kata dari suatu ungkapan, sebagian apa lagi seluruhnya, tentu akan mengakibatkan terjadinya salah komunikasi antara

kedua belah pihak, yang dalam hal-hal tertentu mungkin dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif. Hal ini akan sangat terasa bila terjadi dalam kehidupan beragama, yang sering dianggap sebagai sesuatu yang "rawan". Di antara kata-kata yang masih perlu mendapatkan kesepakatan secara bulat dalam kehidupan antar umat beragama adalah penggunaan kata-kata tertentu, yang dapat disebut sebagai "kata-kata agama" atau lebih tepat "ragam bahasa fungsional agama" karena di samping berasal dari bahasa agama tertentu juga karena salah penggunaannya akan dapat mengakibatkan kerawanan. Masalah lain adalah transliterasi dari huruf asing ke huruf bahasa Indonesia, yang sebagiannya memang sukar untuk ditransliterasikan dengan tepat sehingga tak akan salah ucap lagi. Hal ini banyak terdapat dalam transliterasi dari huruf Arab.

Demikian besar pengaruh ragam bahasa fungsional agama dalam kehidupan agama di masyarakat sehingga pemakaiannya pun terikat oleh pengertian yang bercorak khusus dari ajaran suatu agama, bahkan kadang-kala erat berkaitan dengan masalah akidah. Dalam hal demikian dirasakan perlunya dikembangkan semacam "Kode etik" dalam penggunaannya, agar pemakaian kata-kata tertentu dari suatu agama tidak menimbulkan reaksi dari "pemilik" kata-kata tersebut. Dan hal itu demi pemantapan serta pelestarian kerukunan hidup antar umat beragama yang menjadi salah satu sasaran pembinaan kehidupan agama.

Di bawah ini kami sampaikan beberapa contoh guna memperjelas pertanyaan tersebut :

1. Sebagaimana telah disebutkan di atas cukup banyak kata-kata yang berasal dari "bahasa-bahasa agama" (bahasa asing yang erat berkaitan dengan agama) yang telah dijadikan kata-kata bahasa Indonesia dan ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia. Dan karena sudah secara umum dianggap menjadi bahasa Indonesia, maka secara bebas pula setiap orang, dari golongan agama apapun, menggunakannya dalam kaitannya dengan kehidupan agama masing-masing. Ternyata dari pengalaman selama ini hal tersebut kadang-kala menimbulkan kegelisahan, atau setidaknya tidaknya kekurang-serasian hubungan, dalam pergaulan antar agama. Sebagai contoh: kita sering mendengar kata *almarhum* (artinya: yang mendapat rahmat Allah) digunakan untuk menyebut seseorang yang telah meninggal dunia, tanpa pandang agama apapun yang dipeluknya (bahkan pernah terjadi untuk menyebut tokoh PKI pun digunakan istilah tersebut). Hal ini ternyata telah menimbulkan rasa kurang wajar, di kalangan umat

- Islam, karena istilah tersebut erat kaitannya dengan masalah tauhid (theologi). Barangkali kata mendiang dapat menggantikannya untuk dipakai secara umum tanpa menimbulkan reaksi negatif. Begitu juga akhir-akhir ini kata-kata *zakat* dan *wakaf* telah pula digunakan untuk menunjang perbuatan amal sosial bagi agama non Islam, sedang kita tahu bahwa kata *zakat* adalah salah satu dari rukun Islam, fondamen pokok ajaran Islam. Senada dengan itu penggunaan kata *Ulama* dan *ibadah*. Di kalangan umat Islam pun terdapat pendapat yang tidak setuju dengan penggunaan istilah "sembahyang" yang berasal dari sembah dan Hiyang yang berasal dari agama Hindu dan lebih tepat menggunakan kata "shalat".
2. Memang peraturan perundangan yang melarang tidak ada, namun kiranya ada semacam rasa agama dalam beberapa kata-kata, atau sebagai makna subyektif dari kata-kata tersebut, di samping maknanya yang obyektif, sehingga segolongan umat beragama "mengklaim kata-kata tertentu sebagai kata-kata agama yang hanya dapat digunakan oleh "pemiliknya". Karenanya penggunaan oleh kelompok agama lain tentulah akan menimbulkan ketidakserasian. Sebagai contoh kongkrit adalah protes umat Islam yang pernah diajukan terhadap pemakaian kata *madrasah* untuk sesuatu sekolah agama non Islam, karena dianggap akan membingungkan umat. Demikian juga umat Hindu di Bali pernah protes karena penggunaan kata *Pura Agung* sebagai nama dari salah satu rumah ibadah non Hindu. Tentunya hal yang sama akan terjadi pada umat beragama lainnya, bila penggunaan kata-kata tertentu yang dianggap "monopoli" suatu agama tertentu dilakukan oleh pengikut agama lain.
 3. Masalah lain adalah masalah transliterasi. Menurut ejaan bahasa Indonesia yang diperbaharui kosa kata asing yang telah diserap ke dalam perbendaharaan kosa kata Indonesia ejaannya tidak didasarkan atas ejaan bahasa aslinya, tetapi disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Hal ini memang bermanfaat, untuk menghindari salah ucap, misalnya kata *hadlirin* () sering dibaca *had-iirin* oleh mereka yang tidak tahu bahasa Arab. Maka dengan menuliskannya menjadi *hadirin*, ucapannya akan lebih mendekati kata aslinya. Demikian juga kata *ridlo*, yang kemudian menjadi *rido* dan *rela*. Namun ternyata kata *ni'mat* (dituliskan dengan e : ) yang artinya bertentangan

bila ditulis dengan *nikmat* (pakai **نِعمَة**) ni'mat = karunia, nikmat = kemurkaan).*)

Khusus mengenai ayat-ayat Al-Qur'an diperlukan ketentuan tersendiri dalam transliterasi ke huruf Latin, untuk menghindari salah baca, yang merupakan hal yang esensial bagi umat Islam. Demikian juga tentunya transliterasi dari huruf Sangsekerta dan Pali bagi umat Hindu dan Budha. Khusus untuk transliterasi huruf Arab ke Indonesia, IAIN Jakarta pernah mengadakan seminar, juga Proyek Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama telah memberikan pedoman tulisan itu. Namun sementara ini berlaku secara nasional, karena ternyata penerbit-penerbit kitab suci Al-Qur'an di Indonesia masih menggunakan transliterasi yang berbeda-beda.

Kesimpulan dan Saran-saran.

Sebagaimana penutup dari uraian ini kami sampaikan kesimpulan, saran-saran sebagai berikut :

- 1) Bahwa bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara terdiri dari pelbagai suku dan keturunan dengan bahasa dan adat istiadat yang beraneka ragam dengan adanya perbedaan agama yang dipeluk oleh masing-masing warganegara tidak menjadi penyebab perpedahan yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, tetapi justru menjadi perekat bagi lima titik temu yang sudah ada, yaitu satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu idiologi dan satu pemerintahan.
- 2) Secara langsung ataupun tidak agama telah ikut mengembangkan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia.
- 3) Bahasa Indonesia berkembang seirama dengan perkembangan rasa keagamaan dan rasa kebangsaan setiap warga negara Indonesia, dan dalam menghadapi pelbagai variasi pengembangan dan penyempurnaannya bahasa Indonesia bertugas untuk menjembatani kemajemukan yang ada di kalangan pemakainya sehingga ragam kosa kata yang berkaitan dengan

*) Jarang nama Bapak Menteri Agama: Munawir Sjadzali diucapkan dengan tepat yang dalam bahasa aslinya **سجادلي**, namun sering diucapkan Syadzali.

ajaran pokok agama tertentu tidak menimbulkan komunikasi yang memang serasi di antara para pemeluk agama yang berbeda.

- 4) Sehubungan dengan butir 3 dan karena adanya ciri-ciri yang khas dalam kaitannya dengan ibadah dan keimanan, agama memerlukan beberapa kata atau "istilah" tersendiri yang merupakan ragam fungsional agama dan yang hanya berlaku bagi agama tertentu; karena kata-kata atau istilah ini sangat akrab berkaitan dengan nilai-nilai keyakinan serta rasa keagamaan pada masing-masing pemeluk agama, maka pemakaian oleh agama lain akan menimbulkan kurang serasian dalam pergaulan antar umat beragama. Dan untuk itu diperlukan adanya pedoman atau konsensus antar umat beragama tentang penggunaan istilah-istilah yang khusus itu. (Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama pernah menjadwalkan masalah ini untuk dibicarakan bersama, namun sampai sekarang belum terlaksana).
- 5) Untuk membantu mempermudah membaca berbagai kitab suci diperlukan transliterasi ke huruf-Latin (huruf bahasa Indonesia) dan untuk ini diperlukan adanya *Pedoman Standar*. (Badan Litban Agama c.q. Puslitbang Lektur Agama telah menjadikannya sebagai salah satu program kegiatan tahun 1983 — 1985).
- 6) Dan akhirnya untuk lebih memantapkan penanganan masalah-masalah tersebut di atas kami kira perlu ada kerjasama antara Pusat Pengembangan Bahasa dengan Badan Litbang Agama serta Wadah Musyawarah Antar Ummat Beragama.

Demikian sekedar sumbangan pada kongres yang penting ini semoga ada manfaatnya.

Jakarta, 28 Oktober 1983,

PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA DI DALAM DUNIA PENERANGAN DI INDONESIA

Harmoko
Menteri Penerangan

Pendahuluan

1. Terlebih dahulu saya menyampaikan kegembiraan dan penghargaan atas terselenggaranya Kongres Bahasa Indonesia IV yang merupakan suatu rangkaian usaha pembangunan bahasa Indonesia sehingga makin dapat meningkatkan peranannya di dalam ruang lingkup pembangunan nasional.

2. Tujuan Kongres Ini adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintahan, sarana pengembangan kebudayaan, sarana pendidikan dan pengajaran, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Untuk mencapai tujuan itu masalah bahasa dan sastra Indonesia akan dibahas dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan nasional serta ditinjau pula dari segi komunikasi massa dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi modern.

Kongres Bahasa Indonesia IV bertemakan "Dengan bahasa Indonesia sebagai sarana, kita sukseskan Pembangunan Nasional".

Hal ini jelas menggambarkan betapa erat hubungan bahasa Indonesia dengan kesinambungan pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 khususnya pada butir yang menyangkut kebudayaan antara lain amanatkan bahwa :
 - Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar.

- Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu sarana identitas nasional.
4. Bertolak dari tujuan dan tema Kongres serta berlandaskan amanat TAP MPR tersebut, dalam kesempatan ini saya ingin mengajukan suatu kertas kerja dengan judul "Pengembangan Bahasa Indonesia di dalam Dunia Penerangan di Indonesia". Dengan judul tersebut saya ingin mengemukakan pelbagai upaya yang dilakukan oleh jajaran penerangan dalam usaha pengembangan bahasa Indonesia dan dalam rangka penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi melalui berbagai media komunikasi.
 - a. Saya menyadari bahwa walaupun kesadaran umum untuk memajukan bahasa Indonesia cukup besar, namun kendala-kendala juga masih kita jumpai. Mengingat bahwa bahasa merupakan cermin kehidupan dalam proses pergaulan yang dinamis, maka perkembangan bahasa mengandung dinamika yang arah dan kecenderungannya memerlukan perhatian.
Demikian pula dengan bahasa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang sebagai sarana komunikasi maupun selaku salah satu perwujudan tingkat kehidupan budaya bangsa, maka bahasa Indonesia tidak jarang menghadapi hambatan, di samping dorongan-dorongan yang mendukung pertumbuhannya.
 - b. Hambatan-hambatan tersebut acapkali tidak disadari, oleh karena di dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari kealpaan-kealpaan dapat timbul tanpa menyebabkan terganggunya arus komunikasi, meskipun bila dipandang dari sudut bahasa sebenarnya telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang cukup berarti.
 - c. Sesuai dengan bidang kehidupan yang saya alami, yaitu bidang komunikasi dan penerangan maka yang akan saya bicarakan di sini adalah masalah bahasa Indonesia dengan titik berat pada fungsinya sebagai sarana komunikasi.
 5. Dalam kertas kerja saya yang berjudul "Pengembangan Bahasa Indonesia di dalam Dunia Penerangan di Indonesia" saya mencoba menguraikan dan menyajikan pengamatan-pengamatan sekilas yang mengandung be-

berapa masalah yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari para ahli bahasa.

Jajaran penerangan yang bertugas melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi untuk menyebarluaskan sesuatu ide kepada masyarakat luas, sekaligus merupakan unsur yang ikut menciptakan kebudayaan, menumbuhkan bahasa dan bertanggung jawab terhadap maju atau mundurnya bahasa Indonesia.

6. Ijinkanlah saya di dalam kertas kerja ini mengemukakan beberapa hal mengenai :
 - a. Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi;
 - b. Penggunaan dan pengembangan bahasa Indonesia oleh berbagai media komunikasi dan permasalahannya;
 - c. Sumbangan jajaran Penerangan dalam pengembangan bahasa Indonesia;
 - d. Kesimpulan dan himbauan yang berkaitan dengan pengembangan bahasa Indonesia dalam komunikasi dan untuk menjadi pemikiran kita semua, khususnya dalam kerangka kegiatan Kongres Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi

1. Bahasa Indonesia sebagai salah satu perwujudan budaya bangsa, mempunyai sejarah perkembangan yang unik, bahasa Indonesia lahir jauh mendahului kemerdekaan kita. Pada tanggal 28 Oktober 1928 di dalam rapat perkumpulan berbagai organisasi pemuda, telah dicetuskan sikap politik yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia merupakan salah satu butir pernyataan yang erat hubungannya dengan persatuan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa Indonesia.
2. Setelah itu bahasa Indonesia tumbuh sebagai bahasa perjuangan politik kebangsaan. Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi di antara para perintis kemerdekaan, dan sebagai upaya untuk meletakkan dasar kesadaran bersama terhadap nilai penting persatuan dan kesatuan.
3. Pada saat sekarang ini apabila kita merenungkan kembali ke masa lampau, maka kita dapat membayangkan betapa beratnya perjuangan

an bahasa Indonesia, baik sebagai cerminan kehidupan budaya maupun sebagai sarana komunikasi sosial.

Bahasa Indonesia sebagai cerminan budaya, harus berhadapan dengan keadaan bahwa bahasa-bahasa daerah telah tumbuh dengan akar yang kuat di pelbagai suku bangsa dan hidup di dalam proses komunikasi sehari-hari di kalangan masyarakat luas, terutama di kalangan masyarakat umum.

Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi massa, pada waktu itu belum memiliki bentuk yang kokoh seperti sekarang, harus pula berdampingan dengan bahasa-bahasa asing.

Dari segi bahasa, masa penjajahan Jepang di Indonesia mempunyai arti yang cukup penting, terutama di dalam hal memajukan bahasa Indonesia.

Penghapusan penggunaan bahasa Belanda telah mempercepat pemakaian bahasa Indonesia terutama di kalangan atas. Para cendekiawan kita yang memiliki kesadaran nasional tidak pula menyia-nyiaakan kesempatan untuk memperkokoh dan memperluas perkembangan bahasa Indonesia.

Anjuran tugas untuk menggunakan bahasa Indonesia di kantor-kantor merupakan salah satu faktor penting mempercepat pengembangan pemakaian bahasa Indonesia di kalangan resmi atau di kalangan atas masyarakat.

Tidak jarang pada waktu itu kita mendengar orang-orang terpelajar yang menguasai berbagai bahasa asing dan bahasa daerah sebagai "bahasa ibu" giat belajar bahasa Indonesia.

5. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dengan Undang-Undang Dasar yang merupakan tonggak sejarah amat penting bagi bahasa Indonesia, oleh karena dengan tegas bangsa Indonesia telah mencantumkan bahwa "Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia". (UUD 1945 Bab XV, Pasal 36). Oleh sebab itu bahasa Indonesia dengan kokoh telah mempunyai landasan konstitusional sehingga pengembangan bahasa Indonesia menjadi sangat luas sejalan dengan pengembangan budaya bangsa Indonesia.
6. Saya teringat kepada Seminar Politik Bahasa Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1975, yang antara lain merumuskan dengan jelas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai baha-

sa nasional maupun sebagai bahasa negara. Kemudian menjelaskan juga kedudukan bahasa-bahasa daerah sebagai pendukung pengembangan bahasa nasional.

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai :

- (1) lambang kebanggaan nasional;
- (2) lambang identitas nasional;
- (3) alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya;
- (4) alat perhubungan antar budaya dan antar daerah.

Di dalam fungsi bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara, berfungsi sebagai :

- (1) bahasa resmi kenegaraan;
- (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan;
- (3) bahasa resmi di dalam hubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan;
- (4) bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

Sedangkan bahasa-bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa tetap dipelihara dengan fungsi pokok pengembangan budaya daerah yang memperkaya kebudayaan nasional.

7. Dengan fungsi-fungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, saya melihat bahasa Indonesia dari sudut pandangan komunikasi sosial, di mana fungsi-fungsi tersebut dikembangkan melalui hubungan antar manusia dengan jalan saling berkomunikasi, saling berbicara, dengan demikian saling menggunakan bahasa bagi pembinaan kesatuan pendapat, dalam memecahkan berbagai permasalahan dan menentukan pemikiran-pemikiran serta pandangan-pandangan yang positif.
8. Komunikasi sosial dalam pengertian umum berarti suatu proses hubungan antar manusia untuk memperlancair kebersamaan di dalam kehidupan.

Komunikasi sosial dilakukan orang dengan menggunakan lambang-lambang yang paling sempurna di dalam proses komunikasi adalah bahasa, karena bahasa mampu melambangkan benda-benda

konkrit, pikiran maupun perasaan yang merupakan suatu hal bersifat abstrak.

Saling pertukaran lambang-lambang melalui bahasa maka terjadi proses komunikasi. Proses komunikasi berisi pembicaraan yang terus-menerus sehingga membawa masyarakat kepada taraf hidup budaya tertentu.

9. Komunikasi sosial dalam pengertian terbatas dikaitkan dengan kegiatan memberi dan menerima penerangan, yang dewasa ini kita lakukan, pengertiannya sama dengan komunikasi sosial secara umum.

Proses komunikasi di dalam kegiatan penerangan juga tetap memberikan fungsi yang penting terhadap komunikasi timbal balik. Namun kegiatan Penerangan sering dianggap sebagai suatu kegiatan komunikasi searah, tentu saja hal ini tidak benar.

10. Masyarakat Indonesia juga telah sungguh-sungguh mendayagunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Secara timbal balik bahasa Indonesia telah mampu dipergunakan sebagai sarana komunikasi antar warga negara Indonesia, sebaliknya proses komunikasi sendiri juga ikut memperkokoh kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa nasional dan akan terus berkembang sebagai bahasa ilmu pengetahuan.
11. Tentang hal kesempurnaan bahasa Indonesia di dalam mendukung fungsinya sebagai sarana komunikasi, masalah yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan bahasa tertulis. Nampaknya pembakuan bahasa Indonesia memang dengan penun tanggung jawab telah kita laksanakan, demikian juga dalam media massa, tetapi masih perlu ditingkatkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penggunaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia oleh Berbagai Media Komunikasi dan Permasalahannya,

1. Penggunaan bahasa Indonesia di tanah air sebagai sarana komunikasi sosial, setelah memasuki jaman kemerdekaan selama lebih dari 38 tahun, menunjukkan tingkat kemajuan yang semakin baik.

Komunikasi antar warga negara Indonesia yang berasal dari ber-

bagai suku bangsa dan dari wilayah berjauhan serta yang memiliki bahasa daerah beraneka ragam, selama ini tidak nampak dijumpai hambatan. Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar hubungan sosial telah cukup mampu menjadi sarana.

Bahasa Indonesia, sejak tahun 1945 dinyatakan sebagai bahasa negara senantiasa diperhatikan pembinaan dan penyempurnaannya, terutama di dalam usaha pembakuan-pembakuan tata bahasa, ejaan ataupun istilah. Sementara itu media komunikasi massa sangat besar dukungannya dalam melaksanakan garis-garis pembakuan yang dihasilkan oleh para ahli bahasa kita di setiap tahapan.

2. Penggunaan bahasa Indonesia dalam media komunikasi menunjukkan kemajuan dan pengembangan sangat pesat. Pada beberapa media komunikasi massa dapat disebut secara singkat sebagai berikut :

- a. *Media Pers*

Pers nasional yang terbit di Indonesia dewasa ini terdapat 273 penerbitan, terdiri dari surat kabar harian, berkala, majalah serta buletin.

Dari jumlah penerbitan pers tersebut kira-kira 4,40% terbit dalam bahasa daerah.

Penerbitan pers Indonesia pada umumnya secara kualitatif telah berusaha menggunakan pembakuan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pemberitaan, ulasan, tajuk rencana dan karangan umumnya telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik.

"PojoK" sebagai keistimewaan pers Indonesia, yang semula sering diisi dengan gaya bahasa dialek daerah, sekarang umumnya telah menggunakan bahasa Indonesia, tetapi oleh karena pers mempunyai ruangan terbatas, maka kepala berita untuk menarik perhatian, dilihat dari sudut bahasa ada beberapa yang kurang sesuai dengan pembakuan umum.

Cara penyusunan kepala berita merupakan ciri khusus bagi surat kabar.

Gaya bahasa dalam pers memerlukan syarat daya guna dan hasil guna tinggi, di mana diperlukan susunan yang singkat, padat, dan jelas juga berlaku bagi pers Indonesia.

Pers Indonesia sebagai media komunikasi massa menggunakan bahasa sebagai sarana, juga ikut mendukung pengembangan dalam arti penyempurnaan bahasa Indonesia, yaitu dengan memuat ulasan ataupun menyediakan ruang pembinaan bahasa Indonesia sebagai upaya untuk menyebarluaskan pembakuan yang telah disepakati bersama oleh para ahli di samping sebagai usulan-usulan yang perlu diperhatikan oleh para ahli bahasa. Menurut pengamatan saya, sedemikian jauh tidak terdapat kecenderungan pers nasional kita yang dapat merugikan pertumbuhan bahasa Indonesia, bahkan sebaliknya pers Indonesia senantiasa menjadi pendukung bagi penyebaran usaha penyempurnaan bahasa.

b. *Media Radio*

Radio Republik Indonesia dengan 49 buah stasion di seluruh Indonesia menyelenggarakan siaran menyebarluaskan kebijaksanaan pembangunan nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar.

Komunikasi dengan sarana bahasa Indonesia cukup dimengerti secara luas oleh masyarakat. Namun karena tujuan penerangan adalah agar isi penerangan dapat dipahami oleh masyarakat luas, maka RRI masih menyediakan penyiaran berita dalam bahasa daerah. Dari 49 Stasion RRI, 41% menyiarkan warta berita dengan bahasa daerah di samping menggunakan bahasa Indonesia, karena waktu penyiaran terbatas, yaitu antara 10 hingga 15 menit setiap hari.

Siaran pedesaan dan siaran-siaran lokal masih menggunakan bahasa daerah, baik sebagian maupun keseluruhannya, atau menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek daerah. Karena siaran-siaran ini ditujukan untuk masyarakat yang setiap harinya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Bahasa Indonesia yang baik harus digunakan di dalam siaran RRI, sehingga dapat dijadikan patokan oleh media massa lainnya.

Radio non RRI yang jumlahnya lebih dari 560 buah stasion lokal dan tersebar di seluruh Indonesia, dalam siarannya masih ada yang menggunakan bahasa Indonesia yang kurang sempurna.

Di dalam pengantar siaran sering digunakan bahasa percakapan sehari-hari yang kurang mengindahkan pembakuan. Untuk mengatasi hal tersebut, di setiap wilayah telah kita ada-kan Badan Pembina Siaran Radio Non Pemerintah, secara fungsional melakukan himbauan dan pembinaan agar mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik.

c. *Media Televisi*

Televisi merupakan media komunikasi massa muda usia, memiliki sifat-sifat khusus sebagai media yang cepat dapat langsung didengar dan dilihat.

Pengelolaan televisi di Indonesia hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, maka sejak semula penggunaan bahasa selalu diusahakan agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siaran televisi Indonesia sangat berjasa dalam menyebarkan bahasa persatuan guna mengembangkan jiwa kesatuan yang lebih kokoh. TVRI sebagai sarana komunikasi juga berfungsi mengadakan pembinaan bahasa karena di dalam siaran TVRI diadakan terus-menerus acara pembinaan bahasa Indonesia. Siaran televisi yang menggunakan bahasa daerah semata-mata hanya suatu pelengkap untuk mencerminkan kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Penggunaan bahasa Indonesia, di dalam siaran Televisi Republik Indonesia semakin ditingkatkan sehingga seni budaya daerah yang disajikan dengan menggunakan bahasa nasional dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

d. *Media Film*

Film Indonesia dewasa ini pada umumnya telah menggunakan bahasa yang cukup baik.

Film Indonesia terutama yang bertema hiburan, yang hanya ingin memancing tertawa para penonton, seringkali menggunakan bahasa kurang baik, bila dilihat dari tata bahasanya tetapi dari segi komunikasi memenuhi syarat karena mudah dimengerti. Permasalahan ini juga dialami media-media lain.

Dari beberapa penyorotan tentang penggunaan dan pengem-

bangun bahasa Indonesia dalam media komunikasi, dapat disimpulkan bahwa media komunikasi telah menggunakan bahasa Indonesia yang cukup mendorong bagi terbinanya bahasa Indonesia dengan baik.

Media komunikasi cukup sadar tidak ingin menciptakan penyimpangan bahasa Indonesia yang mendasar dan tidak terdapat kecenderungan media massa untuk tidak menggunakan kaidah bahasa yang baku, bahkan sekarang ini tidak ada media massa mengembangkan bahasa "Indonesia pasar" seperti halnya di masa lampau.

Bagaimana kita mengembangkan pertumbuhan bahasa Indonesia selaku produk kebudayaan dan pendukung proses komunikasi sosial adalah masalah kita bersama. Para ahli bahasa perlu mempererat hubungan dan dukungan timbal balik dengan dunia komunikasi sosial, sehingga setiap penyempurnaan bahasa Indonesia akan segera tersebar luas dalam masyarakat.

3. Saya juga perlu menjelaskan peranan bahasa dalam komunikasi langsung antar pribadi.

Di dalam proses komunikasi langsung, pada umumnya kita telah mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kata-kata yang berasal dari bahasa asing biasanya digunakan jika memang belum terdapat padanan dalam bahasa Indonesia yang tepat. Apabila terdapat sedikit penyimpangan terutama di dalam pengucapan lisan, kemungkinan disebabkan oleh suatu kebiasaan yang memang sukar untuk diubah, namun hal tersebut bukan merupakan suatu penyimpangan yang mendasar. Dibandingkan dengan lima, sepuluh atau lima belas tahun lalu, penggunaan bahasa asing yang kurang perlu dewasa ini pemakaiannya sudah berkurang. Satu hal yang ingin saya kemukakan ialah mengenai makin banyaknya penggunaan bahasa-bahasa singkatan atau akronim.

Di dalam proses komunikasi, baik lisan maupun tertulis penggunaan akronim nampak makin banyak di kalangan kita. Dari segi komunikasi, penggunaan bahasa akronim dapat menolong memudahkan penyebutan terhadap pengertian tertentu. Tetapi di samping itu dirasakan bahwa komunikasi menjadi terhambat karena adanya suatu akronim sehingga isi komunikasi menjadi terputus.

Pada umumnya menurut pandangan saya penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi, telah mengalami kemajuan sejalan dengan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri.

Dalam perkembangan pembinaan bahasa Indonesia dewasa ini saya melihat bahwa para ahli bahasa demikian tekun berupaya untuk lebih menyempurnakan bahasa Indonesia sesuai dengan disiplin ilmiah, sedangkan masyarakat pemakai bahasa Indonesia juga telah menunjukkan niat baik untuk menggunakannya secara benar, walaupun demikian kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan lain karena bahasa merupakan hasil proses budaya bangsa yang senantiasa berkembang.

Sumbangan Jajaran Penerangan dalam Pengembangan Bahasa Indonesia

Peranan Departemen Penerangan dan jajaran penerangan dalam pengembangan bahasa Indonesia, didasarkan atas fungsi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 55A/KEP/MENPEN/1975 yang meliputi 4 fungsi utama, yaitu :

1. Memantapkan pembinaan kesatuan, persatuan dan jiwa Bangsa.
2. Mensukseskan Pembangunan Nasional melalui Repelita.
3. Menggalang Ketahanan Nasional bagi terwujudnya Stabilitas Nasional.
4. Tugas-tugas khusus yang beruang lingkup nasional.

Dalam hubungan dengan fungsi pertama, yaitu memantapkan pembinaan kesatuan, persatuan dan jiwa bangsa, maka UUD 1945 telah menggariskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang rakyatnya terdiri dari sejumlah suku bangsa, adat istiadat dengan tradisi kehidupannya masing-masing, hidup dalam semangat kesatuan dan persatuan sebagai satu bangsa.

Pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia harus mencakup manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai semangat persatuan sebagai satu bangsa. Oleh karena itu pembangunan yang sedang dilaksanakan pada hakekatnya adalah pembangunan semangat atau sikap kejiwaan manusia Indonesia seutuhnya dengan tata nilai berdasarkan Pancasila. Membangun sikap kejiwaan berdasarkan Pancasila adalah membangun budaya nasional dengan dukungan unsur-unsur budaya daerah dalam perwujudan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam hubungan kebijaksanaan tersebut, khususnya dalam pengem-

bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan, kesatuan dan jiwa bangsa, Departemen Penerangan melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Kebijakanaksanaan ke dalam.

Kebijaksanaan ini mengharuskan setiap pejabat Departemen Penerangan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; baik dalam surat-menyurat maupun dalam komunikasi lisan. Kebijakanaksanaan ini terus diterapkan sampai kepada aparat terbawah yang melaksanakan operasional penerangan di dalam masyarakat.

2. Penerbitan Khusus Untuk Daerah Pedesaan (PKUDP) yang dilaksanakan pada awal Pelita II, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, mempunyai tujuan, antara lain membantu pemberantasan buta huruf gaya baru, yaitu buta huruf Latin, *buta bahasa Indonesia*, buta pengetahuan dasar dan buta informasi.

PKUDP ini selanjutnya ditingkatkan menjadi Program Koran Masuk Desa (KMD) yang diatur dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 203A/KEP/MENPEN/1979. Dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 203A/KEP/MENPEN/1979 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan KMD adalah "Pemerataan memperoleh pendidikan, dalam hal ini pendidikan non formal melalui media pers sebagai sarana pendidikan umum yang murah dan efektif".

3. Dalam setiap pendidikan yang dilaksanakan Departemen Penerangan, baik pendidikan jenjang maupun teknis/khusus, pada kurikulumnya selalu dicantumkan pelajaran Bahasa Indonesia dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Pusat dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat wilayah.

4. Setiap tahun Departemen Penerangan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan festival pertunjukan tradisional (sosiodrama) dalam rangka pembinaan kesenian rakyat yang komunikatif. Salah satu persyaratan bagi peserta adalah bahwa naskah dan dialog harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar pertunjukan rakyat yang tumbuh dan

berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat lebih memasyarakatkan secara nasional, sehingga setiap suku bangsa di Indonesia mengetahui dan menghayati kebudayaan suku bangsa lainnya.

5. Dalam kaitan izin produksi film, Direktorat Bina Film Departemen Penerangan selalu memberikan pengarahan kepada produser agar di dalam memproduksi film senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
6. Menyadari bahwa komunikasi merupakan bidang yang sangat penting di dalam kehidupan, maka peranan komunikasi itu menjadi lebih penting lagi di tengah usaha bangsa kita dalam pembangunan nasional dewasa ini.

Bersamaan dengan peningkatan komunikasi dalam kehidupan kita, ilmu dan praktek komunikasi juga berkembang terus selaras dengan usaha peningkatan kesadaran orang akan pentingnya bidang itu. Salah satu sektor yang menjamin terus perkembangan dan pemantapan komunikasi ialah bidang tata istilah. Walaupun bahasa Indonesia sudah dipakai dalam berbagai bidang kehidupan dan cabang ilmu pengetahuan selama lebih kurang setengah abad, namun dalam bidang ilmu dan praktek komunikasi tata istilah belum dikembangkan secara sistematis. Di bidang ini penggunaan istilah didasarkan semata-mata pada pertimbangan "bagaimana praktisnya saja" dan orang menggunakan istilah yang beraneka ragam untuk mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat tertentu dalam bidang komunikasi. Di samping itu kebiasaan mempergunakan bahasa asing pun masih ada.

Pemakaian dan penggunaan aneka istilah dapat mengungkapkan hal-hal yang berbeda; dengan kata lain belum ada pembakuan istilah di bidang komunikasi dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan penjelasan makna atau arti istilahnya. Keadaan demikian ini menimbulkan berbagai macam kesulitan, kepincangan, kesalahpahaman, baik bagi ilmuwan maupun bagi praktisi dalam melakukan tugasnya.

Pengembangan komunikasi di negara kita dapat dipisahkan dari perkembangan bahasa nasional, sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat bangsa yang merdeka. Dilandasi keyakinan bahwa ilmu dan praktek komunikasi dapat dimantap-

kan serta dikembangkan, Departemen Penerangan mengambil prakarsa menyusun sebuah LEKSIKON (Daftar Istilah Kamus Sederhana) sebagai usaha untuk membakukan peristilahan, yang dapat dijadikan pegangan bagi praktisi dan ilmuwan di bidang komunikasi.

Berdasarkan pendirian tersebut Departemen Penerangan menjalin kerjasama dengan Lembaga Linguistik Fakultas Sastra Universitas Indonesia untuk inventarisasi dan menyusun perangkat istilah komunikasi lengkap dengan padanannya serta deskripsinya dalam bahasa asing. Kegiatan pengembangan ini telah dilakukan beberapa lama melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahun 1977 : Penyusunan Leksikon Komunikasi Edisi Pertama.
2. Tahun 1979 : Edisi Kedua dengan perbaikan dan penyempurnaan.
3. Tahun 1981 : Kedua Edisi tersebut diketengahkan dalam suatu Lokakarya ke I yang menghasilkan Edisi III.
4. Edisi ke III ini menjadi bahan pengkajian Team Perumus yang terdiri dari kelompok-kelompok Umum, Pers, Grafika, Radio-Televisi dan Film.
5. Hasil pekerjaan Team Perumus dimaksud, disajikan dalam Lokakarya ke II tahun 1982.
6. Perbaikan, penyempurnaan dan penambahan oleh peserta Lokakarya ditampung dan disunting oleh suatu Panitia Pengelola. Hasil akhir hingga saat ini telah tersusun sekitar 1500 istilah komunikasi yang meliputi bidang-bidang :

1. umum,
2. pers,
3. grafika,
4. radio-televisi,
5. film..

Tindak lanjut yang digariskan Lokakarya ke II dan perlu dilaksanakan sekarang adalah mengadakan uji coba sebelum istilah-istilah dalam Leksikon Komunikasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat. Pada kesempatan Kongres Bahasa ini dengan senang hati saya menyerahkan hasil sementara penyusunan Leksikon

Komunikasi Indonesia kepada para ahli bahasa untuk mendapat telaahan agar lebih mantap sebelum disebarluaskan kepada masyarakat.

Penutup

Saya perlu menggarisbawahi pada penutup uraian ini agar kita bersama-sama senantiasa meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bertanggung jawab.

Demikian pula halnya dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sosial, marilah kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta mencegah penyimpangan pemakaian bahasa yang tidak perlu. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengandung dinamika tinggi, karenanya kita berkewajiban menjaga agar dinamika itu tetap bergerak di dalam ruang lingkup pembakuan yang sebenarnya. Ini tidak berarti kita harus melakukan pengekanan, yang perlu dilakukan ialah pengembangan bahasa dalam kerangka pemikiran pembangunan budaya nasional.

Di bidang komunikasi, saya mengharapkan agar para ahli bahasa dapat membuat bahasa Indonesia untuk menampung perkembangan dan kebutuhan, hal tersebut perlu diungkapkan karena dewasa ini di dunia komunikasi telah terjadi perkembangan dan kemajuan yang cepat akibat penemuan teknologi-teknologi baru, sehingga dalam kita memberikan komunikasi dan penerangan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, tepat dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Saya percaya, para ahli bahasa telah siap dengan konsepsi-konsepsi pengembangan bahasa Indonesia yang akan dibahas di dalam Kongres Bahasa ke IV sekarang ini, sejalan dengan derap Pembangunan Nasional yang semakin cepat kemajuannya. Di bidang pengembangan bahasa senantiasa berpangkal tolak dari Strategi Pembangunan Nasional yaitu, bahwa pada Pelita ke IV nanti kita akan meletakkan landasan pembangunan yang kokoh, dalam rangka memantapkan Pelita V, sehingga pada Pelita ke VI dapat mencapai momentum pengembangan bahasa dengan landasan yang makin kokoh.

Saya menilai pola pikir strategi pembangunan nasional telah menjiwai pemikiran para ahli bahasa yang terus sibuk mengadakan usaha penyempurnaan. Hal ini berarti pula melakukan pembangunan, karenanya pengembangan bahasa Indonesia, dalam kita mengisi cita-cita kemerdekaan bangsa

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 senantiasa menjadi perhatian kita bersama.

Akhirnya saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga Kongres Bahasa Indonesia ke IV dapat mencapai hasil yang diharapkan demi peningkatan kemajuan Nusa, Bangsa dan Negara.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 22 Nopember 1983

PENGUNAAN BAHASA INDONESIA DI LINGKUNGAN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMNIKASI, DAN DI DALAM LALU LINTAS KEGIATAN KEDINASAN SEHARI--HARI

Achmad Tahir

Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi

Pendahuluan

Pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada departemen kami Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dapat menyampaikan sebuah kertas kerja pada Kongres Bahasa Indonesia IV ini.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (selanjutnya kami singkat PPPB) selaku penyelenggara kongres ini membatasi permasalahan yang hendak kami kemukakan pada hal-hal yang berakitan erat dengan tugas kami sehari-hari di departemen. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang hendak kami bahas dibagi dalam dua bagian. Pertama, penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan pariwisata, pos dan telekomunikasi. Kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam lalu lintas kegiatan sehari-hari.

Permasalahan yang dibahas dikaitkan dengan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan umum.

Agar kertas kerja ini lebih sederhana dan lebih mudah diikuti, maka pendapat dan saran kami mengenai permasalahan yang dikemukakan langsung kami sertakan sebagai bagian atau mengikuti pembahasan. Mengingat panjang halaman yang ditentukan panitia bagi kertas kerja ini hanya sekitar 20 halaman, maka pembahasan kami tujukan kepada hal-hal yang kami pandang penting untuk diketengahkan. Intisari pembahasan dan saran-saran kami sajikan dalam bab Kesimpulan.

Penggunaan Bahasa Indonesia di Lingkungan Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

a. Pariwisata

1) Sebutan-sebutan di lingkungan Kepariwisata dan Gejala Penyingkatan

Sebutan "*pariwisata*" sebagai sebutan *tourism* dalam bahasa Inggris bersumber dari *tiga bahasa*, yakni Sansekerta, Kawi dan Jawa. Dalam bahasa Sansekerta, *pari* adalah suatu awalan yang berarti: di sekitar, dari semua penjuru, dalam segala hal. Sedangkan *wisata* berasal dari bahasa Kawi, berarti *pergi*. Maka ahli-ahli bahasa kita seperti Amin Singgih dan J.S. Badudu sepakat mengartikan pariwisata sebagai "*pergi berkeliling*".

Pada waktu akhir-akhir ini banyak muncul gabungan kata dalam bahasa Indonesia dengan kata pertama wisata sebagai padanan dari sebutan-sebutan dalam bahasa Inggris :

<i>Marine tourism</i>	— <i>wisata bahari</i>
<i>Religion touris</i>	— <i>wisata ibadah</i>
<i>Hunting tourism</i>	— <i>wisata buru</i>
<i>Cultural tourism</i>	— <i>wisata budaya</i>
<i>Youth tourism</i>	— <i>wisata remaja</i>
<i>Tourist product</i>	— <i>produk wisata</i>
<i>tourism destination area</i>	— <i>daerah tujuan wisata.</i>

Jadi segala sebutan *tourism* dan *tourist* dalam bahasa Inggris dialihkan menjadi *wisata* dalam bahasa Indonesia.

Bahari, ibadah, berburu, dan budaya adalah obyek yang dilihat atau dituju oleh para wisatawan.

Tapi *remaja* dan *domestik* dalam pengertian di atas bukan objek yang dilihat atau dituju tapi jenis wisatawan yang melakukannya.

Maka sebutan yang tepat kami kira adalah wisatawan remaja (bukan wisata remaja) dan wisatawan domestik (bukan wisata domestik). Demikian juga padanan yang tepat untuk *tourist destination area* adalah "daerah tujuan wisatawan", bukan "daerah tujuan wisata".

Mengingat terjemahan *tourism* adalah pariwisata, maka sebutan nama-nama yang lain itu seharusnya adalah: *pariwisata bahari, pariwisata ibadah, pariwisata buru* dan *pariwisata budaya*. Masalahnya sekarang, samakah pengertian *pariwisata* dengan *wisata*?

Kecenderungan memperpendek kata-kata tertentu merupakan salah satu gejala yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari sekarang ini.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Pariwisata ada direktorat yang diberi nama: *Direktorat Bina Perjalanan Wisata*; *Direktorat Bina Akomodasi dan Aneka Wisata*.

Demikian pula di beberapa departemen lain digunakan sebutan bina, seperti: *Direktur Bina Sarana Usaha*, *Direktur Bina Produksi*, *Direktur Bina Kewiraswastaan*.

Namun di berbagai departemen lain, sebutan yang digunakan bukan bina tapi *pembinaan* seperti: *Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat*, *Direktur Pembinaan Kesenian*, *Direktur Pembinaan Kesiswaan*.

Ada pula departemen yang selain menggunakan sebutan bina, juga menggunakan sebutan *pembinaan*.

Di Departemen Penerangan, selain ada *Direktur Pembinaan Hubungan Masyarakat*, ada pula *Direktur Bina Wartawan*. Departemen Tenaga Kerja mempunyai Direktorat Jenderal yang menggunakan sebutan *bina*, yakni *Direktorat Jenderal Binalindung Tenaga Kerja* dan *Direktorat Jenderal Binaguna*. Tapi direktorat-direktorat yang berada di bawahnya menggunakan sebutan *pembinaan*, seperti : *Direktorat Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan*, *Direktur Pembinaan Norma Perlindungan Tenaga Kerja*, *Direktur Pembinaan Program Tenaga Kerja*, *Direktor Pembinaan Keahlian Kejuruan Tenaga Kerja*. Ini mengesankan seolah-olah pengertian *bina* lebih umum dari *pembinaan*.

Nampak bahwa di lingkungan pemerintahan sendiri tidak ada keseragaman penggunaan sebutan. Hal ini hendaknya dapat ditertibkan karena sebutan yang berbeda-beda tersebut membingungkan bagi para pencinta bahasa Indonesia dan juga bagi orang-orang asing yang tengah mempelajari bahasa Indonesia.

Menurut pendapat kami sebutan yang tepat pada nama-nama jabatan tersebut adalah *pembinaan*, bukan *bina*. Ada kecenderungan menyederhanakan sebutan *pembinaan* menjadi *bina* (seperti juga pariwisata menjadi wisata), adalah karena :

- a) Terpengaruh oleh bahasa pers yang cenderung mengembalikan kata imbuhan kepada kata dasarnya terutama pada judul-judul berita (disebabkan terbatasnya kolom halaman yang tersedia).
- b) Terpengaruh oleh kecenderungan penyingkatan kata-kata yang tengah berjangkit sekarang, seperti :

informasi	—	info
memorandum	—	memo
lokomotif	—	lok
helikopter	—	helli.
- c) Terpengaruh oleh keinginan untuk memilih sebutan yang enak dan praktis (*euphony*)
- d) Ikut-ikutan.

Dan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan (dulu Penertiban) Aparatur Negara (MENPAN) selaku lembaga kenegaraan yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan struktur dan organisasi departemen tidak pula menyaring sebutan-sebutan tersebut menurut pengertian bahasa Indonesia yang benar.

2) *Penggunaan Kata-kata Asing*

Sebutan-sebutan dalam bahasa asing banyak digunakan di lingkungan perhotelan, terutama hotel-hotel berbintang. Malahan nama-nama petugas dan bagian-bagian yang ada di dalam hotel menggunakan sebutan-sebutan bahasa Inggris, seperti: *manager, room boy, bell boy, servant, receptionist, front office, house keeping, breakfast, laundry, room rate, service charge, lavatory, bill, lobby*.

Sebutan-sebutan asing ini juga banyak digunakan di lingkungan biro-biro perjalanan. Penggunaan sebutan-sebutan asing ini semula dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan-wisatawan asing untuk berkomunikasi. Tetapi, seperti sering diemukakan di media massa, banyak orang yang berkeberatan dengan sebutan-sebutan asing itu. Alasannya, sebagian besar pengunjung hotel itu pada umumnya orang Indonesia dan tidak semua wisatawan itu tahu bahasa Inggris.

Selain itu, penggunaan sebutan-sebutan yang "serba asing" itu mengesankan seolah-olah kita berada di Inggris atau Amerika, tidak di tanah tumpah darah Indonesia sendiri.

Masing-masing pihak yang berbeda pendapat mengenai ini tentu mempunyai alasan dan dalihnya masing-masing. Namun yang terang,

penggunaan sebutan-sebutan asing itu tidaklah didasarkan atas sesuatu instruksi dari pemerintah. Kami setuju upaya memasyarakatkan bahasa Indonesia dalam segala bidang kegiatan kehidupan hendaknya lebih digalakkan; penggunaan sebutan-sebutan asing dibatasi pada hal-hal yang penting saja atau menyangkut sebutan-sebutan yang sulit mencari padanannya dalam bahasa Indonesia tanpa merubah pengertian sebenarnya.

Agar supaya itu memberikan hasil yang maksimal, kami sarankan :

- a) Dikeluarkan suatu instruksi atau keputusan pemerintah, umpamanya dalam bentuk Keputusan Presiden (KEPPRES) mengenai pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia hingga mempunyai kekuatan hukum dan mengikat lembaga-lembaga pemerintah serta aparat-aparat negara untuk mengindahkannya.
- b) PPPB hendaknya lebih tanggap mengikuti perkembangan terjadinya "penyelusupan-penyelusupan" kata-kata sing baru dalam komunikasi dan percakapan sehari-hari masyarakat kita (seperti dapat diketahui melalui media massa yang ada), cepat-cepat mencarikan dan mempublikasikan padanannya dalam bahasa Indonesia.

Patut dihargai ikhtiar yang dilakukan PPPB pada akhir-akhir ini yang menyebarluaskan himpunan "kata-kata baru" melalui pers. Tapi publikasi yang dilakukan itu kami anggap belum cukup memadai, baru sebagian kecil masyarakat saja yang sempat mengetahuinya. Usaha pemasyarakatan kata-kata baru tersebut (sebagian merupakan padanan kata-kata asing yang sedang populer dalam masyarakat) hendaknya dapat semakin diperluas, tidak saja melalui pers, tapi juga melalui jalur-jalur komunikasi lainnya.

Amat sayang, publikasi padanan kata-kata yang dilakukan PPPB melalui pers tersebut, selain kurang juga agak kasep diterima masyarakat. Sesuatu kata asing sudah demikian populer ditulis atau diucapkan orang, baru keluar padanan katanya dari PPPB. Hingga orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan kata-kata asing tersebut merasa berat menggantinya dengan padanan kata itu.

Dewasa ini sering kita dengar atau kita baca sebutan-sebutan dalam bahasa Inggris, seperti: *catering, clain pulsa, cleaning service, filter, foto copy, overhead projector, real estate, search and rescue (SAR), stabilo, tissue, video*. Tidak kunjung masyarakat dapat

mengetahui padanan katanya, maka dapat diperkirakan lama-kelamaan masyarakat akan memperlakukan statusnya sebagai "warga bahasa Indonesia".

b. Pos dan Telekomunikasi

Menyangkut penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan pos dan telekomunikasi, ada tiga hal yang ingin kami ketengahkan dalam kertas kerja ini, yakni: gabungan kata, penyingkatan kata-kata, dan penggunaan kata asing.

1) *Gabungan Kata*

Di lingkungan pos sudah menjadi kebiasaan gabungan kata yang berkaitan dengan pos banyak yang ditulis serangkai, seperti: bendapos, bulkpospaket, kantongpos, kantorpos, monopolipos, peralatanpos, rumahpos, tromolpos. Baik di lingkungan pos, maupun di lingkungan telekomunikasi, nama-nama kota atau tempat ditulis serangkai, seperti *Pematangsiantar*, *Padangpanjang*, *Tanjungkarang*, *Tulungagung*, *Palangkaraya*, *Ujungpandang*.

Menurut ketentuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (selanjutnya kami singkat PUEBI saja), gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus bagian-bagiannya umumnya ditulis terpisah. Hanya gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai.

Petunjuk yang diberikan PUEBI, menurut hemat kami tidak cukup jelas. Orang dapat memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan "kata majemuk", "istilah khusus", dan "sudah dianggap satu kata" itu. Maka agaknya baik bila PPPB mempertimbangkan kembali pendapat sebagian ahli bahasa Indonesia (seperti Dra. Sitti Chamdiah dalam bukunya *Teori Bahasa Indonesia*, yang antara lain juga digunakan oleh Harian Kompas, seperti dapat dilihat pada tajuk-tajuk rencananya) bahwa untuk memudahkan dan mempercepat penulisan, serta untuk mengurangi keragu-raguan, sebaiknya semua gabungan kata, baik yang asli, yang diberi imbuhan ataupun yang berulang, dituliskan serangkai saja semuanya.

Dengan demikian penulisan gabungan-gabungan kata yang sudah lama diterapkan di lingkungan pos dan telekomunikasi itu tidak menyalahi ketentuan-ketentuan penulisan bahasa Indonesia.

2) *Penyingkatan Kata-kata*

Seperti juga di lingkungan lainnya, di lingkungan pos dan telekomunikasi telah lama menjadi kebiasaan untuk menyingkat kata, terutama kata-kata khas pos dan telekomunikasi yang sering digunakan dalam lalu lintas pekerjaan sehari-hari. Namun singkatan itu biasanya huruf pertamanya saja yang huruf besar, selebihnya huruf kecil.

Misalnya: *Kptb Bandungsetibudi* : Kantor Pos Tambahan Jalan Setia Budi Bandung.

Kdpos I Jakarta: Kepala Daerah Pos dan Giro I Jakarta.

Jtupos Suratno : Juru Tata Usaha Pos Suratno.

Diroppos : Direktur Operasi Pos.

Diruttel : Direktur Utama Perusahaan Umum Telekomunikasi.

Dirmudadpegtel: Direktur Muda Tata Usaha & Kesejahteraan Personil PERUMTEL.

Pusdiklatbangtel: Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan PERUMTEL.

Pinprosarpen : Pimpinan Proyek Sarana Penunjang.

Agaknya orang-orang yang bekerja di lingkungan PERUM Pos dan Giro dan PERUMTEL saja yang paham dengan singkatan-singkatan tersebut. Kami setuju tiap-tiap instansi atau jawatan yang besar seperti halnya PERUM Pos & Giro dan PERUMTEL tersebut membuat singkatan-singkatan untuk memudahkan hubungan kerja antara sesama mereka.

Tapi singkatan-singkatan tersebut hendaknya hanya berlaku untuk kalangan mereka saja, sedangkan pers umpamanya tidak perlu ikut-ikutan mengutipnya.

Di dalam kenyataan, singkatan-singkatan tersebut sering kita lihat muncul di surat-surat kabar hingga cenderung untuk memasyarakat (karena pers-pun rupanya menyenangi sebutan yang pendek dan praktis). Yang menyedihkan lagi singkatan-singkatan tersebut juga diucapkan oleh penyiar radio dan televisi. Hal ini ikut mendorong lahirnya macam-macam singkatan dalam lalu lintas sehari-hari penggunaan bahasa Indonesia yang dapat membingungkan para pemakai bahasa (karena demikian banyaknya).

Sungguhpun kami menyetujui jawatan atau instansi membuat

singkatan-singkatan yang berlaku untuk kalangan mereka sendiri, namun kami menyarankan agar PPPB mengeluarkan semacam "pedoman umum penyingkatan" bagi mereka hingga singkatan-singkatan yang dilahirkan (terutama instansi resmi) didasarkan atas patokan yang berlaku umum itu.

3) *Penggunaan Kata-kata Asing*

Kemajuan pesat yang dicapai Indonesia dalam bidang pertelekomunikasian pada dasawarsa yang lalu telah melahirkan pula aneka ragam sebutan asing. Banyak di antara sebutan asing itu yang hingga kini tetap dituliskan dan diucapkan dalam bentuk aslinya tanpa banyak muncul kata padanannya dalam bahasa Indonesia.

Misalnya: *circuit switching, digital, direct dialing, facsimile, gentex, kabel coaxial, metaconta, PABX, radio-sonde, remote control, terrestrial.*

Kami menyadari bahwa penyusupan kata-kata asing dalam bahasa Indonesia melalui sebutan-sebutan telekomunikasi hanya merupakan bagian terkencil saja, karena seluruh bidang teknik dan keilmuan disusupi oleh sebutan-sebutan asing. Hendaknya juga dikeluarkan suatu "pedoman umum pengalihan kata-kata asing ke dalam bahasa Indonesia" seperti halnya "pedoman umum penyingkatan" yang kami sarankan di atas. Yang sudah ada pedomannya di dalam PUEBI adalah penulisan unsur serapan bahasa asing sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia.

Dalam kaitan ini kiranya perlu dipertimbangkan gagasan Prof. Ir. Herman Johannes bahwa awalan-awalan dan akhiran-akhiran tertentu di dalam bahasa Inggris ditentukan padanannya dalam bahasa Indonesia.

Beberapa contoh :

- a) Awalan *a-*, *an-*, *in-*, *non-* dan akhiran *-less* serta bentuk-bentuk lain yang berarti tanpa atau tidak memiliki, diberi awalan *nir* dalam bahasa Indonesia.

<i>apathy</i>	—	nirasa
<i>anonymous</i>	—	nirnama
<i>inanimate</i>	—	nirnyawa
<i>nondegree</i>	—	nirgelar
<i>voiceless</i>	—	nirsuara

- b) Yang berpengertian "kurang" diterjemahkan menjadi "tuna", seperti :
- | | | |
|-----------------|---|------------|
| <i>deaf</i> | — | tunarungu |
| <i>amoral</i> | — | tunasusila |
| <i>roofless</i> | — | tunawisma |
- c) Awalan *an-*, *in-*, atau *non-* yang berarti bukan diterjemahkan menjadi tan
- | | | |
|------------------|---|------------|
| <i>nonmetal</i> | — | tanlogam |
| <i>inorganik</i> | — | tanorganik |
- d) Awalan *a-*, *ab-*, *il-*, *im-*, *in-*, *ir-*, *un-*, *non-*, *de-*, dan *dis* yang berarti tidak diterjemahkan menjadi *tidak*.
- | | | |
|----------------------|---|------------|
| <i>asosial</i> | — | taksosial |
| <i>abnormal</i> | — | takbiasa |
| <i>impure</i> | — | taksuci |
| <i>insufficient</i> | — | takcukup |
| <i>irregular</i> | — | takteratur |
| <i>non-essential</i> | — | takpenting |
| <i>unable</i> | — | taksanggup |
| <i>discontent</i> | — | takpuas |
- e) Awalan *nara-* dipakai untuk menterjemahkan sebutan "person" dalam bahasa Inggris.
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| <i>convicted person</i> | — | narapidana |
| <i>resource person</i> | — | narasumber |
- f) Akhiran *-en*, *-and*, dan *ent* yang berarti *di.....kan* atau sebutan-sebutan yang mengandung arti demikian diterjemahkan dengan menggunakan sisipan *-in-*
- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| <i>addent</i> | — | tinambah |
| <i>divident</i> | — | binagi |
| <i>integrant</i> | — | rinangkum |
| <i>son in law</i> | — | minantu |

Pengalihan dengan cara demikian dimaksudkan agar padanan Indonesia atas kata-kata asing itu lebih rasional dalam rangka ketepatan, keseragaman, kesedapan bunyi dan keringkasannya.

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Lalu Lintas Kegiatan Kedinasan Sehari-hari

a. Surat-menyurat

1) Sebutan "*Yang Terhormat (Yth)*"

Dalam surat-menyurat, baik surat biasa maupun surat dinas (termasuk nota dinas dan memo), masih lazim menggunakan sebutan *Kepada Yth.* untuk sialamat yang dituju.

Arti awalan *ter* dalam sebutan tersebut adalah *sangat* atau *pa-ling* (bentuk superlatif). Berarti *Yang Ter* tersebut hanya *satu* dari semua yang dituju (tingkatan yang ada).

Dalam praktek berbahasa sehari-hari sebutan itu digunakan untuk semua orang. Bahkan surat seorang atasan yang ditujukan kepada bawahannya juga menggunakan sebutan *Kepada Yth.* Jadi tidak cocok dengan hakekat pengertian yang sebenarnya.

Sehubungan dengan itu, kami menyarankan agar sebutan sopan-santun yang sudah lazimkan itu tidak lagi dipakai dalam surat-menyurat maupun pidato-pidato, Untuk menyatakan rasa hormat kepada sejumlah bapak tertentu di dalam pertemuan-pertemuan, agaknya lebih tepat menggunakan sebutan "*Yang dihormati ...*" kepada masing-masing bapak tersebut, daripada menyebut "*Yang terhormat...*"

Demikian juga di dalam alam kemerdekaan dan demokrasi sekarang ini, rasanya cukup sopan menyebut "*Kepada ...*" saja. Untuk mengungkapkan rasa hormat kita, maka dapat dicantumkan sebutan "*Dengan hormat*" pada alinea pertama surat (yang justru banyak dihapuskan dalam surat-surat dinas sekarang).

Jadi contoh surat yang kami sarankan tersebut adalah demikian :

Dengan hormat 	Kepada Bapak di
-----------------------------------	---

2) Kerangka Surat Dinas

Hingga saat ini belum kita lihat adanya keseragaman kerangka surat-surat dinas di lingkungan pemerintah. Lihat saja bentuk kepala surat, nomor surat, dan stempel yang beraneka ragam yang dibuat oleh tiap-tiap departemen. Bahkan perbedaan itu juga terjadi antara direktorat-direktorat jenderal di lingkungan departemen yang sama.

Ahli-ahli bahasa kita dari PPPB juga tidak memberikan tuntunan yang persis sama mengenai kerangka surat dinas. Sebagai contoh dapat kami kemukakan bahasa dalam surat PPPB nomor 5/S/KBI/83 tanggal 18 Agustus 1983 yang ditujukan kepada kami berkaitan dengan penulisan kertas kerja ini dapat dilihat, *si lamat* ditempatkan di sebelah kiri, sejajar dengan *nomor surat*, *lampiran* dan *perihal*.

J.S. Badudu dalam bukunya *Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar* memberikan tuntunan, *si* alamat itu ditempatkan di sebelah kanan. Berbeda dengan kebanyakan surat dinas yang kita kenal, sebutan salam pembuka digukakan adalah "Yang Terhormat" (bukan "Kepada Yth"), tanggal surat tanpa didahului nama kota (tempat), antara nama penulis surat dan jabatannya tidak diberi bergaris dan tanpa NIP (tidak pula digunakan huruf-huruf kapital).

Menurut hemat kami, yang ideal adalah bila semua surat dinas mempunyai kerangka dan pola yang baku, tidak berbeda antara departemen yang satu dengan departemen yang lain. Bila ada perbedaan, perbedaan itu tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pola yang baku itu.

b. Penomoran Naskah

Belum pula terlihat adanya keseragaman dalam penomoran naskah, baik naskah dinas maupun naskah ilmiah. Masing-masing penulis menu-rutkan seleranya sendiri-sendiri, yang menunjukkan belum adanya pegangan umum mengenai ini. Kami kemukakan beberapa contoh :

- 1) Penomoran naskah didasarkan atas perselang-selingan bentuk angka dan huruf yang ada, dengan contoh kerangka demikian

I.	
A.	
1.	
a.	
1)	
a)	
(1)	
(a)	
2.	
B.	

- 2) Pola penomorannya sama dengan di atas, tapi dimulai dengan huruf A (bukan angka Romawi I).
- 3) Pola penomoran dimulai dengan Arab 1 (bukan angka Romawi I maupun huruf Arab A).
- 4) Pola penomoran menggunakan salah satu cara di atas, tapi pemilah-an sesudah angka-angka yang bersangkutan ditambah dengan urutan angka-angka.

Contoh :

I.	
A.	
B.	
1.	
1.1.	
1.2.	
1.2.1.	
1.2.2.	
1.2.3.	
2.	
IV.	

- 5) Penggunaan sebutan bab (umpamanya Bab V) dan pemilahan di dalam sub-sub bab menggunakan sebutan paragraf I (umpamanya 12).
- 6) Baik bab maupun sub-sub bab tidak menggunakan nomor.
- 7) Sub-sub judul atau sub-sub bab dimulai dari nomor urutan 01 (biasanya untuk pengantar atau pendahuluan), selanjutnya digunakan nomor urutan 02, 03, 04, setelah no. 9 baru digunakan nomor biasa 10, 11, 12,
- 8) Pemilahan menggunakan tanda-tanda baca tertentu seperti kurung (—), tanda pisah (—), tanda tambah tambah (+) atau tanda bintang (*) bukan

1.	
—	
—	
2.	
*	
+	

- 9) Variasi dari bermacam catra tersebut.

Menurut pendapat kami, masyarakat perlu diberi tuntunan, pola penomoran mana yang baik digunakan sebagai bagian usaha kita untuk membakukan penulisan bahasa Indonesia yang benar. Dan menurut he-

mat kami pola penomoran seperti dicantumkan pada butir 1) di atas adalah yang terbaik.

c. **Penggunaan Huruf Kapital**

Di dalam PUEBI disebutkan bahwa ada 13 jenis kata yang mengharuskan penulisan huruf kapital (huruf besar) pada huruf pertamanya. Tapi di dalam praktek penulisan sehari-hari bahasa Indonesia ada kata-kata yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, yakni :

- 1) Judul buku atau artikel, judul bab dan judul sub bab-sub bab.
- 2) Kata-kata yang dituju atau dianggap penting dalam suatu kalimat.
Contoh: PENJABAT ialah orang yang (pada suatu waktu) menjabat suatu pekerjaan.
- 3) Kata-kata kependekan
Contoh: DEPPEN, KAPERJANKA, DIRJENPAR, KAPUSDIKLAT.
- 4) Nama kota *si alamat*, kata-kata yang dicantumkan pada *perihal*, nama jabatan atau nama penulis surat dalam surat-surat dinas.

Malahan ada kecenderungan naskah-naskah pidato seorang pejabat seluruhnya ditulis dengan huruf kapital (hingga penggunaan huruf kapital pada 13 jenis huruf pertama kata yang digariskan PUEBI itu tidak dapat digunakan untuk naskah pidato itu.

Kami kira PPPB juga perlu memberikan tuntunan mengenai ini.

d. **Penulisan Kata-kata Penting**

Selain dengan menggunakan huruf-huruf kapital, penulisan kata-kata yang dituju atau yang dianggap penting dalam suatu kalimat juga menggunakan cara-cara lain, seperti :

- 1) Merenggangkan huruf-huruf :
Contoh : s e m e s t a.
- 2) Menggarisbawahi (bila tulisan tangan atau ketikan) atau menghikmatkannya (bila huruf cetak). Atau juga dicetak dengan huruf miring.
Contoh : *semesta*
- 3) Menempatkan antara ".tanda petik" atau "tanda petik tunggal"
Contoh : "semesta", 'semesta'.

Karena cara yang bermacam-macam ini, masyarakat pemakai bahasa tulis menjadi ragu, cara apa yang baik dan baku digunakan. Seyogyanya PPPB juga memberikan tuntunan mengenai ini.

e. Penggunaan Sebutan Anda bagi Orang Kedua

Sebenarnya banyak sebutan yang dapat digunakan untuk orang kedua yang setaraf dalam bahasa Indonesia, seperti : *saudara, kamu, engkau, kau*. Tapi dalam pembicaraan yang dianggap "sopan", dirasakan berat menggunakan sebutan-sebutan itu. Sebutan Saudara hanya banyak digunakan dalam surat-menyurat. Maka sebutan yang banyak digunakan biasanya adalah langsung menyebut nama yang bersangkutan atau menggunakan sebutan *Pak* (baik diikuti nama ataupun tidak) walaupun yang diajak bicara tersebut setaraf atau di bawah taraf orang yang mengajak bicara (baik dalam pengertian umur maupun pangkat).

Pada akhir-akhir ini sudah mulai banyak digunakan orang sebutan *Anda* untuk orang kedua tersebut.

Karena sebutan *Anda* ini cukup sopan serta hormat yang dapat digunakan untuk orang kedua yang setaraf maupun tidak setaraf (juga sebagai padanan sebutan *you, jij* atau *situ*), maka kami sarankan agar sebutan *Anda* itu dapat dijadikan sebutan resmi untuk orang kedua serta ditempuh usaha-usaha untuk memasyarakatkannya. Untuk orang kedua jamak, kami kira lama-kelamaan orang akan terbiasa dengan sebutan : *Para Anda, Anda-anda semuanya*, dan lain-lain.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan uraian-uraian kami di atas, maka dalam rangka pembakuan bahasa Indonesia perlu diterbitkan suatu Keputusan Presiden (hingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua instansi dan aparat pemerintah) yang memuat antara lain :

- Pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia;
- Pedoman umum penyingkatan;
- Pedoman umum pengalihan kata-kata asing ke dalam bahasa Indonesia;
- Pedoman umum tata naskah (termasuk di dalamnya pembakuan kerangka surat-surat dinas dan penomoran naskah).

Materi konsep Keputusan Presiden tersebut hendaknya dapat dibahas pada Kongres Bahasa Indonesia IV ini atau pertemuan ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh PPPB yang khusus membahas hal tersebut.

Penutup

Demikian kertas kerja ini kami sampaikan di hadapan Kongres Bahasa Indonesia IV ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kongres ini dan bagi pembinaan bahasa Indonesia pada umumnya.

Jakarta, 20 Oktober 1983.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Singgih, "Bahasa Bangsa Indonesia", NV Harapan Nusa, Jakarta, 1973.
- Badudu, JS, "Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar", PT. Gramedia, Jakarta, 1983.
- Herman Johannes, Prof. Ir., "Gagasan Gaya Bahasa Keilmuan" (dalam majalah "Analisis Kebudayaan", Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Pustaka, Tahun 1, nomor 3), Jakarta, 1980/1981.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan", Balai Pustaka, Jakarta, 1978.
- Siti Chamdiah, Dra. "Teori Bahasa Indonesia", Fa Gadjah Mada, Djakarta, 1970.

ANTARA KENYATAAN DAN HARAPAN

Ki Soeratman

Pengamatan sekilas penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai segi kehidupan dalam masyarakat Jogjakarta sebagai upaya pendahuluan untuk menjadikan anjuran penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar sebagai suatu gerakan.

Pendahuluan

Dalam musyawarah nasional suatu organisasi tertentu salah seorang utusan daerah mengusulkan agar kata "Panitia ad hoc" dengan istilah dalam bahasa Indonesia, adapun "reasoningnya" ialah ... dan seterusnya. Sudah barang tentu usul tersebut mengundang gelak ketawa dari para peserta lainnya, karena adanya hal yang bertentangan. Satu segi usulnya menghendaki agar ada sikap kemurni-murnian, sedang segi yang lain secara tidak sadar dalam pengusulannya itu masih terselip di dalamnya kata "reasoning" yang artinya kurang lebih sama dengan alasan.

Seorang peserta lain yang duduk dekat penulis memberi komentar: "Selain di mimbar bahasa Indonesia dalam TV, sebenarnya di makakah bahasa kita telah digunakan secara baik dan benar?". Komentar itu mendorong penulis untuk merenungkan masalahnya, dan secara sepiantas berpendapat untuk berkecenderungan menyatakan, bahwa dalam masyarakat luas memang hal tersebut belum sepenuhnya kita lakukan.

Fungsi suatu bahasa dalam kehidupan manusia merupakan alat untuk berkomunikasi. Selain itu bahasa juga menjadi sarana untuk menata pola berpikir manusia, di samping itu juga merupakan alat untuk menyatakan rasa indah manusia, yang kemudian berwujud dalam seni-bahasa, kesusastraan dan ungkapan lainnya. Dalam perkembangannya maka bahasa Indonesia

telah melengkapi dirinya dengan berbagai kaidah dan ketentuan-ketentuan baku lainnya sebagai patokan dan pedoman penggunaannya bagi setiap pemakaiannya.

Bangsa Indonesia yang kehadirannya terdiri atas berbagai suku bangsa dan memiliki bahasa daerah masing-masing dalam kehidupan sehari-harinya paling sedikit harus menggunakan dwi-bahasa, ialah bahasa daerahnya dan bahasa persatuannya. Dihubungkan dengan keperluan pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, maka sebagian warga masyarakat wajib memperkaya dirinya dengan berbagai bahasa asing.

Anggapan sebagian bangsa kita bahwa bahasa Indonesia itu mudah, barangkali disebabkan karena bahasa tersebut adalah bahasa sendiri, serta sikap memudahkan (gemampang, Jawa) dalam mempelajari bahasa Indonesia, merupakan salah satu penyebab kurangnya mereka itu memperhatikan kaidah dan ketentuan-ketentuan baku dalam berbahasa Indonesia, sehingga karenanya mereka itu tidak berbahasa secara baik dan benar.

Dalam pergaulan masyarakat mereka lebih mengutamakan fungsi komunikatif dari bahasa, sehingga mereka bukannya mengutamakan untuk berucap secara baik dan benar, melainkan sudah dipandang cukup memadai jika dalam berwawancara itu satu sama lain sudah saling dapat mengerti maknanya. Suatu keganjilan sering terjadi ialah bahwa orang asing yang benar-benar mempelajari bahasa Indonesia dengan tekun, mereka itu akan lebih berkemampuan menggunakan bahasa Indonesia lebih tertib berpedoman kaidah-kaidah yang benar dan menggunakannya secara baik. Hal demikian itu biasa terjadi karena mereka memiliki disiplin yang cukup tinggi dalam menaati kaidah-kaidah bahasa yang dipelajarinya.

Kenyataan yang Kita Hadapi

Sumpah Pemuda 1928 merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia terutama dalam menempa seluruh suku bangsa menjadi satu bangsa Indonesia. Secara khusus maka ikrar untuk menjunjung bahasa persatuan, ialah bahasa Indonesia, merupakan landasan dasar bagi terwujudnya dan proses pengembangan bahasa Indonesia selanjutnya. Tanpa pernyataan tersebut, kiranya warna perjuangan bangsa akan berbeda dan proses persatuan serta kesatuan masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk mewujudkannya.

Dengan Sumpah Pemuda tersebut memang tidak dengan sendirinya segera terbentuk bahasa persatuan Indonesia yang lengkap sempurna, dengan segala kaidah dan hukum kebahasaannya. Sumpah Pemuda sekedar melahir-

kan kesadaran perlunya satu bahasa persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan bahasa daerah masing-masing. Dengan kesadaran tersebut sebagai modal dasarnya, maka bangsa Indonesia berkesempatan mengembangkan bahasa persatuan itu menuju terpenuhinya persyaratan kebahasaan yang baku dan bisa dijadikan pedoman bagi penggunaannya secara baik dan benar.

Karena bahasa itu hidup maka dalam proses perkembangannya juga akan berpengaruh dan menerima pengaruh dari keadaan lingkungannya, termasuk juga bahasa-bahasa lain yang bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat. Mengenai pengaruh kebahasaan ini bagi bahasa Indonesia ada dua macam kelompok bahasa, yaitu bahasa daerah setempat dan bahasa asing yang digunakan oleh sebagian warga masyarakat.

Pengaruh bahasa daerah pemakai bahasa Indonesia tidak mudah dihindari, karena terbawa oleh sifat kodrat manusia yang sangat ditentukan perkembangan kepribadiannya oleh keadaan lingkungannya. Sedikitnya logat atau aksen kedaerahannya akan sangat mempengaruhi ucapan seseorang, sehingga mendengar ucapan bahasa Indonesia seseorang, kita sering dengan mudah menentukan asal-usul kedaerahan seseorang.

Secara teori memang mudah dikemukakan, bahwa jika kita secara sungguh-sungguh memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, kita pasti akan mudah pula mengungkapkan segala isi hati kita dengan bahasa yang baik dan benar. Tetapi mengucapkan kata-kata dengan benar tanpa terpengaruh oleh "pembawaan" seseorang memang tidak demikian mudah.

Kalau bahasa tulisnya "kan" tetapi terucapkan "ken" sudah pasti bukan karena kesulitan, melainkan karena terbawa oleh suatu kebiasaan. Ki Hadjar Dewantara pandai menulis artikel dengan baik, tetapi jika beliau berpidato, bukannya akhiran "kan" diucapkan "ken", tetapi kata "dengar" pun diucapkannya menjadi "denger".

Adapun pengaruh bahasa asing itu pada umumnya berkaitan dengan peristilahan ilmu tertentu yang sudah baku, sehingga kalau harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan merupakan suatu uraian yang panjang. Kata-kata radio, komputer dan sejenisnya memang tidak perlu diterjemahkan, manakala tentang benda tersebut sudah difahami pengertiannya. Selain itu, maka cara berfikir yang sudah terbiasa dengan menggunakan kaidah bahasa asing (meskipun tidak kebanyakan orang), sering terpengaruh pula dalam ungkapan sisipan-sisipan bahasa asing tersebut. Mungkin bisa terjadi pula, bahwa penggunaan beberapa kata berasal dari bahasa asing, dilatar-bela-

kangi oleh anggapan bahwa dengan demikian akan lebih memberi kesan "intelektual" atau lebih bersifat "akademik".

Betapapun kita selalu mengajurkan dan mendapat anjuran agar kita selalu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, di mana saja dan kapan saja, namun apa yang diuraikan di muka adalah kenyataan yang kita jumpai dalam masyarakat kita. Kalau kita ingin melacak lebih jauh, maka kita akan menemukan penggunaan bahasa Indonesia yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan itu di berbagai bidang kehidupan seperti dalam ruang pendidikan dari yang rendah hingga yang tinggi, hidup perkantoran, dalam dunia perdagangan, kehidupan berorganisasi, pergaulan masyarakat luas dan sebagainya.

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Masyarakat Luas.

A. Dalam dunia pendidikan

Seorang guru SD negeri atas suatu pertanyaan menjelaskan, bahwa ada umumnya para guru kelas di SD tersebut telah berusaha sungguh-sungguh untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Mereka sadar, bahwa segala perilakunya akan menjadi suri teladan bagi para anak didiknya. Namun jika melihat hasilnya ternyata belum memadai.

Dalam pergaulan antar murid masih banyak digunakan bahasa daerahnya, dan demikian pula pergaulan antar para guru pada waktu di luar jam mengajar. Hal demikian dipandang sebagai pertanda belum berhasilnya usaha tersebut. Seorang Kepala Sekolah SD Swasta menguraikan hal yang sama, ialah belum dapat dilaksanakannya penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar di sekolahnya. Tetapi Pak Kepala itu berpendapat, bahwa hasil pendidikan bahasa Indonesia tersebut mungkin sekali hasilnya baru akan diketahui di masa mendatang, pada saat anak didiknya itu di sekolah menengah atau di perguruan tinggi. Kalau ditinjau dari ketrampilan berbahasa boleh dikatakan sudah lumayan, tetapi untuk menggunakannya secara terus-menerus di berbagai lingkungan, rupanya belum cukup memadai. Keadaan rumah tangga dan keadaan orangtua masing-masing kurang menjadi penunjang untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Di kalangan pendidikan menengah penguasaan pengertian bahasa sudah lebih maju. Cara berfikir anak-anak sudah bisa dibawa ke arah

analitik sangat membantu. Namun demikian anggapan bahwa bahasa Indonesia itu masalah gampang merupakan suatu hambatan. Anak-didik masih belum bisa menyadari, bahwa bahasa Indonesia itu memang tidak mudah. Biasanya kesadaran itu timbulnya agak terlambat, ialah pada saat mereka itu harus menempuh suatu EBTA (ujian).

Bagaimana keadaan anak tingkat menengah atas, sangat mudah dirasakan oleh para dosen di perguruan tinggi. Pada umumnya para dosen itu mengeluh tentang kemampuan bahasa para mahasiswanya. Seorang dosen Fakultas Teknik suatu universitas negeri mengemukakan, bahwa dalam latihan membuat "kertas kerja" ternyata hampir seluruhnya mahasiswanya belum mampu menyusun kalimat yang tepat. Kalimat-kalimatnya belum mampu mengungkapkan isi hatinya.

Satu kesulitan bagi kalangan dosen dalam menyajikan perkuliahannya, ialah masih sangat terbatasnya peristilahan yang berkaitan dengan bidang ilmu masing-masing. Demi kepentingan kejelasan dalam penyajian tersebut dosen terpaksa menggunakan alat bantu yang berupa bahasa asing atau juga bahasa daerah. Hal demikian menjadi penyebab, mengapa para dosen belum sepenuhnya dapat berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Seorang dosen Fakultas Sastra mengungkapkan keprihatinannya, bahwa di lingkungan fakultasnya penggunaan bahasa Indonesia masih dapat disebutnya kurang bersungguh-sungguh, bahkan mungkin semrawut. Hal ini dikemukakan terutama bahasa antar para mahasiswa. Dosen ini berpengharapan seyogyanya masyarakat fakultas sastra itu dapat dijadikan teladan mengenai masalah kebahasaan ini bagi fakultas lainnya.

Dalam Dunia Perkantoran

Seorang pegawai dinas yang mengurus masalah ternak, menjelaskan bahwa dalam lingkungan dinasnya terasa sekali kurangnya usaha untuk berbahasa yang baik dan benar. Hanya mengenai hal yang menyangkut kedinasan resmi, maka tentang bahasa memang diperhatikan, misalnya dalam hal surat-menyurat, persiapan pidato Kepala-dinasnya, keupacaraan dan sebagainya.

Dalam pergaulan antar pegawai, sampai-sampai juga dengan Kepala Dinas, lebih banyak digunakan bahasa daerah dari pada bahasa Indonesia. Kejadian demikian dianggap memang wajar, karena bahasa daerah Jawa yang masih mengenal "unggah-ungguh" (tingkat-tingkat dalam

pergaulan) dirasa merupakan bahasa yang paling tepat untuk bergaul dengan atasan yang sekaligus sudah terasa adanya penghormatan.

Pegawai tersebut yang juga seorang dokter hewan, juga merasa lebih aman jika berhubungan dengan kepalanya dengan menggunakan bahasa Jawa. Dengan demikian maka bahasa Indonesia di lingkungan tersebut baru merupakan "bahasa resmi" dan bukan bahasa pergaulan sehari-hari.

Seorang sekretaris Wilayah daerah Kabupaten juga mengemukakan, bahwa di lingkungan perkantornya bahasa Indonesia masih merupakan bahasa resmi. Sedangkan masyarakat dinas tersebut pergaulan antar penghuninya kebanyakan menggunakan bahasa Jawa. Hal ini bisa terjadi karena kebanyakan pegawai dinas tersebut adalah kebanyakan - hampir seluruhnya - berasal suku Jawa. Sekretaris itu juga menduga, bahwa di daerah lain pun mungkin juga terjadi hal yang sama, misalnya di daerah Pasundan, Batak, Minangkabau, Makasar, Bali dan sebagainya.

Bapak Camat di suatu kotamadya menjelaskan, bahwa di kantornya penggunaan bahasa Indonesia agak lumayan. Hal demikian dimungkinkan, karena tugas kantor kecamatan itu melayani kepentingan warga masyarakat yang memang terdiri atas berbagai suku bangsa kita. Ini merupakan suatu keuntungan. Semua pegawai di lingkungan kecamatan telah ditugaskan agar dalam melayani masyarakat digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta bersikap sopan.

Dengan demikian maka dalam kantor kecamatan itu bahasa Indonesia diusahakan untuk bisa digunakan secara baik dan benar. Tetapi antar pegawai kecamatan itu penggunaan bahasa juga lebih banyak bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Hal ini mengandung suasana santai dan tidak terlalu "resmi".

C. Dalam Dunia Perdagangan

Seorang pemilik toko di kampung, seorang pribumi mengatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia tergantung dari siapa pembelinya. Karena pembeli itu bermacam-macam, ada tetangga yang kebanyakan suku Jawa, tetapi ada kalanya suku lainnya, bahkan ada pula orang peranakan atau non-pribumi, maka pada dasarnya digunakan bahasa Indonesia. Meskipun demikian bahasa yang digunakannya juga bukan bahasa yang menurutnya disebut "bahasa sekolah". Maksudnya tiada lah adalah sekedar untuk memudahkan berkomunikasi, dan dapat mencapai tujuan, ialah berlangsungnya proses jual-beli.

Seorang kenalan pemilik toko di jalan protokol yang non-pribumi

tetapi warganegara Indonesia, mengatakan bahwa! pada umumnya di tokonya berlaku bahasa Indonesia, yang dikenalkan sebagai "bahasa dagang". Yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang tidak terlalu ketat berpegang kepada kaidah dan hukum kebahasaan,

Hubungan antara tauke dengan para pramuniaga menggunakan bahasa Indonesia tersebut, tetapi antar para pramuniaga itu digunakan bahasa campuran, Jawa dan Indonesia. Jadi jelas kiranya bahwa dalam hubungan demikian itu yang diutamakan adalah segi komunikatifnya.

Dalam keadaan yang lebih majemuk seperti masyarakat pasar, maka penggunaan bahasa benar-benar "seenaknya" dalam arti asal dapat memperlancar proses jual-beli. Di sini tidak dapat dituntut digunakannya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seolah-olah dalam keadaan demikian hal itu tidak terlalu penting. Segi yang kurang menguntungkan dalam keadaan demikian adalah sulit dikembangkannya kesadaran untuk berbahasa yang baik. Buat para pedagang arti bahasa tiada lain adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memperlancar proses jual-beli itu. Selebihnya tidak perlu dihiraukan, apa lagi mengenai kaidah dan hukum-hukumnya.

Meskipun demikian di berbagai kesempatan yang ada, tampak adanya usaha dari beberapa orang pedagang yang ingin menggunakan bahasa Indonesia secara baik, tetapi mereka memang tidak hendak mempersulit diri dengan mempelajarinya secara lebih mendalam. Mereka menghendaki yang serba praktis.

D. Dalam Kehidupan Berorganisasi

Seorang pengurus salah satu organisasi pelajar menegaskan bahwa dalam organisasinya telah digunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Hal ini diusahakan dalam rapat-rapat pengurus maupun anggota. Juga dalam pembuatan catatan rapat, diusahakan agar sejauh mungkin digunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Tetapi di samping hidup keorganisasian yang resmi itu, maka para anggotanya itu selalu berbahasa yang santai dalam berkomunikasi antara seorang dengan yang lain. Meskipun oleh para guru selalu dianjurkan untuk berbahasa yang baik sehari-hari, namun kenyataan adalah sukar. Alasannya kalau terlalu "resmi" rasanya kurang akrab dan kurang santai. Bagi para remaja alasan demikian cukup dimengerti. Bahkan kabarnya di Jakarta para remaja itu sempat membuat bahasa khusus sendiri yang dikenal sebagai *pasa Prokem*.

Di kalangan organisasi profesi lain lagi halnya. Di kalangan organisasi yang menghimpun para petani, dalam rapat pengurusnya digunakan bahasa Indonesia. Tetapi jika harus terjun ke lapangan, maka bahasa yang paling komunikatif adalah bahasa daerah setempat. Dengan bahasa yang dapat mudah dimengerti para anggotanya, maka segala program dapat dilaksanakan dengan tertib dan berhasil.

Jadi bagi organisasi yang bergerak di pedesaan demi kepentingan para anggotanya, maka terpaksa digunakan bahasa Indonesia secara resmi tetapi jika diperlukan juga dengan bahasa daerah setempat. Ini yang akan menjamin keberhasilan.

Di kalangan organisasi kalangan guru sudah barang tentu harus dipenuhi digunakannya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat diketahui dari berbagai kegiatan rapat-rapatnya, baik rapat pengurus maupun rapat anggota. Di kalangan tersebut tidak ada alasan untuk tidak digunakannya bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Namun kenyataan menunjukkan pula bahwa jika terjadi pembicaraan antar anggotanya yang sesuku, masih sering pula terdengar pembicaraan dengan bahasa daerahnya. Tetapi hal demikian tidak terlampaui mengganggu terhadap usaha menggalakkan digunakannya bahasa Indonesia secara baik dan benar. Di kalangan guru sudah cukup kesadaran untuk menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa budaya, bahasa ilmu dan bahasa pergaulan.

E. Dalam Pergaulan Masyarakat Luas

Dalam ruang lingkup ini maka pelakunya sangat majemuk. Adalah wajar jika dalam pergaulan itu juga tidak menentu bahasa apa yang digunakan. Tetapi dapat diteliti secara saksama, jika kelompok masyarakat itu majemuk (heterogen), maka kelompok itu berkecenderungan untuk menggunakannya bahasa Indonesia. Misalnya dalam perkumpulan olahraga, kesenian, kepramukaan dan sebagainya, maka pada umumnya digunakan bahasa Indonesia. Apakah bahasa yang digunakan itu sudah memenuhi persyaratan benar dan baik, masih bisa dipersoalkan.

Dalam asrama mahasiswa yang penghuninya juga bermacam asal kedaerahannya, maka bisa dipastikan bahwa bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia. Memang lambat laun ada kecenderungan bagi semua pihak untuk menyesuaikan diri dengan keadaan daerah setempat. Akhirnya terjadilah penggunaan bahasa campuran. Dari proses

kebudayaan yang demikian itulah dimungkinkan terjadinya perubahan dan perkembangan nilai, yang memungkinkan timbul dan tumbuhnya nilai budaya yang baru.

Seorang tukang becak mengemukakan pendapatnya, bahwa baginya penggunaan bahasa seperlunya, yang ia mengerti, sekedar untuk alat komunikasi dengan calon penumpangnya. Bisa berhubungan dengan baik hingga terjadi tawar-menawar, meskipun digunakannya bahasa yang kurang baik dan tidak sempurna sudah cukup. Bahkan tarif tertentu dalam bahasa Inggris pun ia hafalkan, karena wilayah kerjanya di jalan protokol yang memungkinkan adanya wisatawan asing berminat menggunakan becakanya.

Dia bangga mendengar keterangan bahwa dengan bahasa Indonesia itu kita saling bisa berhubungan dengan rekan-rekan seluruh tanah air, Dia berkehendak untuk bisa menguasai bahasa persatuan itu, tetapi ia bingung ke mana mesti belajar. Dengan penguasaan bahasa itu ia mengharapkan bisa mengikuti berita melalui koran, dan mengerti apa yang terjadi dalam masyarakatnya.

Demikianlah beberapa nukilan dari usaha pengamatan secara sekilas ini belum teliti betul, sehingga kemungkinan kesimpulannya belum tentu tepat, namun semoga ada gunanya.

Kesimpulan dan Saran

Dari wawancara dengan berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran sejauh mana lingkungan tertentu tersebut bahasa Indonesia sudah digunakan secara baik dan benar dapat dibuat kesimpulan sementara sebagai berikut :

1. Anjuran untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar untuk kepentingan pembinaan bahasa Indonesia menuju kesempurnaannya adalah tepat. Tetapi hendaknya kita jangan berpengharapan, bahwa seluruh rakyat akan berkemampuan untuk melaksanakannya. Hendaknya kita anggap cukup andaikata sebagian besar warga masyarakat yang belum sepenuhnya mampu menggunakannya secara baik dan benar merasa terpanggil dan melaksanakannya.
2. Kenyataannya kalangan dunia pendidikan memang sudah ada usaha untuk mewujudkan anjuran tersebut. Meskipun diketemukan hambatan di

sana-sini, namun hal tersebut tidak harus menimbulkan kekhawatiran lebih-lebih kecemasan. Lebih tinggi tingkat pendidikan yang kita temui, ternyata kesadaran untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar lebih mantap.

3. Di kalangan berbagai kehidupan seperti perkantoran, perdagangan dan pergaulan masyarakat luas, maka bahasa Indonesia mempunyai kedudukan resmi. Pada umumnya bahasa itu mendapat kedudukan yang cukup terhormat. Namun pada umumnya mengenai penggunaannya yang tidak resmi banyak dilakukan secara santai.
4. Untuk kepentingan resmi baik tulisan maupun lisan, ketentuan baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan mendapat perhatian cukup. Tetapi dalam bahasa lisan lebih banyak digunakan berdasarkan pertimbangan praktis, ditinjau dari kedudukannya sebagai alat komunikasi.
5. Untuk lebih menggiatkan dalam usaha mewujudkan anjuran tersebut, hendaknya kita laksanakan dengan suatu gerakan, berdasarkan suatu pengertian bahwa pembinaan dan usaha menjadikan bahasa persatuan kita satu-satunya bahasa nasional yang lengkap-semburna menjadi tanggungjawab kita bersama, dan karenanya harus melibatkan kita semua.

Guna mewujudkan gerakan tersebut beberapa saran dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Untuk dapat melaksanakannya secara mantap dan terpadu hendaknya diperhatikan beberapa persyaratan berikut.

Mengenai penguasaan bahasa yang lengkap secara akademik memang merupakan bagian tugas dari para ahlinya. Tetapi untuk memiliki ketrampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan hak dari semua pihak. Yang sangat diperlukan adalah adanya : tekad, disiplin, kecermatan dan usaha yang sungguh-sungguh.

Kita harus bertekad untuk dapat berbahasa yang baik dan benar. Disiplin untuk mentaati semua kaidah dan ketentuan kebahasaan menjadikan kita akan menggunakan bahasa yang teratur, baik dan benar. Kita mesti cermat jangan sampai membuat kesalahan dengan memandang remeh tentang bahasa Indonesia dan berusaha menguasainya secara tekun.

Mengenai gerakan yang akan merupakan serangkaian kegiatan dalam usaha menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Usaha yang paling efektif adalah melalui dunia pendidikan :

- a. Karena pentingnya kedudukan guru dalam proses penyebaran kemampuan berbahasa yang baik dan benar, maka di semua lembaga pendidikan guru harus ditingkatkan pendidikan berbahasa Indonesia (SPG, SGO, IKIP, FKG).
- b. Dalam berbagai tingkat pendidikan diselenggarakan lomba : mengarang dan berpidato. Demikian pula pada tiap akhir tahun pendidikan diberikan semacam hadiah bagi para siswa yang menunjukkan kegiatan yang menonjol dalam berbahasa Indonesia.
- c. Kepada segenap pemimpin kenegaraan dan kemasyarakatan dihimbau untuk bersedia menjadi teladan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- d. Di tiap RW dan RT pada berbagai kesempatan diadakan lomba mengarang dan berpidato. Untuk keperluan semacam itu, perlu kiranya dihimbau agar berbagai penguasaan bisa turut membantu penyelenggaraannya.
- e. Anjuran kepada semua organisasi profesi untuk secara konsekuen, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan organisasinya.
- f. Berbagai lomba penulisan karya ilmiah atau penulisan buku yang selama ini sudah sering diadakan oleh lembaga seperti LIPI, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN dan sebagainya hendaknya dapat dilanjutkan dan diperkembangkan.

2. Bahasa Indonesia hendaknya juga dimasukkan dalam persyaratan pokok dalam :

- a. penerimaan pegawai negeri/swasta
- b. kenaikan tingkat para pegawai

3. Dalam kehidupan kelembagaan legislatif supaya juga diusahakan peningkatan usaha, mulai berbagai tingkat kegiatan seperti : pernyataan pen-

dapat, penyusunan laporan sampai hasil yang berwujud Undang-undang, supaya dapat disusun berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran untuk mengusahakan adanya gerakan untuk mewujudkan anjuran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai suatu kenyataan. Andaikata gerakan semacam ini berhasil 25% saja, kiranya bahasa Indonesia kita sepuluh tahun kemudian sudah akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Semoga.

PERANAN GURU BAHASA INDONESIA DALAM MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

I. Umar Suparno

Persatuan Guru Republik Indonesia

PGRI merasa berbahagia dan bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan dan ridho-Nya pada saat ini PGRI dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam Kongres Bahasa Indonesia ke IV yang sangat mulia ini. Oleh karena itu, PGRI sangat berterima kasih kepada Panitia Penyelenggara Kongres atas undangannya, lagi pula atas kesempatan yang diberikan kepada PGRI untuk menyampaikan makalah dalam forum Kongres Bahasa Indonesia ke IV ini.

PGRI sebagai organisasi kaum pendidik yang lahir di tengah-tengah perjuangan bangsanya dalam mempertahankan dan menegakkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 menyambut dengan penuh antusiasme terhadap terlaksananya Kongres Bahasa Indonesia IV ini, lebih-lebih setelah mengetahui bahwa Kongres Bahasa Indonesia ini dilaksakana dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-55 Sumpah Pemuda yang sangat terkenal itu.

PGRI menyadari bahwa antara bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda, Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan organisasi kaum pendidik yang disebut PGRI ada alur benang merah putih yang membawa amanat suci perjuangan bangsa Indonesia, yaitu perjuangan di dalam menegakkan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka dengan identitas nasionalnya yaitu Pancasila. Maka dari itu sesuai dengan permintaan dan pengarahan Panitia Penyelenggara Kongres PGRI akan ikut berperan serta dengan menyumbangkan pemikiran dengan judul *"Peranan Guru Bahasa Indonesia dalam Menyuksekan Pembangunan Nasional"*. Pemikiran PGRI itu akan dituangkan dalam makalah ini dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Permasalahan
- III. Pembahasan

- IV. Langkah-langkah
- V. Kesimpulan dan saran
- VI. Penutup

PGRI berharap semoga pemikiran yang disumbangkan kepada Kongres ini ada berguna bagi pengembangan bahasa Indonesia yang melambangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam mewujudkan, membina, dan mempertahankan kerukunan dan ketahanan nasional yang tangguh dan kokoh.

Pendahuluan

Dewasa ini bangsa Indonesia telah berada dalam tahap perjuangan mengisi kemerdekaan dengan jalan melaksanakan pembangunan Amanat Penderitaan Rakyat, yaitu mencapai dan mewujudkan masyarakat adil makmur, lahir batin, berdasarkan Pancasila. Dalam tahapan mengisi kemerdekaan ini, kita bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakan Pelita I, II, dan III seperti yang diamanatkan oleh seluruh rakyat Indonesia lewat MPR dan dituangkan dalam GBHN 1973, 1978.

Kongres ini dilaksanakan justru dalam tahun terakhir dari Pelita III dan diambang pintu memasuki tahun pertama Pelita IV. Sidang Umum MPR Maret 1983 telah menghasilkan pula Tap II/MPR/1983 tentang GBHN yang merupakan kesinambungan dari GBHN sebelumnya dan setelah menggariskan arah dan tujuan Pelita IV yang akan dimulai pada bulan April 1984. Berdasarkan GBHN 1983 telah ditetapkan tekad bangsa Indonesia, yaitu pada Pelita IV ini harus sudah dicapai kerangka dasar masyarakat adil dan makmur dan kerangka dasar itu akan dimantapkan pada Pelita V, sehingga pada Pelita VI bangsa Indonesia sudah tinggal landas untuk mewujudkan dan mengembangkan masyarakat adil dan makmur. Dari GBHN 1983, hal-hal yang perlu kita tonjolkan, kita catat dan kita pegang antara lain adalah :

- Hakekat pembangunan nasional kita adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
- Pembangunan nasional merupakan penjabaran pelaksanaan Pancasila.
- Segala sesuatu yang sifatnya menyangkut ideologi negara yang sering menimbulkan ketegangan nasional yang sangat membahayakan persatuan, kesatuan dan keutuhan nasional, harus sudah dapat diselesaikan secara tuntas dalam Pelita IV.

- Generasi muda harus menjadi generasi penerus yang lebih baik, yaitu suatu generasi yang tanggap terhadap aspirasi perjuangan bangsanya, yang dapat mewarisi dan menghayati jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur 1945.

Setelah kita memahami apa yang dikehendaki oleh Lembaga Tertinggi Negara kita sebagai penjelmaan kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, maka kita terkenang atau teringat peristiwa pada 55 tahun yang lalu yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, saat diselenggarakan Kongres Pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda yang keramat itu. PGRI memahami dan menyadari bahwa 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia, karena pada hari Sumpah Pemuda itu tercetuslah tekad bangsa Indonesia untuk membangun integritas bangsa. Isi Sumpah Pemuda adalah pernyataan luhur Pemuda Indonesia yang isinya adalah *satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia*.

Oleh karena itu hakekat Sumpah Pemuda tiada lain adalah tahapan gelombang pasang dari perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Dari Sumpah Pemuda itulah gerak dan arah serta wujud perjuangan bangsa Indonesia menjadi lebih konkrit yaitu *"Mencapai Indonesia Merdeka"*.

PGRI menyadari bahwa berkat Sumpah Pemuda itu bangsa Indonesia meneruskan perjuangannya dengan memupuk, membina dan mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terwujud satu kesatuan nasional yang maha dahsyat. Puncak perjuangan itu adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yang merupakan pintu gerbang kehidupan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan yang dijalani sampai dewasa ini dan untuk selama-lamanya. Kita bangsa Indonesia menyadari bahwa isi Sumpah Pemuda itu merupakan mutiara pusaka mulia yang harus dipertahankan, dikeramatkan, sebagai sumber utama bagi kekuatan bangsa Indonesia di dalam mempertahankan eksistensinya. Menyadari hal yang demikian itu maka PGRI sebagai organisasi kaum guru yang menyandang tiga tugas suci (tugas kemanusiaan, tugas profesi dan tugas civic) selalu menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa kepada anak didiknya yang merupakan tunas-tunas bangsa yang akan melanjutkan perjalanan hidup bangsanya.

Mengenai bahasa Indonesia, PGRI menyadari bahwa itu merupakan suatu mutiara dari Sumpah Pemuda yang harus diperjuangkan, dikembangkan dibina secara terus menerus oleh setiap warga bangsa Indonesia baik secara individual maupun secara kelompok, dalam hidupnya sehari-hari dalam ling-

kungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan pergaulan dengan bangsa lain yang memungkinkan.

Menyadari akan tugasnya dalam kehidupan bangsa, maka PGRI pun dalam perjalanan perjuangannya telah berhasil menampilkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam forum persidangan Internasional. Hal ini terjadi pada waktu PGRI menjadi tuan rumah Kongres Guru Sedunia ke-27 (WCOTP) di Indonesia pada tanggal 26 Juli s/d 2 Agustus 1978. Dalam Kongres tersebut PGRI memberanikan diri mengusulkan dan mengusahakan bahasa Indonesia dijadikan salah satu bahasa pengantar persidangan dalam Kongres tersebut. Pada waktu itu penyelenggara menyadari akan berbagai kesulitan baik sarana maupun tenaga. Akan tetapi, PGRI berpendirian, justru sejalan dengan kegiatan menyongsong peringatan setengah abad Sumpah Pemuda, maka peristiwa Kongres guru sedunia itu dijadikan pula salah satu titik tolak dalam upaya penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi internasional. Ternyata usaha PGRI tiadalah sia-sia. Dalam prakteknya berjalan lancar dan baik. Dalam penghayatan PGRI peristiwa semacam itu dapat menggugah harga diri pada delegasi Indonesia dan membangkitkan kebanggaan nasional. Hal lain yang dapat memperkuat kebanggaan nasional kita adalah kebersamaan para delegasi guru-guru dari negara yang tergabung dalam ASAN langsung berbahasa Indonesia/Malaysia di dalam membicarakan soal-soal tertentu.

Dalam mencatat sukses itu PGRI tidak dapat melupakan jasa dan prestasi Prof. Dr. Amran Halim dibantu oleh Drs. Anton Hilman dan Drs. Zainal Abidin yang telah berhasil menggembleng para penterjemah kita dalam waktu 1½ bulan sehingga mampu berpartisipasi dan berintegrasi dengan tim penterjemah internasional yang sudah berpengalaman.

Dewasa ini setelah melampaui berbagai tahapan, selaras dengan tugas kewajiban dan tingkat kemajuan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Ibarat seorang gadis yang lahir di pedesaan dahulu hidup di lingkungan masyarakat desa, kemudian belajar dan bergaul dikalangan kota dari yang kecil sampai yang besar dan kemudian belajar dan bergaul di masyarakat ibukota negara sampai kepada kota internasional. Tentu saja setelah dewasa gadis ini akan menampilkan berbagai perubahan dan perkembangan yang selaras dengan keperluan penampilannya.

Dalam proses perkembangan bahasa Indonesia yang diibaratkan seorang gadis tadi, guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia khususnya mempunyai peranan yang penting dalam menentukan perkembangan bahasa

Indonesia itu. Ibarat gadis tadi, guru bahasa Indonesia ikut menjaga dan mengarahkan agar gadis itu berkembang secara teratur tidak bertentangan dengan watak dasar lingkungan dan bangsanya. Perkembangannya membawa dan memancarkan harmoni yang indah.

Salah satu bidang sasaran pembangunan nasional adalah bidang sosial budaya. Di dalam bidang itu terdapat sasaran pembangunan mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Suksesnya pembangunan nasional berarti suksesnya pembangunan mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Atau sebaliknya, pembangunan terhadap bahasa dan sastra Indonesia harus mendukung suksesnya pembangunan nasional. Maka dari itu pembangunan terhadap bahasa dan sastra Indonesia harus *selaras, seirama, serasi* dengan arah pembangunan nasional. Dalam hal ini kiranya guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia pada khususnya mempunyai kesempatan untuk ikut mensukseskan pembangunan nasional.

Permasalahan

Pada tahun 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda telah diikrarkan adanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia merupakan lambang persatuan dan kesatuan bangsa. Karena bahasa adalah wahana dari isi jiwa pemakainya yang mengandung unsur cipta, rasa, dan karya, maka materi bahasa tersebut tidaklah statis, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Pada tahun 1928 itu kelahiran Bahasa Indonesia telah diakui, tetapi mengenai tetap tegaknya eksistensi Bahasa Indonesia itu agar mampu menjadi wahana budaya bangsa Indonesia masih harus diperjuangkan terus sebab kita mengetahui beban tugas Bahasa Indonesia makin lama makin banyak, makin kompleks, dan makin berat. Dalam pertumbuhannya menjadi bahasa persatuan, bahasa Indonesia ini bergerak maju di tengah-tengah bahasa daerah yang beribu-ribu jumlahnya dengan latar belakang sejarah dan sosial yang beraneka ragam. Bahasa daerah itu di samping memberikan kekuatan dan sumbangan tenaga terhadap tumbuhnya Bahasa Indonesia, juga tidak sedikit menimbulkan hambatan-hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia yang sehat dan segar.

Setelah perjuangan bangsa Indonesia mencapai titik kulminasi pada 17 Agustus 1945, yaitu berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Sumpah Pemuda tahun 1928 mendapat legalitasnya dalam konstitusi negara Republik Indonesia secara resmi. Dalam pasal 36 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa bahasa daerah yang dipelihara oleh rakyatnya

dengan baik-baik, bahasa-bahasa itu akan dipelihara dan dihormati juga oleh Negara. Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Secara yuridis formal sudah jelas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia, demikian juga bahasa daerah.

Bahasa adalah lembaga kebudayaan dan juga lembaga sosial. Maka dari itu pertumbuhan bahasa Indonesia mencerminkan atau dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan dan masyarakatnya. Dalam proses inilah timbul permasalahan yang berkaitan satu sama lain secara beruntun yang justru menunjukkan adanya dinamika dari kehidupan bahasa itu sendiri. Permasalahan itu dalam proses pembangunan adalah hal yang wajar, justru dengan permasalahan itu, kita ditantang untuk mengatasinya. Dalam mengatasi permasalahan itu kita akan teruji sejauh mana kita bangsa Indonesia ini terkait secara konsisten dengan jiwa dan semangat perjuangan pada waktu mengikrarkan Sumpah Pemuda yang ingin menciptakan integritas bangsa secara integralistik. Permasalahan yang menentang kita antara lain adalah :

1. Bagaimana menjaga dan mempertahankan bahasa Indonesia tetap sebagai integritas bangsa yang memancarkan jiwa dan semangat persatuan bangsa Indonesia demi kesatuan dan keutuhannya dengan bernapaskan Bhineka Tunggal Ika.
2. Bagaimana membina, merigusahakan, dan mengembangkan bahasa Indonesia sehingga makin mampu dan mantap melaksanakan tugas sucinya (*mission sacre*-nya) sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa budaya, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa administrasi, bahasa perundang-undangan, bahasa perdagangan dan lain sebagainya yang mampu memikul tugas segala aspek kehidupan.
3. Bagaimana mengusahakan, menjaga agar dalam perkembangannya bahasa Indonesia tetap memiliki watak dasar atau tetap berpijak pada kepribadiannya sendiri.
4. Bagaimana mengusahakan dan menjaga agar terjadi sinkronisasi antara bahasa Indonesia di dalam dunia pendidikan dengan bahasa Indonesia yang terjadi secara praktis di dalam masyarakat.
5. Bagaimana mengakomodasikan unsur bahasa daerah sehingga tidak mengganggu, menghambat bahkan merusak bahasa Indonesia, tetapi hendaklah betul-betul memperkaya dan memperkuat bahasa Indonesia.

Kiranya permasalahan yang tersebut di atas itu merupakan tantangan terus-

menerus bagi bangsa Indonesia sejak diikrarkan bahwa bangsa Indonesia memiliki dan menunjung tinggi bahasa persatuan. Tantangan itu mengundang kita untuk selalu berpikir dan berjuang mencari jalan mengatasinya. Forum seperti sekarang ini adalah suatu upaya yang tepat karena dalam forum Kongres bahasa Indonesia ini kita, bangsa Indonesia, secara nasional memfokuskan perhatiannya kepada bahasa Indonesia sebagai milik nasional.

Pembahasan

Bapak Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya di depan Sidang DPR-RI pada tanggal 16 Agustus 1972 mengatakan sebagai berikut :

"Dalam pada itu, kita perlu memelihara semua unsur-unsur yang menyatukan dan menjadi kekuatan bangsa kita, unsur-unsur yang menjadi jiwa bangsa dan kebudayaan kita sendiri, yang menunjukkan Indonesia adalah Indonesia. Dalam hal ini, kita tidak mungkin berbicara tentang Indonesia tanpa bahasa Indonesia. Sungguh, kita dan generasi-generasi yang akan datang berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin dan generasi-generasi terdahulu yang telah melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928".

Selanjutnya Bapak Presiden dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa Sumpah Pemuda adalah putusan sejarah yang amat penting yang telah ikut melahirkan bangsa Indonesia. Beliau mengatakan bahwa sulit dibayangkan kesulitan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia yang 134 juta tersebar di wilayah seluas dari London ke Istambul, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan kebudayaan daerah, tidak memiliki bahasa nasional yang satu. Bapak Presiden menandakan bahwa beruntung sekali dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang belum juga memiliki bahasa nasional atau yang menggunakan beberapa di bawah satu atap perumahan negara mereka.

Kita menyadari bahwa negara kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau besar kecil tersebar di atas bentangan laut dan lautan yang semuanya merupakan satu rangkaian kepulauan yang dihuni oleh lebih kurang seratus lima puluh juta manusia, terdiri dari berpuluh-puluh suku bangsa. Tiap suku bangsa mempunyai adat istiadat, nilai-nilai keyakinan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda pula. Hal tersebut merupakan kenyataan yang tidak dapat kita hindari, tetapi harus kita terima dengan penuh rasa bangga dan penuh tanggung jawab. Keadaan yang serba majemuk itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bila kita melepaskan rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tetapi sebaliknya kalau kita selalu mawas diri meneliti ke-

dudukan kita sebagai warga bangsa yang penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bangsa, maka keadaan yang demikian itu dapat dijadikan sumber kekuatan bangsa untuk memperkaya khasanah budaya bangsa. Dalam keanekaragaman dan kemajemukan yang berbeda-beda itu dapat ditemukan sejumlah nilai yang sama yang dapat dijadikan kekuatan bagi kehidupan bangsa, sebagai penopang atau penyangga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu keanekaragaman itu perlu dibina dan dikembangkan guna mewujudkan kebudayaan bangsa yang mencerminkan pribadi bangsa.

Di atas telah disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa Sumpah Pemuda adalah putusan sejarah yang ikut melahirkan bangsa Indonesia. Kiranya perlu kita sadari bahwa Sumpah Pemuda pun bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian sejarah dari masa ke masa yang mendahuluinya. Peristiwa sebelum Sumpah Pemuda yang wajib kita catat adalah kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tanda lahirnya Kebangkitan Nasional.

Kebangkitan Nasional bergerak setapak demi setapak, fase demi fase menjalar ke seluruh nusantara, hidup di tengah-tengah kelompok suku bangsa yang telah kena isolasi sosial akibat politik penjajah. Makin lama makin menampakkan kekuatannya untuk meneruskan perlawanan dengan cara baru, yaitu berjuang untuk merebut kembali kedudukannya sebagai suatu masyarakat budaya yang bebas merdeka. Mulailah timbul gerakan kedaerahan dan keagamaan, mulailah gerakan kebudayaan, pendidikan dan sosial, kemudian menuju gerakan politik yang sifatnya persatuan, kesatuan dan kebangsaan. Gerakan-gerakan itu mula-mula berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi bertemu pada muara yang sama ialah persatuan dan kesatuan, kebangsaan atau nasionalisme. Gerakan itu bersifat Bhineka Tunggal Ika. Paham dan cita-cita kebangsaan atau nasionalisme mulai tumbuh dan berkembang dan ekspresinya mencetuskan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dalam peristiwa itu diikrarkan suatu sumpah yang merupakan ungkapan kesadaran kebudayaan dan cita-cita kebudayaan bagi subjek budaya nusantara. Naskah pernyataan itu keseluruhannya adalah sebagai berikut :

Kami, putera-puteri Indonesia, menyatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia.

Kami, putera-puteri Indonesia, menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia.

Kami, putera-puteri Indonesia, menyatakan berbahasa satu, bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu merupakan pernyataan penuh kesadaran bahwa masyarakat nusantara adalah satu subjek\ budaya Indonesia yang akan dan harus memperjuangkan nasibnya di masa-masa mendatang. Satu nusa, berarti diungkapkan secara sadar adanya keyakinan satu tanah air, satu lingkungan alam, satu kondisi geografis. Satu bangsa, berarti diungkapkan secara sadar adanya pengakuan dan keyakinan bahwa mereka adalah satu kesatuan kondisi rakyat, satu\ kondisi demografis, satu subyek budaya yang disebut bangsa Indonesia. Satu bahasa, berarti diungkapkan secara sadar adanya keyakinan atau pengakuan bahwa mereka mempunyai satu kebudayaan, yaitu kebudayaan nusantara yang kemudian disebut kebudayaan Indonesia. Bukanlah bahasa merupakan sarana komunikasi yang menjadi wahana segala sikap, persatuan, nilai dan cita-cita? Jadi, dibalik Sumpah Pemuda itu muncullah kekuatan nasional, yaitu adanya kesadaran satunya masyarakat bangsa Indonesia dan satunya budaya bangsa Indonesia.

Kebangkitan Nasional sungguh merupakan tonggak sejarah baru yang menggerakkan roda sejarah perjuangan yang lebih luas, roda sejarah\ perjuangan dunia modern. Dari sinilah terjadi proses generatif kultural bangsa kita yang lebih maju, lebih kompleks dan lebih modern. Proses ini tiada mudah. Ini merupakan perjuangan yaitu suatu proses yang ditempa atau digembleng oleh berbagai peristiwa dan masalah. Kebangkitan Nasional yang melahirkan Sumpah Pemuda tahun 1928 itu melahirkan satu tekad bangsa, mengarahkan perjuangannya kepada satu titik yaitu mencapai Indonesia Merdeka. Dari gerakan kebudayaan meningkat kepada gerakan politik. Karena bangsa Indonesia sebagai subjek kebudayaan akan dapat mengembangkan kebudayaan bila ada kemerdekaan politik.

Dari Sumpah Pemuda itulah kini bangsa Indonesia hidup sebagai satu bangsa besar yang merdeka, mendiami wilayah dari Sabang sampai Merauke, berkebudayaan nasional dengan berbahasa nasional yaitu bahasa\Indonesia.

Selanjutnya Bapak Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya yang disebutkan di atas menegaskan betapa kewajiban kita dan tanggung jawab kita terhadap bahasa\Indonesia. Beliau menandakan sebagai berikut :

"Memiliki bahasa nasional mengharuskan adanya kecintaan kepada bahasa nasional itu dan kecintaan kepada bahasa nasional mengharuskan adanya pembinaan yang teratur. Bahasa itu hidup dan berkembang. Tanpa pembinaan, hidupnya tanpa arah. Melalaikan pembinaan sama buruknya dengan membiarkan bahasa yang kita cintai itu rusak.

Tidak perlu disangsikan lagi, pembinaan bahasa nasional kita adalah mutlak; malahan, ia merupakan bagian daripada pembinaan bangsa kita. Pembinaan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab nasional; bukan hanya menjadi beban pemikiran ahli-ahli bahasa saja, bukan hanya urusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Di dalam membina, memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia yang menjadi kebanggaan nasional kita, ada beberapa hal yang patut kita catat, yaitu :

1. Bahasa Indonesia sendiri secara kualitatif dan kuantitatif dalam keterbatasan, sehingga untuk melaksanakan tugas sebagai bahasa nasional, bahasa resmi dan bahasa kebudayaan masih memerlukan perluasan vokabulair dan unsur-unsur bahasa lainnya.
2. Bahasa Indonesia hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat negara berkembang yang baru saja lepas dari penjajahan yang menyebabkan rakyatnya menderita tiga buta. Tiga buta itu adalah : *buta huruf dan angka, buta bahasa Indonesia, buta pendidikan dasar*. Dalam keadaan yang demikian tidak sedikit pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Pola pikir masyarakat yang diwarnai oleh tiga buta itu memancar dalam pola bahasanya.
3. Pengetahuan, kepandaian, keterampilan, dan kemahiran warga masyarakat dari berbagai kalangan dalam menggunakan bahasa Indonesia berasal dari berbagai sumber. Ada yang bersumber dari pergaulan sehari-hari, ada yang bersumber dari usaha belajar sendiri, ada pula yang bersumber dari membaca surat kabar dan majalah, ada lagi yang bersumber dari mendengarkan radio dan TV. Di samping itu ada yang memang bersumber dari pendidikan. Warga masyarakat yang menguasai bahasa Indonesia bersumber dari pendidikan ini pun masih berbeda-beda berhubung tingkat dan jenis pendidikannya. Berdasarkan sumber yang berbeda-beda itu, terjadilah keragaman bahasa Indonesia dalam penggunaan. Secara idial memang diharapkan penggunaan bahasa Indonesia di dalam prakteknya bersumber dari proses pendidikan. Tetapi karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan digunakan oleh masyarakat bhinneka dan sangat luas, maka terjadilah jarak keserasian antara Bahasa Indonesia dalam kalangan pendidikan dan bahasa Indonesia dalam masyarakat sehari-hari. Jarak isi makin lama makin sempit setelah makin banyak warga masyarakat yang melewati proses pendidikan. Di sini

proses pendidikan memegang peranan penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia yang diharapkan.

Dari hal-hal tersebut di atas kaum pendidik atau guru, secara umum atau secara khusus menempati posisi yang sangat mempengaruhi bahkan menentukan terhadap catak pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Hal ini kiranya bukan hal yang terlalu dilebih-lebihkan. Masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi yang dalam proses kedewasaannya mengalami pendidikan formal di sekolah. Makin hari masyarakat yang terdidik makin banyak dan pada waktunya semuanya mengalami pendidikan di sekolah. Kalau sudah tercapai tingkatan yang demikian berarti penguasaan bahasa Indonesia bagi semua warga masyarakat bersumber dari pendidikan di sekolah. Ini berarti semua warga masyarakat mengalami proses pendidikan formal dengan salah satu bidang studinya adalah bahasa Indonesia. Lagi pula mereka mendapatkan training berbahasa Indonesia setiap hari karena bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan. Dengan dasar pemikiran seperti itu maka fungsi dan profesi guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia pada khususnya mempunyai peranan penting di dalam mensukseskan pembangunan bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui hakekat pembangunan nasional kita adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Maka para guru dengan perantaraan bahasa Indonesia dapat melakukan pembangunan oleh kaum guru ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan. Pertama bahasa Indonesia sebagai objek dan kedua bahasa Indonesia sebagai sarana. Sebagai objek pembangunan, guru mempunyai peranan ganda di dalam membina bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia yang berhasil menyebabkan bahasa Indonesianya sendiri tumbuh dan berkembang teratur, kemampuan bahasa para siswa menjadi baik yang membaaa kepada cara berfikir teratur dan mengakibatkan cara berfikir masyarakat pun teratur pula.

Sebagai sarana, bahasa Indonesia menjadi kunci pintu gerbang ke dunia ilmu pengetahuan yang beraneka ragam itu yang mampu meningkatkan kualitas pribadi. Guru tidak akan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya manakala tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik pula. Dalam membahas peranan guru untuk mensukseskan pembinaan bahasa Indonesia yang mempunyai arti mensukseskan pembangunan nasional, PGRI melihatnya dari beberapa sudut pandangan.

Pertama dari sudut sejarah perjuangan bangsa

Dari sudut ini guru selalu dapat membina semangat kebangsaan dan selalu dapat menumbuhkan jiwa cinta tanah air yang dapat mempertebal harga diri dan kebanggaan nasional. Hal itu dimungkinkan karena bahasa Indonesia adalah satu di antara tiga mutiara pusaka isi Sumpah Pemuda. Melalui bahasa Indonesia ini, guru pada umumnya atau guru bahasa Indonesia pada khususnya dapat mengintegrasikan secara langsung sejarah perjuangan bangsanya kepada apara anak didik sehingga rasa ikut memiliki bahasa Indonesia ini terus terjalin. DARI sasa dan sikap ikut memiliki ini dapat tumbuh dan berkembang rasa cinta dan sikap mempertahankan serta semangat untuk membina bahasa Indonesia.

Kedua dari sudut materi Bahasa Indonesia

Materi bahasa Indonesia terdiri dari beberapa unsur, yaitu antara lain: tatabunyi, vokabulair (kosa kata), morfologi (bentuk kata) dan tatakali-mat (sintaxis). Karena dalam taraf perkembangan dan pertumbuhan, unsur-unsur tersebut di atas banyak menantang kita untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan mana yang dapat menguntungkan bahasa Indonesia, dan pertumbuhan perkembangan mana yang merugikan justru merusak bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, unsur-unsur materi bahasa itu harus makin membaku. Dalam hal menuju pembakuan bahasa Indonesia ini, guru pada umumnya dan khususnya guru bahasa Indonesia berperan menentukan. Secara umum penggunaan bahasa Indonesia oleh kaum guru relatif mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia sehingga sedikit banyak memberi suri teladan kepada anak didik. Sedangkan guru bahasa Indonesia sudah barang tentu memberikan pengetahuan dan ke-trampilan berbahasa Indonesia yang semestinya, yang sesuai dengan hukum-hukum yang telah dibakukan oleh para pemikir bahasa Indonesia dan Lembaga yang berwenang. Hasil karya kaum pendidik atau kaum guru ini akan mewarnai corak bahasa Indonesia di masyarakat. Karena di dalam masyarakat juga ada dinamika bahasa yang menghasilkan bentuk-bentuk baru, maka sering timbul gejala bahasa yang tidak selaras, tidak sesuai, tidak cocok dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesia. Hal ini tidak mengapa, karena di negara kita sudah ada lembaga yang berwajib dan berwenang menangani pertumbuhan perkembangan bahasa Indonesia, yaitu Pusat Lembaga Bahasa Indonesia, maka peranan guru bahasa Indonesia menjadi salah satu mata rantai dalam siklus pembinaan bahasa Indo-

nesia. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : dalam masyarakat terjadi praktek bahasa dengan segala variasinya. Praktek bahasa itu diteliti dan dievaluasi oleh Lembaga bahasa Indonesia dengan hasil mana yang dibakukan dan mana yang dianggap penyimpangan yang harus dicegah. Hasil Lembaga bahasa Indonesia ini, dimasyarakatkan oleh guru bahasa Indonesia lewat pengajaran bahasa Indonesia kepada para anak didik. Anak didik mempraktekkan pengetahuannya itu dalam masyarakat.

Di samping siklus di atas ada pula pembinaan oleh masyarakat sendiri, yaitu kalangan pemikir/ahli bahasa, kalangan pers dan lainnya. Ini pun dapat juga ditransformasikan oleh guru kepada anak didik. Siklus semacam di atas itu dalam saat-saat tertentu dipertemukan dalam forum bahasa Indonesia seperti sekarang ini. Jadi dilihat dari sudut materi bahasa Indonesia peranan guru bahasa Indonesia menjadi *agent of change* yang dapat dimasyarakatkan dan dapat pula mencegah suatu gejala pertumbuhan perkembangan.

Ketiga dari sudut sastra

Sastra adalah budaya bangsa dengan bahasa sebagai alatnya. Sastra dengan segala bentuknya (sajak, prosa, prosa lyris, drama, dll) berisi curahan isi jiwa pengarangnya. Isi jiwa ini merupakan kekayaan rokhaniah dari bangsa yang memilikinya. Kekayaan rokhaniah itu bagi pengarangnya merupakan ketrampilan dan prestasi di alam pemikiran yang mengandung pesan spiritual yang dapat disampaikan kepada masyarakat pembacanya dari masa ke masa. Dari sudut pembacanya, kekayaan rokhaniah yang tersimpan di dalam sastra, merupakan sumber informasi, sumber kekuatan spiritual yang tiada habis-habisnya. Di dalam karya sastra kita jumpai nilai kultural yang harus kita lestarikan ataupun sebaliknya. Dari sudut sastra ini guru bahasa Indonesia dapat berbuat banyak bagi pembangunan. Dia sendiri dapat berkarya di bidang sastra secara produktif yang dapat menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada bangsanya. Bukanlah pengarang-pengarang kita jaman Balai Pustaka umumnya berasal dari kalangan guru? Di samping itu secara konsumtif guru bahasa Indonesia dapat menyerap isi karya sastra yang kemudian dapat ditransformasikan kepada para siswanya sebagai sarana pembentukan pribadi yang diharapkan. Sedangkan terhadap para siswanya, guru bahasa Indonesia dapat memperoleh dan mengarahkan agar para siswa yang berbakat sastra dapat berkembang menjadi sastrawan sesuai dengan bakatnya. Di samping itu dapat pula ia mengarahkan para siswa suka dan gemar menikmati isi karya sastra dengan membaca sendiri. Dalam kerang-

ka usaha yang demikian, guru bahasa Indonesia mendorong terbentuknya *masyarakat baca, masyarakat tulis dan masyarakat belajar*.

Keempat dari sudut ilmu pengetahuan

Bahasa adalah kunci untuk membuka khasanah pengetahuan. Kalau di dalam karya sastra terdapat pengetahuan dan nilai spiritual kultural, maka di dalam buku-buku ilmu pengetahuan terdapat pengetahuan dan teknologi dari berbagai disiplin. Hanya dengan bahasalah kita dapat menguasai ilmu tersebut. Dalam hal ini pun guru bahasa Indonesia dapat mendorong para siswa suka dan gemar membaca kitab ilmu pengetahuan. Suka membaca adalah proses belajar-mengajar secara pribadi yang berlangsung terus-menerus selama hidup.

Kelima dari sudut sosial

Dengan melewati bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia selalu dapat mengarahkan terciptanya jiwa persatuan dan kesatuan dalam rangka membina dan mempertahankan kerukunan nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang merupakan pancaran sifat masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Dengan lewat bahasa Indonesia, guru Bahasa Indonesia dapat ikut memantapkan pelaksanaan Wawasan Nusantara.

Keenam dari sudut pendidikan

Pendidikan adalah proses penanaman nilai, pembentukan sikap. Ia merupakan proses internalisasi nilai agar anak dapat menghayati nilai rohaniyah yang selanjutnya memancar dalam pola tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam proses pendidikan ini guru bahasa Indonesia dapat ikut mengambil bagian lewat pengajaran bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia kita jumpai bentuk-bentuk bahasa yang sudah membaku merupakan ungkapan nilai spiritual yang digali dan diangkat dari pengalaman hidup nenek moyang. Nilai-nilai ini diabadikan dalam bentuk ungkapan, peribahasa, pepatah petiti, perumpamaan, ibarat, pemeo, pengandaian dsb. Dengan memperkenalkan dan mendalami isi ungkapan-ungkapan di atas maka guru bahasa Indonesia sudah ikut berperan melaksanakan perintah GBHN bidang pendidikan yang antara lain berbunyi :

"Dalam rangka pelaksanaan nasional perlu diperluas dan ditingkatkan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat" .

Di bawah ini ditunjukkan beberapa contoh bentuk ungkapan yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang dapat digarap oleh guru bahasa Indonesia untuk menanamkan nilai sebagai usaha memperluas dan meningkatkan pelaksanaan P-4 Ekaprasetya Pancakarsa :

- Bulat air dalam pembuluh, bulat kata dalam mufakat (nilai demokrasi Pancasila).
- Tangan mencencang, bahu memikul (nilai tanggung jawab).
- Duduk sama rendah, berdiri sama tegak (nilai kesamaan harkat dan martabat).
- Duduk di bawah-bawah, mandi di hilir-hilir (nilai sopan santun tanpa kehilangan harga diri).
- Datang tampak muka, pergi tampak punggung (nilai keterbukaan, terus terang dan kejujuran).
- Berani karena benar takut karena salah (nilai kebenaran).
- Air jernih ikannya jinak (nilai ketenteraman sosial, stabilitas nasional).
- Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri (nilai cinta tanah air).
- Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampau (nilai efisien dan produktif).
- Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah (nilai keadilan sosial).
- Itu merupakan *suratan tangan* (nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa).

Demikianlah pembahasan kita terhadap peranan guru bahasa Indonesia dalam mensukseskan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Langkah-langkah yang perlu diambil

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia pada khususnya memiliki posisi dan fungsi yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu, agar posisi dan fungsi itu makin lebih berhasil guna dan tepat guna, maka oleh guru itu sendiri dan oleh yang berwajib pun perlu ditempuh beberapa langkah yang tepat. Langkah itu ialah :

1. Guru sendiri harus menyadari dan memahami akan tiga tugas suci yang ada padanya. Dengan memahami tiga tugas suci itu, mereka akan me-

mahami adanya tanggung jawab terhadap tiga tugas tadi. Tiga tugas suci itu adalah :

- a. Tugas kemanusiaan
- b. Tugas profesi
- c. Tugas civic

Dalam tugas kemanusiaan ini guru bahasa Indonesia secara sadar akan mendorong, membawa anak didik untuk selalu gemar membaca bacaan yang berfaedah bagi pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara manusiawi. Secara kodrati anak didik memerlukan bimbingan dan tuntutan di dalam perkembangannya. Maka sikap suka membaca yang ada pada anak didik sudah merupakan proses memperoleh bimbingan dan tuntutan. Dalam tugas profesi, guru harus selalu meningkatkan prestasinya. Guru bahasa Indonesia harus memiliki dan menguasai materi bahasa Indonesia yang masih di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan metodologi mengajarnya yang juga selalu tumbuh dan berkembang. Kiranya dalam hal metodologi yang melibatkan siswa belajar secara aktif. Dengan disadarinya adanya tugas profesi ini, maka hasil belajar dalam bidang bahasa Indonesia akan menjadi lebih memenuhi harapan. Sedangkan tugas civic yaitu tugas guru bahasa Indonesia sebagai warganegara. Dalam kaitan ini guru bahasa Indonesia akan selalu ikut memproses terbentuknya warganegara yang baik yaitu warganegara yang Pancasilais, patriotis, nasionalis. Bahasa Indonesia sebagai lambang integritas bangsa selalu memiliki kesempatan untuk membentuk jiwa anak didik menjadi nasionalis yang bersemangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam langkah yang pertama ini di samping usaha dari pribadi-pribadi para guru, perlu kiranya Pemerintah selalu berusaha meningkatkan kesadaran kaum guru itu lewat penataran-penataran.

2. Peningkatan minat baca anak didik. Guru di dalam ikut mensukseskan pembangunan nasional dapat menempuh jalan membina dan meningkatkan minat baca anak didik. Karena itu guru bahasa Indonesia harus tepat memilih bahan bacaan dan memberikan tugas membaca serta mengadakan penilikan dan penilaian terhadap anak didik.
3. Di samping meningkatkan minat baca, guru bahasa Indonesia harus dapat meningkatkan minat dan kemampuan menulis. Menulis adalah kegiatan berpikir. Maka dari itu kalau anak didik kita mampu dan besar minatnya untuk berkarya tulis-menulis akan tercapailah warganegara yang

mampu membudayakan tulisan. Ini berarti juga terciptalah masyarakat yang teratur tertib susunan pikirannya dan berdisiplin di dalam tingkah lakunya. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto, di depan Sidang Paripurna DPR-RI 16 Agustus 1972 menegaskan : *"Pembakuan bahasa mendidik pemakai bahasa berbahasa dengan tertib. Bahasa yang tertib menunjukkan cara berfikir dan bertindak yang tertib juga. Dan ketertiban itu merupakan dasar pokok dari hidup bermasyarakat yang berkebudayaan dan sejahtera"*.

4. Meningkatkan ketrampilan berbahasa yang teratur, baik lisan maupun tertulis. Biasanya orang suka melepaskan diri dari norma-norma bahasa, di dalam berbahasa lisan. Hal itu dalam batas kewajaran dapat diterima, tetapi dalam hal-hal tertentu kalau dibiarkan lanjut akan merusak bahasa Indonesia. Dalam hal yang demikian guru bahasa Indonesia memiliki legalitas untuk menegor memperbaiki dan memperingati para anak didik.
5. Melaksanakan dan menggalakkan apresiasi seni sastra di kalangan para siswa. Apresiasi seni sastra adalah langkah kegiatan menghayati karya seni sastra bangsanya. Dari langkah ini akan tercipta sikap mengagumi yang membawa rasa bangga terhadap bangsanya. Sikap mental yang demikian itu bagian dari sikap mental manusia seutuhnya.
6. Mengintegrasikan pelajaran bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa dalam media massa, pers, radio dan TV. Pengintegrasian ini sangat perlu karena para siswa dibawa kepada suatu situasi yang berkembang dan berlanjut. Kemampuan para siswa di dalam menyaring pertumbuhan bahasa akan makin meningkat.
7. Menintegrasikan pelajaran bahasa Indonesia dengan bahasa yang dipergunakan oleh para pemimpin. Para pemimpin mempunyai peranan juga di dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Tetapi tidak semua pertumbuhan dan perkembangan bahasa seperti halnya dalam media massa bersifat normatif. Dengan pengintegrasian ini anak didik menjadi tahu mana yang baik dan mana yang kurang atau tidak baik.

Kiranya masih banyak lagi langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru

bahasa Indonesia di dalam ikut mensukseskan pembangunan nasional lewat bahasa Indonesia ini.

Kesimpulan dan saran

Dari uraian yang disajikan oleh Pengurus Besar PGRI ini mengenai "Peranan Guru Bahasa Indonesia dalam menyukseskan Pembangunan Nasional" dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Kesimpulan

1. Menyuksesan pembinaan bahasa Indonesia berarti menyuksesan sebagian dari Pembangunan nasional yang hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.
2. Dalam membina bahasa Indonesia agar menjadi bahasa nasional yang tertib teratur dan mampu menjalankan tugasnya di dalam segala spek kehidupan, guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia khususnya mempunyai posisi strategis dan fungsi edukatif.
3. Guru bahasa Indonesia adalah komunikator bahasa antara bahasa Indonesia dalam masyarakat dengan bahasa Indonesia dikalangan pendidikan sehingga jarak di antara keduanya makin hari makin sempit.
4. Bahasa Indonesia menjadi lambang integritas bangsa Indonesia yang merupakan bentuk ungkapan perjuangan budaya bangsa yang memancarkan semangat persatuan kesatuan bangsa serta membawakan kebanggaan nasional.
5. Melalui bahasa Indonesia, guru dapat mentransformasikan nilai-nilai moral Pancasila kepada para siswa, sesuai dengan P-4 Ekaprasetya Pancasila.
6. Dengan bahasa Indonesia sebagai sarana, guru Indonesia dapat ikut berusaha membawa bangsa Indonesia ke dalam forum Internasional maupun regional.
7. Bahasa Indonesia tetap terbuka menerima unsur dari luar demi tugasnya, tetapi unsur dari luar itu jangan merusak pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri.

Saran

1. Perlu adanya usaha yang terus menerus dari yang berwajib untuk membina dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan berbahasa bagi guru pada umumnya dan guru bahasa Indonesia khususnya.
2. Perlu adanya pengawasan, bimbingan, supervisi khusus kepada pelaksanaan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah.
3. Perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan kuantitasnya dan kualitasnya.
4. Perlu ditingkatkan kegiatan membaca dan menulis di sekolah-sekolah, baik secara kurikulai, maupun secara ekstra kurikulai.

Penutup

Demikianlah penyajian PGRI di dalam ikut serta mensukseskan pembangunan nasional lewat forum Kongres Bahasa Indonesia yang dimuliakan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan apabila terdapat kekurangan/kekeliruan/kesalahan di dalam penyajiannya.

Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. *Ajip Rosidi Pembinaan Minat Baca 1973*, Panitia Buku Internasional DKI.
2. Alamsjah Ratu Prawiranegara Haji 1982
Pembinaan Kerukunan hidup umat beragama, Jakarta
3. Ali Moertopo 1972
Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 tahun, Jakarta Yayasan Proklamasi CSIS.
4. Ali Moertopo 1974
Strategi Politik Nasional Jakarta, CSIS
5. Ali Moertopo 1978
Strategi Kebudayaan : CSIS
6. Budhisantoso S. 1981/1982
Peranan keluarga dan pembinaan budaya bangsa. Dalam Analisa Kebudayaan I/II.
7. Daoed Joesoef 1981
Aspek-aspek Kebudayaan yang harus dikuasai guru. Dalam Analisis Kebudayaan I/II.
8. Hazairin SH, Prof. Dr. 1981
Demokrasi Pancasila, Jakarta, Binaaksara.
9. *Himpunan Pidato Presiden RI Bidang KESRA Tahun 1979 – 1980*. Departemen Penerangan Republik Indonesia.
10. *Himpunan Pidato Presiden RI Bidang Polkam-EKUIN-KESRA tahun 1980*, Departemen Penerangan Republik Indonesia.
11. *Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 1983/1984 pada Sidang DPR 1983*. Republik Indonesia
12. Koentjoroningrat 1974
Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, Jakarta Pt. Gramedia.

13. Koentjoro Poerbopranoto, Prof. Mr. 1973
Sistem Pemerintahan Demokrasi, Jakarta—Bandung Pt. Eresco cet. 3.
14. Miriam Budiardjo 1981
Partisipasi dan Partai Politik. Sebuah Bunga rampai, Jakarta Pt. Gramedia.
15. Miriam Budiardjo, Prof. 1982
Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : Pt. Gramedia.
16. Perusen C.A., Prof. Dr. 1976.
Strategi Kebudayaan, Jakarta Gunung Mulia.
17. *Pidato Kenegaraan Presiden RI Soeharto di depan Sidang DPR, 16 Agustus 1982*. Republik Indonesia.
18. Samsuri, Prof. Dr. 1978, Analisa Bahasa, Erlangga Jakarta.
19. Sartono Kartodirdjo 1977
Sejarah Nasional Indonesia I Jakarta, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
20. Sartono Kartodirdjo 1977
Sejarah Nasional II Jakarta, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Sekretaris Jenderal MPR 1978. *Ketetapan-ketetapan MPR RI Jakarta*, Setjen MPR RI.
22. *Seminar Pancasila ke I* 1959. Yogyakarta : Panitia Seminar Pancasila.
23. *Suwito 193*, SOSIOLINGUSTIK, Henary Offset, Surakarta.
24. *Taman Siswa 30 tahun*, 1981. Yogyakarta: Taman Siswa Cet III.
25. *Taman Siswa 60 tahun*. 1982. Yogyakarta : Percetakan Taman Siswa.
26. Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia 1978. *UUD 1945, P-4 dan GBHN*, Jakarta.
27. Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia 1978. *Buku materi pelengkap penataran*, Jakarta.

BAHASA ADMINISTRASI SEBAGAI BAHASA PELAYANAN

Bambang Sugema
Lembaga Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Pendahuluan

A. Tugas dan Fungsi Lembaga Administrasi Negara

Ditegaskan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1971 "Lembaga Administrasi Negara (LAN berfungsi membantu Presiden dalam menyempurnakan, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan dayaguna administrasi negara sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan dalam arti seluas-luasnya".

Selanjutnya dijabarkan dalam Keppres tersebut, bahwa dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, LAN mengemban tugas :

1. Menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dari segi ilmiah kepada Presiden mengenai penyempurnaan pembagian tugas, struktur organisasi dan tata kerja departemen-departemen dan badan-badan pemerintah lainnya;
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara;
3. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan pegawai negeri termasuk memberi petunjuk serta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan latihan dalam lingkungan departemen-departemen dan badan-badan pemerintah lainnya;
4. Memberikan pertimbangan-pertimbangan di bidang administrasi negara kepada instansi-instansi pemerintah dan instansi lainnya yang memerlukan dan dipandang perlu oleh lembaga;
5. Menyelenggarakan hubungan dan kerjasama di bidang administrasi

negara dengan instansi-instansi di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah menurut peraturan-peraturan yang berlaku;

6. Memperembangkan serta memajukan ilmu administrasi negara di Indonesia termasuk dalam hal ini mengeluarkan buku-buku pedoman yang bersifat teknis administratif di bidang tata administrasi pemerintahan.

Dari rumusan dalam Keppres tersebut tampak bahwa fungsi atau tugas LAN adalah "*pelayanan*". Ini diberikan melalui penerapan dan pengembangan administrasi berdayaguna.

Namun demikian, makalah dengan substansi kajian tentang bahasa Indonesia, tidaklah sepenuhnya disusun dari kacamata tugas pokok LAN secara keseluruhan. Sebab untuk menyusun makalah seperti ini memerlukan waktu yang lebih longgar. Padahal faktor kelonggaran waktu tersebut pada saat ini tidak tersedia. Oleh karena itu, makalah yang disusun hanya secara alamentar, dari kacamatan tugas LAN di bidang pendidikan dan latihan, lebih khusus lagi hanya dari kacamata Sekolah Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA-LAN RI) sebagai salah satu satuan organisasi (unit) Pendidikan dan Latihan pada LAN. Tentang STIA-LAN RI ini disajikan pada Bab II.

Jadi perlu diberikan pembatasan bahwa makalah ini hanyalah disusun sebagai hasil pengalaman STIA-LAN RI (bukan dari LAN secara keseluruhan), dalam pengajaran bahasa Indonesia yang tercakup dalam kurikulum sebagai mata kuliah dasar yang diberikan selama 4 semester terus menerus. Makalah ini disusun atas permintaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya No. 5/S/KBI/83 dalam rangka rencananya untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV pada tanggal 22 – 26 November 1983.

B. Bahasa sebagai Sarana Komunikasi yang Paling Berhasilguna (effective)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang luas tersebut di atas, LAN sangat bergantung kepada (salah satunya) pemakaian dan *penggunaan bahasa yang mudah dan dapat dicerna dengan baik* dengan tidak mengubah dan menyimpang dari aturan bahasa Indonesia yang baku yang dalam istilah populer sekarang dinamakan bahasa yang baik

dan benar. Bahasa yang baik mengandung makna bahwa dalam pemilihan kata, penggunaan ragam bahasa, cukup memudahkan pihak lain dalam mencerna dan menanggapi serta memahaminya. Sedangkan bahasa yang benar yaitu bahasa yang selalu mengikuti pola dan aturan bahasa yang baku.

Sesuai dengan fungsi dan tugas LAN tentunya diperlukan suatu bahasa Administrasi yang cukup memudahkan dalam rangka menjamin kelancaran jalannya administrasi pemerintahan sehingga terciptanya suatu pemerintahan yang bersih, berhasil-guna (*effective*) dan berdaya-guna (*effisien*). Hal ini akan sulit tercapai jika sarana utamanya yaitu bahasa tidak menunjangnya. Jelasnya bahasa administrasi harus benar-benar mencerminkan hakikat administrasi, yaitu "pelayanan" yang merupakan tugas dan fungsi dari LAN sebagaimana telah disinggung pada Sub Bab I/A. Agar "pelayanan" terlaksana dengan baik, artinya tepat pada sasarannya (*effective*, berhasil-guna) maka diperlukan *Komunikasi* yang baik. Komunikasi yang baik hanya dimungkinkan dengan penggunaan bahasa yang baik pula. Maka bahasa adalah sarana komunikasi yang paling berhasil-guna.

Dalam hubungan ini bagaimanakah kita pada dewasa ini menciptakan bahasa "pelayanan" dalam rangka menunjang kelancaran pembangunan. Dalam rangka itu pulalah kertas kerja ini kami beri judul "*Bahasa Administrasi Sebagai Ragam Bahasa Pelayanan*".

C. Sistematika Penulisan

Proses administrasi modern pada hakikatnya adalah memudahkan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. "*Memudahkan*" di sini tentunya dengan tetap berpegang teguh kepada segala norma tta kerja, koordinasi, peraturan perundangan yang berlaku dan sebagainya. "*Memudahkan*" dalam arti pelayanan harus terlaksana, baik dalam tugas-tugas pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan.

Agar sesuai dengan tugas dan fungsi LAN, serta dalam rangka memudahkan para pembaca dan peminat bahasa untuk mengikuti penyajiannya, maka makalah yang berjudul "*Bahasa Administrasi Sebagai Ragam Bahasa Pelayanan*" ini penulis susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bagian Pendahuluan menguraikan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, bahasa sebagai sarana komunikasi administrasi yang paling efektif, dan sistematika penulisan.

Bagian Pengajaran bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA—LAN RI), juga menguraikan STIA—LAN RI sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan, serta penjelasan tentang pengajaran bahasa Indonesia di STIA—LAN RI.

Bagian Permasalahan bahasa Indonesia, menguraikan tentang perlunya pembakuan bahasa, ketidaksejajaran dalam pembakuan istilah.

Bagian Kesimpulan dan Saran, menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari uraian dalam bab sebelumnya dan mengajukan beberapa bahan pertimbangan dalam pembinaan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang.

Pengajaran Bahasa Indonesia di STIA—LAN RI

Seperti telah dinyatakan di muka bahwa bahasa adalah sarana paling efektif dalam komunikasi administrasi, dan bahasa administrasi harus mencerminkan bahasa pelayanan sehingga benar-benar administrasi berperan maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan. Salah satu unit sebagai pelaksana tugas pokok LAN adalah *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi* yang bertugas menyiapkan tenaga ilmiah yang berkualifikasi sarjana dalam ilmu administrasi. Menyadari betapa berat beban yang dipikul para pemikir administrasi lulusan STIA—LAN RI, penyaji berkeyakinan bahasa yang baik dan benar akan mampu membantu meringankan beban yang berat tersebut. Penulis berkeyakinan dengan penguasaan bahasa yang memadai akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan ataupun tugas-tugas pelayanan. Selain itu bahasa memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan arah dan jalannya kehidupan manusia, dengan kata lain bahasa mempunyai "power". Pemakaian bahasa yang salah akan dapat menyesatkan seseorang. Sebaliknya dengan bahasa yang baik dan digunakan dengan arif akan menjadikan seseorang bijaksana.

Menyadari betapa pentingnya bahasa dalam komunikasi antarmanusia, maka dalam dunia administrasi, STIA—LAN RI dalam kurikulumnya menyediakan 4 semester untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Silabus mata kuliah bahasa Indonesia di STIA—LAN RI lebih menekankan aspek *komunikatif administratif* dari pada segi teoritis

kebahasaan, tanpa mengabaikan pola dan kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Harapan yang ingin dicapai dari pelajaran bahasa Indonesia di STIA—LAN RI tersebut adalah agar para lulusan memiliki kemampuan yang memadai dalam penguasaan bahasa Indonesia yang pada gilirannya kelak akan turut membantu memudahkan dalam memberikan pelayanan administrasi, sehingga kelancaran tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tidak terhambat.

A. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi — Lembaga Administrasi Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan

Berdasarkan Kpepres Nomor 5 Tahun 1971 (sesuai juga Keppres Nomor 34//1972 serta Inpres Nomor 15/1974), antara lain ditegaskan bahwa LAN mempunyai tugas "Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri, termasuk memberi petunjuk, serta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan latihan dalam lingkungan Departemen-departemen dan Badan-badan Pemerintah lainnya."

Kemudian terbit Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 003/LAN/SET/HK/1975, yang dalam pasal 11 menetapkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi — Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA—LAN RI) yang merupakan satu pusat pendidikan tinggi pegawai negeri, bertugas memberikan pendidikan akademik kepada Pegawai Negeri di bidang administrasi, merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan serta mengawasi seluruh pendidikan akademik Pegawai Negeri yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah.

Dari kutipan di atas tampak bahwa STIA—LAN RI bukan saja bertugas menyelenggarakan sendiri pendidikan tinggi kedinasan, tetapi berkewajiban juga membina pendidikan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah lainnya. Dalam hubungan ini dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan, STIA—LAN RI pertama-tama harus mampu menjadikan dirinya sebagai acuan lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam *disiplin (ilmu) administrasi* yang diselenggarakan instansi-instansi pemerintah.

B. Perkuliahan Bahasa Indonesia di STIA—LAN RI

Perkuliahan bahasa Indonesia di STIA—LAN RI seperti telah diuraikan di muka tidak ditujukan agar para lulusannya menguasai teori bahasa Indonesia secara mendalam, karena pengajaran seperti itu adalah menjadi tugas Fakultas Sastra. Pengajaran Bahasa Indonesia di STIA—LAN RI lebih ditujukan kepada kemampuan berbahasa Indonesia yang memadai dan berpola kepada kaidah kebahasaan yang baku dalam disiplin administrasi.

Tujuan ataupun hasil yang akan dicapai melalui kuliah bahasa Indonesia selama 4 semester di STIA—LAN RI adalah kemampuan praktis berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu silabusnya disusun sebagai berikut :

- Sejarah perkembangan bahasa Indonesia
- Ejaan
- Gejala bahasa
- Alat-alat eksplisit bahasa
- Politik bahasa Nasional
- Diksi
- Kalimat efektif
- Komposisi, meliputi paragraf, kerangka karangan, dan penyusunan karangan
- Definisi.

Permasalahan Bahasa Indonesia

Ingin penyaji mengemukakan pendapat bahwa perkembangan pengetahuan bahasa Indonesia termasuk paling pesat dibanding pengetahuan lainnya, terutama di Indonesia, bahkan termasuk pula di dunia perguruan tinggi non-fakultas bahasa. Perkembangan yang demikian itu sangat membanggakan dengan harapan semoga makin pesat lagi pada masa-masa datang, sehingga tercapailah harapan bahasa Indonesia selain menjadi bahasa resmi dan bahasa nasional juga benar-benar menjadi bahasa ilmiah dan bahasa teknologi modern.

Menyimak keadaan sehari-hari masalah kebahasaan itu, ternyata di sana-sini ditemukan adanya ketidaksejajaran, baik yang disebabkan para pemakai bahasa pada umumnya, maupun karena kekurangacermatan lembaga yang bertugas dalam bidang pembinaan bahasa. Dalam kesempatan ini penulis berharap agar dalam pembakuan tetap berpegang

teguh kepada watak asli bahasa Indonesia, baik fonemnya maupun unsur-unsur bahasa lainnya. Dewasa ini tampaknya pembakuan bahasa kurang memperhatikan watak asli bahasa Indonesia itu.

Karena itu sebenarnya ada juga kekhawatiran penyaji bahwa kalau pembakuan tersebut kurang diperhatikan, maka bagian terbesar bangsa kita akan tidak mampu lagi menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar.

A. Pembakuan Bahasa Indonesia

1. Pembakuan Sintaksis

Dalam pembakuan sintaksis penulis (penyaji) berpendapat bahwa para pembina bahasa sudah cukup berusaha sehingga aada umumnya pola kalimat bahasa kita sudah sesuai dengan kaidahnya. Kalaupun masih sering kita baca dan dengar orang alam kesempatan berbicara resmi menggunakan kalimat yang tidak berpola kalimat bahasa Indonesia yang baku, maka hal demikian tentunya disebabkan kekurangcermatan dan rasa bahasa pemakai bahasa itu yang tipis. Berikut ini beberapa contoh kalimat yang ditulis di depan kantor-kantor pemerintah yang tidak berpola kalimat bahasa Indonesia baku :

- Dengan semangat 17 Agustus 1945 kita menyiapkan untuk melaksanakan Pelita IV. Seharusnya : Dengan semangat 17 Agustus 1945 kita siapkan pelaksanaan Pelita IV.
atau
Dengan semangat 17 Agustus 1945 kita siap melaksanakan Pelita IV.
- Dirgahayu RI 38. Seharusnya : Dirgahayu RI, selamat HUT ke-38.

2. Pembakuan Susunan Kata

Penulis (penyaji) yakin para pembina bahasa telah berbuat banyak tentang penulisan susunan kata bahasa Indonesia itu harus ber hukum "*diterangkan-menerangkan*" (DM). Meskipun alam praktek sehari-hari masih saja banyak pemakai bahasa tidak mengindahkan kaidah pokok bahasa kita. Dengan mudah kita lihat contoh-contoh susunan kata yang tidak baku, antara lain : Kartika Plaza, President Hotel, Hilton Hotel, dan lain-lain.

3. Pembakuan Kata/Istilah

Dalam bahasa Indonesia mungkin yang paling banyak membutuhkan perhatian adalah dalam hal pembakuan kata atau istilah, baik yang diambil dari bahasa kita sendiri (daerah) maupun hasil serapan dari bahasa asing.

Pembakuan kata/istilah ini sangat penting dilakukan terutama agar bahasa Indonesia mampu menyerap segala kepentingan permasalahan teknologi modern.

Permasalahan pembakuan istilah dalam bahasa kita dewasa ini sangat rumit dan tidak mudah dipahami oleh para sarjana sekalipun, apalagi oleh masyarakat umum.

Berikut ini dapat penulis kemukakan pembentukan istilah sebagai bahan perbandingan :

a. Hasil serapan lama

fatsal	menjadi	pasal
fiqir	menjadi	pikir
akhli	menjadi	ahli
voorchot	menjadi	persekot
chauffeur	menjadi	sopir
almari	menjadi	lemari
asbab	menjadi	sebab
stroop	menjadi	sirop
sauveneir	menjadi	supenir
bureau	menjadi	biro

b. Hasil serapan dewasa ini

khusus	menjadi	khusus (jadi tetap saja)
service	menjadi	servis
success	menjadi	sukses
system/systeem	menjadi	sistem
psychology	menjadi	psikologi
effective	menjadi	efektif
analysis	menjadi	analisis
neveau	menjadi	nivo
organization	menjadi	organisasi
standardization	menjadi	standarisasi

coordination	menjadi	koordinasi
cooperation	menjadi	koperasi
dan lain-lain.		

Memperhatikan pembentukan istilah seperti contoh di atas tampak bahwa bentukan istilah hasil bahasa Indonesia terdahulu lebih mencerminkan kaidah fonemik bahasa Indonesia, sebaliknya pembakuan istilah yang dilakukan dewasa ini menunjukkan kekaburan fonemik bahasa kita. Selain itu pada bahasa kita dewasa ini ada kecenderungan mengikuti fonem bahasa asing terutama dalam nama-nama bulan. Mengapa nama Pebruari diubah menjadi Februari, Nopember menjadi November, bukankah nama Pebruari dan Nopember itu adalah nama Indonesia meskipun hasil serapan dari bahasa asing?

Dalam kaitan ini kiranya perlu ketegasan dari instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bahasa untuk segera mengeluarkan pembakuan istilah yang benar-benar berdasar fonemik bahasa Indonesia. Di samping itu penulis lihat juga bahwa di antara pemikir dan ilmuwan bahasa kita belum sependapat tentang pembakuan istilah ini. Ada ahli bahasa kita menulis "analisis" sedangkan ahli lainnya masih menulis "analisa".

B. Ketidak Sejalan dalam Pembentukan Istilah

Dengan mudah kita dapati pembentukan istilah yang tidak sejalan dengan kaidah bahasa kita, umpamanya :

Kata *ahli* yang baku dalam bahasa kita berasal dari bahasa Arab *akhli*. Bunyi *kh* diserap menjadi *h* karena bunyi *kh* itu lebih dekat dengan fonem bahasa kita *h*. Sebanding dengan itu kata *khusus* dari bahasa Arab juga diserap ke dalam bahasa kita menjadi *khusus*. Mengapa bukan *husus*?

Kata *psikologi* hasil serapan dari kata Inggris *psychology*. Bukanlah *ch* dalam kata *psychology* juga lebih dekat dengan bunyi *h*, kata *architec* diserap ke dalam bahasa kita *arsitek* (?).

Kata *service* dari bahasa Inggris menjadi servis, bentuk katanya adalah *diservis*, *serviskan*, *menyervis*, *menyerviskan*.

Kata *success* (Inggris) diserap ke dalam bahasa kita menjadi *sukses*. Bentuknya adalah *sukseskan*, *disukseskan*, *suksesnya*, *mensukseskan*.

Dari dua contoh di atas (servis dan sukses) tampak ketidaksejajaran pembentukan katanya. Kata bentuknya *menyervissesuai* dengan kaidah bahasa Indonesia awalan *me* diikuti bunyi *a, s* menjadi luluh. Sedangkan kata sukses mengapa menjadi mensukseskan? Bukankah harus menyukkseskan (?).

Kita lihat * yang lain lagi. Yang penulis maksudkan adalah bentuk dari kata *photo* dan *photocopy* menjadi :

difoto	memfotokan	memfotokopikan
difotokan	difotokopi	fotokopinya
memfoto	difotokopikan	
memfotoi	memfotokopi	

Di samping itu mengapa bunyi *v* dan *f* tidak diserap saja ke dalam fonem bahasa kita yang asli *p*. Dalam bentukan kata-kata *foto* menjadi *memfotoi* akan bermakna *meletakkan, memberi, atau menyematkan* foto. Padahal yang dimaksud adalah mengambil gambar yang dilakukan berulang-ulang. Pengertian itu akan dapat dipenuhi dengan kata *memotoi*, hal tersebut dapat dilakukan jika bunyi *f* diserap menjadi *p*, sebab awalan *me* diikuti fonem *p*, *p* akan luluh *memoto* bukan *mempoto*.

Kesimpulan dan saran-saran

A. Kesimpulan

1. Penulis (penyaji) bukan seorang ahli bahasa oleh karena itu kesempatan untuk menyajikan kertas kerja dalam Kongres Bahasa IV yang mulia ini, benar-benar suatu penghargaan yang tidak ternilai. Namun kiranya panitia dan peserta kongres yakin bahwa penulis meskipun bukan ahli, tetapi mohon dicatat sebagai pencinta bahasa Indonesia yang terdepan.
2. Kertas kerja ini disusun sesuai dengan bidang tugas penulis sebagai praktisi bahasa, sehingga kertas kerja ini lebih mencerminkan bahasa Indonesia *keseharian*.
3. Sebagai orang yang berkecimpung dalam ilmu administrasi, ilmu yang mengembangkan berhasilnya tugas-tugas pelayanan, penulis (penyaji) *mengakui* bahwa bahasa Indonesia adalah merupakan wahana komunikasi yang paling efektif untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu administrasi di Indonesia yang sekaligus menunjang berhasilnya pelaksanaan tugas-tugas umum pemerin-

tah dan pembangunan. Ini lebih memperkuat keyakinan penulis (penyaji) bahwa bahasa administrasi sebagai ragam bahasa pelayanan.

4. Dari uraian di atas ternyata bahasa kita perkembangannya demikian maju dan sangat membanggakan.
5. Dalam perkembangan yang pesat itu penulis merasakan adanya hal positif maupun yang negatif.
6. Kenegatifannya terutama dalam pembentukan istilah-istilah baru yang cukup rumit dicerna oleh para cendekiawan sekalipun, apalagi oleh sebagian terbesar anggota masyarakat kita.
7. Keadaan demikian bukan saja berakibat akan sangat sedikit di antara kita yang mampu berbahasa yang baik dan benar, baik lisan maupun tertulis, lebih jauh dari itu akan menghambat pembangunan, karena sarana penyampaian informasi yang utama yaitu bahasa dapat menimbulkan kesenjangan.

B. Saran-saran

1. Peranan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang hingga saat ini umum mengetahui, adalah sangat berjasa dalam membina bahasa Indonesia. Penulis berharap agar keberhasilan tersebut terus ditingkatkan sampai dengan bahasa Indonesia benar-benar menjadi bahasa ilmiah dan teknologi modern, di samping bahasa nasional dan bahasa resmi.
2. Momentum kegairahan masyarakat akan bahasa Indonesia saat ini sangat besar dan sangat menggembirakan kita semua. Penulis sarankan agar segera dapat dimulai atau dilanjutkan kampanye besar-besaran tentang keharusan menggunakan istilah bahasa Indonesia, selagi masih tersedia kata bahasa Indonesia untuk keperluan itu. Umpamanya, kalau tidak perlu lagi memakai kata *tailor* alih-alih kata *penjahit*; *barbershop* alih-alih kata *pemangkas rambut*.

Cukup beralasan kalau penulis (penyaji) khawatir, jika pada suatu saat ada seseorang mencari tukang cukup tidak dapat menemukannya karena yang ada hanya *barbershop*.

Satu hal lagi kata serapan dari bahasa asing seperti *fotokopi* sesuai dengan hukum bahasa kita (DM) mestinya *kofifoto*, penulis sarankan agar dibakukan saja menjadi *kopifoto*. Mungkin

pertama-tama terasa janggal, seperti dulu *mobrig* (mobile brigade) diubah menjadi *brimob* (brigade mobile), waktu baru-baru diubah memang kita merasa janggal, bagaimana sekarang (?).

3. Dalam pembentukan istilah, penulis (penyaji) sarankan agar fonem yang berasal dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan sejauh mungkin disesuaikan dengan fonem bahasa kita, sebaiknya serap saja ke dalam fonem bahasa kita. Hal tersebut penting supaya bahasa kita dapat mudah dan cepat dipahami oleh bangsa kita seluas-luasnya.
4. Pengakuan dan keyakinan tentang pentingnya bahasa administrasi sebagai ragam bahasa pelayanan, hendaklah didukung pula oleh langkah-langkah nyata pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, misalnya melalui :
 - a. Kerjasama yang terpadu antara LAN dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam penulisan dan penerbitan buku-buku administrasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
 - b. Menghidupkan lagi tim (yang pernah ada sebelum tahun 1965) penyusunan peristilahan (*glossary*) ilmiah dalam ilmu administrasi dalam bahasa Indonesia yang membaku.

PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA DAN PEMBANGUNAN BUKU

Harris M. Nasution
Ikatan Penerbit Indonesia

Pendahuluan

Dalam rangka berlangsungnya Kongres Bahasa Indonesia IV, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengharapkan kesediaan kami untuk menulis sebuah kertas kerja yang akan disajikan dalam Kongres tersebut.

IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), adalah satu organisasi profesi penerbit swasta yang didirikan sejak 17 Mei 1950. Tujuan IKAPI adalah meningkatkan penerbitan buku, secara kuantitatif maupun kualitatif. IKAPI aktif melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan perbukuan sebagai usaha industri, sejajar dengan sikap moral untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dewasa ini IKAPI berada dalam naungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami memilih judul : Pengembangan Bahasa dan Pembangunan Buku untuk kertas kerja ini, adalah untuk dua tujuan utama yang saling berkaitan :

Pertama : Pengembangan Bahasa Indonesia, memelihara dan mempergunakannya dengan baik dan benar, merupakan cita-cita dan pelaksanaan yang dituntut kepada semua anggota dalam usaha penerbitan buku.

Kedua : Pembangunan Buku, mengandung unsur makna : membina, mendirikan, membangkitkan dan menegakkan. Ke arah itulah ditujukan pelaksanaan cita-cita dalam bidang perbukuan, Pembangunan !

Tidak mudah untuk menulis/menyajikan suatu kertas kerja dalam satu forum Kongres Bahasa. Terasa beratnya untuk menyusun kata demi kata untuk menjadi kalimat. Sudah sewajarnya kertas kerja itu harus tersusun mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, para ahli bahasa yang hadir dalam Kongres ini akan mafhum dan dapat memperbaiki

kesalahan susunan kata dan kalimat, justru kami sebagai penerbit, belum termasuk dalam jajaran yang berpengalaman cukup dalam tata bahasa.

Berbicara soal bahasa, kita tidak dapat melepaskan diri dari soal buku. Buku menjadi sayap dari perkembangan bahasa. Buku adalah bahasa tulisan. Buku berbicara dengan bahasa tanpa suara. Bicara buku dapat disimpan dan apabila waktunya ia selalu bersedia untuk diajak bicara.

Banyak kata-kata semboyan yang diberikan kepada buku. Buku adalah guru yang tak pernah jemu. Buku guru yang baik, tanpa pernah bertemu muka. Buku menjadi sarana pokok untuk menyimpan dan menyebarkan khazanah dunia ilmu pengetahuan. Tahun Buku Internasional tahun 1972, Konferensi Umum UNESCO, telah memproklamasikan semboyan : "Buku untuk semua orang".

Buku adalah produk industri yang mempunyai fungsi tersendiri, dibandingkan dengan produk lainnya. Karena ia tidak hanya barang dagangan yang bertujuan komersial saja. Buku harus membawakan idealisme yang diperlukan oleh masyarakat dalam menunjang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain dari itu buku pun harus diproduksi secara terpadu, antara : pengarang/penerjemah, penerbit, ilustrator, pencetak, toko buku dan konsumen pembaca. Kehilangan salah satu partner, berarti gagalnya produksi.

Terdapat hubungan yang erat antara bahasa dan buku.

Permasalahan

Terdapat tugas dan kewajiban yang berat pada kita dalam menunjang pelaksanaan PELITA IV yang segera kita masuki. Di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pendidikan, yang berkaitan dengan masalah pengembangan bahasa dan penerbitan buku, terdapat hal berikut :

Bidang Kebudayaan

- f. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar.
- g. Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu sarana identitas nasional.

Bidang Pendidikan

- p. Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia perlu makin ditingkatkan dan diperluas sehingga mencakup semua lembaga pendidikan dan menjangkau masyarakat luas.
- q. Kepustakaan serta penerbitan, penulisan dan penerjemahan buku dan terbitan lainnya, perlu lebih ditingkatkan jumlah dan mutunya sehingga dapat lebih menunjang program-program pendidikan dan pembangunan bangsa.

Dari kutipan di atas sudah jelas tugas yang harus kita jalankan bertalian dengan pengembangan bahasa dan peningkatan perbukuan.

Dalam usaha pengembangan bahasa, memang sudah ada modal dasar yang kita miliki, warisan tak ternilai harganya, yaitu SUMPAH PEMUDA.

Pada saat-saat dalam suasana Kongres Bahasa seperti yang berlangsung sekarang, kita makin terkesan akan arti dan jasa para pemuda Indonesia yang telah mendapat anugerah pemikiran dari Allah swt, untuk mencetuskan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dengan susunan kalimat yang sederhana :

Berbangsa satu Bangsa Indonesia, bertanah air satu, Tanah Air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia.

Mereka adalah pelopor, pejuang dan representasi kehendak dan sikap masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan beraneka ragam bahasa.

Sejak Sumpah Pemuda itu dicetuskan, maka kedudukan Bahasa Indonesia berada dalam kondisi stabil. Suku bangsa yang mempunyai bahasa daerah, walaupun dalam jumlah mayoritas, berikhlas hati dan melaksanakan dalam praktek, untuk mempergunakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa suku daerah minoritas. Inilah satu kebanggaan rohani. Jika dibandingkan dengan negara tetangga atau negara berkembang lainnya yang belum berhasil mempunyai satu bahasa kesatuan, kita bersyukur dan bahagia.

Pemikiran manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, memasyarakatkan ideologi Negara, melaksanakan usaha demi usaha dalam pembangunan, disalurkan melalui bahasa, baik lisan maupun tulisan. Tanpa bahasa yang cukup tangguh untuk menguraikan dan menjabarkan semua tujuan, bisa terjadi kebekuan. Karena itu sudah tidak dapat dimungkiri lagi bahwa bahasa memerlukan kesempurnaan dan kekuatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan maksud membangkitkan manusia Indonesia seutuhnya.

Bagaimana usaha memantapkan perkembangan bahasa untuk dapat mencapai setiap warga negara? Bagaimana supaya Bahasa Ibu yang keramat

itu dapat dihayati, dimengerti, dibaca dan diucapkan? Bagaimana pula supaya bahasa yang dalam perkembangan ini, mampu menguraikan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir?

Dalam kenyataan, pertanyaan di atas tentu sudah ada yang terjawab, namun masih memerlukan penyempurnaan. Kongres IV ini diantaranya akan mengarah ke sana.

Kami sebagai penerbit buku, dihubungkan dengan para penulis, penerjemah atau penerjemah, masih menghadapi kesulitan dalam penulisan naskah-naskah untuk perguruan tinggi atau teknologi. Hal itu terbentur pada kemampuan istilah yang belum memadai atau karena si penulis sendiri belum mampu menjangkau pembentukan istilah baru. Istilah atau pembentukan istilah baru yang telah ditetapkan oleh Pengembangan Bahasa belum tersebar luas sebagaimana diharapkan. Perlu satu usaha terpadu antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Penerbit, Pengarang dan Penerjemah, untuk mencapai tujuan tersebut. Penerbit yang mempunyai staf Editor bersama-sama dengan Pengarang dan Penerjemah dapat memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan perkembangan bahasa.

Tercatat dalam sejarah bahwa tidak sedikit penerbit buku yang aktif dan berjasa, baik secara langsung atau tidak langsung, membantu penyebaran dan perkembangan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ini. Nama penerbit Balai Pustaka tercatat diantaranya.

Diketahui bahwa sudah banyak buku yang diterbitkan langsung oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tentang berbagai petunjuk baik ejaan yang disempurnakan maupun tentang istilah ataupun kata-kata baru. Namun penyebarluasan buku tersebut amat terbatas. Apakah tidak lebih baik, manakala cetak lanjutan dari buku-buku tersebut, yang hak ciptanya berada di tangan (Team atau Departemen?), ditawarkan kepada penerbit swasta, langsung atau melalui koordinasi IKAPI.

Patut disyukuri adanya kerja keras tanpa pamrih dari para ahli bahasa, khususnya tenaga-tenaga yang terhimpun dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Namun walau betapapun derasnya perkembangan itu, kalau tidak diiringi dengan derasnya arus penyampaian dan penjangkauan terhadap orang atau masyarakat yang harus dibina dan kembangkan bahasanya. Masih cukup banyak terdapat pemakaian bahasa Indonesia yang tidak benar dan tidak baik, tulisan atau lisan. Hal ini dijumpai pada surat-surat kabar ataupun buku atau dalam ucapan-ucapan pidato. Masalahnya karena mereka belum terjangkau oleh pembinaan dan pengembangan.

Semua orang tentu ingin mempergunakan bahasa yang baik dan benar.

Mempergunakan bahasa yang salah itu tidak disengaja. Masalahnya adalah karena si pemakai tidak serius mengikuti perkembangan bahasa atau perkembangan bahasa itu sendiri tidak sampai kepada si pemakai.

Usia bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sudah mencapai umur yang cukup tua, 55 tahun. Peranan waktu yang demikian lanjut, seharusnya kita sudah sampai pada pengembangan penyempurnaan. Seharusnya memang kita sudah harus merasa malu, manakala masih terdapat pemakaian bahasa dalam bacaan sehari-hari, surat kabar, majalah atau buku, jauh dari baik dan benar, bahkan dalam ejaanpun banyak terdapat kekeliruan.

Terasa perlunya penetapan politik bahasa nasional yang memberi arah, praktis dan mengharuskan penggunaan bahasa secara konsekwen, bahasa yang baik dan benar *in action*.

Seperti telah diuraikan tadi, peranan pers dan buku, cukup penting dalam pengembangan bahasa.

Data sementara yang tercatat pada IKAPI, tahun-tahun terakhir ini adalah sekitar 4000 judul buku yang diterbitkan setiap tahun. Jumlah ini belum termasuk buku-buku yang diterbitkan oleh Pemerintah/Departemen-departemen dan lain-lainnya. Sebutkanlah bahwa tahun yang lalu diterbitkan 5000 judul buku dengan oplah rata-rata 5000 eksemplar. Perkiraan itu berarti ada 14 judul buku yang terbit setiap hari dikalikan 5000 eksemplar atau 70.000 buku. Buku itu diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Masalahnya apakah buku itu, - yang nota bene bisa menjadi tolak ukur bagi pembacanya dalam pemakaian bahasa yang baik dan benar, - sudah mempergunakan bahasa baku sebagaimana diharapkan? Buku itu akan dibaca, disimpan dalam lemari pribadi atau perpustakaan dan diulang lagi membacanya oleh satu atau banyak orang.

Manakala buku yang sampai setiap hari ketangan pembaca adalah sekian jumlahnya, maka penyebaran dan penerbitan surat kabar, majalah masih berlipat ganda, jutaan lembar. Sampai di mana pengaruh pemakaian bahasa yang kurang baik dan benar, jika terdapat dalam bacaan tersebut, terhadap pembaca?

Memang ada alasan yang dapat diajukan oleh pengasuh surat kabar tentang terdapatnya pemakaian kata yang tidak baik menurut tata bahasa, yaitu : penyusunan berita/tulisan dalam surat kabar perlu mengejar waktu. Berbeda dengan penyusunan buku, terdapat cukup waktu. Namun harus dipertanyakan, sejauh mana batas waktu bahwa pemakaian bahasa dalam surat kabar atau buku harus dapat menjadi pembimbing bagi pembaca.

Dari dua medi ayang cukup tangguh untuk membantu pengembangan

bahasa, yaitu buku dan surat kabar, ada satu kepastian, ialah : Buku atau surat kabar yang mempunyai susunan bahasa yang baik dan benar, positif akan menunjang pembinaan bahasa. Sebaliknya kedua media tersebut dapat merusak, sekurang-kurangnya meragukan, mengelirukan dan memperlambat perkembangan

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam usaha pengembangan bahasa, ialah masalah Minat Baca. Masyarakat yang banyak membaca dapat mempercepat tercapainya pembinaan dan pengembangan bahasa.

Minat (*interest*) membaca adalah karena dorongan keinginan, sikap, perasaan, perhatian dan sebagainya. Karena itu ada faktor yang harus digalakkan, untuk sampai kepada Minat Membaca. Termasuk dalam faktor itu : fisik buku, isi, ilustrasi/disain, susunan bahasa dan faktor harga yang relatif murah, dapat terjangkau oleh kantong masyarakat umum.

Sudah sering menjadi pembahasan, bahwa Minat Baca dalam masyarakat kita, (*reading interest, reading habit*), masih rendah. Benarkah demikian?

Menurut hemat kami, pembahasan dalam hal ini dapat diberikan dalam penempatan dua hal :

Pertama : Dibandingkan dengan Negara maju seperti Jepang, Inggris dan lain-lain sebagainya, masyarakat kita masih jauh ketinggalan.

Kedua : Pengalaman menunjukkan, bahwa pada masa-masa akhir ini, setiap ada Pameran Buku, baik di daerah atau di ibu kota, minat terhadap buku dan pembelinya cukup memuaskan. Minat baca itu ada dan bergerak meningkat di tengah masyarakat.

Sambutan masyarakat terhadap adanya pameran buku di daerah mengembirakan. Banyak buku yang diterbitkan oleh para penerbit yang kebanyakan berada di ibu kota (Jakarta), tidak sampai penyebarannya ke daerah. Hal itu adalah karena masalah teknis. Di antaranya adalah karena mahalanya ongkos kirim, berbeda dengan ongkos kirim yang rendah untuk koran dan majalah. Penyebab lainnya adalah karena pelaksanaan aturan perdagangan yang harus melalui toko buku setempat. Toko-toko buku masih kurang jumlahnya dan mempunyai modal yang relatif lemah. Untuk Toko Buku dan Penerbit masih sulit mendapat sentuhan kredit bank, bahwa buku tidak dapat dijadikan agunan.

Minat Membaca bukanlah bakat yang terbawa lahir. Ia harus dibiasakan, diusahakan, dipelajari, dijadikan sikap dan harus diyakinkan sebagai salah satu faktor untuk mencapai keberhasilan. Orang yang sudah sampai pada taraf Minat Membaca, menjadikan ia gemar membaca, tentu ia akan

dapat mencapai prestasi tinggi, makin besar motivasi dan makin tinggi hasil kerja dan kesuksesannya.

Adanya Minat Membaca di tengah masyarakat, akan lebih memudahkan usaha pengembangan dan pembinaan bahasa melalui media bacaan.

Pembahasan

Dasar yang paling berharga sudah ada pada kita: sumpah untuk menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Aparat Pemerintah yang berusaha membina dan mengembangkan bahasa itu pun sudah bergerak sewajarnya.

Para ahli bahasa cukup dan meyakinkan. Alat penyebaran, radio, televisi, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan.

Masih tersendar-sendatkah pembinaan dan pengembangan bahasa itu. Sudahkah ada target atau program dan jangka waktu yang ditentukan, sehingga pengembangan itu sudah *take off* atau sudah landing atau masih di landasan menunggu penumpang?

Gerakan pengembangan bahasa tidak dapat dicapai hanya dengan aktivitas suatu lembaga atau instansi. Usaha harus terpadu dengan mengikutsertakan tenaga-tenaga yang diperlukan. Hal itulah tentu yang mendorong Pusat Pembinaan Bahasa, untuk mengadakan Kongres yang sekarang sedang berlangsung. Kongres akan menentukan dan mengambil keputusan penting dan menggariskan program pelaksanaan pengembangan.

Putusan dalam Kongres ini tentu penting. Namun pelaksanaan program akan lebih penting lagi. Menurut hemat kami program itu pun harus dijalankan secara terpadu, lanjutan dari jiwa Kongres ini.

Dalam pembahasan ini, kami dari IKAPI akan menkhususkan diri dalam hal yang berkaitan dengan tugas organisasi profesi kami sebagai penerbit buku.

IKAPI sebagai organisasi yang berada dalam pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sudah positif dapat menempatkan diri sebagai partner dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa, bersama-sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Khusus dalam penerbitan buku yang berkaitan dengan pengembangan bahasa, IKAPI akan mendudukkan masalah, sebagai pendukung, mendahulukan idiologi pembangunan bangsa melebihi tujuan komersial segi usaha. Untuk itu IKAPI menyediakan diri dalam kedudukan yang wajar, untuk

ikut berpartisipasi menyebarluaskan penerbitan buku yang bertalian dengan pembinaan dan pengembangan bahasa.

Dalam pelaksanaannya tentu banyak hal yang perlu menjadi perhatian, di antaranya :

1. Naskah-naskah/buku yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang diterbitkan secara terbatas, supaya diserahkan izin penerbitannya kepada anggota-anggota cq IKAPI sebagai koordinator, dengan ketentuan yang dapat dimusyawarahkan pelaksanaannya.
2. Untuk menjangkau harga penjualan yang relatif murah, sehingga dapat tersebar luas, secara bersama-sama harus diusahakan :
 - a. bahan baku kertas yang bebas bea atau yang memperoleh subsidi, khusus untuk buku yang beralian isi dengan pembinaan/pengembangan bahasa;
 - b. ongkos kirim khusus untuk buku tersebut diberikan keringanan, minimal seperti ongkos kirim yang diberikan kepada surat kabar;
 - c. harga penjualan ditentukan secara bersama;
 - d. kredit permodalan akan lebih memperlancar tujuan usaha ini.

Rencana tersebut dapat dijadwalkan, belaku selama program pengembangan dalam Pelita IV. Naskah-naskah buku yang dimaksudkan tidak hanya terbatas pada kepunyaan Pusat Pembinaan, tetapi mencakup semua naskah/buku yang berisi tentang pelajaran/pengembangan bahasa, termasuk Kamus dan lain-lain.

Pemakaian bahasa, tidak terbatas pada satu kelompok tertentu. Tidak mungkin kalau pelaksanaan pemakaian yang baik dan benar itu hanya dikuasai oleh anak didik atau guru-guru atau lingkungan intelektual saja. Perkembangan bahasa yang terjadi sekarang cukup deras arusnya dipandang dari segi pemakaian istilah-istilah baru. Karena itu penyebarluasannya pun harus bersifat deras, aktif dan menyeluruh. Penyebaran via buku adalah salah satu usaha yang efektif.

Segala ketetapan yang telah diambil oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, buku-buku petunjuk yang disusun oleh para ahli bahasa, keputusan-keputusan yang diambil di dalam Kongres ini, harus tersebar luas untuk menjadi pedoman dan pegangan. Rakyat Indonesia berpenduduk 150 juta lebih. Sebutkanlah seperlima dari jumlah itu harus mengetahui dan mempunyai pedoman pemakaian bahasa yang baku. Bukankah itu berarti

harus tersedia buku pedoman dan buku petunjuk lainnya sebesar sekian juta yang diperlukan. Apakah artinya jika oplah buku untuk penyebaran bahasa itu hanya berkisar 5000 eksemplar saja? Di sinilah letaknya uluran tangan Pemerintah bersama-sama swasta melakukan aksi, aktif seperti disebutkan sebelumnya.

Buku-buku yang diterbitkan dengan bahasa yang dapat merusak tertib bahasa baku pun harus mendapat perhatian yang ketat. Buku seperti ini banyak terdapat, karena ujud penerbitan yang hanya komersial.

Khusus dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, kami ingin menghimbau supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Kongres IV, tidak hanya memperhatikannya setengah-setengah atau hanya sekedar putusan yang tidak pernah terjangkau oleh pelaksanaan. Dasar tugas yang digariskan dalam GBHN cukup jelas. Bahasa daerah harus dipelihara sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup.

Kami dari penerbit buku sekarang ini, sudah merasakan betapa sulitnya untuk memperoleh naskah atau penulis yang dapat menyusun bahasa daerah yang "baku", utamanya bahasa daerah di luar pulau Jawa. Bahasa daerah Jawa, Sunda, masih memadai ahli dan penulisnya, tetapi beberapa bahasa daerah lainnya telah ada yang dikhawatirkan akan musnah perlahan-lahan.

Memperhatikan bahwa penerbitan buku bahasa daerah, tentu terbatas oplahnya, maka pihak Pemerintah sudah sewajarnya untuk mengulurkan tangan. Penerbit swasta yang menerbitkan buku bahasa daerah, wajar untuk memperoleh subsidi. Tujuan ini pun dapat dicapai, jika penerbit milik Pemerintah dikerahkan secara aktif untuk mencapai tujuan menggalakkan pemeliharaan bahasa daerah.

Bahasa daerah banyak berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan setempat dan bernilai tinggi. Bahasa daerah ada yang lebih mantap pemakaiannya ketimbang bahasa nasional, khususnya untuk daerah di mana bahasa itu berkembang. Prinsipnya bahasa daerah adalah penunjang perkembangan kebudayaan nasional. Perkembangan bahasa nasional seharusnya sejajar dengan perkembangan bahasa daerah.

Kesimpulan dan Usul

1. Bahasa Indonesia adalah sarana untuk menyukseskan pembangunan nasional.
2. Bahasa daerah sebagai alat perhubungan masyarakat pemakainya dan

sebagai penunjang pertumbuhan kebudayaan nasional, hendaklah diintensifkan pemeliharaan dan perkembangannya.

3. Jangka waktu Pelita IV, supaya dijadwalkan sebagai "gerak masyarakat" memantapkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, mempergunakannya dengan baik dan benar.
4. Seusai Kongres Bahasa Indonesia IV, hendaklah dibentuk gerakan lanjutan terpadu antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan unsur swasta yang dapat menunjang pelaksanaan program.
5. Penerbitan buku-buku yang menunjang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah, hendaklah digalakkan; mendapat subsidi dari Pemerintah; penyebaran dengan oplah besar; harga yang relatif murah.
6. Risalah, naskah, buku, bertalian dengan bahasa, yang milik/hak ciptanya berada di tangan Pemerintah, dapat diterbitkan oleh penerbit swasta, berdasarkan tujuan/ketentuan pada 5. di atas.
7. Pendirian Perpustakaan Sekolah, Desa dan Umum dan pelaksanaan Pameran Buku, perlu digalakkan bersama-sama dengan tujuan untuk membangun Minat Baca.
8. Pembangunan Buku adalah sarana yang positif menunjang pembinaan dan pengembangan bahasa.

BERLAKUKAN PEPATAH "SAMBIL MENYELAM MINUM AIR" DALAM PEMBINAAN ILMU DAN TEKNOLOGI MELALUI PEMBAKUAN ISTILAH?

Mien A. Rifai

Lembaga Biologi Nasional – LIPI, Bogor

Pendahuluan

Berdasarkan kearifannya, para ahli perancang pengembangan dan rekayasa bahasa Indonesia telah mengambil kebijaksanaan untuk meluaskan cakrawala cakupan bidang tugas yang ditanganinya. Salah satu langkah nyata dalam kaitan ini adalah pembakuan istilah-istilah keilmuan, yang kegiatannya mendapat prioritas yang diutamakan. Karena itu tidaklah mengherankan jika buku *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* dikeluarkan bersamaan waktunya dengan penerbitan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*.

Keputusan untuk mendahulukan penanganan istilah-istilah keilmuan ini patut mendapat pujian dan dukungan, karena dalam dunia modern ini ilmu dan teknologi telah merasuk dan terserapkan dalam kehidupan sehari-hari segenap lapisan masyarakat. Lagipula kelompok ilmuwan seperti sudah ditunjukkan pada kesempatan terdahulu (Rifai 1981) – merupakan kelompok penentu kepesatan perkembangan kebudayaan bangsa. Berdasarkan ciri kehidupan kecendekiawan yang berpegang teguh pada asas ketepatan yang tinggi dapatlah diharapkan bahwa pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan dibantu oleh kaum cerdik cendekiawan ini: kebiasaan mereka untuk berkomunikasi secara tepat, lugas dan gamblang pasti akan mempengaruhi seluruh pemakai bahasa Indonesia melalui contoh nyata yang diteladankan oleh mereka. Akan tetapi haruslah diakui bahwa dunia kaum ilmuwan ini merupakan lingkungan sempit tersendiri yang seringkali terpisah dari masyarakat yang mendukungnya. Dalam jangka pendek pengaruh mereka terhadap pola kebiasaan berbahasa lingkungannya tidaklah sebesar dampak yang diakibatkan oleh wartawan, seniman populer

ataupun juru dakwah yang mempunyai hubungan langsung dengan massa hadirin yang sangat besar jumlahnya. Adapun dampak jangka panjangnya tidaklah diragukan lagi, sebab sifat hasil karya para ilmuwan yang langgeng melestarikan dan tahan ujian zaman itu akan tetap terus terpatut bekasnya.

Tugas ilmuwan di negara sedang berkembang seperti Indonesia ini memang berat, karena sebagai pemandu kepesatan kemajuan di pundak merekalah terpusatkan beban untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sebagai bagian daripada pembangunan kebudayaan bangsa. Di samping kewajiban membina ilmu mereka diharuskan pula memberikan sumbangsih dalam memelihara bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui karya-karya mereka. Dengan sendirinya mereka memerlukan dukungan semua pihak dalam segala bentuk pengejawantahan hidup bangsa berbudaya dan berdaulat. Untuk memuaskan dahaga kemelitan mereka agaknya sudah waktunya untuk dipertanyakan adakah dampak yang disumbangkan para perancang pengembangan bahasa Indonesia terhadap pembinaan ilmu dan teknologi itu sendiri? Berikut ini akan disajikan hasil penelaahan kasus pembinaan dan pengembangan biologi khususnya dalam kaitannya dengan pembakuan peristilahannya.

Dari Lintasan Panggung Sejarah Biologi Indonesia

Alam hayati di sekitar kita telah lama mempesona kaum terpelajar Indonesia. Seperti diungkapkan oleh Zoetmulder (1983) para pujangga zaman keemasan kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa dulu secara cerdik menggunakan khazanah flora dan fauna Indonesia dalam mengandaikan berbagai fenomena emosi jiwa manusia. Baik secara tersirat maupun tersurat dalam pelbagai prasasti, hikayat dan semacamnya kekayaan alam hayati yang melimpah itu telah dimanfaatkan oleh nenek moyang kita untuk mendukung kebudayaan masa silam yang keagungan bekas peninggalannya dapat disaksikan sampai hari ini. Banyak pengetahuan kuno itu yang sampai pada kita melalui tradisi penurunan pusaka warisan secara lisan sehingga seringkali kita menerima potongan-potongan yang tidak utuh lagi. Karena berlebarnya rasa hormat terhadap kesatuan petuah pusaka orang tua dan asingnya logika falsafah Aristoteles maka banyak sekali pengetahuan yang mampu memberikan kemudahan pada nenek moyang kita itu tidak berkembang untuk mencukupi tuntutan kehidupan masa kini yang kian meningkat. Sekalipun dibukukan (seperti misalnya *Serat Centhini*) isinya tidak pernah di-

pertanyakan berdasarkan penalaran ilmiah, apalagi karena bukunya itu sendiri adakalahnya dikeramatkan.

Kita harus berterima kasih kepada perangkum asing seperti Rumphius yang dalam bukunya *Herbarium Amboinense* untuk pertama kali merekam secara ilmiah pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia. Berdasarkan buku ini banyaklah kesimpulan umum yang bisa diambil, pencarian bahan sumber daya baru berdasarkan kekerabatan alamiahnya, pengalihan teknologinya dan pengujian kandungan khasiatnya secara sewajarnya. Sekalipun ditulis dalam bahasa Latin dan bahasa Belanda, pengacuan pada nama dan istilah daerah setempat serta *lingua franca* yang berlaku saat itu menyebabkan buku ini sebagai sumber rujukan yang amat berharga untuk pengembangan biologi di Indonesia.

Dalam bidang biologi, bahasa Melayu baku telah muncul dalam tulisan ilmiah yang terbit beberapa saat sebelum tercetusnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ketika Dr. C. van Overeen (1925) mempertelekan jamur *Laetiporus miniatus* dalam bahasa Jerman, maka disertakannya pula ringkasannya dalam bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Sayang sekali ilmuwan yang sangat berpotensi ini meninggal dalam usia muda sehingga ancaman pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang biologi itu tidak diteruskan orang untuk waktu yang lama sekali.

Batu dasar pemapanan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi biologi ditanam oleh pemerintah penjajahan Jepang yang tidak menghendaki dipakainya bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah. Sebagai jalan pintas diterjemahkanlah sebuah buku pelajaran ilmu hayat tulisan Noordenbos ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan dalam tahun 1943. Buku terjemahan ini ternyata mempunyai dampak yang panjang terhadap pendidikan biologi di Indonesia. Pengaruhnya sangat terasa pada buku-buku pelajaran ilmu hayati hasil karya bangsa Indonesia sesudah perang kemerdekaan. Pola pendekatan, gaya penyajian, kedalaman penggarapan bahkan materi bahan pelajarannya umumnya dianut orang sampai berlakunya Kurikulum 1975, ketika masalah lingkungan hidup dan kependudukan mulai mendapat penekanan. Dapatlah dimengerti jika sebagian besar istilah biologi yang dipakai dalam buku terjemahan itu bertahan sampai sekarang ini.

Untuk memenuhi kebutuhan buku pendidikan biologi di SLTA diterjemahkanlah buku pelajaran botani karya Dr. K.B. Boedijn dan J.R. Kuperus oleh S. Setiadiredja (1955) dan buku pelajaran zoologi karya C. Hiltvoogd dan H.C. Delsman oleh R.G. Indrajana (1957). Pemilihan kedua buku sangat tepatnya karena keduanya ditulis berdasarkan bahan yang ada di lingkung-

an hidup kita. Sampai sekarang pun buku-buku pelajaran biologi untuk SLTA yang disiapkan oleh Depdikbud masih menggunakan bahan-bahan contoh yang sama yang secara cermat telah dipilih oleh para penulis buku-buku tersebut. Boleh dikatakan bahwa bekal pengetahuan dasar biologi yang dimiliki para ahli biologi, pertanian, kehutanan, perikanan, kedokteran dan lain-lain di Indonesia sekarang ini dapat ditelusuri urat akarnya pada buku-buku terjemahan tadi. Seperti tercantum pada kata pengantar buku tersebut, dalam proses penterjemahannya besarlah jasa yang disumbangkan almarhum Prof. Ir. Kusnoto Setyodiwirjo, putra Indonesia pertama yang menjadi direktur lembaga-lembaga yang sekarang tergabung dalam Lembaga Biologi Nasional — LIPI. Dengan rajin beliau menghimpun istilah-istilah yang telah dipakai orang dan menyarankan istilah-istilah baru yang sebaiknya dipergunakan berdasarkan pengalamannya dalam memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Untuk perguruan tinggi buku-buku teks biologi berbahasa Indonesia sampai sekarang masih terhitung langka dan hal ini menimbulkan masalah tersendiri. Jika sampai SLTA terdapat buku pegangan yang dipakai secara luas di seluruh Indonesia, untuk perguruan tinggi pembakuan isi, bahan, kedalaman dan pendekatan serta peristilahan terpulang kepada para pengajar masing-masing di setiap perguruan tinggi. Keceragaman beberapa istilah memang terlihat hanya sampai SLTA saja, sedangkan di atas itu istilah asing seringkali dipakai dalam bentuk aslinya. Karena itu di samping istilah mulut daun atau ganggang kita menemukan pula bentukan *stomata* serta *alga*. Logat setempat pun dapat terjadi dengan suburnya tergantung kepada kuatnya kepribadian, karisma dan otoritas seseorang tokoh.

Untungnya ketidakseragaman istilah ini tidak mengendorkan minat orang untuk berkarya dan sekalipun bergerak dengan pelan-pelan biologi bertindak maju, merintis jalan bagi generasi berikutnya. Akan tetapi keadaan lingkungan tidaklah memberikan dukungan yang diinginkan sehingga kecepatan pembinaannya tidaklah berjalan secepat seperti diharapkan.

Kata Hati, Ucapan, dan Penerbitan

Sebagai bagian ilmu-ilmu alamiah, biologi itu dapat terbina dan pesat pengembangannya bila setiap ahlinya giat menggali dan mengungkapkan penemuan baru serta selalu mencetuskan gagasan dan teori yang orisinal untuk menumbangkan dan mengganti konsep-konsep usang yang tak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu semua pakar biologi dituntut agar menguasai segala sesuatu yang telah dilakukan orang sebelumnya, mengikuti perkem-

bagian hal-hal yang dipermasalahkan ahli-ahli masa kini dan mampu melihat arah yang dituju bidang spesialisasi yang ditekuninya di masa depan.

Seseorang berhak disebut sebagai peneliti biologi jika ia sudah memberikan sumbangsih yang nyata dalam upaya mengembangkan cabang ilmu pilihannya itu. Karena itu sesudah mengidentifikasi dan mengisolasi sesuatu masalah penelitian, seorang biologiwan biasanya akan mengikuti jalan penalaran pikirannya sendiri dalam memilih pola pendekatan yang akan dipakai untuk memecahkan masalah itu. Andaikata ia berhasil menyelesaikan persoalan yang dihadapinya ia akan bertanya pada dirinya apakah hasil kesimpulannya itu tidak mengulangi apa yang sudah diketahui umum. Ia perlu mengetahui pendapat orang lain sebelum melangkah lebih jauh untuk mengumumkan hasil penelitiannya secara luas dan lestari. Mau tidak mau ia harus berkomunikasi dengan sesama ilmuwan sejenisnya : secara bertahap mula-mula ia akan mendiskusikan hasil dan pendapatnya bersama teman sejawat di lingkungan kerjanya, kemudian berusaha mendapatkan masukan dari kalangan yang lebih luas lagi. Ia dapat melakukan ini dengan menulis surat kepada tokoh lain yang dikenalnya, seperti yang dilakukan Antoni van Leeuwenhoek dulu sewaktu melakukan pertukaran surat dengan Royal Society di London. Secara formal ia dapat mengemukakan penemuannya dalam forum pertemuan ilmiah yang sekarang sudah diorganisasi dalam pelbagai bentuk mulai dari seminar, simposium, loka karya, kongres dan entah apa lagi.

Jika dari pelbagai masukan yang diterimanya ternyata bahwa hasil penemuannya ilmu akan makin berkembang si peneliti berkewajiban menerbitkannya agar umat manusia dapat mengambil keuntungan dari jerih payahnya. Suatu penelitian yang berhasil yang tidak diterbitkan haruslah dipandang sebagai suatu tindakan kriminal (Rifai 1981). Selain memperbesar penyebaran, penerbitan juga menjamin terekamnya hasil penelitian itu secara abadi dalam khazanah ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Perekaman karya ilmiah itu memerlukan ketrampilan khusus karena sudah merupakan seni tersendiri. Polanya sudah dibakukan, gaya penyajiannya mengikuti cara-cara tertentu sedangkan logatnya dibatasi pula oleh derajat keteknisannya. Sifat ilmu yang lugas, jelas dan singkat mengharuskan dipakainya istilah ilmiah yang tidak meragukan pengertiannya. Sekalipun demikian masih diinginkan agar karya tulis ilmiah yang diterbitkan itu tidak bersifat bacaan yang kering dan kaku tetapi haruslah tetap merupakan suatu karya yang hidup dan enak dibaca. Keteraturan, ketertiban dan kelancaran isi tulisan ilmiah hendaklah mencerminkan keseluruhan gerak kata hati, ungkapan pengujaran dan kewajiban tulisan yang didasarkan pada mendarah dagingnya

sikap kecendekiaan dan keilmuan penulisnya. Selain ketepatan penggunaan istilah keilmuan yang tidak dapat ditawar lagi, dalam karya tulisnya seorang ilmuwan dituntut untuk memilih ungkapan-ungkapan secara cermat. Tidaklah dapat dipungkiri lagi bahwa seorang ilmuwan harus memiliki kamus istilah dan kamus umum bahasa yang terbaik yang dapat dijangkaunya.

Kisah Suses sebuah Istilah

Jika diperkenankan membuat parafrase salah satu cukilan sajak Shakespeare dalam *Romeo and Juliet* II, 2 : 43 – 44, bab ini agaknya pantas diberi motto : "What's in a term, that which we call a germ/By any other word would act as bad" Orang tidak pernah meragukan kemahiran Shakespeare bermain dengan kata-kata tetapi keberhasilan suatu istilah ditentukan oleh kemampuan kata yang dipilih untuk mengemban makna yang ingin diungkapkan. Selain itu masalah konotasi dan eufoni juga dipersyaratkan oleh *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Di samping itu banyak faktor luar yang juga ikut menentukan nasib suatu istilah yang diperkenalkan orang, seperti terlihat pada kasus istilah plasma nutfah.

Pesatnya pertambahan jumlah penduduk telah menyebabkan gagasannya upaya untuk mencukupi keperluan pangannya dan menyediakan tempat tinggalnya. Bibit unggul diciptakan, kawasan hutan dibabat untuk dijadikan areal persawahan ataupun daerah pemukiman. Bibit unggul mendesak bibit lokal/tradisional sehingga yang terakhir ini dilupakan orang dan perluasan daerah pertanian ataupun permukiman menyebabkan cepatnya kemusnahan kerabat jenis-jenis tanaman pertanian. Padahal dalam setiap populasi bibit loka ataupun kerabat jenis budidaya tanaman itu mengandung substansi yang mengatur sifat keturunan yang dapat dipindah-pindahkan melalui perkawinan silang, untuk merakit bibit unggul baru yang memiliki sifat-sifat baru yang diinginkan sesuai dengan tuntutan massa. Substansi inilah yang merupakan sumber daya genetika yang dalam bahasa Inggris terkenal dengan nama *germplasm*.

Lebih kurang dua dasa warsa yang lalu para ahli biologi mengamati penuh keprihatinan menghilangnya substansi tadi secara pelan-pelan. Gerakan pengawetan alam dan upaya ekologi yang saat itu menjadi mode tidaklah melampaui membendung proses pelanggaran sumber daya yang amat penting bagi kelangsungan pertanian di dunia ini. Bersamaan dengan pudarnya pamor pengawetan alam dan ekologi itu -- yang terakhir sekarang berganti umbul-umbul menjadi lingkungan hidup -- diperkenalkanlah upaya pelestari-

rian *germplasm* itu, suatu gerakan internasional yang didukung badan-badan PBB.

Bahwa pengikisan dan pengerosian sumber daya genetika itu berlangsung pula di Indonesia disadari juga oleh biologiwan Indonesia. Pemerintah berhasil diyakinkan akan perlunya upaya nasional untuk mengatasi kerawanan yang dapat timbul. Dengan sendirinya diperukan seperangkat istilah untuk menampung kegencaran komunikasi yang timbul oleh kegiatan ini. Dengan persetujuan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa maka pada tahun 1975 diperkenalkan istilah plasma nutfah yang keasingannya tidak kalah kepada kerumitan konsep yang ingin disampaikan. Akan tetapi istilah ini dipandang lebih baik daripada istilah plasma germa yang pernah muncul dalam salah satu tulisan *Kompas* pada masa itu.

¹ Dibentuknya Komisi Pelestarian Plasma Nutfah Nasional dengan surat keputusan Menteri Pertanian RI telah menyebabkan istilah ini menjadi resmi. Sulitnya masalahnya dan kesukaran pelafalannya tidak mengurangi kecenderungan orang-orang untuk menggunakan istilah itu dalam berbagai kesempatan, bahkan dalam sidang Kabinet Republik Indonesia! Walaupun Komisi itu sendiri tidak banyak bergembar-gembor, kegiatannya yang mantap dalam mengajak masyarakat membantu usaha pelestarian plasma nutfah itu menyebabkan luasnya tingkatan pemakaian istilahnya. Belasan kursus penataran dan puluhan ceramah di berbagai pelosok tanah air telah ikut mempopulerkan istilah ini sehingga pembakuannya tidaklah merupakan masalah lagi.

Jika seandainya istilah-istilah keilmuan yang lain memiliki separuh saja keberhasilan yang dikenyam istilah plasma nutfah, alangkah ringan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa . . .

Yang Tergugah dan yang Meremehkan

Sejak Kantor Pengajaran zaman penjajahan Jepang menerbitkan buku *Ilmoe Toemboeh-toemboehan* pada tahun 1943 sampai diresmikannya Ejaan Yang Disempurnakan, telah ratusan tulisan dalam bidang biologi yang dihasilkan orang dalam bahasa Indonesia. Tidak adanya pedoman dalam masalah pembentukan dan penggunaan istilah dengan sendirinya telah menimbulkan kesimpangsiuran yang menyebabkan tersendat-sendatnya kemajuan yang dicapai bidang ini. Tidaklah mengherankan untuk menjumpai suatu konsep seperti *genus*, misalnya, diterjemahkan dengan 9 macam istilah yang berbeda-beda. Kita masih harus merasa beruntung bahwa orang mau

menulis dalam bahasa Indonesia, setidaknya untuk keperluan pendidikan.

Anggapan akan keuniversilan biologi juga elah tidak membantu mempercepat upaya pengembangan ilmu ini di Indonesia. Sehubungan dengan ini banyak hasil karya ilmiah orang Indonesia yang dituangkan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, karena ini menyebabkan pengakuan internasional yang segera terhadap sesuatu penemuan. Malahan sampai beberapa tahun yang lalu beberapa ilmuwan Indonesia masih berpendapat bahwa tulisan ilmiah dalam bahasa asing harus mendapat bobot penilaian yang berbeda bila dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan prestasi karir seseorang. Pemikiran inilah yang menyebabkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memberikan angka nilai yang lebih tinggi terhadap karya tulis ilmiah berbahasa asing itu, seperti tercermin dalam salah satu peraturan penilaian jenjang jabatan penelitian di Indonesia. Kesadaran bahwa hal ini tiak benar telah menyebabkan dihapusnya perbedaan penilaian itu sejak tahun 1980.

Sejalan dengan upaya pembakuan peristilahan yang dilancarkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, beberapa perkembangan telah ikut mendukung kegiatan ini. Membaiknya perekonomian bangsa memungkinkan para ilmuwan melakukan kegiatan terencana dalam bidang ilmunya. Penelitian mulai mapan dilakukan orang dan dengan itu segala akibat sampingannya : lahirnya perhimpunan profesi, adanya pertemuan-pertemuan ilmiah yang diorganisasi perhimpunan-perhimpunan tadi serta dikeluarkannya risalah pertemuan yang memuat kumpulan makalah, serta terbitnya beberapa majalah ilmiah baru.

Kemampuan perangkat pembina ilmu ini telah menghilangkan keraguan biologiwan Indonesia untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara langsung. Di balik itu ada gejala yang kurang sehat, yaitu mundurnya penguasaan bahasa asing oleh para lulusan perguruan tinggi kita. Ini merupakan masalah yang pelik yang memerlukan pemecahan tersendiri.

Jika dulu disertasi doktor biologi dalam bahasa Indonesia dapat dihitung dengan jari sebelah tangan, maka berkat adanya program nyata dari pemerintah akhir-akhir ini terjadi peningkatan yang menyolok dalam jumlah promosi yang ditulis orang. Ini semua memang belum menyebabkan suara biologiwan Indonesia terdengar cukup lantang dalam forum internasional, karena sampai sekarang belum terbentuk "aliran pemikiran" di Indonesia, yang membuktikan telah mapannya kepesatan kemajuan sesuatu bidang spesialisasi yang didukung pendalaman beberapa orang. Akan tetapi jika

gejala yang sekarang terjadi berkembang terus sesuai dengan kemajuan perkembangan ilmu, maka akan datang saatnya ketika ilmuwan luar negeri akan berpayah-payah membaca *semua* hasil karya orang Indonesia dalam bahasa Indonesia, seperti terlihat sekarang dari usaha para ilmuwan barat untuk memahami monografi jamur yang ditulis ahli-ahli Jepang dalam bahasa Jepang.

Jika dikaji secara seksama, maka di belakang keberhasilan munculnya karya-karya berbahasa Indonesia ini disebabkan kegigihan beberapa orang penyunting yang berpengaruh dalam bidangnya masing-masing. Mereka ini umumnya tidak muncul ke permukaan tetapi bekasnya terlihat dan dapat dirasakan. Mereka tergolong orang-orang yang mau berpayah-payah belajar menguasai bahasa Indonesia, rajin mencatat istilah-istilah yang baru dimunculkan, tidak segan membuka kamus, cermat dalam berbicara dan mempunyai rasa bahasa yang tinggi. Suatu lingkungan yang tidak memiliki seorang penyunting biasanya menghasilkan karya-karya yang berisikan kalimat rancu yang tidak menunjukkan kejernihan jalan pikiran. Pada umumnya keadaan begini muncul bila lingkungan itu berpegang pada anggapan bahwa bahasa Indonesia itu mudah, karena merupakan bahasa ibu yang dianggap sudah dikuasainya sejak kecil. Akan tetapi bila disimak ketepatan pilihan kata atau istilah yang dipakai dalam tulisan mereka, serta ditelaah kalimat dan paragraf ataupun judul karangannya maka akan segera terlihat kejanggalan-kejanggalannya. Lingkungan ini biasanya tidak merasa risau bila suatu tulisan itu terkontaminasi frase atau kata-kata asing. Malahan terpampangnyanya unsur asing itu dianggapnya sebagai penunjuk bahwa penulisnya mampu berbahasa asing. Agaknya memang sulit untuk mengatasi kesenangan akan unsur-unsur asing ini, sebab Zoetmulder (1983) sudah menulis bahwa para rakawi kita di zaman dulu pun senang akan kata-kata asing. Akibatnya dalam kakawin *Nagarakertagama* Hayam Wuruk oleh Prapanca dikisahkan mengejar hewan perburuan yang tidak ada dalam hutan Jawa!

Jadi untuk menjaga ketepatan dan keilmiahannya bahasa yang dipakai para ilmuwan Indonesia perlu adanya penyunting-penyunting tangguh. Masalahnya adalah menampilkan mereka ke permukaan untuk berfungsi secara lebih aktif. Pada saat ini di Indonesia penyunting memang merupakan komoditas yang langka.

Melihat ke Depan

Semua orang menyadari bahwa pembakuan istilah bukanlah pekerjaan yang ringan. Dampaknya tidaklah dapat cepat dirasakan, apalagi kalau sese-

orang mengecilkan faktor waktu dalam usaha pembinaan. Sekalipun demikian dalam dasa warsa terakhir ini beberapa perkembangan yang secara ketbetulan bermunculan bersama telah membuktikan bahwa istilah mempunyai peranan yang tidak kecil dalam usaha membina dan mengembangkan sesuatu ilmu.

Pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk yang konservatif sifatnya. Sangatlah sulit untuk mengajar seseorang yang terbiasa dengan istilah tumbuhan pengganggu agar menggantinya dengan gulma (yang hanya satu kata, kalau diketik menghemat 14 ketukan, dapat dijabarkan/diturunkan dengan lebih luas dan lebih mudah dan lain-lain). Akan tetapi bagi dunia ilmu di Indonesia saat ini merupakan saat yang paling bahagia karena kita dapat membuat rencana yang matang dalam mengembangkan ilmu itu melalui perencanaan perkembangan istilahnya. Jumlah tulisan yang ada relatif masih sedikit sehingga kita dapat mengganti istilah yang sudah terbiasa dipakai tetapi ternyata tidak sesuai dengan asas yang benar, tanpa takut hal itu akan mempunyai pengaruh tidak menguntungkan di belakang hari. Kita yang sudah terbiasa dengan istilah kurang benar harus merelakan diri mengubah kebiasaan dengan memakai istilah yang lebih baik. Istilah yang disodorkan pada generasi mendatang hendaklah merupakan istilah yang tepat; mereka janganlah diminta untuk meneruskan kesalahan yang telah mengganggu generasi kita ini.

Mengingat dampak jangka panjangnya itu kita harus sadar bahwa membina istilah sama artinya dengan mengembangkan ilmu itu sendiri. Kalau pembakuan istilah yang kita idam-idamkan itu gagal maka berarti kita mengemrem laju kecepatan pengembangan ilmu di Indonesia.

PUSTAKA ACUAN

- ANONIM. 1943. *Ilmoe toemboeh-toemboehan*. Kantor Pengajaran, Jakarta.
- BOEDIJN, K.B., KUPERUS, J.R. & SATIADIREJA, S. (Penerjemah). 1957. *Buku ilmu binatang*. J.B. Wolters, Jakarta.
- RIFAI, M.A. 1973. *Kode Internasional Tatanama Tumbuh-tumbuhan*. Herbarium Bogoriense – LBN, Bogor
- RIFAI, M.A. 1981. The literary aspects of scientific publications : the case in Indonesia. Makalah dalam VI ASANAL Conference, Denpasar.
- VAN OVEREEM, C. 1925. Polyporanceae. Dalam Overeem & Weese, *Icones Fungorum Malayensium*. Mykologischen Museums, Wien.
- ZOETMULDER, P.J. 1983. *Kalanguwan* (diterjemahkan oleh Dick Hartoko). Jambatan, Jakarta.

BAHASA INDONESIA MENGHADAPI PENTERJEMAHAN

Ali Audah

Himpunan Penerjemah Indonesia

Pendahuluan

ADANYA organisasi-organisasi penterjemahan baik di negara-negara yang maju maupun dalam negara-negara sedang berkembang, berdirinya federasi penterjemah internasional seperti FIT yang beranggotakan sebagian organisasi-organisasi tersebut, begitu juga perhatian UNESCO yang cukup besar terhadap dunia penterjemah, tentulah karena hal ini makin lama makin terasa pentingnya dalam perkembangan dan pengembangan dunia kebudayaan. Dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman peranan penterjemahan turut menentukan. Sebagian besar buku-buku yang beredar di Indonesia masih dalam bahasa asing, bahasa yang kurang dikuasai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kampus. Sudah sama kita ketahui bahwa bangsa Indonesia angkatan sebelum Perang Dunia II jauh lebih baik penguasaan bahasa asingnya, terutama bahasa Belanda, daripada angkatan sekarang, meskipun jumlah sarjana dan kaum terpelajarnya sekarang lebih banyak. Saya tidak akan membahas apa sebab terjadi demikian. Pengajaran bahasa asing di Indonesia memang bukan jaminan bahwa hasilnya akan melahirkan mereka yang benar-benar akan memahami pesan yang terkandung di dalam buku-buku itu.

Tidak mudah orang akan dapat menguasai satu dua atau lebih bahasa asing yang sama kuatnya dengan penguasaan bahasa sendiri. Oleh karena itu beralasan sekali kalau akan kita katakan bahwa yang pertama-tama dan terutama harus kita lakukan ialah membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Perlu sekali kita menanamkan gairah dan kebanggaan berbahasa Indonesia kepada murid-murid sejak dari taman kanak-kanak sampai kepada mahasiswa termasuk para pengajar di perguruan tinggi-perguruan tinggi. Dengan demikian diharapkan mereka yang menguasai dan yang tidak menguasai bahasa asing, mempunyai gairah dan hasrat yang sama dalam membaca

buku-buku terjemahan. Bagaimana kita harus meyakinkan diri kita bahwa yang selama ini kita kagumi bukanlah bahasa asingnya, tetapi ilmu dan pengalaman yang disampaikan kepada kita (Sapardi, 1977. 204).

Dalam usaha kita membicarakan penterjemahan, juga tidak lepas dari pembicaraan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia karena penterjemahan juga adalah masalah kebahasaan. Tetapi sampai berapa jauh tugas penterjemahan itu dapat diikutsertakan dan dapat berperan, itulah yang ingin kita lihat. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia, yaitu peningkatan segala usaha kemasyarakatan sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia itu digunakan oleh masyarakat kita dengan keyakinan bahwa bahasa Indonesia sama kerennya, sama agungnya dengan bahasa mana pun di muka bumi ini. Sedang yang dimaksud dengan pengembangan bahasa adalah peningkatan mutu bahasa Indonesia itu sehingga bahasa Indonesia memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Beban yang diberikan kepada bahasa Indonesia adalah tugas sebagai bahasa nasional, beban yang diberikan oleh UUD 45 sebagai bahasa negara, beban yang diberikan oleh dunia pendidikan kita adalah sebagai pengantar kependidikan, beban yang diberikan oleh ilmu pengetahuan kita adalah sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sanggupkah bahasa Indonesia melaksanakan tugas-tugas itu? . . . Semua usaha memperkaya bahasa Indonesia ini bertujuan mengembangkan kesanggupan dan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan sebagai bahasa pengantar (Amran Halim, 1981. 84).

Peranan Buku dalam Pendidikan dan dalam Masyarakat

Meskipun berkat teknologi modern sarana pengajaran sering juga dilengkapi dengan media audio-visual seperti rekaman suara, televisi, slide, film, radio dan alat-alat lain, namun komponen buku pelajaran masih tetap menjadi unsur pokok dalam proses pendidikan. Meskipun alat audio visual yang lebih baru dipergunakan secara luas, buku-buku tidaklah dikesampingkan (Barker & Escarpit, 1976 : 201). Kegiatan para penerbit menerbitkan terjemahan buku-buku ilmu pengetahuan populer untuk anak-anak dan remaja, patutlah kita hargai walaupun jumlahnya masih sedikit sekali, seperti yang juga dapat kita baca dalam saran dan laporan UNESCO (Douglas Pearce, 1974) ("At present very few translations are published in bahasa Indonesia. In the field of populer science etc. translations could do much to provide for needs")

Patut kita akui bahwa kita memang belum sepenuhnya mampu menyajikan karya-karya asli ilmu pengetahuan populer, dan walaupun ada jumlahnya sedikit sekali. Usaha Yayasan Buku Utama sejak 1974 dengan memberikan hadiah-hadiah kepada buku-buku terbaik untuk fiksi dan non-fiksi setiap tahun, akan sangat bermanfaat karena selain memberi dorongan kepada penulis-penulis karya asli, juga sekaligus mempopulerkan karya-karya penulisan demikian.

Tetapi cukuplah kita hanya menunggu karya-karya asli itu saja untuk mengisi perpustakaan kita? Selain jumlah yang masih sangat terbatas, patut juga kita akui bahwa ragamnya pun masih terbatas pula. Perpustakaan-perpustakaan kita di mana-mana masih lebih banyak berisi buku-buku ilmu dalam bahasa asing. Sebagian besar buku yang ada di sana ditulis dalam bahasa Inggris, beberapa puluh dalam bahasa Belanda dan hanya kira-kira dua atau tiga persen dari jumlah yang ada ditulis dalam bahasa Indonesia (Sapardi, 1977 : 202).

Berbagai Buku Perlu Diterjemahkan

Sejak pertengahan 1974 Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan telah mengemukakan gagasan-gagasan sekitar pengadaan buku-buku ilmiah baik penulisan asli ataupun terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Tahun berikutnya gagasan ini dituangkan dalam bentuk pertemuan yang lebih laus, diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa unsur yang terdiri dari konsorsia perguruan tinggi-perguruan tinggi negeri, organisasi-organisasi yang memiliki penerbit, penterjemah dan lain-lain diikuti sertakan. Yang menjadi pokok pembahasan ialah soal penulisan dan penterjemahan buku-buku bidang ilmu dan teknologi. Dalam program itu termasuk juga penterjemahan makalah-makalah dan risalah-risalah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing. Gagasan dan rencana yang terpuji ini rupanya memang tidak begitu mudah diwujudkan dalam kenyataan. Tentu banyak kendala yang tak dapat kita duga, meskipun tidak berarti rencana itu tidak berjalan sama sekali.

Meskipun memang tidak bertindak sebagai badan eksekutif, seperti kita ketahui bersama, dengan Keputusan Presiden No. 5/1978, telah terbentuk sebuah lembaga yang khusus menangani segala masalah perbukuan di Indonesia, yaitu Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN), yang bertanggungjawab kepada Menteri P dan K, dan diketuai oleh Ketua BP3K.

Sesuai dengan pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada rapat Badan tersebut baru-baru ini antara lain bagan berikut ini dapat kita lihat !

Ke- giat- an yang harus dilak- sanakan	Jenis buku yang diperlukan	Sains dan Teknologi	Ilmu Sosial dan Budaya	Agama
1. Buku apa yang harus ditulis				
2. Buku apa yang ha- rus diterjemahkan				
3. Buku apa yang ha- rus diimpor				

Dalam bagan ini dapat kita lihat, bahwa hampir semua jenis buku itu kita perlukan, dengan catatan bahwa di dalam pengembangan perbukuan hendaknya diarahkan kepada lebih perbanyak judul daripada eksemplar. Di dalam pelaksanaan yang telah dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja tahun ini sudah diharapkan dapat disusun daftar judul buku misalnya 1.000 judul untuk tiap kota 1.

Andaikata rencana ini sudah bisa dilaksanakan semua, dapat kita bayangkan betapa besar kesibukan yang akan kita hadapi.

1. Buku Sains dan Teknologi

Dalam pengertian ini selain buku-buku sains dan teknologi dapat kita takrifkan juga buku-buku ilmu pengetahuan pada umumnya, termasuk di dalamnya ilmu sosial dan budaya. Selama ini sudah berjalan kegiatan penterjemahan buku-buku bidang sains dan teknologi, sebagian besar dilakukan oleh perorangan dan diterbitkan oleh penerbit-penerbit swasta. Dalam kegiatan penterjemahan ini akan kita lihat sampai berapa jauh bahasa Indonesia mampu mengalih bahasakan kosa kata, istilah dan ungkapan bahasa-bahasa asing itu ke dalam bahasa Indone-

sia. Sampai sekarang memang belum ada suatu lembaga yang secara khusus mengadakan penilaian mengenai hasil-hasil terjemahan itu, tetapi juga sampai sekarang belum ada keluhan secara umum mengenai ketidakmampuan kita menterjemahkan. Buku-buku terjemahan sains dan teknologi yang sekarang beredar dapat dikatakan diterima oleh masyarakat dengan baik, dipergunakan sebagai bahasa teks, buku bacaan penunjang, buku rujukan dan sebagainya, sebagai sesuatu yang wajar, dapat dimengerti malah sangat membantu masyarakat luas, khususnya masyarakat kampus. Beberapa judul di antaranya sudah mengalami cetak ulang. Anggapan yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia belum mampu dihadapkan pada karya-karya ilmiah untuk diterjemahkan karena sering terbentur pada istilah teknis ilmiah yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, bertentangan dengan kenyataan. Adanya anggapan yang berlebihan bahwa menterjemahkan ilmu itu hanya akan mengkhianai ilmu, sama dengan ungkapan bahasa Itali yang terkenal dalam dunia linguistika : *traduttore traditore* ("penterjemah itu pengkhianat"). Hughes (1966 : 12–13) menjelaskan bahwa ungkapan itu memang ada benarnya. Soalnya, karena perbedaan bahasa akan membawa perbedaan struktur pula. Seorang penterjemah takkan dapat mengalihkan struktur yang asal itu sepenuhnya ke dalam terjemahannya dengan menggunakan seperangkat satuan (kata-kata dan kalimat-kalimat) yang sama dan mau menterjemahkan kata dengan kata yang sama pula. Karena dalam hal ini bahasa-bahasa Eropa pada umumnya mempunyai hubungan yang dekat satu sama lain, penterjemahan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain, hampir masih dalam bentuk struktur yang sama.

Seorang penterjemah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya dan akan memikul amanat yang sungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu dan pikiran yang ada dalam buku yang diterjemahkan itu. Tetapi dia tidak dapat dituntut harus menterjemahkan kata, kalimat, ungkapan dan struktur bahasa sumber. Dia dituntut menggunakan bahasa sasaran (bahasa Indonesia) yang tepat untuk mengalihkan karya ilmiah dan menguasai istilah dan kosa kata yang sesuai dengan yang dimaksud. Jika istilah-istilah dan kata-kata itu belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka di sinilah kewajiban penterjemah "menciptakan" sendiri istilah-istilah dan kosa kata itu, yang mungkin diambil dari bahasa Melayu "klasik", dari bahasa daerah atau dari bahasa asing yang ejaannya disesuaikan dengan ejaan bahasa

Indonesia. Bahasa karangan ilmiah harus memenuhi syarat-syarat khusus di samping kaidah-kaidah umum bahasa Indonesia (H. Johannes : 1978) yang dalam beberapa rumusannya berlaku juga untuk penterjemahan, yakni bahwa bahasa karangan ilmiah harus dibedakan dengan bahasa sastra; istilah-istilah yang khusus ditakrifkan khusus pula sehingga kata yang sama dalam bahasa ilmiah dan dalam bahasa umum dapat berbeda artinya; tingkatan bahasa yang dipakai ialah tingkat bahasa resmi; bahasa keilmuan tenang dan gahari (moderate); penggunaan kata-kata yang mubazir dihindari. Jelasnya bahasa keilmuan harus lugas; lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan. Ini dapat kita pakai sebagai dasar-dasar umum.

Di samping itu penggunaan bahasa dalam penterjemahan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran perlu disesuaikan juga dengan sifat, isi dan maksud buku yang diterjemahkan. Sudah tentu masih ada ciri-ciri dan syarat-syarat lain yang masih diperlukan, disesuaikan dengan tingkat dan keperluan.

Mengenai buku-buku bidang hukum, yang kebanyakan masih dalam bahasa Belanda, tampaknya masih memerlukan perhatian tersendiri dalam penterjemahannya, karena sudah terlanjur, khusus bidang perundang-undangan yang sekarang dipakai hampir merupakan terjemahan harfiah dari bahasa dan pola berpikir Belanda.²

Selama ini belum tampak adanya kendala yang luar biasa dari segi bahasa. Kita masih dapat berbesar hati bahwa bahasa Indonesia mampu dihadapkan pada penterjemahan karya ilmiah walaupun tidak berarti sudah bebas dari kekurangan-kekurangan. Kalau masa sebelum Perang Dunia II hampir tidak ada buku-buku sains dan teknologi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena kalangan terpelajar dan mahasiswa-mahasiswa cukup membacanya dalam bahasa Belanda, pada waktu sekarang buku-buku ilmiah terjemahan sudah ada beberapa yang diterbitkan, dengan pelbagai ragam yang hampir memadai. Penerbit-penerbit pun menyadari betapa pentingnya menerbitkan karya-karya ilmiah terjemahan itu, sehingga kita dapat melihat dalam perpustakaan-perpustakaan dan dalam iklan-iklan buku-buku terjemahan bidang hukum, sosiologi, antropologi, kedokteran, matematika sampai pada buku ruang angkasa. Bahkan ada sebuah buku kedokteran setebal lebih kurang 2.000 halaman yang sudah selesai diterjemahkan dan sekarang masih berupa naskah yang sudah siap diterbitkan. Ketika saya tanyakan kepada penterjemahnya³, adakah kesulitan bahasa yang harus dihadapi

ketika menterjemahkan buku itu. Saya mendapat jawaban bahwa hampir tidak ada; kecuali jika ada istilah-istilah yang sngat teknis sifatnya; itu pun cukup dilampiri dengan daftar istilah (glossarium).

Kalau kita akan bertanya sudah adakah beban yang diberikan kepada bahasa Indonesia oleh ilmu pengetahuan sebagai pendukung ilmu dan teknologi, kita akan mendapat jawaban, bahwa tugas itu sudah dilaksanakan. Kita lihat misalnya hasil terjemahan buku-buku ilmiah yang sudah beraneka ragam, meskipun dalam jumlah baik judul maupun eksemplar masih sedkiit sekali, tanpa begitu banyak menghadapi kesulitan-kesulitan bahasa.

Mengenai judul buku sains terbitan selama sepuluh tahun (1972 – 1981) belakang ini jumlahnya memang sedikit sekali, jika kita lihat data berikut ini (Sukra : 1982).

Jenis Buku		Kode Bidang Ilmu ⁴										Jumlah
		72	11	12	21	22	23	24	25	61		
Banyaknya judul												
Terjemahan	Buku teks	4	2	22	6	33	—	39	15	7	128	
	Buku bukan teks	—	1	3	9	10	2	46	14	—	85	

Pernah dipermasalahkan orang apakah yang menjadi hambatan maka penterjemahan buku-buku di Indonesia secara umum masih tersempit. Satu pihak mengatakan, bahwa dananya sudah tersedia, mana tenaga penterjemahnya. Yang lain mengatakan tenaga sudah siap, mana dana dan buku yang akan diterjemahkan. Tentu bukan maksud kita akan mencari mana yang benar. Yang jelas agaknya, fasilitas penterjemahan itu sudah ada – dana, tenaga dan buku. Sebenarnya (Maurits Simatupang : 1978) dana yang tersedia untuk tahun 1976/1977 belum terpakai seluruhnya; begitu pula dana untuk tahun 1977/1978. Tetapi perencanaan secara sungguh-sungguh dan terpadu, itulah yang belum tergarap hingga sekarang. Program ini sangat penting bukan saja yang menyangkut tenaga dan dana, tapi juga soal pembidangan kerja. Perguruan tinggi-perguruan tinggi tetap perlu dimanfaatkan menurut bidang masing-masing. Masalah imbalan berupa honorarium dan royalti, dan ke-

sibukan beberapa tenaga akan dapat diatasi. Adanya usaha Ibid : 1978) penterjemahan karya ilmiah yang dicoba digiatkan dari kalangan perguruan tinggi, konsorsia yang memilih judul buku yang akan diterjemahkan dan penterjemahannya ditawarkan kepada dosen-dosen yang dianggap ahli dalam bidang yang bersangkutan, tapi kenyataan menunjukkan bahwa usaha dalam bidang ini tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan -- barangkali karena kita terlalu membatasi pada tenaga-tenaga dalam lingkungan perguruan tinggi yang umumnya memang sudah terlalu sibuk. Di luar mereka masih ada penterjemah profesional dan setengah profesional yang kita harapkan dapat bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lain. Dalam beberapa hal, meskipun ragam yang diterjemahkan dari bahasa sumber yang sama, tetapi bidang berbeda, tidak menutup kemungkinan perlunya ada latihan-latihan khusus buat mereka.

Berpacu dengan Waktu

Yang tidak urang pentingnya dan perlu mendapat perhatian kita dalam hal penterjemahan buku-buku ilmiah ialah soal mengejar waktu. Perkembangan (Ali Audah : 1982) ilmu dan teknologi dewasa ini bergerak begitu cepat, sedang buku yang akan menunjang ke arah itu masih dalam bahasa asing yang umumnya belum dapat dicerna oleh mahasiswa dan pelajar. Untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita dalam bidang ini, penterjemahan buku-buku ilmiah secara besar-besaran perlu sekali dipercepat. Kita dituntut oleh ilmu dan teknologi itu segera bertindak. Kita lihat misalnya kapan buku-buku itu diterbitkan di luar, kapan akan sampai ke Indonesia, kapan akan mulai diterjemahkan, dan kapan pula akan diterbitkan. Kita sudah akan jauh ketinggalan dari bangsa yang menghasilkan ilmu dan buku-buku itu. Padahal bangsa lain, Jepang misalnya -- sekedar contoh -- tidak lagi menunggu buku-buku itu dikirim dari luar, malah mereka datang sendiri memburu ke tempat asalnya, lalu segera dibawa pulang untuk kemudian diterjemahkan dan diterbitkan di tanah air. Mereka menyadari betapa pentingnya ilmu dan pengalaman yang ada di dalam buku-buku itu bagi kemajuan dan pembangunan bangsa dan negaranya.

Dengan adanya usaha penterjemahan itu jelas kita akan mendapat keuntungan ganda, dari pelbagai segi -- materi, sosial dan kultural. Bagi penerbit-penerbit hal ini akan merupakan salah satu bahan baku dalam pengembangan industri mereka, yang dengan sendirinya akan

melibatkan pula tenaga-tenaga kerja penerbitan, percetakan dan toko-toko buku; masyarakat ilmiah, tenaga pengajar, mahasiswa dan masyarakat umum akan juga terbantu. Dalam hal ini sebenarnya berlaku juga untuk segala macam penterjemahan, dan sumbangan penterjemahan pada pengembangan bahasa Indonesia akan sangat terasa.

Bahasa Indonesia, yang dalam penulisan karya-karya ilmiah masih banyak memerlukan apa yang biasa disebut bahasa keilmuan, mau tidak mau dengan jalan penterjemahan akan menyadari sendiri kekurangan-kekurangan. Dengan kata lain bahasa Indonesia akan melatih diri berbicara dalam bahasa ilmu dan teknologi. Seperti halnya dengan bahasa-bahasa lain, yang sekarang sudah maju, pada mulanya juga tertatih-tatih dalam menterjemahkan, khususnya buku-buku ilmiah. Hal ini akan kita rasakan bila kita sudah terjun langsung ke "lapangan". Kita akan melihat dengan tiba-tiba kata-kata baru yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, dan kita harus "menciptakan" padanan itu dalam kata-kata baru. Dengan jalan ini bahasa Indonesia justru diperkaya.

Hasil terjemahan demikian itu dapat dipertanggungjawabkan selama dikerjakan oleh ahlinya dan menurut bidang masing-masing. Meskipun pada mulanya mungkin ada sesuatu yang terasa agak janggal, lambat laun akan diterima oleh masyarakat sebagai hal yang wajar.

2. Karya Cerita Rekaan

Kalau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bahasa penterjemahan karya ilmiah dan non-fiksi lainnya, syarat-syarat demikian berlaku juga untuk bahasa penterjemahan karya cerita rekaan (fiksi), yakni novel, cerita pendek, puisi atau drama. Di atas sudah disebutkan bahwa bahasa keilmuan lebih berkomunikasi dengan fikiran daripada dengan perasaan. Ini tidak berarti bahwa dalam menterjemahkan bahasa sastra kita tidak menggunakan fikiran! Kadar perasaan yang ada dalam bahasa sastra, dalam ungkapan-ungkapan majasi, kata-kata dan kalimat yang oleh bahasa keilmuan dianggap mubazir, dalam bahasa sastra ia kadang turut menentukan mutu.

Bahasa Indonesia dalam berhadapan dengan penterjemahan bahasa sastra juga merupakan ujian, sampai berapa jauh kemampuan bahasa perasaan dalam penterjemahan itu berkomunikasi dengan perasaan bahasa sumber. Ungkapan perasaan dan majasi yang tersimpan dalam bahasa sumber itu tidak sama dengan ungkapan perasaan dan majasi

dalam bahasa Indonesia. Di sini seorang penterjemah karya sastra tidak saja dituntut kemampuan bahasanya tetapi juga kemampuan kreativitasnya menggunakan bahasa. Kita berpikir dan merasa dengan bahasa sastra dan dengan bahasa itu kita menterjemahkan. Dilihat dari segi kreativitas penterjemahan tidak sekedar menyalin kata-kata dan pengertian-pengertian, tapi juga sudah merupakan karya tersendiri. Ia harus menciptakan keindahan itu dalam bahasa Indonesia yang tidak mengurangi amanat yang ada dalam bahasa sumber. Terasa ada kenikmatan kita membaca karya sastra terjemahan yang demikian itu. Satu karya terjemahan biasa dianggap berhasil apabila ia merupakan "reproduksi" dan seperti apa adanya dari yang diterjemahkan dengan menggunakan bahasa terjemahan yang hidup dan bergaya. Dalam sejarah sastra tidak sedikit karya-karya terjemahan yang begitu hidup dan sedap dibaca sehingga orang lupa bahwa ia membaca karya terjemahan. Judul buku aslinya kadang juga sudah tidak dikenal dan penterjemahnya lebih dikenal daripada nama pengarang asal

Sumbangan pada pengembangan bahasa Indonesia lebih-lebih kita rasakan dalam penterjemahan karya sastra. Sambil mengadakan penulisan asli karya sastra Indonesia seperti yang dilakukan oleh Balai Pustaka sekitar tahun dua puluhan, penterjemahan karya-karya sastra juga digiatkan. Kita tetap tertarik membaca karya-karya terjemahan itu, dan nyatanya sudah mengalami cetak ulang sampai beberapa kali.

Sebelum Perang Dunia II penterjemahan sastra modern Indonesia sering dilakukan tidak langsung dari bahasa asal melainkan sudah melalui "jembatan" terjemahan kedua atau ketiga. Itu pun (Audah, 1975) masih terbatas sekali, baik macam, jumlah dan jangkauannya. Pada waktu itu penterjemahan dilakukan melalui bahasa Belanda, meskipun yang diterjemahkan itu sastra Prancis, Inggris atau Rusia misalnya, di samping sastra Belanda sendiri, dengan tidak mengurangi bahwa memang ada yang langsung. Juga sudah dapat dipastikan bahwa sebagai bukan hasil terjemahan sepenuhnya dalam arti harfiah, melainkan sudah berupa saduran, diringkaskan atau diceritakan kembali.

Barangkali tidak berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa lahirnya Pujangga Baru dan Angkatan 45 tidak lepas dari pengaruh sastra terjemahan. Sekurang-kurangnya pengaruh dari luar, melalui karya terjemahan yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain.

Sesudah Indonesia merdeka ada beberapa diantaranya yang diterjemahkan langsung dari bahasa Inggris atau Prancis. Dari bahasa-bahasa

lain masih melalui bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Belakangan ini, setelah kegiatan penterjemahan makin meningkat, karya-karya sastra dunia sebagian besar diterjemahkan langsung dari bahasa asal. Tolstoi diterjemahkan dari bahasa Rusia, Lorca dari bahasa Spanyol, Iqbal dari bahasa Persia atau Urdu, dan sastra Arab dari bahasa Arab meskipun sebagian besar buku-buku agama. Penterjemahan langsung dari bahasa asal memang selalu mesti diusahakan untuk menghindari adanya "distorsi" dan memperluas jangkauan kita berkomunikasi langsung. Belakangan ini ada kecenderungan orang menterjemahkan karya-karya yang dulu sudah diterjemahkan.

Sastra Daerah.

Menang pada hemat penulis masalah penterjemahan adalah masalah kebahasaan juga. Dalam pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah penterjemahan telah memperlihatkan peranannya sebagai penunjang (Hoed, 1978 : 317).

Samal halnya dengan sastra dunia sastra daerah pun perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangkauan ini akan cukup luas. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan bahasa daerah, dalam pengembangan bahasa nasional karya sastra daerah sudah sewajarnya diperkenalkan, pertama-tama kepada bangsa Indonesia. Orang Minahasa akan mengenal sastra Aceh misalnya, melalui hasil terjemahan bahasa Indonesia. Begitu juga sastra Batak, Madura, Bali, Sunda, Jawa dan seterusnya, akan dapat saling diperkenalkan melalui penterjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia akan terasa lebih penting sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu.

Langkah ke arah ini belakangan sudah mulai terlihat melalui penulisan-penulisan baik dalam majalah-majalah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah.

3. Buku Agama

Selain karya sastra, penterjemahan yang sudah cukup tua usianya di Indonesia ialah buku-buku agama. Orang mengenal Qur'an dalam terjemahan bahasa Melayu/Indonesia yang pertama pada pertengahan abad ke-17 oleh Abdul Rauf Alfansuri. Walaupun mungkin ditinjau dari sudut ilmu bahasa Indonesia modern belum sempurna, tetapi pekerjaan itu adalah besar jasanya sebagai pekerjaan perintis jalan (Al Quran dan Terjemahannya, 1980 : 45). Di samping terjemahan dalam bahasa Mela-

yu/Indonesia, terdapat juga terjemahan Quran dalam bahasa-bahasa daerah. Hampir bersamaan waktunya dengan itu juga buku-buku ta-sauf sudah lama ada terjemahannya dalam bahasa Melayu dan beberapa bahasa daerah. Kita belum memiliki datanya yang lebih terperinci mengenai sejarah penterjemahan buku-buku agama ini, yang sudah tentu akan meliputi juga literatur agama lain yang ada di Indonesia. Seperti halnya dalam menghadapi penterjemahan buku-buku ilmiah dan karya-karya sastra, penterjemahan buku-buku agama ke dalam bahasa Indonesia tidaklah banyak menemui kesulitan.

Dalam perkembangan selanjutnya sampai saat ini penterjemahan buku-buku agama dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia memperlihatkan adanya kemajuan yang makin pesat dan beraneka ragam. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia mutu terjemahan juga tampaknya sudah lebih baik.

Bagaimanapun juga penterjemahan buku-buku takkan berakhir selama manusia masih berpikir dan penerbitan buku dalam dunia internasional masih terus berkembang.

Catatan

1. Pengarahan Mendikbud pada rapat pleno BPPBN tanggal 28 September 1983 di Jakarta.
2. Anton M. Moeliono, dalam Seminar Penterjemahan Bidang Hukum, diselenggarakan oleh HPI bekerjasama dengan Erasmus Huis, tanggal 10 - 12 Januari 1983 di Jakarta.
3. Keterangan ini diperoleh dari dr. Elias Effendi, penterjemahnya sebagai anggota Himpunan Penterjemah Indonesia (HPI).
4. Bidang ilmu menurut klasifikasi UDC/DDC.
 72 = Filsafat/Teori Ilmu Pengetahuan
 11 = Logika
 12 = Matematika
 21 = Astronomi dan Astrofisika
 22 = Fisika
 23 = Kimia
 24 = Biologi
 25 = Ilmu Pengetahuan tentang Bumi dan Ruang (termasuk Oseanografi)
 61 = Psikologi

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Ali, 1982. "Buku-buku Ilmiah masih Perlu diterjemahkan". *Pustaka Kita, Dari Pameran ke Kultur Membaca*. Frans M. Parera. Jakarta : Panitia Pameran Buku Internasional Ikapi.
- "Beberapa Masalah Penterjemahan" Ceramah di Taman Ismail Marzuki, 10 Februari 1975. Jakarta : *Berita H.P.I.* 1975. No. 1.
- 1975. *Peranan Penterjemahan dalam Pengembangan Sastra Indonesia*. Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen P dan K.
- Al Quran dan Terjemahannya*. 1980. Jakarta : Departemen Agama RI
- Barker & Escarpit, 1976. *Haus Buk (The Book Haunger)*. Sunindyo, penterjemah. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Cowley, Malcolm, 1962. "American Books Abroad". Robert E. Spiller, Willard Throp, Thomas H. Johnson dan Henry Seidel Canby, editors. *Literary History of the United States*. New York : The Macmillan Company.
- Damono, Sapardi Djoko, 1977. "Masalah Penterjemahan dalam Bahasa Indonesia". *Berita H.P.I.* No. 7.
- Halim, Amran, 1981. "Peranan Penerjemahan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa". *Budaya, Bahasa dan Penerjemahan*. Drs. H. Oesman Rahman, B.A., penyunting. Jakarta : Sekolah Tinggi Penerjemah Nasional.
- Hoed, B.H., 1978. "Penataran Penterjemah dan Politik Bahasa Nasional", Jakarta : *Berita H.P.I.* 1978 No. 11.
- Hughes, John P., 1966. *The Science of Language*. New York : Random House.

- Johannes, H., 1978. *Gaya Bahasa Keilmuan*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pearce, Douglas, 1974. *Book Development*. Paris : UNESCO. Reprinted by Pusat Grafika Indonesia.
- Simatupang, Maurits, 1978. *Penterjemahan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sukra, Yuhara dkk., 1982. *Keadaan Perbukuan Bidang Sains di Indonesia*. Laporan Penelitian. Jakarta : Proyek Pengembangan Perpustakaan Pusat Pembinaan Perpustakaan, bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengembangan pada Masyarakat, Departemen P dan K.

BAHASA NASIONAL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL

Jusuf A. Feisal
IKIP Bandung

Bendahuluan

1. Kemampuan Dasar dan Penampilan Kebahasaan

Kemampuan dasar manusia untuk berbahasa merupakan kemampuan yang sejalan dengan potensi hidup manusia; sarana ujaran (articulatory organs) sekaligus berfungsi sebagai alat hidup (bernafas, makan-minum, pencernaan, merasa dan perkembangan badani). Meskipun demikian kemampuan dan tingkat perkembangan ujaran sebagai penampilannya selain daripada erat hubungannya dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan kreativitas seseorang, sangat erat hubungannya dengan pertimbangan individu yang dilandasi oleh nilai-nilai tertentu (budaya, agama, profesi, hubungan-peran, dan lain-lain).

Perkembangan bahasa secara genetik sangat dipengaruhi oleh kondisi objektif tersebut di atas, akan tetapi secara normatif perkembangan bahasa dibakukan dan dikembangkan oleh suatu badan atau kelompok masyarakat yang mewakili strata sosial tertentu dengan kerangka nilai budaya yang sudah disiapkan yang mengacu kepada kepentingan-kepentingan tertentu sedangkan secara deskriptif perkembangan bahasa tersebut ditentukan oleh kesepakatan dan penerimaan sosial yang dilandaskan kepada pertimbangan pribadi dan sosial serta nilai-nilai budaya, sehingga merupakan suatu kerangka pragmatik sosial yang secara struktural historis mengandung pengertian dan tafsiran linguistik dan kognitif para pelaku ujarannya sendiri.

Istilah Bahasa Nasional dalam judul makalah ini digunakan dengan kerangka berpikir seperti tersebut diatas yaitu bahasa tersebut adalah

bahasa standar yang dikembangkan baik secara normatif maupun secara deskriptif. Istilah Nasional dipakai untuk mencerminkan perbedaan pengertian dengan istilah Indonesiayang berarti terdapat di kepulauan Indonesia. Oleh karena pengertian tersebut bisa digunakan untuk bahasa-bahasa seperti bahasa daerah) yang terdapat di Indonesia, akan tetapi tidak berfungsi sebagai Bahasa Nasional yang merupakan bahasa standar, kecuali sumbangannya dalam perkembangan Bahasa Nasional tersebut (bunyi, kosakata, sintaksis dan makna).

Sarana komunikasi adalah alat verbal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang mengandung data, hubungan antar data dan makna konseptual dalam bentuk bahasa lisan atau tulisan, sehingga terjadi kontak, saling pengertian dan saling isi (interaksi) dalam suatu konteks tertentu yang sedikitnya mengandung unsur psikologi, sosiologi dan fisik. Konteks psikologik merupakan dimensi terpadu dalam proses komunikasi yang melibatkan aspek sikap dan motivasi serta ke-sejarahan, pengalaman dan pengetahuan. Dimensi sosiologik meliputi status dan peran hubungan, norma budaya dan moral sosial, sedangkan dimensi fisik melibatkan ruang dan tempat terjadinya proses komunikasi. Ketiga dimensi ini merupakan unsur-unsur terpadu dalam satu proses penyebaran informasi dan pembentukan pola-pola interaksi dalam satu konteks yang dapat menetapkan makna beserta nuansa-nuasanya, baik dalam bentuk pesan, bujukan maupun perintah.

Tujuan komunikasi secara sejajar, bertingkat atau bercabang tidak hanya dimaksudkan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau konsep, akan tetapi juga dimaksudkan untuk menerima arus balik yang merupakan kesan, pengertian dan konsep yang merupakan masukan bagi perbaikan, perkembangan dan pembaharuan konsep atau makna dan konsepsi suatu perilaku budaya (tujuan Nasional).

Cita-cita Nasional sebagaimana kita lihat dalam paragraf empat Pembukaan UUD 1945 ialah "Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," Realisasi tujuan Nasional ini tidak hanya bergantung kepada landasan yang harus terbentuk terlebih dahulu dan mendasari cita-cita tersebut, seperti dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan seluruh bangsa Indonesia, Kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, akan

tetapi juga harus dipahami asal mula terjadinya dan suasana terbentuknya kode ujaran tersebut sehingga memahami maksudnya atau aliran-aliran pikiran yang terkandung di dalamnya dengan mengingat pula dinamika kehidupan masyarakat dan negara yang selalu tumbuh dan berkembang (proses perubahan).

2. Teori Komunikasi dan Proses Sosialisasi

Jika diteropong teori komunikasi sebagaimana dirumuskan oleh Paul Watzlawick dan kawan-kawan²), mereka menyatakan bahwa komunikasi adalah setiap unit perilaku yang berfungsi menyampaikan informasi secara sefihak dan tidak memungkinkan timbulnya kesimpangsiuran, disebut pesan (*message*). Seperangkat pertukaran pesan antar individu secara timbal-balik disebut interaksi (*interaction*). Akhirnya pada tingkat ulang yang tinggi komunikasi manusia ini dilahirkan pola interaksi (*patterns of interaction*).

Pesan membawa kesan, demikianlah dalam komunikasi manusiawi pesan berarti isi pesan. Pesan ini seringkali secara kategorik diungkapkan dalam simbol kebahasaan yang jelas yang mengacu kepada makna yang sederhana, gamblang dan terang. Akan tetapi ada kalanya pesan ini harus diungkapkan dengan cara yang rumit, melelahkan dan tidak jarang menimbulkan kesalah-fahaman karena luasnya konsep makna yang terkandung pada simbol kebahasaan tersebut atau dalam konsep yang terdapat pada kaitan antar makna yang terkandung dalam seperangkat simbol kebahasaan atau struktur kalimat sehingga menuntut si penutur melengkapinya dengan unsur-unsur saru bahasa (*para linguistic features*) yang bersifat nada, sikap-badani, rangka (*tonal, postural, contextual*), jarak, bau, raba (*distance, olfactory, tactile*), semangat dan mikik³) (lihat teori komunikasi yang dirumuskan oleh Joseph A DeVito).

Kerumitan pesan tersebut akan terasa lebih serius apabila si penerima atau pendengar tidak menggunakan rujukan yang sama atau memiliki persepsi yang berbeda, baik yang bersifat objektif atau bersifat judgemental, terutama apabila si penutur mengabaikan sama sekali adanya pihak si penerima, pendengar atau "kawan" berinteraksi (*communication gap*). Hal ini juga mungkin terjadi karena berlakunya pengabaian nilai (*value ignorance*), pengabaian norma budaya dan pragmatik yang terpadu dengan pihak pendengar tersebut sehingga tidak terjadi proses pertukaran informasi (*exchange of message*) dan oleh karena itu kehilangan pengertian (*cognitive deficit*) yang disebabkan karena tidak adanya

umpan balik. Dengan demikian proses sosialisasi (timbal-balik) mengalami hambatan atau sama sekali terhenti.

Korelasi antara Masyarakat Bahasa, Ujaran (Bahasa) dan Makna (tujuan Menurut Pandangan Hipotesis Defisit Lawan Konsep Kebinekaan (*Variability Concept*))

1. Masyarakat Bahasa (*Speech Community*) menurut Joshua A Fishman⁴) ialah sekelompok penutur yang anggotanya menggunakan sekurang-kurangnya sebuah ragam bahasa¹ (*speech variety*) berikut norma-norma penggunaannya yang tept, yang seringkali secara fungsional merupakan sumber kebahasaan yang berbeda bergantung kepada jaringan interaksi perilaku bahasa yang berbeda pula.
2. Bahasa secara potensial merupakan simbol suara yang bersifat arbitrer dan digunakan untuk komunikasi manusia, khususnya pada masyarakat bahasa tertentu dan oleh karena itu merupakan milik masyarakat tersebut, sedangkan ujaran adalah penampilan aktual bahasa yang merupakan produk perorangan dalam proses komunikasi yang riil (lihat pandangan Ferdinand de Saussure sebagaimana dikutip oleh Josep A deVito⁵).
3. Makna pada hakekatnya merupakan tujuan ungkapan atau ujaran yang memungkinkan mengacu kepada benda, peristiwa, konsep atau penilaian. Oleh karena itu makna ada kalanya berbentuk kosa-kata, hubungan antar kosa-kata, pernyataan, hubungan antar pernyataan yang ditetapkan oleh maksud atau pertimbangan si penutur dan si pendengar. Selain daripada itu, makna seringkali meliputi bukan hanya unsur-unsur tersebut di atas, akan tetapi juga unsur budaya yang dijalin dalam suatu bentuk dan struktur ujaran tertentu yang disebut pragmatik. Di dalam kenyataannya pemilihan kosa-kata, bentuk dan struktur ujarannya yang baik dan benar, menurut Hipotesis Defisit harus merujuk kepada satu bentuk dan struktur standar yang secara normatif ditetapkan oleh sekelompok para ahli dan digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang dimasyarakatkan melalui suatu proses pendidikan. Setiap kelompok masyarakat yang mengharapkan untuk bisa berkomunikasi dengan kelompok masyarakat tersebut di atas harus berusaha untuk menguasai bentuk dan struktur ujaran tersebut atau dengan perkataan lain kelompok masyarakat yang memiliki ujaran standar masyarakat kelompok masyarakat lain untuk mengikuti pelajaran tambahan agar kelompok tersebut dapat berintegrasi dengan kelompok pemilik ujaran standar tersebut.

Sebaliknya menurut teori Konsep Kebinekaan, teori Hipotesis Desisit tersebut dalam kenyataannya tidak melahirkan integrasi sosial, akan tetapi justru mensahkan dan memperkuat adanya kelompok ujaran tertentu yang berstatus lebih tinggi daripada kelompok ujaran lain yang dipandang lebih rendah. Kelompok ujaran yang lebih rendahlah yang harus melestarikan kepentingan kelompok ujaran yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya status atau martabat kelompok ujaran diukur dari suatu kelompok tertentu yang kebetulan memiliki kesempatan dan otoritas, padahal adanya berbagai kelompok ujaran dalam masyarakat adalah suatu kenyataan kultural yang terpadu dengan norma-norma budayanya dan oleh karena itu mempunyai hak hidup dan hak untuk dimengerti oleh kelompok lainnya yang secara deskriptif kaidah-kaidah kebahasaannya hendaknya dirumuskan secara menyeluruh yang masing-masing martabat dan keunikannya dihormati dan dibakukan yang akhirnya digunakan dalam satu kerangka masyarakat ujaran yang lebih luas dalam lintasan antar kelompok maupun dalam wadah Nasional (lihat pendapat Noerbert Dittmar⁶).

Dalam kerangka pikiran inilah istilah Bahasa Nasional dipergunakan dalam judul makalah ini.

Analisis Bahasa

1. Bahasa atau ujaran pada dasarnya memiliki bentuk, isi dan tujuan. Bentuk bahasa dapat diurut mulai dari adanya bentuk dan struktur bunyi yang merupakan unit-unit bunyi yang membentuk arti dan bunyi atau unit yang memiliki arti. Selanjutnya bentuk dan struktur kosa-kata yang terdiri dari unit-unit bunyi yang merupakan simbol suatu benda, konsep, peristiwa dan evaluasi yang memiliki makna tersendiri secara terpisah atau dalam hubungannya dengan kosa-kata yang lain dalam satu struktur kalimat dan atau makna yang dimilikinya secara khusus karena keterkaitannya dengan kosa-kata yang lain dalam suatu konteks atau situasi (waktu dan *setting*). Selain daripada itu dalam struktur kalimat yang menggambarkan susunan tempat kosa-kata terdapat juga susunan kalimat yang mempertimbangkan tidak hanya susunan tempat kosa-kata, akan tetapi pilihan kosa-kata atau frasa dilihat daripada efektifitas pencapaian maksud yaitu gaya bahasa dan pragmatik tertentu. Sejalan dengan itu penggunaan aksen, tinggi rendah bunyi, sambungan bunyi antar kata (*juncture*), nada dan irama bahasa, merupakan bentuk lain yang memberi makna tersendiri yang seringkali dibantu kedalaman maknanya oleh

mimik (air muka) maupun sikap dan gerak badani yang dalam bahasa tulisan hal ini diungkapkan oleh tanda-tanda bacaan seperti koma, titik koma, tanda seru, tanda tanya, titik, dan sebagainya.

2. Isi ungkapan secara garis besarnya terbagi ke dalam makna harfiah (tersurat) dan makna kiasan (tersirat), makna rujukan (denotasi) dan makna hakekat (konotasi). Dengan cara lain makna dapat dibagi ke dalam makna kosa-kata (leksis) yang biasanya dibakukan dalam suatu indeks (kamus). Selanjutnya isi atau makna sintaksis yang ditetapkan maknanya ditetapkan oleh posisi kosa-kata dalam kalimat dan diatur oleh ketentuan tata bahasa. Meskipun di dalam kenyataan penggunaan ujaran atau bahasa seringkali terjadi penyimpangan dari atau ketidaklengkapan aturan kebahasaan, sebenarnya kalimat-kalimat tersebut tetap memperoleh arti yang seharusnya karena kalimat-kalimat tersebut dapat dialih bentukkan ke dalam kalimat lain yang merupakan maksud yang sebenarnya (*surface vs deep structure*).

Isi atau makna juga terjadi karena kosa-kata atau frasa tidak hanya karena hubungannya dengan kosa-kata atau frasa yang lain, akan tetapi karena masuknya faktor waktu dan *setting*, (susunannya dengan lingkungan) atau dalam konteks tertentu. Dalam keadaan seperti ini pengungkapan maksud yang sama dilakukan dengan menggunakan frasa atau kalimat yang berbeda atau ungkapan (kalimat) yang sama mempunyai arti yang berbeda hanya karena ungkapan atau kalimat tersebut berada dalam konteks dan atau situasi yang berbeda. Akhirnya makna seperti halnya makna kontekstual di atas dapat diungkapkan melalui bentuk dan atau struktur ujaran khusus yang merujuk kepada keunikan fungsi (*register*), alat (*media*) dan atau daerah (*dialek*).

3. Tujuan ujaran identik dengan tujuan komunikasi karena ujaran adalah salah satu bentuk komunikasi yang riil yaitu untuk menyajikan data atau informasi sebagai laporan dan untuk menyampaikan keterangan tentang data atau informasi yang merupakan harapan atau perintah. Karena bentuk kegiatan komunikasi tidak hanya berlaku secara verbal akan tetapi meliputi seluruh bentuk perilaku budaya, maka proses komunikasi, termasuk komunikasi verbal atau kalimat bertujuan untuk memancing umpan balik yang merupakan pengertian, harapan ataupun aspirasi pendengar untuk perbaikan makna atau konsep, konsep maupun perkembangan dan atau perubahannya sesuai dengan dinamika pendengar atau kelompok pendengar (masyarakat). Yang terakhir ini merupakan

proses pembentukan makna, isi atau tujuan ujaran dengan pendekatan deskriptif yang berbeda dengan pendekatan normatif.

4. Proses sosialisasi bentuk dan struktur ujaran atau dengan perkataan lain proses komunikasi yang menyajikan data dan informasi secara normatif-sepihak, dapat dilakukan melalui berbagai macam bentuk pendidikan, percontohan, retorika, permainan simulasi, dan sebagainya; sedangkan proses sosialisasi timbal balik dilakukan dalam bentuk-bentuk pola interaksi yang menerima arus balik seperti dalam bentuk tanya-jawab, diskusi, simposia, seminar, pengumpulan dan pencatatan pendapat, dan sebagainya.
5. Ketidakpastian makna dan atau tujuan (*entropy*) karena perbedaan konsep atau konsepsi suatu ujaran yang disebabkan oleh karena kesalahan-fahaman, perbedaan persepsi dan perbedaan tujuan akan mengakibatkan terjadinya salah-komunikasi (*miskomunikasi*) bahkan kesenjangan komunikasi (*communication gap*) atau sekurang-kurangnya akan terjadi nuansa dan variants yang dapat menimbulkan kebingungan (*confusion*), frustrasi dan atau sikap masa bodoh yang disebabkan oleh tidak adanya pengertian. Hal ini dapat berlanjut kepada suatu keadaan hampa nilai (*anomie*), sehingga ujaran atau komunikasi dan interaksi kehilangan bentuk struktur dan arah. Sebagai akibatnya, ujaran (Bahasa Nasional) kehilangan fungsinya.
6. Kalau kita perhatikan formula teori komunikasi dan kebahasaan sebagai landasan pendapat analisis maupun konsepsi atau teori dan rumusan Tujuan Nasional serta isi tafsirannya, sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu dan kita hubungkan pula dengan GBHN 1983–1988 Bab III yaitu Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Sub A ayat 3 yang berbunyi :

”Setelah pemberontakan G–30–S/PKI pada tahun 1965 dapat digagalkan, berkat Lindungan dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kesadaran dan keteguhan rakyat pada landasan falsafah Pancasila, maka Orde Baru dengan perjuangan yang sungguh-sungguh telah berhasil menciptakan satilitas nasional, baik di bidang politik, untuk selanjutnya melakukan serangkaian pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terus-menerus, menyeluruh, terarah dan terpadu, bertahap dan berencana, sebagai satu-satunya jalan untuk mengisi kemerdekaan serta mencapai *tujuan nasional*. Semua usaha dan perjuangan itu akan terwujud apabila

seluruh bangsa setiap pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945."

Dan apabila kita rujuk pula Pola Dasar Pembangunan Nasional sebagaimana termaktub dalam GBHN 9183 – 1988 Bab II sub A yang berbunyi :

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai,⁷⁾ maka jelaslah bahwa pencapaian Tujuan Nasional hendaknya menjamin terpenuhinya/terpeliharanya lingkungan (encironment) Tujuan Nasional tersebut yang antara lain terdiri dari :

1. Unsur kesejarahan tentang asal usul terjadinya rumusan dan alam pikiran yang melatar belakangi rumusan Tujuan Nasional tersebut.
2. Maksud (makna dan tujuan) rumusan setiap kata dan kalimat (ujaran)
3. Pedoman dasar pencapaian Tujuan Nasional.
4. Pelaksanaan teknis pencapaian Tujuan Nasional tersebut.
5. Dinamika yang tumbuh di dalam lingkungan bangsa dan negara.
6. Dinamika yang berpengaruh dari luar dalam lingkungan antar bangsa (dunia).

Hal ini berarti bahwa penggunaan Bahasa Nasional dalam rangka mencapai Tujuan Nasional hendaknya diusahakan terbentuknya kalimat, pernyataan dan pernyataan tentang pernyataan (*statements about statements*) yang tidak hanya berbentuk pesan (*message*) yang menyampaikan data dan atau informasi yang bersifat normatif, akan tetapi diusahakan penggunaan kalimat yang demikian rupa sehingga menimbulkan interaksi, dialog, saling isi yang dapat menghasilkan umpan balik yang merupakan masukan untuk penyempurnaan dan atau perubahan, bahkan Bahasa Nasional seyogyanya memungkinkan tingkat komunikasi yang lebih tinggi yaitu terjadinya pola-pola interaksi yang bervariasi, tidak monolitik dan dogmatik.

Lebih daripada itu, interaksi adalah suatu sistem yang terdiri dari

seperangkat obyek yang memiliki keterkaitan dengan obyek lain beserta seluruh atributnya. Dengan perkataan lain komunikasi atau interaksi sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang merupakan bagian sistem, atribut komponen dan keterkaitannya satu sama lain (*relationship between components and between their attributes*).

Sesuai dengan rumusan interaksi sebagai suatu sistem terbuka, ia harus memenuhi syarat-syarat :

1. Menyeluruh – tidak unilateral artinya sistem tersebut tidak berperilaku sebagai suatu komposit unsur yang bebas, akan tetapi secara pekat menyatu dengan keseluruhan.
2. Memungkinkan adanya umpan balik, melalui jalur putaran sistem tersebut ujaran-ujaran yang mengandung konsepsi serta keterkaitannya dengan dinamika lingkungan disalurkan.
3. Memungkinkan tercapainya *equifinality*, yaitu gerak maju dengan perubahan dalam suatu sistem, setelah mengalami periode tertentu, perubahan dan atau perkembangan atau modifikasi ujaran, konsep, makna dan tujuan tidak lagi terikat kepada pewaktuan yang terlalu kaku dan kondisi sebelumnya akan tetapi lebih ditentukan oleh parameter sistem tersebut.⁸⁾

Kesimpulan dan Anjuran

Sebagai akibat dari konsepsi ini yang diturunkan dari teori kebahasaan, komunikasi dan sosialisasi yang tidak terpaku hanya kepada pendekatan normatif akan tetapi juga menggunakan pendekatan deskriptif maka hal-hal tersebut di bawah ini sangat mungkin akan terjadi (sebagai konsekwensi dari kebenaran suatu sistem terbuka) yaitu :

1. Bahasa atau ujaran sebagai sarana komunikasi dan interaksi yang *baik* dan *benar* merupakan bahasa standar yang dibakukan secara normatif.
2. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan masukan baru yang terdiri dari kosa kata, frasa, pernyataan dan pernyataan tentang pernyataan yang mengkonseptualisasikan dan mengkonsepsionalisasikan makna atau pengertian baru yang lahir dari dinamika masyarakat dan budaya.
3. Demikian halnya dengan bentuk dan struktur ujaran Tujuan Nasional hendaknya merupakan ujaran standar yang dibakukan secara normatif.
4. Akan tetapi tetap membuka kemungkinan masukan baru yang lahir dan tumbuh dari dinamika masyarakat dan budaya.

Apabila teori ini dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan proses komunikasi, interaksi atau sosialisasi Tujuan Nasional maka sudah dapat diperhitungkan/diprediksikan bahwa bukan saja tidak akan terjadi miskomunikasi, kesenjangan komunikasi atau hampa komunikasi akan tetapi justru akan terjadi harmoni antara bahasa sebagai sarana komunikasi dengan Tujuan Nasional sebagai obyek komunikasi dan lingkungan serta atributnya dalam suatu keterkaitan sistem yang berjalan dan lestari.

Untuk memungkinkan hal ini perlu dilakukan peningkatan keterbukaan, objektivitas, keluwesan, kesabaran dan tingkat kecerdasan yang menunjukkan kebijaksanaan. Tidak tertutup, eksklusif, penuh ketidakpercayaan dan tidak saling menutup kemungkinan berdialog dan berinteraksi.

INDEKS PUSTAKA

1. MPR, *P4, GBHN dan UUD 1945*, Pancuran Tujuh, C.V., Jakarta, 1978.
2. Watzlawick, Paul, Ph. D., Cs., *Pragmatics of Human Communication*, W.W. Norton & Company, Inc., New York, 1967.
3. DeVito, Joseph A., *The Psychology of Speech and Language*, Random House, Inc., New York, 1970.
4. Fishman, Joshua A., *The Sociology of Language*, Newbury House Publisher, Inc., Massachusetts, 1969.
5. Idem no. 3.
6. Dittmar, Norbert, *Sociolinguistics*, Edward Arnold Ltd., 1976.
7. MPR, GBHN serta P4 (1983 – 1988 dan 1978 – 1983), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
8. Idem no. 2 dan
Inglehart, RF dan Woodward, M., *Language Conflicts and Political Community*, yang diedit oleh Pier Paolo Giglioli dalam *Language and Social Context*, Penguin Books, Auckland, New Zealand, 1979.

PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI MASYARAKAT

P.W.J. Nababan
IKIP Jakarta

Pendahuluan

Pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia mengikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk berjuang akan tercapainya "satu nusa : Indonesia; satu bangsa : Indonesia; satu bahasa persatuan : Indonesia". Dengan demikian, secara konseptual, lahirlah nusa, bangsa dan bahasa Indonesia. Sewaktu perwujudan nusa dan bangsa Indonesia sedang diperjuangkan, bahasa Indonesia sudah lahir dengan nyata dan sejak Sumpah Pemuda itu mulai diasuh, dikembangkan dan dipelihara oleh pejuang-pejuang Indonesia.

Dalam masa penjajahan politis, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia mengalami banyak kesukaran. Namun dapat dicatat bahwa pada dekade 1930 sudah lebih banyak penerbitan dalam bahasa Indonesia, baik surat-surat kabar maupun buku-buku. Patut dicatat dalam kaitan ini penerbitan majalah *Pujangga Baru* dibawah pimpinan Sutan Takdir Alisyahbana, dibantu oleh Armin Pane dan Amir Hamzah (Abas, 1978 : 111).

Salah satu puncak usaha pembina-pembina bahasa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ialah penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo pada tahun 1938. Dalam Kongres Bahasa Indonesia I itu diusulkan antara lain :

- (1) membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi;
- (2) pembaharuan ejaan, pengembangan istilah-istilah dan penyusunan tata bahasa baru sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia;
- (3) pendirian suatu Institut Bahasa Indonesia (cf. Moeliono 1982).

Tidak mengherankan bahwa hasil-hasil kongres itu tidak terselenggara oleh karena tidak ada organisasi atau lembaga yang mempunyai danda dan wewenang untuk mengimplementasi keputusan-keputusan itu. Namun, kongres itu berhasil meningkatkan serta meluaskan kesadaran orang akan fungsi

bahasa Indonesia sebagai alat dan kekuatan pemersatu dalam perjuangan menuju tercapainya nusa dan bangsa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 itu.

Selama jaman kolonial Belanda, bahasa Indonesi amasih dalam kedudukan yang terpojok sebab bahasa Belanda satu-satunya bahasa yang diberikan status resmi. Dalam masa pendudukan Jepang, posisi bahasa Indonesia menjadi lebih penting dan luas, oleh karena bahasa Belanda dilarang pemerintah militer Jepang sedangkan bahasa Jepang tidak/belum diketahui orang. Jadi terpaksa bahasa Indonesia yang kebanyakan dipakai dalam fungsi-fungsi resmi seperti pemerintahan, pengadilan, dan juga di sekolah-sekolah. Akan tetapi, dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia segera meluas di seluruh Indonesia secara nyata.

Pemerintah Jepang membentuk Komisi Bahasa Indonesia pada akhir tahun 1942, namun tidak diberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan komisi itu bekerja dengan baik, malah mereka membubarkan Komisi pada tanggal 30 April 1945 (Johannes, 182). Walaupun demikian, komisi ini menghasilkan daftar-daftar istilah untuk berbagai bidang yang sempat diterbitkan oleh S.T. Alisyahbana denga Poestaka Rakjat dalam Oktober 1945. Mungkin yang lebih penting dan berguna bagi perkembangan bahasa Indonesia ialah naskah dari Kamus Umum Bahasa Indonesia (yang kemudian diterbitkan W.J.S. Purwadarminta dengan Balai Pustaka).

Kemerdekaan Indonesia membuat kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia secara yuridis menjadi penuh dan lengkap dengan Fatsal 36, Bab XV, UUD 1945, yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia secara nyata dan benar menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi Indonesia, yang dipakai dalam semua kegiatan resmi negara dan pemerintahan; demikian juga dalam pendidikan dan juga kegiatan sosioekonomi yang bersifat suprad daerah. Perubahan kedudukan, fungsi dan penggunaan bahasa Indonesia ini dapat diduga akan membawa perubahan dalam berbagai pola berbahasa orang Indonesia.

Dalam kertas kerja saya ini ingin membicarakan pola penggunaan bahasa Indonesia, khususnya sebagai "bahasa pertama" atau bahasa yang dipelajari penuturnya dalam lingkungan rumah tangga (yang secara tradisional juga disebut "bahasa ibu"). Sumber utama bagi pengkajian ini ialah data yang terkumpul oleh survei yang dilaksanakan suatu tim dari Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam tahun 1980 – 1982. Sebelumnya, kiranya ada gunanya kita lihat beberapa hasil Sensus Penduduk Indonesia.

Pola Kebahasaan dalam Sensus Penduduk Indonesia 1980

Dalam buku *Hasil Sub-Sampel Sensus Penduduk 1980* (SPI) diperlihatkan bahwa lebih dari 61% penduduk Indonesia mampu berbahasa Indonesia (lihat Tabel 1). Jumlah ini terdiri dari rata-rata persentase dari yang terendah 50.8 (Jawa Timur) sampai yang tertinggi 99.5% (DKI Jaya). Dalam tabel ini, Indonesia dibagi atas 5 wilayah :

- (1) Jawa Madura;
- (2) Sumatera;
- (3) Kalimantan;
- (4) Sulawesi, dan
- (5) Kepulauan lain.

Dari kelima wilayah ini, Sumatera mempunyai persentase yang tertinggi (71.7%) penduduk yang dapat berbahasa Indonesia. Rupanya, dalam bidang ini dimasukkan penutur-penutur bahasa daerah Melayu yang ada di Sumatera Timur, Riau, Djambi, dan Palembang. Jawa-Madura mempunyai persentase yang terendah, yaitu 58%. Ini barangkali agak mengherankan oleh karena Jawa mempunyai penduduk yang relatif lebih banyak di kota dibanding dengan pedesaan.

TABEL 1
PERSENTESE PENDUDUK YANG BISA BERBAHASA
INDONESIA MENURUT PROPINSI/PULAU 1980

Propinsi/Pulau	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jawa — Madura	63.8	52.3	58.0
a. DKI Jakarta	99.5	99.4	99.5
b. Jawa Barat	66.0	57.2	61.6
c. Jawa Tengah	58.8	45.0	51.8
d. DI. Yogyakarta	67.1	52.1	59.5
e. Jawa Timur	57.7	44.0	50.7
2. Sumatera	74.3	69.1	71.7
3. Kalimantan	68.1	59.3	63.8
4. Sulawesi	66.3	60.7	63.5
5. Kepulauan lain	66.0	52.9	59.5
Indonesia	66.4	56.4	61.4

Sumber : Seri D, Sensus Penduduk Indonesia 1980, Biro Pusat Statistik.

Kita umumnya menganggap lebih banyak bahasa Indonesia digunakan di kota daripada di pedesaan. Perbandingan penduduk umur 5 tahun ke atas antara kota dan pedesaan di Jawa—Madura ialah 1 : 3, sedangkan di Sumatra ialah 1 : 4, di Kalimantan 2 : 7, di Sulawesi 1 : 5, dan di Kepulauan lain 1 : 7 (lihat Tabel 8 dalam SPI 1980). Kemungkinan keterangannya ialah bahwa :

- (1) di luar Jawa—Madura banyak terdapat orang pedesaan yang menyatakan tahu bahasa Indonesia oleh karena tahu berbahasa Daerah Melayu, seperti bahasa Melayu Manado, Kupang, Ambon, bahasa Banjar dan bahasa-bahasa Melayu di Sumatra.

- (2) di Jawa—Madura terdapat konsentrasi penduduk pedesaan yang lebih homogen berbahasa daerah.

Persentase penduduk Indonesia yang mampu berbahasa Indonesia adalah 60.8% dalam SPI 1980 (Tabel 2). Pada SPI 1971, persentase penutur bahasa Indonesia ialah 40.8%, dan Biro Pusat Statistik memroyeksikan kenaikan persentase dalam tahun 1981 kepada 49.66%. Jadi kenyataan ada kelebihan 11% lebih daripada proyeksi statistik. Proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 1981 adalah 140 juta. Ini tidak sebanyak penduduk dalam SPI 1980, yang berjumlah 146 juta, tetapi perbedaannya tidak sebesar perbedaan proyeksi penutur bahasa Indonesia.

Perbedaan yang lebih besar dalam jumlah penutur bahasa Indonesia a kemungkinan sekali oleh karena kurang dihitung cepatnya bertambah jumlah pelajar di sekolah. Umpamanya dalam 2 (dua) tahun, antara 1975 dan 1977, jumlah pelajar bertambah 14.5% (BP3K, 1979), sedangkan pertambahan penduduk yang diproyeksikan dalam 10 (sepuluh) tahun adalah kurang dari 28%. Ini saja sudah cukup membuat perbedaan yang besar antara kenyataan dan proyeksi. Lagi pula ada juga kiranya pengaruh dari pesatnya berkembang telekomunikasi dan media massa, yang ikut juga berperan dalam bertambahnya penutur bahasa Indonesia, atau paling sedikit mempertahankan kemampuan berbahasa Indonesia para penonton, pendengar dan pembaca.

TABEL 2
 PERSENTASE PENDUDUK YANG DAPAT BERBAHASA INDONESIA
 MENURUT DAERAH KOTA/PEDESAAN, UMUR DAN JENIS KELAMIN
 1971 DAN 1980

Umur	1971			1980		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Darah Kota						
0 – 9	51,3	51,4	51,4	55,1	55,6	55,3
10 – 49	87,4	78,7	83,0	96,8	91,5	94,8
50 +	73,1	51,5	61,9	83,5	59,1	70,8
Tak Terjawab	99,4	98,9	99,5	80,1	66,2	73,1
JUMLAH	75,3	68,4	71,9	84,2	78,8	81,5
Daerah Pedesaan						
0 – 9	16,6	16,4	16,5	22,9	23,4	23,1
10 – 49	54,2	38,9	46,3	82,1	67,8	74,8
50 +	32,0	14,2	22,8	50,8	20,8	35,4
Tak Terjawab	100,0	100,0	100,0	49,1	25,7	38,7
JUMLAH	39,4	29,3	34,3	60,5	49,3	54,8
Kota + Pedesaan						
0 – 9	22,2	21,9	22,1	29,6	30,0	29,8
10 – 49	60,4	46,1	53,0	85,7	73,3	79,4
50 +	38,2	19,9	28,7	57,0	28,2	42,2
Tak Terjawab	99,4	98,9	99,2	54,7	34,6	45,5
JUMLAH	45,7	36,0	40,8	65,8	55,9	60,8

Sumber : Seri D, Sensus Penduduk 1971 dan Sensus Penduduk 1980
 Biro Pusat Statistik.

Pola Perolehan Bahasa Indonesia

Orang belajar bahasa secara informal, atau sambil lalu, dalam suatu lingkungan bahasa terutama untuk keperluan berkomunikasi dengan orang-orang dalam lingkungan kebahasaan itu. Jika belajar bahasa ini dilakukan untuk pertama kali dan biasanya di kalangan rumah tangga/keluarga, bahasa yang dipelajari itu disebut "bahasa ibu" (*mother tongue*), "bahasa asli" (*native language*), atau "bahasa pertama" (*first language*). Kita akan pakai di sini istilah *bahasa pertama*.

Dalam Sensus Penduduk Indonesia 1980 dipakai istilah "bahasa yang dipakai sehari-hari", yang kita anggap sama dengan "bahasa pertama" yang kita pakai di sini, mengikuti peristilahan survei Proyek Penelitian Pusat Bahasa tersebut di atas. Kan tetapi, bahasa yang dipakai sehari-hari agaknya mempunyai implikasi lebih langsung kepada tingkat kemampuan daripada bahasa pertama. Dengan kata lain, pada umumnya lebih terjamin adanya tingkat kemampuan yang memadai dalam pengertian "bahasa yang dipakai sehari-hari", sedangkan kemampuan berbahasa seseorang dalam "bahasa pertama" dapat saja berkurang bergantung pada frekuensi dan situasi penggunaan bahasa itu. Namun, dengan catatan di atas, kita akan memakai kedua istilah itu seperti sama.

Dalam Sensus Penduduk Indonesia 1980 tercatat 11.93% penduduk yang "memakai bahasa Indonesia sehari-hari". (lihat Tabel 3 di bawah). Bilangan ini sama dengan perkiraan dalam Tabel 12.3 dari Seri S, SPI 1980, yang mencatat jumlah 17.640.621. SPI 1971 mencatat 48,3 juta orang yang "tahu bahasa Indonesia", jadi secara perbandingan dapat diperkirakan ada 11.363.311 orang yang memakai bahasa Indonesia sehari-hari. Bersasarkan SPI 1971 itu, Latief (1979) memberikan perkiraan jumlah "penutur bahasa Indonesia" dengan jarak yang cukup aman, yaitu dari 20 sampai dengan 60 juta. Perkiraan ini agaknya membayangkan kemampuan "berbahasa kedua" dari yang serendah-rendahnya sampai yang amat baik.

Tabel 4 di balik memberikan ikhtisar dari perolehan bahasa Indonesia :

- a. sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua;
- b. oleh orang dewasa dan anak-anak;
- c. di kota besar dan di kota kecil;

di 13 Propinsi, termasuk DKI Jaya. Yang dimaksud dengan orang dewasa ialah yang berumur 25 ke atas dan anak-anak terdiri dari murid-murid Sekolah Dasar dan SMP. Jika kita anggap anak-anak berumur antara 6 – 15 tahun, maka perbedaan umur antara golongan dan golongan anak ialah pa-

ling sedikit 10 tahun (25 – 15 tahun). Rata-rata umur golongan dewasa ialah kira-kira 35 tahun dan golongan anak kira-kira 11 tahun, maka perbedaan umur rata-rata antara dewasa dan anak ialah 24 tahun. Kota besar ialah ibu kota kedua belas propinsi dan Jakarta Raya. Kota kecil ialah satu kota kecamatan yang jauhny antara 20 dan 30 km dari ibu kota. Di DKI Jaya, kota kecil berarti pinggiran kota.

Seluruh responden berjumlah 2071 orang, terdiri dari 1409 dewasa dan 662 anak (lihat Tabel 5 di bawah). Di kota besar, ada 821 responden dewasa dan 409 anak. Di kota kecil 588 dewasa dan 253 anak. Di antara yang berbahasa Indonesia sebsagai bahasa pertama (B1), 41 dewasa dan 100 anak di kota besar; 19 dewasa dan 41 anak di kota kecil. Di antara yang berbahasa Indonesia sebagai bahasa kedua (B2), 666 dewasa dan 286 anak di kota besar; 487 dewasa dan 199 anak di kota kecil.

TABEL 3 PERSENTASE PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR
DAN BAHASA YANG DIPAKAI SEHARI—HARI 1980

Golongan umur	Bahasa yang dipakai sehari-hari											Jumlah
	Indo-nesia	Jawa	Sunda	Ma-dura	Ba-tak	Mi-nang	Bali	Bu-gis	Ban-jar	Tidak ter-jawab	Lain-nya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(2) – (12)
0 – 4	12,70	37,30	15,74	4,15	2,44	2,57	1,50	2,20	1,14	0,87	19,39	21.190.672
5 – 9	11,52	38,70	15,65	4,48	2,34	2,44	1,71	2,50	1,22	0,84	18,60	21.231.927
10 – 14	12,17	40,55	15,22	3,68	2,47	2,47	1,69	2,30	1,10	0,75	17,60	17.619.034
15 – 24	14,51	40,41	14,30	3,95	2,08	2,42	1,62	2,02	1,12	0,72	16,85	28.284.780
25 – 49	11,71	40,48	15,00	5,74	1,78	2,14	1,70	2,33	1,14	0,75	16,87	41.630.698
50 +	7,40	45,54	14,76	5,51	1,99	2,81	2,01	2,24	1,04	0,64	16,06	16.798.967
Tak Ter-jawab	10,77	43,70	18,16	3,03	1,16	1,22	1,09	1,60	0,60	0,72	17,95	20.398
Jumlah	11,93	40,44	15,06	4,71	2,12	2,42	1,69	2,26	1,13	0,76	17,48	146.776.473

Sumber : Biro Pusat Statistik, Sensus Penduduk 1980.

TABEL 4 BAHASA INDONESIA

Nama propinsi KB & KK		B1 & B2 Dewasa & Anak2		Dewasa				Anak-anak			
				B1		B2		B1		B2	
				Jml	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
Bali	KB	—	—	77/78	99	—	—	24/24	100		
	KK	—	—	39/40	97,5	—	—	22/22	100		
1. Jawa Tengah	KB	4/69	5,7	64/69	92,7	9/32	28,1	21/32	65,6		
	KK	—	—	52/55	98,2	1/20	5	19/20	95		
2. Kalimantan Selatan	KB	—	—	51/52	98	5/37	13,5	32/37	86		
	KK	3/86	3,5	82/86	95	3/14	21	10/14	71		
3. Irian Jaya	KB	8/47	17	8/47	17	5/18	27,8	4/18	22,2		
	KK	6/116	9,5	75/116	64,6	25/46	54,3	16/46	34,8		
4. Sulawesi Selatan	KB	5/73	6,8	57/73	78,1	19/42	45,2	22/42	52,4		
	KK	—	—	31/42	73,8	1/10	10	8/10	80		
5. Jawa Barat	KB	2/42	4,7	37/42	88	3/46	6,5	42/46	91,3		
	KK	—	—	4/4	100	2/5	40	2/5	40		
6. Maluku	KB	4/83	4,8	72/83	86,7	2/27	7,4	26/27	96,3		
	KK	—	—	32/38	84,2	—	—	21/21	100		
7. Sulawesi Utara	KB	—	—	36/60	60	3/30	10	24/30	80		
	KK	1/57	1,7	40/57	70,2	1/25	4	20/25	80		
8. Riau	KB	—	—	71/83	85,5	—	—	21/21	100		
	KK	2/46	4,2	40/46	86,9	—	—	22/22	100		

Nama propinsi KB & KK		B1 & B2 Dewasa & Anak2		Dewasa				Anak-anak			
				B1		B2		B1		B2	
				Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
9. Sumatra Utara	KB	8/90	8,8	78/90	86	35/48	72,9	13/48	27		
	KK	—	—	10/11	91	1/15	6,6	14/15	93,3		
10. Sumatra Selatan	KB	1/65	1,5	50/65	77	2/34	6	25/34	73,5		
	KK	—	—	31/36	86,1	—	—	20/20	100		
11. DKI Jakarta	KB	9/37	24,3	27/37	73	16/29	55,2	12/29	41,4		
	KK	—	—	6/6	100	6/17	35,3	10/17	58,8		
12. NTT	KB	—	—	38/42	90,5	1/21	4,8	20/21	95,2		
	KK	2/51	3,9	45/51	88,2	1/16	6,3	15/16	93,7		

Keterangan :

1. B1 = Bahasa Pertama
B2 = Bahasa Kedua
KB = Kota Besar
KK = Kota Kecil

Sumber : Tabel-tabel "Penelitian
Kedwibahasaan", Pusat
Pembinaan dan Pengem-
bangan Bahasa.

2. Setiap pecahan menunjukkan R/N, di mana :
R = responden yang menjawab
N = jumlah semua responden

Tabel 5

	B1			B2		
	KB	KK	Jml	KB	KK	Jml
D	41	19	60	666	487	1153
	821	588	1409	821	588	1409
	5%	3.2%	4.3%	81,1%	82,8%	81,8%
A	100	41	141	286	199	485
	409	253	662	409	253	662
	24,4%	16,2%	21,3%	69,9%	78,6%	73,2%
Jml	141	48	201	952	686	1638
	1230	841	2071	1230	841	2071
	11,5%	7,1%	8,8%	88,9%	68,5%	79,1%

Perolehan Bahasa Indonesia

Dalam tabel ini, kita dapat lihat hal-hal berikut :

- (1) Cukup besar perbedaan persentase anak belajar bahasa Indonesia sebagai B1 dengan orang dewasa : 24,4% dengan 5% di KB dan 16,2% dengan 3,2% di KK; secara keseluruhan perbedaannya ialah 21,3% dengan 4,3%. Ini berarti bahwa ada kecenderungan yang jelas akan bertambahnya penutur bahasa Indonesia sebagai B1.
- (2) Kita dapat lihat juga bahwa kecenderungan itu lebih nyata di KB daripada di KK. Hal ini nampaknya berhubungan dengan pola berbahasa setiap hari di KB, di mana lebih banyak digunakan bahasa Indonesia untuk media dalam berbagai lingkungan kebahasaan (*language domain*). Ini berhubungan erat rupanya dengan heterogenitas kebahasaan yang biasanya jauh lebih besar di KB daripada di KK, oleh karena lebih banyak orang pendatang dari daerah lain di KB daripada di KK.

- (3) Sehubungan dengan perolehan bahasa Indonesia sebagai B1, maka perolehan bahasa Indonesia sebagai B2 tentu berkurang. Dalam hal ini pun kelihatan lebih besar kecenderungan perubahan ini di KB daripada di KK.

Kalau kita kaji lebih teliti Tabel 4 di atas, kita akan melihat bahwa kecenderungan semakin banyak orang belajar bahasa Indonesia sebagai B1 tidaklah sama besarnya di semua propinsi. Di antara ke-13 daerah itu, ada enam propinsi yang menunjukkan perubahan yang cukup besar di KB : Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan dan Irian Jaya. Daerah-daerah yang menunjukkan perubahan yang cukup jelas di KK hanyalah Irian Jaya dan DKI Jaya, dan pada tingkat yang lebih rendah, juga Kalimantan Selatan. Daerah Jawa Barat (40%—0%) dan Sulawesi Selatan (10%—0%) menunjukkan perbedaan persentase yang besar, tetapi itu hanya disebabkan oleh kecilnya jumlah respon.

Daerah-daerah yang lain : Bali, Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Riau, Sumatra Selatan dan Nusa Tenggara Timur tidak menunjukkan kecenderungan yang jelas. Lima daerah di antaranya barangkali dapat dimengerti dengan adanya bahasa daerah Melayu di daerah itu yang mengakibatkan orang salah identifikasi bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu daerah itu. Daerah Bali dan Jawa Barat mungkin dapat dimengerti oleh karena kedua daerah ini cukup tinggi homogenitas penduduknya (dibanding daerah-daerah lain), dan terdapat juga dukungan yang kuat untuk pengejaran dan pemakaian bahasa daerah dalam masyarakat kedua daerah itu.

Namun secara keseluruhan ada kelihatan kecenderungan perubahan untuk bertambahnya jumlah penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Ini ternyata dibarengi oleh semakin meluasnya lingkungan kebahasaan pemakaian bahasa Indonesia, termasuk dalam lingkungan keluarga dan hubungan intrasuku. Sebenarnya ini tidaklah mengherankan dalam keadaan masyarakat Indonesia Merdeka ini, Berhubung :

- a. kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang begitu penting dan meluas sebagai bahasa nasional dan bahasa negara (cf. Halim, 1976 : 20, 22);
- b. meningkatnya mobilitas geografis orang Indonesia, yang menghasilkan masyarakat yang heterogen terutamanya di kota-kota besar yang tentu menuntut penggunaan bahasa komunikasi lebih laus dari bahasa daerah;
- c. terbukanya mobilitas sosial yang membuat orang makin ingin dan perlu meraih ilmu dan keterampilan yang dapat dicapai hanya dengan bahasa Indonesia;
- d. bertambahnya kegiatan usaha dan perdagangan antar daerah yang dapat

dikerjakan hanya dengan bahasa Indonesia.

Jadi dapat dimengerti bahwa banyak orangtua yang membiarkan, malah menyetujui, anaknya mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama (sendirian atau bersama-sama dengan bahasa daerah) guna memudahkan anaknya memperoleh keuntungan yang dapat dicapai dengan penguasaan bahasa Indonesia (cf. Deficit Hypothesis dari Bernstein, 1964).

Dampak meluasnya penggunaan bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah

Sebaliknya, ada orang yang menganggap bahwa meluasnya penggunaan bahasa Indonesia mempunyai dampak negatif terhadap hidup dan perkembangan bahasa daerah. Mereka kuatir meluasnya penggunaan bahasa Indonesia akan mengurangi ruang hidup bahasa daerah dan akhirnya akan meleyapkannya. Untuk menghindari efek negatif seperti itu, maka dianjurkan peningkatan pengajaran bahasa daerah. Saya kira sedikit orang yang akan keberatan terhadap peningkatan pengajaran bahasa daerah di sekolah. Untuk itu yang paling penting ialah merencanakan kurikulum dan bahan pengajaran bahasa daerah agar sasarannya benar dan berguna. Janganlah kiranya bertambah beban kurikuler anak-anak pelajar tanpa memperoleh kegunaan yang selaras dengan dana dan tenaga yang dipakai.

Namun, berbicara tentang kemungkinan merana dan lenyap sesuatu bahasa, kiranya agak sukar dibayangkan bahwa sesuatu bahasa yang mempunyai beberapa puluh ribu penutur yang berpusat dalam beberapa tempat akan lenyap dalam waktu yang pendek. Melihat kasus-kasus yang ada di negeri lain, rasanya tidak perlu ditakuti kemusnahan suatu bahasa selama ada daerah basisnya, di mana orang memakai bahasa itu untuk komunikasi setiap hari. Sebagai suatu contoh dapat kita ambil bahasa Welsh. Bahasa ini dihadapkan dengan bahasa Inggris yang dominan secara sosial, politis dan ekonomis selama lebih kurang 1500 tahun, 500 tahun di antaranya dalam persentuhan bahasa yang intensif. Sekarang bahasa Welsh masih ada, malah seperti mengalami semacam "keremajaan kedua" dengan bertambahnya jumlah ekabahasawan Welsh dari 26.100 pada tahun 1961 menjadi 32.700 pada tahun 1971 setelah mengalami kemunduran yang terus-menerus dari 508.000 pada tahun 1981 menjadi 26.100 pada tahun 1961 (Lewis, 1981 : 117). Lewis (hal. 127) juga menyebut penyebab utama dari berkurangnya pemakaian Welsh ialah : industrialisasi, urbanisasi, imigrasi dan pemerintahan sentral. Padahal butir 1, 2 dan ke-4 di atas ini diinginkan penduduk untuk kemajuan ekonomi mereka.

Contoh yang lain tentang bahasa-bahasa yang bertahap hidup dalam

keadaan sosiolinguistik yang negatif ialah yang terdapat di Amerika Serikat. Setelah orang dan bahasa-bahasa Indian hampir lenyap dalam abad ke-19, ada kelihatan penambahan sebanyak 46.5% dari 1950 ke 1960 dan sebanyak 51.4% dari tahun 1960 ke 1970 (Lewis : 166). Demikian juga banyak bahasa-bahasa pendatang ke Amerika Serikat (di luar bahasa Inggris) masih dipakai sebagai bahasa kelompok oleh lebih dari 10 kelompok etnis. Pada tahun 1975, hampir 28 juta ($\pm 17\%$) orang Amerika menyatakan memakai bahasa lain dari bahasa Inggris dalam masa kanak-kanak (Lewis : 180).

Dalam kedua contoh di atas ada tekanan sosial politik dan ekonomi terhadap berkembangnya bahasa-bahasa itu dapat bertahan hidup. Di Indonesia, tidak ada tekanan sosiopolitik terhadap sesuatu bahasa daerah. Yang mungkin ada ialah semacam desakan ekonomi dalam pandangan orangtua yang melihat adanya keuntungan dalam bidang ekonomi dengan jangkauan nasional (bukan jangkauan daerah), jika anaknya menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Ini tidak berarti bahwa bahasa daerah tidak usah dibina, dikembangkan dan digunakan. Pembinaan bahasa daerah perlu untuk dapat menangani kehidupan modern suku dan daerah yang bersangkutan. Menurut hemat saya, bahasa daerah amat perlu dibina sebagai sarana utama dalam pembudayaan anak-anak ke dalam kebudayaan dan kepribadian daerahnya yang menjadi dasar bagi kepribadian nasional seseorang (lihat juga Nababan, 1983).

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembicaraan di atas ialah bahwa meluasnya perolehan dan pemakaian bahasa Indonesia tidak merugikan penuturnya. Juga kita simpulkan bahwa keadaan itu tidak atau belum tentu akan melenyapkan sesuatu daerah.

Penutup

Di atas telah kita lihat sepintas lalu perkembangan bahasa Indonesia dari :

- (a) penetapannya (dalam Sumpah Pemuda 1928) menjadi bahasa pemer-satu dalam perjuangan mencapai kemerdekaan,
- (b) pembinaan dan pengembangannya dalam kurun waktu pra-kemerdekaan: 1928 – 1945,
- (c) pembinaan dan pengembangannya sejak tahun 1945. Secara khusus kita tinjau pola kebahasaan dalam dekade 1971 – 1980, dan perolehan bahasa yang diungkapkan oleh penelitian kedwibahasaan dari Pusat Bahasa.

Hasil survei kedwibahasaan ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan

an bertambahnya perolehan bahasa Indonesia sebagai bahasa bersama dan meluasnya penggunaan bahasa Indonesia sampai kepada lingkungan keluarga dan daerah.

Akhirnya kita pertanyakan apa meluasnya perolehan dan penggunaan bahasa Indonesia ini tidak akan mengancam kehidupan bahasa daerah. Jawabnya yang kita simpulkan dari peninjauan beberapa kasus ialah bahwa, dalam keadaan sosiolinguistik di Indonesia ini, tidak ada alasan untuk meresahkan keadaan itu.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, Husen. 1978. "Bahasa Indonesia as a Uniflying Language of Wider Communication. A Historical and Sociolinguistic Perspective". Ateneo – Philipine Normal Colege Consortium, Manila.
- Bernstein, B. 1964. "Elaborated and restricted codes : their social origins and some consequences". Dalam J.J. Gumperz dan D. Hymes (eds). *The Ethnography of Communication*. American Anthropologist, Jilid 66, bagian 2.
- Halim, A. (ed). 1976. *Politik Bahasa Nasional*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta.
- Johannes, H. 1982. "Membina Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Yang Ilmiah, Indah, dan Lincah". Dalam *Analisis Kebudayaan*, Tahun II, No. 3.
- Latief, A. 1979. "Survey on Sociocultural Aspects of Foreign Language Teaching in Indonesia." Report RELC.
- Lewis, E.G. 1981. *Bilingualism and Bilingual Education*. Pergamon Press Ltd., Oxford.
- Moeliono, A.M. 1982. "Pengembangan dan Pembinaan Bahasa : Ancangan Anternatif di dalam Perencanaan Bahasa". Disertasi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Nababan, P.W.J. 1983. "Tujuan dan Bahan Pengajaran Bahasa Daerah." Seminar Penulisan Bahan Pelajaran Sekolah Dasar. Yogyakarta, Mei 30 – Juni 3, 1983. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jakarta.
- Sensus Penduduk Indonesia 1980. Biro Pusat Statistik. Jakarta.

KESESUAIAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI MASA KINI

M.M. Purbo-Hadiwidjoyo

Pendahuluan

Perkembangan bahasa Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini benar-benar luar biasa. Tanpa banyak yang menyadari, kita telah menuju dengan langkah yang pasti ke bahasa Indonesia yang baku, yang mampu membawakan ilmu dan teknologi masa kini. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran sekilas mengenai ragam bahasa yang terpakai dalam ilmu dan teknologi, termasuk di dalamnya ilmu kebumian.

Saya merasa sangat beruntung karena mendapatkan kepercayaan dan kesempatan dari berbagai pihak untuk menangani pernaskahan bidang itu hingga berupa terbitan. Semula perintisan dilakukan hanya dalam bidang geologi yang sifatnya umum, tetapi kemudian melebar ke bidang yang bersifat terapan, dan akhirnya juga di luar bidang itu. Bahan yang tertera di bawah berasal dari terbitan atau yang dalam persiapan untuk diterbitkan.

Dilihat dari cakupannya, yang dibahas berkisar dari kalimat, ungkapan dan ujaran, hingga istilah. Jika dianggap perlu, sebagai pembandingan dikemukakan juga terjemahan atau padanannya dalam bahasa Inggris.

Dalam hubungan ini perlu kiranya saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Drs. Soetaryo Sigit, Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi, yang menyerahkan selama bertahun-tahun peredaksian 'Buku Tahunan Pertambangan Indonesia' kepada saya; kepada Drs. Rab Sukanto, Kepala Subdirektorat Pemetaan Regional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, untuk mempercayakan penelaahan dan peredaksian peta geologi Indonesia, skala 1 : 100.000 (Jawa) dan 1 : 250.000 (luar Jawa) beserta penjelasannya; kepada Prof. Dr. Amran Halim, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan stafnya untuk kepercayaan ikut menangani peristilahan ilmu kebumian, khususnya bidang Hidrologi, dalam

rangka Panitia Kerja Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia. Dan akhirnya, kepada Penerbit ITB, terutama Kepala dan Ketua Dewan Redaksinya, Drs. Adjat Sakri, M.Sc., yang telah memungkinkan bagi saya menumbuhkan berbagai gagasan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, ragam ilmu dan teknik, melalui perbincangan dan percobaan selama bertahun-tahun. Buku saya, 'Menyusun laporan teknik' (1983) juga diterbitkan oleh Penerbit ITB.

Menuturkan gagasan secara ringkas tetapi jelas

Dalam ilmu dan teknologi sangatlah penting jika gagasan dapat dituliskan dengan ringkas tetapi jelas. Jika yang dituturkan itu menyangkut banyak angka, pemakaian tanda baca yang tepat dapat sangat membantu. Di bawah ini contohnya :

" . . . Hasil kilang secara keseluruhan dalam tahun 1981 berjumlah 193.742.936 *barrel*, naik 0,5 persen dari angka tahun 1980 yang besarnya 192.850.747 *barrel*. Berikut ini adalah gambaran mengenai perangkaan selama dua tahun terakhir; angka untuk 1980 ditempatkan di antara kurung; bensin pesawat terbang, 124.362 *barrel* (149.743 *barrel*) atau turun 16,9 persen; minyak pesawat terbang, 1.665.135 *barrel* (1.850.663 *barrel*) atau turun 10,6 persen; bensin mobil, 24.924.154 *barrel* (24.036.659 *barrel*) atau naik 3,7 persen; minyak tanah, 36.029.939 *barrel* (34.138.081 *barrel*) atau naik 5,5 persen; minyak solar 26.270.714 *barrel* (27.143.178 *barrel*) atau turun 3,2 persen; minyak diesel, 5.992.899 *barrel* (6.982.807 *barrel*) tau turun 14,2 persen; dan minyak bakar, 20.941.088 *barrel* (19.062.135 *barrel*) atau naik 9,8 persen . . . '.

Sebagai pembanding di bawah ini nas (teks) Inggrisnya:

' . . . Total refinery output in 1981 was 193,742,936 barrels, up 0.5 percent from the figure of 1980 of 192,805,747 barrels. The following is a picture of the last two years; the figures of 1980 are shown in parentheses: aviation gas, 124,362 barrels (149,743 barrels) or down 16.9 percent; aviation turbo, 1,665,135 barrels (1,850,663 barrels) or down 10.6 percent; mogas, 24,924,154 barrels (24,036,659 barrels) or up 3.7 percent; kerosene, 36,025,939 barrels (34,138,081 barrels) or up 5.5 percent; automotive diesel oil, 26,270,714 barrels (27,143,178 barrels) or down 3.2 percent; industrial diesel oil, 5,992,899 barrels (6,982,807

barrels) or down 14.2 percent; and fuel oil, 20,941,088 barrels (19,062,135 barrels) or up 9.8 percent . . . '.

(Diambil dari 'Buku Tahunan Pertambangan Indonesia 1981'.)

Geologi merupakan salah satu ilmu yang memiliki 'bahasanya' yang bersifat khas. Ini terutama dapat kita saksikan pada perian batuan, misalnya, yang selain menggunakan peristilahan yang hanya difahami oleh orang dari bidangnya, juga gaya bahasanya yang mirip surat kawat. Di bawah ini contohnya:

'... Tmkv BATUAN GUNUNAPI KALIMISENG: lava dan breksi, dengan sisipan tufa, batupasir, batulempung dan napal; kebanyakan bersusunan basal dan sebagian andesit; kelabu tua hingga kelabu tua hingga kelabu kehijauan; umumnya tansatmata; kebanyakan terubah, amigdaloid dengan mineral sekunder karbonat dan silikat; sebagian lavanya menunjukkan struktur bantal . . . '.

Sebagai pembanding, di bawah ini Inggrisnya:

'... Tmkv KALAMISENG VOLCANICS: lava and breccia, intercalated with tuff, sandstone, claystone and marl; mostly basaltic in composition and partly andesitic; dark gray to greenish gray; generally aphanitic; commonly altered, amygdaloidal with secondary minerals of carbonate and silicate; part of the lava shows pillow structure . . . '.

(Dari Sukamto, 1982, *Geologi Lembar Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai*.)

Tidak semua uraian geologi sulit ditangkap oleh awam, bahkan kata atau ungkapan yang digunakan juga berasal dari bahasa sehari-hari. Di bawah ini contohnya :

'... Bentuk morfologi yang menonjol di lembar ini ialah kerucut gunungapi padam Lompobatang, yang menjulang mencapai ketinggian 2876 m di atas muka laut. Kerucut gunung itu yang dari kejauhan masih memperlihatkan bentuk aslinya, menempati lebih kurang sepertiga daerah lembar . . . '.

Kata seperti 'menonjol' dan 'menjulung' dengan segera dapat menimbulkan kesan akan sesuatu yang berbeda dengan selebihnya. Digunakannya kata 'kerucut' sebenarnya mengikuti kebiasaan yang terdapat dalam bahasa asing. Sebagai pembanding di bawah ini terjemahan Inggrisnya yang juga ditampilkan bersama-sama dalam terbitan yang bersangkutan (Sukanto, 1982):

' . . . The most conspicuous geomorphic feature in this quadrangle is the cone of the extinct Lompobatang volcano which towers to a height of 2876 m above sealevel. The volcanic edifice whose cone from afar still bears its original shape, occupies some one-third of the land area of the quadrangle . . . '.

Kerja sama kebahasaan dengan Malaysia yang mendorong pementasan bahasa ilmu dan teknologi.

Sebagaimana diketahui, sejak akhir tahun 1972 kerja sama dalam bidang kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia memperoleh wadah yang tetap dalam bentuk pertemuan yang disebut Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia, MBIM. Setiap tahun Majelis bersidang dua kali, sekali di Indonesia dan sekali di Malaysia. Setiap persidangan ada acaranya tertentu yang sebelumnya sudah dipersetujui kedua belah pihak. Pada awalnya yang menjadi pokok pembahasan berkisar pada ejaan, istilah dan tata bahasa. Baru pada persidangan yang ketujuh, Pebruari 1976 di Kuala Lumpur, dilibatkan sejumlah ahli yang mewakili bidangnya masing-masing. Pada setiap persidangan yang dibahas peristilahan dari sekitar enam bidang, tetapi sekali waktu mungkin lebih dan sekali waktu kurang.

Kelompok Hidrologi mendapat kesempatan yang jauh lebih banyak daripada kelompok yang lain, yaitu sebanyak 12 kali, dalam selama jangka waktu tiga tahun, 1980 – 1982. Hal ini disebabkan karena adanya bantuan keuangan Unesco. Selama jangka waktu itu yang dibicarakan selain peristilahan juga definisinya.

Kesempatan yang baik itu membuahkan hasil yang semula tidak diperkirakan. Salah satu hal yang sangat penting ialah tumbuhnya pengertian di kedua pihak, bahwa forum MBIM hanya dapat bermanfaat jika setiap permasalahan dapat dikaji secara objektif dan dicarikan penyelesaiannya.

Masalah peristilahan dapat diselesaikan dengan memuaskan. Pada waktu Kelompok Hidrologi bertemu untuk pertama kalinya, istilah Indonesia yang sama dengan istilah Malaysia hanya sekitar 35 persen. Angka ini tidak banyak bedanya dengan hasil yang diperoleh kelompok yang lain. Tetapi selepas

setiap pertemuan berikutnya, persentasi itu terus naik, mula-mula tidak seberapa dan kemudian makin banyak. Demikianlah, pada waktu proyek dinyatakan selesai pada akhir tahun 1982, istilah kedua belah pihak yang sama sudah melebihi 90 persen. Jika suatu istilah tidak dapat dibuat sama benar, paling tidak sudah sangat mendekati. Sekedar ilustrasi di bawah ini dipaparkan beberapa contohnya.

Salah satu contoh yang sangat baik ialah bagaimanakah menemukan padanan istilah Indonesia dan Malaysia untuk istilah Inggris *discharge*. Di Indonesia sudah sejak kira-kira akhir abad yang lalu orang mulai mengenal istilah 'debit'. Istilah itu dipungut dari bahasa Perancis, tetapi lewat bahasa Belanda dan digunakan untuk menyatakan air (yang mengalir melewati suatu penampang) setiap satuan waktu. Dalam bahasa aslinya, Perancis, kata itu dibebani berbagai makna, selain yang tertera di atas, di antaranya juga (banyaknya) yang dijual, hak jual, cara berbicara. Di Malaysia sudah dengan sendirinya orang lebih dulu berpaling ke bahasa Inggris. Jadi sudah sewajarnya jika mereka mula-mula menerima istilah 'discas'.

Pihak Indonesia menyadari akan kelemahan menggunakan 'debit' untuk *discharge*. Sebab, yang di-*discharge* tidak hanya air, tetapi gas atau bahkan barang yang keras pun bisa. Maka itu menjembatani kesulitan itu pihak Indonesia mengusulkan kata 'pelepasan'. Jangankan membicarakan usul itu, mengucapkannya pun pihak Malaysia tidak mau! Tentu saja mereka tidak mau, karena kata itu pada mereka menimbulkan konotasi yang tidak seronok, sebab maknanya 'dubur'!

Akhirnya dimunculkanlah kata 'luah' yang berasal dari bahasa Minangkabau, yang maknanya lebih kurang 'muntah' Begitu mendengar kata itu semua anggota Kelompok Hidrologi, baik yang mewakili Indonesia maupun Malaysia, memberikan persetujuannya. Selain pendek, dari kata itu dapat diturunkan berbagai kata yang lain, seperti 'meluah(kan)' (tindak atau kerjanya), 'peluahan' (prosesnya), dan 'luahan' (hasil proses itu). Kalau perlu, 'peluah' pun mungkin pula, yaitu untuk alat yang berfungsi meluahkan. Yang rupanya ikut berperan pula dalam persetujuan penerimaan kata itu ialah bunyinya yang cukup enak. Ada sekelompok kata Indonesia (dan Malaysia) yang mirip dengan luah, seperti buah, kuah, ruah, tuah.

Demikianlah, satu halangan telah dapat disingkirkan. Memang, masih akan memerlukan waktu, terutama di Indonesia, untuk memasyarakatkan istilah itu. Proses itu dapat dipercepat, jika badan resmi seperti Departemen Pekerjaan Umum, bisang pendidikan dan pers ikut mempopulerkannya.

Contoh lain yang akan saya kemukakan di sini ialah padanan untuk istilah Inggris *pump*. Di Indonesia, kita menggunakan kata 'pompa' yang pungut dari kata Belanda *pomp*. Untuk mempertahankan konsonen p, di belakang dibubuhi a. Dari kata dasar itu kemudian dapat dibuat 'memompa' (Inggris: *to pump* atau dalam hal tertentu, *pumping*), 'pemompaan' (prosesnya, yang Inggrisnya biasanya *pumping*), dan 'pompaan' (*pompage*).

Di Malaysia, kata Inggris itu diucapkan sebagai 'pam', dan itu pulalah yang pada mulanya mereka terima sebagai istilah. Pada saat dari kata itu perlu diturunkan kata jadian yang lain, terasa timbul kejanggalan: 'mengepam' atau 'memam'? Lalu, 'pemanan' dan 'paman'? Melihat kenyataan itu, pihak Malaysia akhirnya menerima 'pampa', dan turunannya 'memampa', 'pemampaan' dan 'pampaan'. Meskipun belum sama, jelas kita sudah sangat dekat.

Dengan cara itu selangkah demi selangkah masalah peristilahan dapat diselesaikan. Tetapi tidak semua dapat diatasi dengan mudah. Istilah atau kata sehari-hari yang sudah sangat lazim tidak akan mungkin diubah atau diganti dengan tiba-tiba; bahkan ejaannya pun sulit untuk diubah. Contohnya: *ais* dan *salji* di Malaysia dan *es* dan *salju* di Indonesia; percubaan dan perbezaan di Malaysia dan percobaan dan perbedaan di Indonesia.

Masalah yang berhubungan dengan ungkapan dan kalimat juga sudah banyak yang dapat diselesaikan. Di bawah ini beberapa contohnya:

Dalam bahasa Indonesia kita sudah terbiasa menyatakan, misalnya: 'Banyaknya aliran berubah *dengan* waktu'.

Tanpa kita sadari, kita mengambilalih kebiasaan bahasa Barat, Inggris atau Belanda. Ungkapan yang digunakan oleh pihak Malaysia ialah:

'Banyaknya aliran berubah *mengikut* waktu.'

Sebenarnya, kita pun dapat menyatakan:

'Banyaknya aliran berubah *mengikuti* waktu.'

atau mungkin pula:

'Banyaknya aliran berubah *sejalan dengan* waktu.'

Tetapi ungkapan yang terakhir ini tentu saja terlalu panjang.

Selama menganggarap definisi hidrologi, kami menjumpai banyak ungkapan serupa yang perlu diselesaikan. Dan banyak pula yang ternyata lewat perbincangan dapat diselesaikan. Bagaimana hasilnya, dapat dinilai dari apa yang telah terbit atau akan terbit dalam waktu mendatang.

Pada penyelesaian definisi digunakan acuan yang berasal dari Unesco, yaitu 'International Glossary of Hydrogeology' (1978) dan 'International Glossary of Hydrogeology' (1974). Hal itu dengan sendirinya sangat memudahkan pekerjaan Kelompok Hidrologi. Tetapi sebaliknya ada tuntutan agar

definisi Malaysia dan Indonesia benar-benar setara dengan Inggrisnya. Sebagai misal, dalam bahasa Inggris terdapat definisi:

'Macro-permeability: Permeability of a rock or soil due mainly to the existence of large cracks and fissures.'

Salinan Malaysianya ialah:

'Makro-ketelapan: Ketelapan batuan atau tanah *terutamanya* disebabkan oleh *wujudnya* retakan dan rekahan yang besar.'

Dan versi Indonesianya:

'Kelulusan makro: Kelulusan bantuan atau tanah *terutama* yang disebabkan oleh *adanya* retak dan celah yang besar.'

Meskipun kita melihat perbedaan istilah dan ungkapan, kedua definisi itu untuk masing-masing penutur bahasa, Malaysia dan Indonesia, untuk saat ini terasa yang paling dapat diterima.

Demikianlah beberapa hasil yang telah diperoleh Kelompok Hidrologi yang bekerja dalam rangka MBIM. Hasil yang dicapai adalah buah kerja sama sekelompok orang dengan berbagai latar belakang keahlian, tetapi yang menekuni air, dan dibantu oleh ahli bahasa.

Pengalaman menangani naskah di Penerbit ITB.

Penerbit ITB termasuk salah satu di antara beberapa badan dalam lingkungan universitas negara yang bertugas menerbitkan naskah, terutama buku ajar. Sejak didirikannya pada tahun 1974, Penerbit ITB menganggap perlu adanya suatu Dewan Redaksi. Salah satu tugasnya, menentukan apakah suatu naskah yang masuk layak untuk diterbitkan. Setelah itu, mulailah proses peredaksian.

Dapat difahami, tidak semua naskah yang masuk dapat diterbitkan. Banyak pula yang terpaksa mengalami perbaikan berat, sebelum akhirnya dapat naik ke percetakan. Umumnya naskah yang dapat terbit sebelumnya sudah pernah beredar berupa diktat atau tulisan lain yang cukup lengkap.

Sudah bukan rahasia lagi, bahwa kebiasaan menulis belum merata dalam lingkungan perguruan tinggi kita. Dan yang akhirnya menulis, ternyata memiliki banyak kekurangan. Tiga hal dapat dikatakan cukup menyolok dalam naskah yang sampai sekarang kami jumpai. Ini menyangkut baik naskah asli, maupun yang terjemahan.

Pertama ialah mengenai bangun (struktur) kalimat. Sering dapat dijumpai kalimat yang tidak lengkap, atau kalimat yang terlampau panjang. Tidak jarang pula semua itu disebabkan karena tidak terdapat perbedaan antara gaya bahasa tulis dan gaya bahasa lisan.

Hal yang lain menyangkut kosakata. Dapat dikatakan, banyak di antara penulis (dan calon penulis) yang kosakatanya sangat terbatas. Sebagai misal, sekali seorang penulis menggunakan kata 'mengemukakan', tanpa disadari yang ia pakai secara terus-menerus juga kata itu saja. Padahal, setiap kali dapat saja ia memanfaatkan kata yang lain, meskipun mungkin maknanya agak berbeda, seperti memaparkan, mengutarakan, membahas, memerikan.

Yang ketiga menyangkut peristilahan. Mereka yang belum menggunakan istilah Indonesia sebenarnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama ialah mereka yang memang tidak mengetahui, bahwa usaha pengindonesiaan istilah sudah mencapai tahap yang sangat jauh. Kelompok ini biasanya dengan mudah dapat diajak untuk menyesuaikan dengan semua yang telah menjadi ketentuan. Kelompok kedua ialah mereka yang menunjukkan sikap ragu hati; mereka tidak yakin, istilah Indonesia dapat benar-benar menyampaikan pesan sebagaimana mereka ingini. Kelompok ini biasanya lebih sulit untuk diyakinkan, bahwa kunci pemahaman bahan terletak pada kejelasan pengertian sebagaimana dibawakan oleh definisi suatu istilah, dan bukan pada kenyataan istilah itu asing atau Indonesia.

Sekedar ilustrasi di bawah ini disajikan beberapa nukilan, yang menggambarkan berbagai kelemahan para penulis kita. Yang pertama saya peroleh dari seorang peserta pada salah satu penataran nasional penulisan buku ajar dengan permintaan untuk dibahas bersama; selebihnya saya ambil dari buku saya yang saya sebut di atas (Purbo-Hadiwidjoyo, 1983).

- (1) Data yang dikumpulkan dari sensus atau penelitian survei, di mana terdapat keterangan tentang fertilitas dapat dihitung tingkat fertilitas.
- (2) Banyaknya masalah-masalah di daerah aliran sungai akan memberikan tanggung jawab beberapa instansi dalam pengelolaan dan pemeliharannya.
- (3) Adapun jumlah instalasi bor (*drilling rig*) yang digunakan adalah 54 buah, di mana 12 di antaranya digunakan di lepas pantai (*offshore*).
- (4) Untuk memenuhi kekurangan itu perlu penambahan produksi dengan jalan pembangunan pabrik kertas baru, mengimport kertas dari luar negeri, dan yang terpenting meningkatkan produksi dari pabrik-pabrik kertas yang sudah ada, agar dapat mencapai kapasitas design sehingga kebutuhan kertas dapat terpenuhi.

- (5) Dengan meng-*Upgrade* jalan-jalan tersebut dengan lapisan Aspal Buton setelah 4 cm diharapkan jalan akan tahan 5 – 10 tahun. Pertimbangan untuk melapisi jalan-jalan tersebut adalah di samping jalan-jalan tersebut adalah jalan ekonomi, juga untuk mengakhiri kerusakan-kerusakan jalan tiap tahun, yang disebabkan oleh frekuensi maupun beratnya kendaraan yang melewati jalan-jalan tersebut semangkin meningkat. Sedangkan konstruksi jalannya lama sudah tidak mampu memikul beban tersebut.

Kalimat yang pertama sulit untuk diperbaiki. Di sini penulis mendapatkan kesulitan pada cara membangun kalimat yang wajar, dan yang lebih berat lagi, tidak menguasai pengertian yang hendak ia ungkapkan. Jika suatu naskah penuh dengan kalimat sejenis itu, dengan sendirinya naskah itu tidak mungkin dapat diterima.

Kalimat kedua menyangkut mantik, yang ketiga dan keempat memerlukan penerapan ekonomi bahasa dan penertiban istilah, dan yang terakhir selain itu juga penataan kembali. Keempat kalimat terakhir itu kiranya dapat dituturkan kembali sebagai berikut :

- (1) Karena banyaknya masalah di daerah aliran sungai, tanggung jawab pengelolaannya dibebankan kepada beberapa instansi.
- (2) Instalasi bor yang digunakan berjumlah 54 buah, 12 di antaranya terpakai di lepas pantai.
- (3) Untuk memenuhi kekurangan itu perlu dibangun pabrik kertas baru, diimpor kertas, dan yang terpenting, produksi pabrik kertas yang sudah ada ditingkatkan.
- (5) Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal Buton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanannya 5 – 10 tahun. Pertimbangan untuk langkah itu ialah mengingat akan sifatnya sebagai jalan ekonomi, dan juga menghindari kerusakan setiap tahun akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya makin meningkat. Konstruksi yang lama tidak sesuai lagi untuk beban yang sekarang.

Pada saat ini pemerintah dengan sekuat tenaga sedang menggiatkan penerbitan buku ajar dan selain itu mengalihbahasakan buku asing. Meng-

hadapi semua itu, pihak Penerbit ITB baru-baru ini telah menerbitkan sebuah buku petunjuk bagi pengarang, penyunting dan korektor (Sakri, 1983). Tujuannya tidak lain, agar ditemukan landasan yang sama bagi ketiga unsur yang menangani penaskahan. Dengan jalan itu diharapkan, paling tidak semua naskah yang masuk ke Penerbit ITB sudah mengikuti bakuan tertentu. Salah satu hal yang sedang diusahakan oleh penerbit ITB ialah terwujud 'gaya selingkung', istilah yang dicoba untuk menyalin istilah Inggris *house style*.

Dalam banyak hal gaya selingkung ITB memang sejalan dengan buku saya. Tetapi ada beberapa pokok yang berbeda, seperti misalnya cara menulis pustaka. Penyebabnya, tidak lain, karena yang pertama berpandangan ke dalam, sedangkan yang kedua ke luar dengan menunjukkan berbagai alternatif yang mungkin dapat dipilih.

Rangkuman dan penutup

Di atas telah saya tampilkan beberapa pengalaman saya menangani naskah bidang ilmu dan teknologi dan melibatkan diri dalam pembinaan peristilahan dalam bahasa Indonesia. Dalam ilmu dan teknologi bahasa berfungsi sebagai sarana untuk berkomunikasi, sedangkan istilah tidak lain merupakan lambang bagi suatu anggitan atau konsepsi. Persyaratan untuk komunikasi bersuai dan sangkil tidak lain ialah sarana yang memadai dan lambang yang tepat, yang dipersetujuan baik oleh pemberi pesan maupun penerima pesan itu. Dalam hal ini dikatakan bersuai, karena dengan usaha yang sekecil-kecilnya dijangkau yang sejauh-jauhnya; dan sangkil, karena langsung menuju ke sasaran.

Keadaan kita dewasa ini masih diliputi berbagai kekurangan, juga yang menyangkut komunikasi bidang ilmu dan teknologi. Di satu pihak terdapat tuntutan yang sangat tinggi, yang harus dipenuhi dalam waktu yang kerap kali sangat singkat. Di pihak lain kita jumpai kondisi yang sering pula mengabur atau menghambat setiap usaha meluluskan tuntutan itu.

Di satu pihak terdapat keharusan untuk alih-teknologi, untuk pengetahuan, ali-ketrampilan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di pihak lain kita saksikan bahwa kondisi kita belum ideal.

Meskipun strategi besar sudah dicanangkan, perinciannya masih perlu dijabarkan.

Demikianlah dalam bidang kebahasaan ini kita melihat adanya jurang yang lebar dan dalam yang memisahkan di satu pihak tuntutan penaskahan yang terus meningkat dalam jumlah maupun mutu, dan di pihak lain yang

harus memenuhi tuntutan itu yang belum 'siap. Sebagaimana diuraikan di atas, bahasa Indonesia dengan peristilahannya memberi harapan yang cerah dapat berfungsi dengan baik menjadi sarana komunikasi ilmu dan teknologi masa kini.

Dengan gambaran seperti itu sebagai latar belakang, Penerbit ITB berusaha untuk ikut merintis jalan yang dapat ditawarkan kepada peminat untuk mencoba menjembatani jurang itu. Bentuknya berupa pedoman yang dapat digunakan pada waktu orang hendak menyusun naskah. Sebagaimana setiap aturan yang dibuat manusia tidak ada yang sempurna, demikian pula pedoman itu tentu masih penuh kekurangan.

Pedoman dan aturan saja tidak mungkin akan dapat menolong setiap usaha. Yang tidak kalah pentingnya tentu saja semua yang tersangkut dalam usaha itu, dalam hal ini penutur bahasa Indonesia pada umumnya, dan khususnya mereka yang hendak menulis naskah dalam bidang ilmu dan teknologi.

Sebagai Lampiran 1 disajikan sejumlah istilah dan kata yang sedikit atau banyak sudah mulai dimasyarakatkan, terutama lewat bahan terbitan.

Acuan

- Buku Tahunan Pertambangan Indonesia 1981, 1982*, Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, Jakarta, 163 halaman + 2 peta.
- International Glossary of Hydrogeology*, 1978, UNESCO, Paris, 165 halaman.
- International Glossary of Hydrology*, 1974, WHO - UNESCO, Geneva, 393 halaman.
- Kamus Hidrogeologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jakarta, (dalam penerbitan).
- Kamus Hidrologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta (dalam persiapan).
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* olahan kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cetakan 5, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1156 halaman.
- Purbo-Hadiwidjono, M.M., 1983, *Menyusun Laporan Teknik*, terbitan 2, cetakan 1, Penerbit ITB, Bandung, 186 halaman.
- Sakri, A., 1983, *Petunjuk bagi Pengarang, Penyunting dan Korektor*, Penerbit ITB. 72 halaman.
- Sukanto, R., 1982, *Geologi Lembar Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai* (The Geology of the Ujung Pandang, Benteng and Sinjai Quad.), 1 : 25.000, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung.

LAMPIAN 1.

1. Perangkat istilah Inggris dengan padangan Indonesianya

(Dicoba diterapkan dalam Kamus Hidrogeologi (dalam penerbitan) dan Kamus Hidrologi (dalam persiapan).)

<i>instrument</i>	— alat
<i>instrumentation</i>	— peralatan
<i>gadget</i>	— acang
<i>tool</i>	— perkakas
<i>device</i>	— gawai
<i>apparatus</i>	— radas
<i>gauge</i> (Amerika: <i>gage</i>)	— sukat
<i>meter</i>	— peukur
<i>utensil</i>	— perabot
<i>appliance</i>	— masin
<i>equipment</i>	— perlengkapan
<i>accessory</i>	— lengkap

2. Kata Inggris dengan padanan Indonesianya yang medan maknanya diusahakan untuk disesuaikan

(Dicoba diterapkan dalam Kamus Hidrogeologi dan Kamus Hidrologi, dan juga lewat terbitan PPPG.)

Kata-pokok	Kerja	Padanan Inggris	Proses	Hasil
coba	mencoba (menggunakan atau memperlakukan sesuatu untuk mengetahui persifatan atau kemampuannya)	<i>to try</i>	pencobaan	cobaan
uji	menguji (mencoba untuk mengetahui atau	<i>to test</i>	pengujian	ujian

	menentukan tingkat kesanggupan atau kemampuannya).			
amat	mengamati (melihat dengan teliti)	<i>to observe</i>	pengamatan	amatan
periksa	memeriksa (mengamati dengan teliti)	<i>to examine</i>	pemeriksaan	periksaan
selidik	menyelidik(i) (memeriksa dengan teliti dan mencari keterangan yang berhubungan)	<i>to investigate</i>	penyelidikan	selidikan
sidik	menyidik (memeriksa dengan pertolongan sidik, yaitu gawai untuk memeriksanya)	<i>to probe</i>	penyidikan	sidikan
tinjau	meninjau (memeriksa sebidang lahan atau daerah; memandang suatu masalah secara sepintas)	<i>to reconnoitre</i>	peninjauan	tinjauan
jelajah	menjelajah (memeriksa secara sepintas suatu daerah atau wilayah, atau suatu masalah)	<i>to explore</i>	penjelajahan	jelajahan

Kata-pokok	Kerja	Padanan Inggris	Proses	Hasil
sigi	menyigi (memeriksa dengan tujuan tertentu; menentukan perbatasan, luas, kedudukan, corak alam atau masalah)	<i>to survey</i>	penyigian	sigian
telusur	menelusur (mengamati atau melihat untuk menentukan persifatan atau khuluk sebenarnya)	<i>to search</i>	penelusuran	telusuran
kaji	mengaji (dengan menggunakan pikiran secara tajam, mempelajari dan memperhatikan benar-benar, dan dari e dekat)	<i>to study</i>	pengajian	kajian
teliti	meneliti (menelusuridan mempelajari dengan sungguh-sungguh untuk menemukan keterangan yang mendasar)	<i>to research</i>	penelitian	telitian

3. **Padanan kata Indonesia untuk kata Inggris yang maknanya**

(Telah banyak dimanfaatkan, juga dalam Kamus Hidrogeologi dan Kamus Hidrologi)

<i>to diffuse</i>	– menghambur
<i>to disperse</i>	– menyerak
<i>to distribute</i>	– menyebar, memarih (kartu)
<i>to spread</i>	– melampar
<i>to scatter</i>	– menebar
<i>to assimilate</i>	– membaaur
<i>to disseminate</i>	– membebar

4. **Kata Indonesia yang jarang dipakai, yang digunakan untuk menyalin kata Inggris sehari-hari.** (Berasal dari Poerwadarminta, 1978, dan dimanfaatkan dalam Kamus Hidrologi dan Kamus Hidrogeologi, serta penerbitan ITB.)

<i>ajuk</i> , meng	– <i>to assess</i>
cergas	– <i>dynamic</i>
pegun	– <i>stationary</i>
piantan	– <i>24 hours</i> (Belanda: etmaal)
sangkil	– <i>effective</i>
senak	– <i>stagnant</i>
sentara	– <i>transient</i>
sepaling	– <i>extreme</i>
tangkil	– <i>file</i>
tegun	– <i>static</i>

DENGAN BAHASA (INDONESIA) SEBAGAI SARANA KITA NAIKKAN DERAJAT BANGSA (INDONESIA)

B.M. Diah

Pemimpin Umum Harian Merdeka

"Dengan bahasa sebagai sarana kita naikan derajat bangsa" saya pakai sebagai judul kertas-kerja ini. Dasar pemikiran judul ini ialah tema dan tujuan Kongres Bahasa Indonesia ke-IV, yaitu "Dengan bahasa Indonesia sebagai sarana kita sukseskan pembangunan nasional."

Kedua soal berkaitan mesra satu pada lain. Menerima masalah pembangunan sebagai persoalan berwajah seribu-muka membuat pembinaan bahasa nasional kita sebagai syarat mutlak mencapai tujuan menjadikannya sarana menaikkan derajat bangsa. Landasannya terletak dibidang kebudayaan dan pendidikan. Orang yang pandai memakai bahasanya adalah orang yang berkebudayaan. Orang yang berpendidikan. Orang yang dapat membawa bangsa dan negaranya kederajat yang tinggi.

Bahasa nama kumpulan tanda-tanda yang tampak dan terdengar, yang dipergunakan oleh manusia secara bersama-sama sebagai sarana memberikan pengertian dan pemahaman tentang kenyataan di dunia luas dan kehidupan dalam jiwa mereka. Pembangunan nasional barulah mungkin mencapai titik tertinggi apakala alat pendekatannya atau penghampirannya, yaitu bahasa dibina, diasuh, diperkaya, dipelihara, dihormati, bahkan dijunjung tinggi, lebih daripada harta kekayaan apapun yang dimiliki. Karena dari bahasa orang mengenal pendidikan dan kebudayaan seseorang. Buruk orang, buruk bahasa, kata pepatah. Dan tentu pula sebaliknya, buruk bahasa, buruk orang. Ini sebagai metafor.

Bahasa jembatan antara orang seorang, antara golongan, warga, suku, antara perkampungan, antara rakyat, antara satu lapisan dengan lapisan lain dalam pergaulan dan masyarakat. Bahasa yang terpelihara, terbina dan kaya alat perhubungan yang sangat bermanfa'at bagi orang-ramai (alat komunikasi massa), sarana pengembangan ilmu pengetahuan, perkakas memahami dan

memperdalam teknologi modern, kewajiban-kewajiban sosial-politik, maupun pemerintahan.

Oleh karena itu dalam pergaulan hidup dikenal istilah bahasa sopan. Bangsa Belanda mengatakan bahwa seseorang itu beradab tinggi apabila ia dapat mempergunakan bahasa beradab "bahasa Belanda sopan" – "Beschaafd Hollands". Bahasa Inggris sopan ialah bahasa Raja – "Kings English", atau Oxford English". Bahasa Jerman tinggi – "hoch Deutsch" atau bahasa Perancis murni, "Francais pure". Dan kita, bangsa Indonesia mengenal juga bahasa Indonesia tinggi, atau Indonesia sopan. Dahulu ada bahasa Melayu tinggi, bahasa sopan.

Dari kedudukan bahasa dalam masyarakat, nyatalah bahwa bahasa memiliki watak sosial. Baik manusia dalam pergaulan sosial, demikian pula bahasa haruslah tunduk pada norma-norma, tata-cara dan peraturan yang mengatur pemakaian alat pergaulan itu, yang berpekeriti sosial itu. Tidaklah dapat diterima jika ada orang sendiri-sendiri menentukan peraturan bahasa (itu). Saya ingin menyatakan di sini, bahwa walaupun sudah ada berbagai ragam usaha membersihkan atau memurnikan, dan juga menuju usaha memakai bahasa yang baik dan benar, namun menurut perasaan saya lebih banyak orang memakai bahasa Indonesia sesuka hatinya. Seakan-akan mereka itu boleh saja merusak bahasa, karena menganggap tidak ada peraturan dan norma-norma yang harus dihormatinya tentang pemakaiannya. Ini tidak saja terjadi di kalangan umum seperti di bidang pers, ahli-ahli pidato, penulis-penulis dari berbagai lembaga umum, tetapi juga dari kalangan pemerintah, yaitu pejabat-pejabat tinggi dan rendah (pegawai negeri)! Lebih celaka lagi, dalam keadaan sekarang dapat dikatakan bahwa juga dikalangan jajaran guru-guru sekolah rendah – sekolah dasar, SD banyak sekali yang tidak memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bayangkan, jika guru tidak dapat memakai bahasa yang baik dan benar, bagaimana pula ia dapat mengajar bahasa baik dan benar itu pada murid-muridnya?

Ahli-ahli bahasa Indonesia, seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Yus Badudu, M. Ramlan, Sumantri dan lain-lain berpendirian bahwa hanyalah dengan usaha-usaha yang sebesar-besarnya sangat mungkin dapat dijaga dan sekaligus diperbaiki bahasa kita yang hendak dipermodern dan diseragamkan (standardisasi), jika diletakkan secara ketat dasar-dasar bahasa disekolah-sekolah, dari rendah sampai menengah, demikian pula dalam pergaulan, dengan bahasa lisan. Pada waktu ini terdapat kecenderungan memakai bahasa menurut selera masing-masing pemakai, sehingga menjadi kacau-balau dan centang perenang. Pembangunan nasional bertujuan menaikkan derajat

bangsa. Ia bersifat membangkitkan kembali norma-norma hidup sebagai bangsa menuju perbaikan dan perubahan sosial dan nilai-nilai. Orang luar membuat penilaian tentang kita sebagai bangsa melalui bahasa. Manusia Indonesia tidak hidup dari nasi saja. Pembangunan tidak dibatasi dengan kemajuan dan kesejahteraan jasmaniah saja. Juga pengisian dan pembaharuan nilai-nilai rohaniyah sangat penting, bahkan lebih utama daripada kemajuan dan kesejahteraan benda saja! Ada orang asing yang mengukur kedalaman kebudayaan bangsa Indonesia dari sudut sosio-ekonomi. Karena itu mereka meremehkan bangsa kita. Ada yang bersikap bahasa Indonesia bahasa mudah. "Gampang"! Jauh panggung dari api. Dari kewajiban memakai pre-fix, suffix dan simulfix pada kata-kata, baik kata kerja, sifat, benda dan sebagainya dalam pembentukan kalimat, sebenarnya bahasa Indonesia sama sulit dan sempurna dengan bahasa Rusia.

Bahasa sebagai sarana mempertinggi kebudayaan bangsa.

Karena bangsa tidak hidup dengan nasi saja, maka kita sebagai bangsa, dengan bimbingan pimpinan nasional berusaha dengan segala jalan menunjukkan hal-hal dibidang sosial dan kebudayaan, disamping pembangunan ekonomi dan keuangan. Dalam kebangkitan kebangsaan manusia Indonesia mempunyai kesanggupan menempah cita-cita yang dikandungnya sejak ia dengan sungguh-sungguh ingin mengadakan perubahan dalam kehidupan sosial dan kebudayaannya. Jika sesuatu bangsa sanggup memajukan bidang sosial dan kebudayaannya dengan ketekunan, maka menyempurnakan dan memperindah, maupun memperkokoh norma-norma dan tata-cara pemakaian bahasa tidak pula sulit. Pada hakekatnya pemugaran bahasa hanya satu bagian daripada perbaikan besar yang dilakukan dibidang sosial dan kebudayaan sebagai rencana teratur untuk kebangkitan bangsa. Pembangunan ekonomi dan perubahan nilai-nilai kehidupan sosial-budaya itu adalah usaha sejarah (historis) sebagai bangsa merdeka mencapai derajat yang lebih tinggi. Banyak di antara pemuka-pemuka kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak sempurna. Bahwa bahasa ini tidak dapat dipakai untuk memperdalam bidang ekonomi, perdagangan, industrialisasi dan teknologi. Bahkan juga masih kurang sempurna jika dipakai dibidang politik. Yang pertama timbul dikalbu saya ialah: apakah orang yang berkata demikian itu mengerti apa itu bahasa Indonesia? Sudah sanggupkah manusia ini membuat sebuah karangan dalam bahasa Indonesia? Mengertikah dia apa yang dimaksudkan dengan tata bahasa? Betapa banyakkah ia memiliki pengetahuan tentang kata-kata dibahasa Indonesia? Artinya, berapa banyak kata-kata berada dalam "kamus"-nya

sendiri atau perbendaharaan kata-kata yang dimilikinya? Karena banyak sekali kekurangannya mengenai bahasa sendiri, maka dicarinya segala hal-hal tentang bahasa Indonesia agar alasannya tampak kuat. Dengan mudah kita menudingnya, menyalahkannya semua itu pada perilakunya sendiri. Tetapi, jujurkah kita semua jika berbuat demikian? Saya pikir, tidak! Mengapa tidak? Sebabnya ialah, karena lembaga-lembaga yang berkewajiban memajukan bahasa Indonesia dimasa kini dan dahulu sangat kurang produktif. Dalam pekerjaan saya sebagai wartawan saya tidak pernah dilanda oleh banjir buku-buku pengetahuan bahasa Indonesia, maupun tulisan, makalah-makalah apalagi buku-buku tentang kesusasteraan dan ceritera-ceritera yang (agak) berbobot. Benar-benar tampak kemiskinan kita akan hal-hal yang ada hubungannya dengan perkembangan bahasa untuk menaikkan derajat bangsa. Walaupun demikian, perlu kita memberikan juga penghargaan pada penerbitan-penerbitan yang diusahakan oleh badan-badan penerbitan bukan pemerintah yang melaksanakan pekerjaannya atas dasar tekanan kewajiban nasionalnya. Buku-buku memang sudah ada di "pasar buku", atau dikenal juga dengan "bursa buku", akan tetapi dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih 150 juta jiwa, jumlah yang dihasilkan segala penerbitan itu, maupun yang dikuasai Pemerintah masih tidak sebanding. Kalau saya katakan kita insani tergolong miskin dalam produksi buku-buku bernilai, maupun dalam bahagian dasar bahasa, seperti tata-bahasa, ilmu bahasa, analisa bahasa, morfologi, kamus, syntax, etimologi, dan lain-lain pengetahuan mengenai bahasa yang diperlukan untuk menyusun bahasa dan sastra yang sempurna dan menggambarkan sekaligus derajat dan harkat bangsa, ada juga sebabnya. Ahli-ahli bahasa tidak begitu kerap mengadakan perundingan, seminar ataupun perundingan-perundingan kecil oleh lembaga-lembaga maupun kumpulan-kumpulan pencinta bahasa, sehingga pertumbuhan bahasa Indonesia dilepaskan kepada perkembangan alamiah, dan jika ada waktu dibantu oleh unsur-unsur resmi maupun setengah resmi. Saya anjurkan supaya kebiasaan ini diubah. Pendirian saya ini dapat diperkuat oleh data-data yang diberikan penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia ke-IV ini. Bahasa Indonesia diterima sebagai bahasa persatuan dalam Kongres Pemuda tahun 1928. Ini suatu langkah revolusioner. Hanyalah, karena bangsa Indonesia masih hidup di bawah kekuasaan Belanda, tidaklah ia mempunyai peluang tanpa kendala memajukan dan melaksanakan keputusan Sumpah Pemuda itu. Lagi pula, penerimaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan lebih banyak bersifat politik daripada sosial-budaya. Ini dapat dibuktikan dari bahasa yang dipakai untuk merumuskan keputusan pertemuan itu. "Kami poetera dan

poeteri Indonesia, mendoengdjoen, bahasa persatoen, bahasa Indonesia".^{*)} Kalau dalam lain keputusan dinyatakan bahwa "mengakoe bertoempah darah yang satoe" dan "mengakoe berbangsa satoe", mengenai bahasa hanyalah menjunjung bahasa persatuan. Tentu dalam keputusan ini telah terkandung keinsyafan bahwa bahasa Indonesia juga diakui sebagai bahasa persatuan. Pernyataan ini yang juga dapat dianggap sebagai sikap simbolik tidak dapat menjamin kemajuan bahasa Indonesia. Bahasa Belanda bahasa yang dominan dalam kehidupan bangsa Indonesia masa itu, termasuk pemuda-pemudanya, walaupun sudah bersumpah menjunjung tinggi bahasa persatuannya. Sarana untuk memajukan bahasa nasional itu tidak ada. Pemuda Indonesia yang masih dibangku sekolah haruslah dapat memakai dengan lancar bahasa Belanda, sebelum dapat beralih kepada pemakaian bahasa Indonesia. Pegawai negeri harus berbahasa Belanda dalam berhubungan satu dan lain. Kaum menak-menak Indonesia dan lapisan atasnya di zaman penjajahan itu tidak dapat berbuat lain selain mempergunakan bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, membaca surat kabar Belanda, mendengarkan radio dalam bahasa Belanda dan sebagainya untuk mendapatkan tempat "terhormat" dalam strata sosial di masa penjajahan. Pers Indonesia dan semua kumpulan-kumpulan yang memakai bahasa Indonesia, yang dianggap oleh penjajahan Belanda sebagai bahasa Melayu saja, tidak mendapatkan tempat yang berarti sedikitpun dalam susunan sosial dizaman itu. Inilah gambaran nasib bahasa Indonesia ketika secara simbolis ditempatkan di atas kepala kaum muda Indonesia sejak tahun 1928. Hanya, pers Indonesia dan pergerakan kebangsaan menjadi sarana yang utama bagi perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekurang-kurangnya yang mendekati istilah itu. Ada juga satu keuntungan yang memungkinkan bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai dikehendaki oleh Sumpah Pemuda. Disekolah-sekolah rendah (atau dasar) yang diadakan pemerintah jajahan untuk bangsa Indonesia diberikan mata pelajaran bahasa Melayu. Selama tujuh tahun, dari tingkat satu sampai tingkat tujuh anak-anak Indonesia mempelajari bahasa ibu, bahasa Indonesia. Sayang, bahwa sampai di situ sajalah kesempatan anak Indonesia mempelajari bahasanya. Tentu mata pelajaran ini juga tidak begitu menjadi jaminan bagi anak Indonesia untuk naik jenjang sekolah. Karena yang dipentingkan ialah bahasa Belanda. Akibatnya, perhatian lebih tertuju pada belajar bahasa Belanda sungguh-sungguh. Di lain daerah khususnya daerah Jawa dan Sunda pelajaran bahasa Melayu disertai juga dengan pela-

*) Lihat Dokumen Keputusan "Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia tahun 1928.

jaran bahasa daerah. Bagaimana anak-anak daerah itu menempatkan bahasa Melayu dalam tingkat "prioritas"-nya tidaklah dapat diketahui. Tetapi bahwa mempelajari bahasa Melayu dengan leluasa tentulah agak berkurang. Karena otak yang muda itu disuruh menghafalkan juga bahasa Melayu disamping bahasa daerahnya. Mereka tentulah lebih mengenal bahasa daerahnya, karena sehari-hari didengarnya ayah dan ibunya memakainya.

Kongres bahasa Indonesia yang pertama terjadi pada tahun 1938 di Solo. Juga usaha ini indah pada niatnya dan harapannya. Pemerintah Hindia Belanda tentulah tidak membantu Kongres ini terlaksana dengan baik. Menghalangipun tidak. Tetapi akibat yang dramatik tidak terdapat sesudah kongres bahasa yang pertama itu. Masih tetap tidak ada bimbingan ilmiah untuk mengembangkan bahasa. Pers Indonesia masih tetap sarana utama. Wartawan-wartawan Indonesia menjadi pejuang memajukan bahasa Indonesia menurut cara dan selera mereka masing-masing. Seorang pemuka dunia wartawan Indonesia, sekretaris jenderal Persatuan Jurnalis Indonesia (nama serikat wartawan dimasa itu) Soedarjo Tjokrosiswojo (S. Tj.S.), seorang putera Solo sangat berjasa menyebarkan kata-kata baru ke dalam bahasa Indonesia. Antara lain perkataan *tanpa* (menggantikan kata Belanda *zonder*), *panitera* (menggantikan kata Belanda *sekretariaat*), dan lain-lain kata-kata asal kata-kata Jawa memperkaya bendahara kata Indonesia. Inilah hasil pemikiran Saudara S.Tj. S. itu. Jangka waktu 10 tahun dari 1928 sampai 1938 tidak sangat memperluas khatulistiwa bahasa Indonesia. Terlalu kuat lawan dan kendala, lebih tegas, halangan yang dihadapinya. Pemerintah Hindia Belanda memusuhi bahasa Indonesia. Karena mereka menyadari dan tahu benar bahwa bahasa itu, jika lebih sempurna, lebih maju kedudukannya, akan menjadi tombak perjuangan bangsa Indonesia mencapai kedudukan yang mulia, antara lain sebagai bangsa merdeka. Walaupun demikian, bahasa Indonesia dianggap sarana komunikasi, sarana perhubungan yang dapat dipergunakan, walaupun tidak sempurna, untuk mencapai orang ramai yang harus diberikan bimbingan dibidang politik. Setelah Belanda menyerah, dan Indonesia diduduki oleh Jepang, terdapatlah peluang yang baik bagi bangsa Indonesia mengenal bahasanya lebih mendalam. Bahasa Belanda dilarang dipakai. Bahasa dimajukan. Tentu tidak demikian keinginan Jepang. Akan tetapi, untuk memaksa bangsa Indonesia mempergunakan bahasa Jepang pastilah tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat sejak mereka datang ke Indonesia. Sarana penghubung antara penjajah baru dan bangsa Indonesia ialah bahasa Indonesia. Surat kabar bahasa Belanda juga tidak ada lagi. Bahasa Melayu-Tionghoa pun sudah tidak boleh terbit. Bahasa Melayu-Tionghoa ini dizaman Belanda

satu "dialek" yang mengganggu perkembangan bahasa Indonesia, karena surat kabar Melayu Tionghoa ini banyak pula dibaca oleh bangsa Indonesia, atau bangsa "pri-bumi" atau "bumi-putera". Walaupun demikian ada kata-kata yang diambil untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia, seperti "justeru", "kendatipun", dan sebagainya. Di jaman Jepang memang secara alamiah lagi terus berkembang bahasa Indonesia. Tanpa ada ahli-ahli bahasa yang memberikan bimbingan pada pemakaian bahasa Indonesia. Hanyalah ada ahli-ahli seperti Armijn Pane, Sanusi Pane, Sutan Takdir Alisjahbana, Dayoh, dan lain-lain pencinta dan pemupuk serta pemurni bahasa Indonesia yang turun kemedan perjuangan bahasa tanpa ada yang menyokong mereka. Semua dilakukan atas rasa kebangsaan yang mendalam, bahwa satu bangsa yang ingin menjadi bangsa besar haruslah memiliki bahasanya sendiri yang berarti, yang mempunyai segala kemungkinan, baik di bidang pengembangan fikiran-fikiran sosial budaya, sosial politik, ekonomi dan sebagainya. Mereka itulah dapat dikatakan pahlawan-pahlawan yang berjuang tanpa bala.

Dari tahun 1954 sampai 1966, yaitu 12 tahun barulah ada gerak lagi untuk memajukan bahasa kita. Di Jakarta diadakan simposium bahasa dan kesusasteraan Indonesia, yang diikuti dua tahun kemudian dengan seminar bahasa Indonesia ditahun 1968. Antara 1968 dan 1978 — jangka waktu 10 tahun terjadi delapan kali seminar dan konferensi bahasa Indonesia. Antara Kongres ke-III dan yang ke-empat yang sekarang ini diadakan dua seminar dalam jangka waktu lima tahun. Usaha bermusyawarah dan berseminar untuk memajukan bahasa nasional cukup banyak, tetapi tidak terlalu banyak. Mungkin penyelenggara tidak menganggap perlu lebih banyak waktu dipakai untuk mempersoalkan bahasa Indonesia ini. Tetapi, sebenarnya kondisi dan keadaan yang kita semua hadapi masa kini haruslah membuat kita sering mengadakan seminar maupun simposium atau kesempatan bertemu membicarakan keadaan bahasa Indonesia dalam ruang-lingkup masa sekarang. Dewasa ini terjadi proses perubahan cepat di semua bidang kehidupan. Karena itu bahasapun menghadapi berbagai tantangan baru di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, industri, teknologi dan sebagainya. Jika tidak banyak diperbincangkan keadaan dan perkembangan bahasa Indonesia karena pengaruh-pengaruh dari luar baik dari masyarakat ilmuwan, penerbitan, bahkan juga masyarakat anak-anak sekolah, dari dasar sampai tinggi, belum lagi diperhitungkan akibat-akibat komunikasi yang frekuensinya semakin banyak antara manusia dan manusia mengenai semua masalah kemasyarakatan dan kehidupan, kita tidak dapat menjaga agar bahasa Indonesia tidak dikacaukan

oleh golongan-golongan di bangsa sendiri yang tidak merasa bertanggung-jawab tentang bahasa kita.

Jika dipelajari sejarah bahasa Indonesia, dari bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, dapat dikatakan bahwa kekuasaan penjajah tidak dapat mengacau dan merusak bahasa kita. Kekuatan kebudayaan kita, termasuk juga bahasa-bahasa daerah, selain daripada bahasa Melayu yang diwarisi turun-temurun dari satu angkatan kelain angkatan memang mengalami gangguan, tetapi tidak merusakkan. Yang benar ialah bahasa itu tidak mendapat tempat yang layak baginya, sebagai unsur kebudayaan satu rakyat yang berjumlah besar.

Walaupun pada suatu masa kita didesak agar memakai bahasa Belanda dan Jepang untuk mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi, namun karena kita masih tetap berpegang pada kebudayaan kita, termasuk bahasa, bahasa kita masih tetap dapat kita tempatkan sesuai tempatnya. Tetapi sebaliknya, dalam masa kini, pada masa kita dapat hidup sebagai bangsa merdeka, bahaya kelongsoran mengancam bahasa Indonesia. Ketika saya memberikan ceramah di salah sebuah universitas di Yogyakarta, saya membicarakan masalah kebangsaan. Dan segala sesuatu yang menunjukkan kita mempunyai perasaan kebangsaan. Tetapi, kata saya, dengan tujuan menggugah perasaan mahasiswa di lembaga ini, saya melihat bahwa seakan-akan tidak ada perasaan demikian. Karena kamar kecil di sini ditandai dengan kata-kata asing: "ladies" dan "gentlemen"! Juga Pemerintah kita membangun dan menamakan perusahaan bajanya dengan nama "Krakatau steel", padahal "baja Krakatau" lebih enak didengar. Alasan apapun yang akan dimajukan untuk membela sikap ini, pemerintah Jepang, atau Tiongkok atau Algeria atau Argentina tidak akan memakai bahasa asing untuk keperluan berhubungan di dunia dagang internasional. Kehormatan nasionalnya melarang mereka memakai bahasa asing. Jika berada di Jalan Kuningan sekarang, kita akan menjumpai berbagai papan pengumuman dalam bahasa Inggris. Gedung-gedung yang sedang dibangun menjajakan sarana untuk dipergunakan sebagai ruang kantor. Untuk keperluan itu mereka tidak memakai bahasa Indonesia, tetapi bahasa asing. Maksudnya menawarkan ruang itu untuk pengusaha-pengusaha asing yang ada di Indonesia. Atau yang akan membuka kantornya di sini. Apakah artinya ini? Bahasa Indonesia diperyahudikan. Mereka ini yang kebetulan bukan Indonesia asli tidak menganggap bahasa kita sebagai alat komunikasi yang menguntungkan mereka. Karena pemerintah tidak mempunyai undang-undang yang melarang memakai bahasa asing dinegeri kita untuk berkomunikasi umum, bukan terarah sebagai di TV, maka bahasa Indonesia dire-

mehkan. Oleh bangsa sendiri, atau warga sendiri. Ini tragis, menyedihkan, dalam satu negara merdeka sebagai negara Indonesia.

Kenyataan seperti demikian membangkitkan perasaan pada kita seakan-akan negara kita bahagian dari "British Empire", atau salah satu negara bagian Amerika Serikat, dan bahasa perantaraannya bahasa Inggris, seperti di Hawaii, Singapura atau Hongkong!

Bahasa Indonesia, karena itu, tidak saja harus dijaga perkembangannya oleh ahli-ahli bahasa kita, bahkan juga harus didudukkan ke singgasana yang mulia dan dilindungi pemerintah, baik pusat, maupun daerah dengan undang-undang. Unsur-unsur yang mengambil keputusan dalam pemerintah haruslah menyadari bahwa bahasa Indonesia dipelajari juga sekarang di beberapa universitas di Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan juga di Moskowa, Praha dan lain-lain negara penting di dunia. Pertanyaan timbul apakah mereka dapat memberikan pelajaran bahasa kita yang benar dan baik, jika kita di Indonesia sendiri tidak melindungi bahasa kita, tidak menjaga standardisasinya, baik di bidang tata-bahasa, seperti morfologi, syntaxnya, bahkan juga perbendaharaan bahasa seperti kata-kata yang dikemukakan. Dan yang dibaku, ataupun yang telah mewarga. Kesatuan struktural dan hukum bahasa harus diutamakan. Seperti dikatakan terlebih dahulu, perhatian pada bahasa kita sangat perlu, mengingat bahwa sebagai bagian dari kehidupan bangsa yang mengalami proses perubahan yang cepat terjadi, baik kemasyarakatan maupun kebudayaan dengan segala akibat sampingan, baik pertentangan maupun ketimpangan, membuat watak bahasa menjadi dinamis. Kita memiliki peluang yang sangat baik melalui bahasa menjadi bangsa besar. Salah satu rencana atau konsep modern dalam pembangunan bangsa dan negara, untuk mempercepat mempersatukan bangsa di bidang sosial dan kebudayaan, dasar segala perkembangan menjadi bangsa besar, ialah memiliki SATU bahasa yang berkesanggupan sebagai kekuatan mempersatukan. Tidaklah berlebihan jika dianjurkan agar diciptakan satu gerak dinamis membangun bahasa. Dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh ini, mendinamisir proses pembangunan bahasa, baik melalui seminar, simposium, pers harian dan berkala, alat-alat perhubungan atau komunikasi lain, baik cetak maupun elektronik, dapatlah kita menjadikan bahasa sebagai sarana meninggikan kebudayaan kita. Watak sosial daripada bahasa menyebabkan bahwa harus ada tata-cara dan pengaturan yang baku untuk pemakaian bahasa sebagai unsur penghubung dan pernyataan fikiran dan pendapat membina segala segi kehidupan satu bangsa dan masyarakat yang hidup.

Bahasa sebagai alat komunikasi

Tujuan Kongres memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, sebagai :

- 1) sarana komunikasi pemerintahan,
- 2) sarana pengembangan kebudayaan,
- 3) sarana pendidikan dan pengajaran,
- 4) sarana pelaksanaan wajib belajar,
- 5) sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Ini semua dirangkum menjadi sarana pembangunan nasional. Kongres ingin mencapai tujuan itu dengan juga *membahas bahasa dan sastra* dalam hubungannya dengan *pembangunan nasional*. Masalah ini hendak ditinjau pula dari segi :

- 1) komunikasi massa, dan
- 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dari persoalan-persoalan yang dikemukakan dan yang akan ditangani oleh Kongres, dan hasilnya secara *optimum* yang ingin dicapai hanyalah dapat terjadi melalui sarana abstrak, yaitu bahasa, pada tingkat pertama. Alat-alat konkrit yang lain hanyalah sebagai alat pembantu.

Demikianlah secara umum susunan dan urutan persoalan, jika sekiranya kita harus membahas masalah bahasa dalam hubungannya dengan pembangunan nasional. Jika dikaitkan masalah bahasa ini dengan *hak berkomunikasi*, sebagai hal yang menjadi persoalan dan pembicaraan dalam UNESCO beberapa tahun terakhir, dengan sendirinya persoalan ini menjadi lebih mendalam maupun luas jangkauannya dan ruang lingkupnya. Menyinggung hak berkomunikasi itu bahwasanya kita sebagai bangsa telah memiliki suatu kedudukan dalam pengertian emansipasi yang sempurna. Dengan emansipasi ini saya maksudkan bahwa kita sudah menjadi bangsa dewasa dan matang. Jika membicarakan bahasa untuk sarana komunikasi, maka hak yang terjamin dalam komunikasi itu dengan tujuan yang tercatat dari 1 sampai 5 membuat kita menjadi bangsa dan negara, nasion yang memiliki segala kelengkapan (attribute). Maka bahasa yang dipergunakan sebagai sarana itu seharusnya yang telah sempurna, telah dapat menjangkau segala persoalan yang dibawa kelengkapan negara kit. Ini tentulah tidak semudah seperti yang tertulis disini. Walaupun demikian kita harus berani bertolak dari titik yang saya kemukakan itu. Dengan nilai bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pemerintahan berarti kita sebagai bangsa telah memiliki bahasa politik. Bahasa dan politik telah dapat berdiri berdampingan dan baur-mem-

baur dalam kerangka komunikasi. Artinya bahasa politik, termasuk bahasa pemerintahan telah kita pergunakan. Masyarakat ramai dapat terjamah jika dihubungi oleh pemerintah dengan mempergunakan bahasa sebagai sarana. Yang dapat difahami. Yang baku. Sebaliknya demikian pula, jika masalah hak — *the right* — untuk mengadakan komunikasi diselipkan dalam persoalan ini. Hak rakyat mendapatkan komunikasi, dan hak rakyat mengadakan komunikasi dengan pemerintah. Inilah yang dinamakan antar-aksi yang positif. Keafdolan hubungan timbal-balik yang bernama komunikasi itu sangat tergantung pada bahasa: perumusannya dalam pemikiran; pemikiran yang dilahirkan hasil pertukaran pendapat (*conversation, discussion*); antar-main dalam arti dasar (semantika) kata-kata, istilah dan bahasa yang dipakai; kebiasaan sosial dan intelektual dan watak penerima (atau pendengar) penerangan sebagai unsur-unsur daripada antar-aksi tersebut yang telah membentuk keterangan atau penerangan pihak pemerintah, maupun rakyat atau wakilnya dengan memakai bahasa untuk keperluan itu. Dan selanjutnya penetapan kepercayaan hasil daripada antar-main itu yang menentukan pula nilai hubungan itu. Dari seluruh antar-aksi ini, tidak dapat tidak bahasa menjadi sarana yang sangat utama. Dan karena sarana ini memiliki budipekerti dan watak sosial, ia berdayaguna yang tinggi efek dan nilainya.

Tanpa mempersoalkan hak, tetapi hanya soal komunikasi saja, dengan bahasa sebagai sarana, baik komunikasi itu untuk pemerintahan maupun untuk mencapai orang-ramai atau massa, soal ini diakui sebagai sumber yang diperlukan untuk pergaulan sosial. Untuk kemanusiaan bersama. Piagam Universal mengenai Hak-hak Manusia mengakui kenyataan ini sejak tahun 1948. Sejak sa'at itu komunikasi diakui sebagai sumber kemanusiaan yang sangat diperlukan, essensial. Dalam perdebatan di salah satu sidang UNESCO yang saya hadiri di Manila tahun 1978 ada yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang tidak selamanya diakui antara sumber, keperluan (kebutuhan) dan hak. Jika keperluan bagi perikemanusiaan akan sumber komunikasi itu tidak dapat disediakan atau diadakan, maka terjadilah frustrasi. Dalam negara seperti kita, dirasakan keperluan yang sangat besar akan komunikasi itu, yang meliputi dalam rencana pemerintahan mengenai keluarga berencana, pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan masyarakat sampai pada pengembangan ilmu pengetahuan. Di beberapa negara sumber komunikasi ini sangat besar dan mudah diberikan, akan tetapi di lain negara ia tertutup dan dihalangi untuk dipergunakan. Perbedaan dalam menikmati sumber komunikasi ini, yang diperlukan dan yang menjadi hak perikemanusiaan menyebabkan dicari cara-cara bagaimana sumber-sumber itu dapat dipergunakan agar efek

dan daya-guna yang sebaik-baiknya diperoleh untuk mendapat hak penyer-taan dalam pembangunan yang seimbang.

Jika kita mengumpulkan semua tujuan Kongres ini sebagai satu usaha untuk pembentukan budipekerti sosial kita, dan sarananya ialah bahasa, maka kita akan mengalami kesulitan yang dikandung masyarakat kita sendiri. Bahasa yang mempunyai watak sosial menunjukkan kepada kita bahwa masih terdapat berbagai saku-saku kebudayaan yang satu dan lain masih berbeda. Saku-saku kebudayaan majemuk ini haruslah dapat kita atasi segera agar tercapai cita-cita menjadikan bangsa kita maju, karena mempunyai alat penghubung yang dapat "dipakai" oleh semua lapisan masyarakat. Mau atau tidak haruslah diakui bahwa terdapat satu stratifikasi sosial dalam masyarakat. Demikian pula bahasa mempunyai stratifikasi sosial. Warga dan keluarga yang bertingkat pengetahuan tanpa dasar pendidikan tidak memakai bahasa sulit. Bahkan tanpa terikat pada norma dan kendala tata-bahasa. Warga menengah dan atas karena berkedudukan dalam strata sosio-ekonomi yang tinggi memakai bahasa tinggi dan sopan dengan sifat yang lebih abstrak.*) Sementara itu mobilitas sosial sangat lamban gerakannya karena jurang antara golongan miskin dan kaya makin melebar dari masa ke masa dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Manusia mempunyai kesanggupan membentuk simbol-simbol dan kata-kata yang mewakili fenomena (rupa) daripada dunia-dunia dalam dan luar. Kesanggupan ini adalah wataknya yang sangat menonjol. Pada proses menelaah dan mengetahui di alam pikirannya akan lingkungannya, manusia mengembangkan sistem-sistem dengan simbol atau bahasa yang membentuk, maupun merubah lingkungannya itu. Kata-kata memberikan kepadanya alat cetakan untuk rencana dan fikiran, demikian juga simbol yang memantulkan keyakinan nilai. Simbol tidak serupa dengan tanda, seperti angka yang mempunyai isi tetap. Simbol dan rencana mengandung sifat keterbukaan yang dibatasi oleh pengertian-pengertian. Hanya bahasa, sifat kegunaannya tidak dapat dilepaskan daripada pengaruh sosialnya. Demikianlah interpretasi yang diberikan oleh Claus Meuller dibukunya "The Politics of Communication"**) mengenai bahasa dalam arti kata yang umum, dipandang dari sudut sosiologi politik daripada bahasa. Tetapi bahasa dan kesadaran politik (pemerintahan), kesadaran pendidikan, kesadaran kebudayaan, kesadaran menyadap pengetahuan dan teknologi haruslah berjalan bersamaan. Demikianpula cara ini menentukan bagaimana seseorang pribadi berhu-

*) Lihat Catatan Perpustakaan di Lampiran.

**) Lihat Catatan Perpustakaan di Lampiran.

bugan dengan lingkungannya. Karl Marx dan Friedrich Engles memberikan perumusan tentang bahasa, yang antara lain dikatakan oleh mereka bahwa bahasa sama tuanya dengan kesadaran. Bahasa ialah kesadaran yang praktis. Karena bahasa, seperti juga kesadaran hanyalah lahir karena keperluan, keharusan mengadakan perhubungan dengan lain manusia.***)

Dari pemikiran ini nyatalah bahwa manusia yang memiliki kesanggupan memakai bahasa dan sanggup menanggapi dinamik lingkungannya akan dapat pula berkecimpung dalam komunikasi politik, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya untuk memperbaiki citranya sendiri dan juga lingkungannya. Tidaklah salah jika saya katakan di sini, bahwa bagi kita sebagai bangsa yang muda, tetapi berkebudayaan tua, termasuk pemilikan bahasa itu perlu menyadari bahwa kita harus sanggup "memilih bahasa", dalam arti bahwa bahasa yang akan dipergunakan adalah yang dapat menentukan derajat bangsa di antara bangsa-bangsa yang berkebudayaan. Sebagaimana juga di Rusia dan Amerika Serikat, bahasa (menjadi) alat perubahan dan perjuangan. Dan seorang ahli bahasa Rusia, L.O. Reznikow, menyatakan: "Ilmu Marx mengajarkan kepada kita bahwa bahasa tidak saja menyatakan dirinya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat ampuh yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan dan terutama sekali budipekerti, demikian juga akhirnya, kenyataan jasmaniah." ****)

Melalui fikiran yang terkembang di sini, yang berasal dari luar dan dalam, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan bahasa sebagai sarana kita dapat, bahkan sanggup, menaikkan derajat bangsa kita. Menaikkan derajat sebagai "kenyataan — jasmaniah" adalah bahagian yang terakhir dan yang puncak daripada sukses pembangunan nasional.

***) Lihat Catatan Perpustakaan di Lampiran.

****) Lihat Catatan Perpustakaan di Lampiran.

CATATAN PERPUSTAKAAN

Untuk makalah ini dipergunakan berbagai buku sebagai pedoman, referensi, tanpa banyak mengutip kalimat-kalimat pendukung dari penulis yang bukunya tercatat di sini :

Mengenai Tata-bahasa:

1. Dr. J.S. Badudu, Pelik-pelik Bahasa Indonesia, Penerbit Pustaka Prima, Bandung, Catatan XXVIII, 1963.
2. DR. J.S. Badudu, Membina Bahasa Indonesia Baju, Penerbit : Sama. Seri 1, 1981, Seri 2, 1980.
3. Drs. M. Ramlan, Ilmu-Bahasa Indonesia, Morfologi, Suatu Tinjauan Deskriptif, U.P. Indonesia, Jogja 1967.
4. Samsuri, Analisa Bahasa, Penerbit Erlangga, Jakarta, Cetakan ke-4 (yang direvisi) 1982.

Mengenai Bahasa

5. S. Takdir Alisjahbana, The Failure of Modern Linguistics in the face of liguistic problems of the twentieth century University of Malaya, Kuala Lumpur, 1965.
6. Peter M. Roeder, "Sprache, Sozialstatus und Bildungschancen" sebagai dikutip oleh U. Oevermann, "Soziale Schichtung und Begabung", "Zeitschrift fur Padagogik", No. 6 (Beiheft) 1966.
Penulis ini mengambil contoh anak-anak Jerman Barat, dari golongan guru dan menengah. Contoh ini saya terjemahkan kemasyarakat Indonesia atas dasar pengalaman. Lihat *).
7. Claus Mueller, The Politics of Communication, A. Study in the Political

Sociology of Language, Socialization, and Legitimation, Oxford University Press, 1976. "Man's capacity to form symbols and words which represent phenomena of his external and internal worlds is his most distinguishing characteristic. In the process of discerning and decoding his environment, man creates symbolic systems or languages which structure and transform it. Words provide modls for concepts and thoughts, as well as for symbols that reflect beliefs and values. Unlike a sign which can be reduced to a fixed content such as a number, symbols and concepts have an open semantic space delimited only by interpretations. The nature and function of language cannot, however, be disconnected from the social realm". Lihat **).

8. Karl Marx and Friedrich Engles, The German Ideology, New York International Publishers, 1969, halaman 19. "Language is an old as consciousness. Language is practical consciousness. For language, like consciousness, only arises from the need, the necessity, of intercourse with other men." Lihat ***)
9. L.O. Reznikow, "Contributions aux Problems", halaman 164 sebagai dikutip oleh Claus Mueller, Op. Cit., halaman 35. "Marxism teaches us that language reasserts itself not only as a means of communication . . . but also as a powerful tool which can be used to affect thoughts, feelings, and especially behavior, as well as, ultimately, the material reality." Lihat ****)
10. Envolving Perspectives on the Right to Communicate, edited by L.S. Harms, Jim Richstad, East-West Center, East-West Communication Institute, August 1977.
11. C. Wright Mills, Power, Politics and People, the Horowitz, Language, Logic and Culture, halaman 423 - 438, Oxford University Press 1963.

MENINGKATKAN BOBOT DAN KADAR PENGAMALAN KESADARAN NASIONAL MELALUI PENGGUNAN BAHASA INDONESIA SECARA BAIK DAN BENAR

Imam Sukarsono

Pendahuluan

Di dalam karyanya yang pertama, yang berjudul "MAX HAVELAAR", E. DOUWES DEKKER yang menggunakan nama samaran "MULTATULI", salah seorang penyala semangat kebangkitan nasional bangsa Indonesia, melukiskan keindahan kepulauan Nusantara sebagai sebuah ikat pinggang dari batu pertama berwarna biru yang bergerak mengitari khatulistiwa. Setiap orang Indonesia yang normal pasti bangga mendengar pujian yang dialamatkan kepada tanah airnya. Ada satu hal lagi yang juga membuat setiap orang Indonesia bangga, ialah kenyataan bahwa bangsa Indonesia termasuk di dalam kelompok lima terbesar di dunia dilihat dari jumlah penduduknya. Seorang penulis Barat yang turut menyumbangkan karya untuk penerbitan buku yang berjudul "NATIONAL SECURITY" dengan anak judul "Political, Military and Economic Strategies In The Decade Ahead" terbitan FREDERICK A. PRAEGER pada tahun 1963 New York – London) melihat bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang bukan saja jumlah penduduknya yang besar, melainkan juga ambisinya. Lepas dari alasan yang digunakan oleh penulis tersebut untuk memberikan kualifikasi "berambisi besar" itu (di dalam karya tersebut alasan itu memang tidak dikemukakan) pembuat kertas kerja ini berpendapat bahwa bangsa Indonesia patut menyambut pemberian kualifikasi demikian dengan perasaan bangga dan gembira. Sebab, bukankah Undang-Undang Dasar kita – 1945 di dalam pembukaannya telah menegaskan kebulatan tekad bangsa Indonesia akan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial? Bukankah kebulatan tekad demikian memperlihatkan ambisi besar di dalam arti yang positif? Masih banyak hal lain yang melukiskan kebesaran bangsa dan tanah air Indonesia. Akan tetapi untuk keperluan pembuatan makalah ini kiranya

tiga hal yang telah disinggung di muka cukuplah sudah. Bangsa Indonesia sadar pula bahwa hanya menonjolkan kebanggaan dan kegembiraan saja tidaklah banyak hal yang dapat dinikmatinya dari kebesaran itu. Oleh karena itu cukup lama ia membanting tulang dan memeras keringat di dalam pemenuhan kewajiban yang dibebankan oleh kualifikasi "besar" tersebut. Di bidang kebahasaan, khususnya yang menyangkut bahasa Indonesia, bangsa Indonesia telah menanam sejumlah tiang pancang sejarah. Tanpa mengurangi arti dan peranan tiang pancang sejarah yang berbentuk lain, untuk keperluan penyajian kertas kerja ini penyaji membatasi diri dengan hanya mengemukakan tiang pancang sejarah yang berbentuk kongres di samping tiang pancang sejarah yang terpenting yakni Sumpah (Keramat) Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928.

Kongres Bahasa Indonesia I dilangsungkan di kota Solo pada tahun 1938. Tahun 1954 ditandai dengan Kongres Bahasa Indonesia II di kota Medan dan Kongres Bahasa Indonesia III merupakan salah satu ciri tahun 1978 dengan ibu kota Jakarta sebagai tuan rumahnya. Kongres Bahasa Indonesia IV akan segera tampil sebagai salah satu peristiwa penting yang menandai tahun 1983. Selaku seorang tenaga bantu sukarela di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pembuat kertas kerja ini memandang kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia IV untuk menyumbangkan fikiran kepada kongres sebagai suatu kehormatan yang harus ditanggapinya sebaik mungkin. Oleh karena penyaji kertas kerja ini bukan seorang pakar bahasa Indonesia melainkan hanya seorang yang di dalam penggunaan sehari-hari bahasa Indonesia senantiasa berusaha memperlihatkan sikap berbahasa yang dapat memenuhi tuntutan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, maka apabila di dalam makalah ini tidak dapat ditemukan bobot ilmiah penyajian seperti yang lazim mewarnai karya seorang sarjana bahasa, kekurangan ini harus dipulangkan kepada kenyataan bahwa penyaji bukan seorang sarjana bahasa Indonesia. Namun, dengan menyadari kekurangan yang melekat pada dirinya ia berdo'a semoga kertas kerja yang disajikannya dapat memenuhi harapan panitia penyelenggara. Kertas kerja ini disusun dengan sistematika yang berikut:

- Pendahuluan
- Bahasa Nasional Sebagai Sarana Untuk Mencapai Tujuan Nasional
- Bobot Dan Kadar Pengamalan Yang Tidak Memadai
- Tantangan Repelita IV
- Ringkasan Dan Saran

Bahasa Nasional sebagai Sarana untuk Mencapai Tujuan Nasional

Peranan sebagai penopang atau pemikul yang umum suatu kebudayaan dipegang oleh bahasa. Dapat juga dikatakan bahwa bahasa merupakan suatu produk sekaligus juga suatu alat yang paling umum yang dihasilkan oleh suatu kebudayaan. Fungsi yang paling elementer dan sekaligus paling umum di dalam suatu masyarakat dilaksanakan oleh bahasa. Suatu alat untuk menyatakan pendapat, itulah bahasa. Di samping itu ia juga merupakan suatu alat di tangan penggunaannya untuk memahami pendapat orang lain. Maka jelaslah bahwa apabila orang berbicara tentang hubungan antar orang, mau tidak mau alat yang disebut "bahasa" itu pasti tidak akan lepas dari ingatannya. Di dalam, oleh dan dengan masyarakat setiap kata yang diucapkan tumbuh serta berkembang. Menyatakan pendapat dan memahami sesuatu hal bukan hanya sekedar berbicara dan mendengar, melainkan lebih dari itu. Pembentukan fikiran tidak dapat dilepaskan dari pernyataan pendapat. Dengan kata lain pengertian pembentukan fikiran lengket dengan pengertian pernyataan pendapat. Memahami sesuatu mengandung pengertian dapat menangkap atau mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang lain. Pengertian-pengertian dan pola-pola fikiran dapat dibentuk hanya dengan penggunaan alat yang disebut "bahasa". Juga oleh alat itu seseorang dimungkinkan mengamati menghayati dan mengamalkan secara teratur pengalaman-pengalaman hidupnya. Suatu sistem yang beraturan dan mengandung pengertian-pengertian serta bentuk-bentuk pernyataan pendapat, itulah bahasa. Ia memungkinkan pemikiran yang teratur dan sebaliknya ia juga dilahirkan dan diberi kemungkinan berkembang oleh pemikiran yang teratur. Manusia belajar membentuk pola-pola fikiran dengan bantuan masyarakat, karena di dalam masyarakat itu ia belajar memahami apa yang dimaksudkan oleh sesama anggota masyarakat. Maka dapatlah dikemukakan bahwa masyarakat melahirkan bahasa dan bahasa melahirkan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Kesamaan bahasa tidak saja berarti bahwa para pemakainya dapat saling memahami, tetapi juga mengandung arti suatu taraf tertentu di dalam kesesuaian berfikir. Dengan demikian jelaslah betapa tinggi kadar vitalitas bahasa di dalam setiap masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat moderen beraspirasi membentuk diri menjadi suatu bangsa, suatu nasion yang merdeka dan berdaulat, maka sungguh mengasyikkan dan menariklah penelitian untuk memahami posisi bahasa milik suatu bangsa, suatu nasion. Bahasa milik suatu nasion, manakala ia mampu memberikan kemungkinan kepada semua anggota nasion untuk saling memahami dan saling berkomunikasi, dapat disebut bahasa nasional bangsa itu. Untuk menge-

tahui di mana posisi bahasa nasional di dalam pembentukan bangsa, penyaji kertas kerja ini mengajak para peserta kongres mendekati lebih dahulu kesadaran nasional. Menurut FREDERICK HERTZ, seorang psikolog-sosiolog, kesadaran nasional dapat dianalisa menjadi empat unsur. Unsur ketiga yang melukiskan empat jenis aspirasi nasional, terdiri atas empat butir. Butir ketiga dan keempat mengandung inti yang dijadikan titik tolak di dalam penelitian posisi bahasa nasional. Butir ketiga melukiskan suatu usaha keras untuk menampilkan keterpisahan, perbedaan, kepribadian, keaslian dan keistimewaan/kekhasan. Sikap menjunjung tinggi bahasa nasional dicatat oleh HERTZ sebagai suatu contoh yang amat berbobot tentang usaha keras ini. Perjuangan suatu bangsa untuk membedakan diri dari bangsa-bangsa lain dilukiskan oleh butir keempat; butir ini mendasari butir-butir yang lain. Dikemukakan pula oleh HERTZ bahwa kesadaran nasional yang memotori gerakan-gerakan nasional merupakan tempat kandungan semangat perjuangan terpadu untuk mewujudkan kesatuan, kemerdekaan, kepribadian dan prestise, sedangkan sasaran utama gerakan-gerakan nasional ialah kebebasan politik, emansipasi kultural, kemerdekaan ekonomi dan kesamaan sosial. Bahwa kesadaran nasional memberikan posisi kepada bahasa nasional sebagai tali tradisional yang paling utama untuk mengikat dan mempersatukan masyarakat, sebagai sarana untuk mendidik rakyat supaya rakyat memiliki semangat solidaritas dan sebagai lambang kepribadian nasional, oleh psikolog-sosiolog tersebut dijelaskan pula secara mantap.

Perjuangan-perjuangan nasional yang bergandengan tangan erat dengan perjuangan pengamalan faham demokrasi mulai makin menonjol sejak abad 19 dan bahasa menjadi lambang kedaulatan nasional, kemerdekaan serta prestise. Dalam pada itu sejarah pun mencatat peristiwa-peristiwa yang berekor perang yang menghancurkan kesatuan pelbagai bangsa sebagai akibat pertentangan atau konflik yang dikobarkan oleh fanatisme bahasa. Tiap-tiap sukunya ingin menempatkan bahasa ibunya pada posisi yang lebih tinggi daripada posisi bahasa ibu suku yang lain. Abad ke 20 yang hampir berakhir ini pun menjadi saksi pergaulan beberapa bangsa dengan kesulitan dan kericuhan yang diakibatkan oleh fanatisme bahasa. Kesulitan dan kericuhan itu tidak jarang menempatkan kelangsungan hidup bangsa tersebut di dalam taruhan. Sejumlah bangsa yang mencapai kemerdekaan sesudah perang dunia kedua dan terdiri atas pelbagai suku yang masing-masing mempunyai bahasa ibu terpaksa menggunakan bahasa bangsa yang pernah menjajah mereka sebagai bahasa resmi, oleh karena mereka tak mampu melahirkan sebuah bahasa nasional yang diterima oleh semua suku.

Di Afrika bahasa bekas bangsa penjajah yang sampai sekarang masih digunakan sebagai bahasa resmi bangsa-bangsa yang telah merdeka itu ialah bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Di Asia bahasa Inggris pun masih menempati posisi sebagai bahasa resmi di beberapa negara yang dahulu menjadi jajahan bangsa Inggris.

Bangsa Indonesia harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya berupa "pelita" yang sejak pagi-pagi di dalam suasana dan alam penjajahan telah menyala dan menerangi hati nuraninya; kecintaan tiap-tiap suku bangsa kepada bahasa ibunya tidak pernah merosot menjadi fanatisme bahasa. Oleh karena tiap-tiap suku bangsa Indonesia sadar bahwa gerakan nasional yang telah berlangsung selama dua puluh tahun sejak hari kebangkitan nasional 20 Mei 1908 kurang memuaskan disebabkan oleh belum adanya satu bahasa yang dapat digunakan olehnya sebagai sarana untuk memahami secara mantap apa yang dimaksudkan oleh suku bangsa yang lain, maka tergeraklah hati pemuda Indonesia untuk menghilangkan hambatan ini dan pada tanggal 28 Oktober 1928 diangkatlah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Sumpah (Keramat) Pemuda yang diikrarkan pada tanggal tersebut merupakan wadah pengangkatan itu.

Sumpah (Keramat) Pemuda merupakan salah satu faktor yang amat penting di dalam pergerakan nasional yang akhirnya berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Jelaslah bahwa apa yang dilukiskan oleh psikolog-sosiolog HERTZ tentang arti suatu bahasa nasional bagi suatu bangsa telah dibuktikan oleh bangsa Indonesia di dalam perjuangan nasionalnya. Bangsa Indonesia menggunakan bahasa nasionalnya, yakni bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan nasional.

Bobot dan Kadar Pengalaman yang Tidak Memadai

Apakah bangsa Indonesia cukup puas dengan hanya memberikan kepada bahasa Indonesia peranan sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan nasional? Pertanyaan ini dapat dijawab secara tegas "tidak". Bangsa Indonesia tidak tinggal diam setelah bahasa Indonesia diangkatnya menjadi bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang Indonesia, sebab apalah arti perkataan "menjunjung tinggi" yang keluar dari mulutnya setiap kali ia mengucapkan Sumpah (Keramat) Pemuda, kalau perkataan itu tidak diikuti perbuatan yang serasi. Secara berangsur-angsur bahasa Indonesia dipupuk, dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan irama perjuangan bangsa. Di dalam alam dan suasana penjajahan Belanda kesempatan untuk pengem-

bangsa bahasa Indonesia praktis tidak ada, oleh karena yang ditempatkan pada posisi kelas satu oleh pemerintah kolonial tak lain dan tak bukan hanya bahasa Belanda. Nama "Bahasa Indonesia" dikenal hanya dikenal oleh dan di kalangan "orang-orang nireerakan". Di luar kalangan itu orang menggunakan nama "Bahasa Melayu". Pemerintah jaiahan menempatkan bahasa Melayu setingkat dengan setiap bahasa daerah yang lain. Setelah Belanda meninggalkan bumi Indonesia sebagai akibat kalah perang dan banesa Iepang sebagai bangsa yang menang perang tampil sebagai neniajah baru mulailah bahasa Indonesia merasakan hembusan angin segar. Pemerintah pendudukan Iepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Di samping bahasa Jepang bahasa Indonesia beroleh tempat yang terhormat. Sejak saat itu orang-orang Indonesia yang sangat mahir berbahasa Belanda tetapi "tidak dapat berbahasa Indonesia" terpaksa belajar bahasa Indonesia. Makin ceralah prospek bahasa Indonesia sejak saat itu. Apa yang dahulu belum pernah dikemukakan di dalam bahasa Indonesia sejak saat itu harus tampil di dalam bahasa Indonesia. Maka mudahlah difahami bahwa di dalam zaman penjajahan Jepang itu mulai tampak kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 tentu dapat juga dicatat sebagai tiang pancang sejarah di dalam perkembangan bahasa Indonesia, oleh karena bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya harus membenahi diri. Pembenahan diri mengandung pengertian pengaturan, ialah pengaturan di dalam rangka pembentukan bangsa, nasion, dan negara Indonesia. Kalau orang berbicara tentang negara, ia akan dapat melihat tiga unsur yang menonjol di dalam kegiatan atau kerja negara, ialah :

- a. kehidupan masyarakatnya dengan pelbagai ragamnya,
- b. penggunaan kekuasaan untuk memungkinkan pembuatan aturan-aturan yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut,
- c. kaidah-kaidah atau norma-norma yang harus ditaati atau ditunduki di dalam pembuatan aturan-aturan itu.

Ketiga unsur ini pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di dalam kegiatan-kegiatan pembuatan aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang baru saja merdeka, bulan-bulan pertama sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah mulai berhadapan dengan kebutuhan akan kata-kata dan istilah-istilah baru bahasa Indonesia. Bahwa penemuan kata-kata dan istilah baru itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, dapat dibuktikan oleh bentuk peraturan perundangan yang diterbitkan di dalam periode 1945 — 1950. Bukan hanya penemuan kata-kata dan istilah-istilah baru yang tampak sebagai suatu pekerjaan yang tidak mudah, melainkan juga penyusunan kalimat yang baik

menurut aturan bahasa Indonesia merupakan suatu beban yang tidak ringan bagi mereka yang terlibat di dalam pembuatan peraturan perundangan tersebut. Maka jelas pulalah bahwa tertib masyarakat menuntut adanya peraturan perundangan yang baik. Oleh karena peraturan perundangan yang baik menuntut penggunaan bahasa yang baik, maka mau tidak mau dari hari ke hari bahasa Indonesia harus disempurnakan. Menyempurnakan bahasa Indonesia berarti pula secara konsisten memupuk, memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia. Membina atau memupuk, memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia secara konsisten mengandung pula arti menghayati dan mengamalkan posisi bahasa Indonesia sebagai unsur ketiga di dalam Sumpah (Keramat) Pemuda. Di dalam zaman Orde Lama kegiatan untuk membenahi bahasa Indonesia melalui forum yang berbentuk kongres telah dilakukan dua kali, yakni di Solo dan di Medan, seperti yang telah disinggung di muka. Orde Baru dapat membanggakan diri sebagai pemenang, andai-kata Orde Lama dan Orde Baru dikompertisikan di dalam kegiatan memajukan bahasa nasional, oleh karena di dalam zaman Orde Baru di samping Kongres Bahasa Indonesia III yang dilangsungkan di Jakarta pada tahun 1978 pelbagai kegiatan yang lain seperti seminar, simposium, loka karya turut menandai Orde Baru. Peristiwa yang patut dicatat sebagai motor untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pembenahan bahasa Indonesia di dalam zaman Orde Baru ialah pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 1967. Di dalam pidato tersebut Kepala Negara mengajak seluruh bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan salah satu badan/lembaganya yang namanya telah berubah beberapa kali dan sekarang bernama "Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa" (disingkat "Pusat Bahasa") patut diberi acungan ibu jari (jempol) sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukannya di dalam rangka pembenahan bahasa Indonesia. Salah satu kegiatan yang patut digarisbawahi secara agak khusus ialah penyuluhan yang dilakukan antara lain melalui layar TV Stasiun Pusat Jakarta. Dengan segala kegiatan itu bangsa Indonesia diajak mengamalkan kesadaran nasional melalui salah satu unsurnya. Bukankah, seperti yang telah disinggung oleh psikolog-sosiolog HERTZ, bahasa nasional merupakan salah satu butir di dalam salah satu unsur kesadaran nasional? Dengan mengikrarkan niat menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda (Keramat) Pemuda menghayati posisi bahasa Indonesia di dalam kesadaran nasionalnya. Setelah penghayatan, pengamalannyalah yang perlu diamati. Sudah mantapkan hasil yang dicapai melalui pengamalan itu? Me-

mang cukup banyak kemajuan yang dapat dicatat sejak Pemerintah (d.h.i. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pusat Bahasanya) melancarkan kegiatan-kegiatan pembenaran. Namun, di samping hasil yang mengembirakan itu, menurut pendapat penyaji kertas kerja ini, kenyataan yang mengandung rasa prihatin masih belum dapat dilenyapkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih terlampau banyak orang Indonesia yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, sekalipun pengamat hanya membatasi diri pada aturan-aturan dasar/elementer tata bahasa. Semua lapisan masyarakat mulai dari yang terbawah sampai yang teratas di semua bidang kegiatan, kecuali mereka yang bergerak di bidang studi bahasa Indonesia, dihindangi kekurangan itu. Satu hal yang menyedihkan ialah sikap orang Indonesia yang suka mengemukakan alasan pemaaf bahwa bahasa Indonesia tokh sedang berkembang, apabila ada orang lain yang mengoreksi kesalahannya berbahasa Indonesia. Juga alasan pemaaf "salah kaprah" (hal yang salah, tetapi krena hampir semua orang melakukannya, sehingga seolah-olah harus dianggap "tidak salah") sering dikemukakan oleh orang-orang seperti itu. Setiap orang yang menguasai aturan bahasa Indonesia dengan kualifikasi "sedang" saja pasti menggelengkan kepala manakala ia membaca karya tulis siswa sekolah lanjutan atas atau mahasiswa. Kalimat yang mengandung kesalahan elementer bertebaran di dalam karya tersebut. Siaran-siaran radio, TVRI dan tulisan-tulisan di dalam media pers sampai detik ini masih diganggu oleh kesalahan di dalam penerapan aturan-aturan elementer itu. Kiranya baik apabila penyaji kertas kerja ini menampilkan beberapa contoh kalimat yang salah:

1. "Dengan⁺) pembukaan jembatan baru itu memungkinkan⁺) peningkatan kegiatan ekonomi di desa-desa yang tandus".
2. "Jumlah⁺) peserta yang berumur dua puluh tahun berjumlah⁺) lima ribu orang".
3. "Dalam⁺) upacara yang sederhana itu dihadiri⁺) juga oleh Gubernur".
4. "Penyerahan⁺) hadiah-hadiah perlombaan membaca puisi diserahkan⁺) oleh Direktur".
5. "Penandatanganan perjanjian antara Pem. R.I. dan Pem. Jepang masing-masing⁺) dilakukan oleh Dirjen dari pihak Indonesia dan dari pihak Jepang".

6. "Pada hari ini, tanggal 15 oleh⁺) saya, panitera pada Pengadilan Negeri atas perintah , akan melakukan⁺) pelelangan".

Catatan

Tanda +) menunjukkan letak kesalahan.

Masih cukup banyak jenis kesalahan yang dapat dibaca atau didengar setiap hari. Akan tetapi beberapa contoh di atas ini cukuplah sudah untuk keperluan penyajian kertas kerja ini. Kenyataan tersebut mengundang pertanyaan mengapa, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia berumur 38 tahun, kelemahan penguasaan bahasa Indonesia seperti yang diperlihatkan oleh contoh di atas belum juga lenyap? Apakah sebabnya? Di samping kemampuan yang menyedihkan seperti yang telah disinggung di muka ada satu hal lagi yang juga mengundang keprihatinan, ialah sikap yang menempatkan bahasa nasional tidak sebagai "tuan rumah" di negeri sendiri. Cukup banyak orang Indonesia yang takluk kepada sikap seperti ini yang merajalela di dalam diri mereka. Di dalam banyak hal mereka menempatkan bahasa Indonesia di bawah bahasa asing (khususnya bahasa Inggris). Secara populer sikap mereka itu dat disebut "keinggris-inggrisan". Di ibu kota dan di kota-kota besar yang lain di Indonesia bertebaran penggunaan kata atau istilah bahasa asing untuk hal-hal yang sebenarnya dapat disebut dengan kata atau istilah yang telah lama ada di dalam kosa kata bahasa Indonesia. Inilah beberapa contoh penggunaan kata atau istilah bahasa asing yang tidak pada tempatnya itu:

"JAYA FURNITURE", "RAPIH FURNITURE", "SARMIDI BARBER'S SHOP", "LELY'S BEAUTY SALON – FOR LADIES AND GENTS", "JATINEGARA BUILDING", "KWITANG BUILDING", "GLODOK BUILDING", "HARBOUR HEALTH CENTER", "KEBAYORAN COMMUNITY CENTER", "JATINEGARA YOUTH CENTER", "DIRJEN CUP".

Kenyataan bahwa praktek tersesat di dalam penggunaan kata bahasa asing seperti yang diperlihatkan oleh contoh di atas ini diikuti (dicontoh) mentah-mentah oleh daerah-daerah, melipatgandakan keprihatinan. Ada lagi sikap tersesat yang kadarnya, menurut pendapat penyaji kertas kerja ini, lebih tinggi daripada kadar ketersesatan yang dilukiskan di dalam contoh di atas. Ketersesatan yang kadarnya lebih tinggi ini mencukil pertanyaan tidakkah sikap tersebut memperlihatkan suatu erosi kesadaran nasional, dalam hal ini erosi yang datang dari salah satu unsurnya. Sikap seperti ini sering dipantulkan oleh iklan pencaharian tenaga yang mengisi halaman-halaman surat-

karbar. Pemasang iklan, ialah fihak yang mencari tenaga menyatakan dirinya sebagai perusahaan nasional. Tenaga yang dicarinya ialah orang/warga negara Indonesia. Tetapi bahasa yang digunakannya di dalam iklan itu bahasa Inggris. Alangkah ganjilnya! Apakah pemasang iklan itu mengira bahwa bahasa Inggris telah diangkat menjadi bahasa resmi kedua? Sungguh benar-benar tersesat perkiraan seperti itu. Apakah dengan kecaman yang dialamatkan kepada praktek tersesat di dalam penggunaan bahasa asing itu penyaji kertas kerja ini mengajak para peserta kongres menjauhi bahasa asing dan memusatkan perhatian hanya kepada bahasa nasional? Oh, jauh dari maksud seperti itu. Ia justru sangat senang melihat pemuda-pemuda giat belajar bahasa asing, sebab makin banyak bahasa asing dikuasai oleh orang-orang Indonesia pasti makin halus atau muluslah jalan yang mereka lalui untuk mencapai kemajuan. Akan tetapi gairah dan semangat belajar bahasa asing itu tidak boleh memojokkan atau menurunkan bahasa nasional ke posisi di bawah posisi bahasa asing. Oleh karena kenyataan dewasa ini masih diwarnai secara menyolok oleh kedua jenis kelemahan yang telah ditonjolkan di muka, yakni kelemahan yang dipantulkan oleh penggunaan bahasa Indonesia yang menyalahi aturan-aturan dasarnya yang sangat elementer dan kelemahan yang didemonstrasikan oleh sikap "kebahasa asing-asingan", maka tidaklah salah apabila orang mencatat bahwa dewasa ini, yakni sampai akhir PELITA III, bobot dan kadar pengamalan kesadaran akan posisi bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan nasional sangat tidak memadai.

Tantangan Repelita IV

Tema yang ditetapkan untuk Kongres Bahasa Indonesia IV ini berbunyi: "Dengan bahasa Indonesia sebagai sarana kita sukseskan pembangunan nasional". Setiap kali orang berbicara tentang pembangunan nasional, mau tidak mau ia pasti berbicara juga tentang PELITA yang sedang berjalan dan apabila PELITA yang sedang berjalan itu akan segera berakhir REPELITA lanjutannya pasti menjadi sasaran perhatiannya pula. Keadaan seperti inilah yang dewasa ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak lama lagi PELITA III akan berakhir dan kegiatan-kegiatan untuk menyusun REPELITA IV telah dimulai. Di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia BAB II kertas kerja ini telah melukiskan secara kualitatif hasil yang telah tercapai. Jelas, para penanggung jawab di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, dibantu oleh orang-orang lain yang berminat, menghadapi tantangan yang cukup berat di dalam REPELITA IV. Memang tugas pembinaan dan pengembangan itu meliputi pelbagai bidang kegiatan, misalnya bi-

dang pengajaran bahasa, bidang pembakuan aturan, bidang penyuluhan dan lain-lain. Akan tetapi menurut pendapat penyaji kertas kerja ini tanpa mengurangi arti bidang-bidang kegiatan yang lain, bidang kegiatan yang perlu dicurahi perhatian ekstra ialah bidang kegiatan yang memungkinkan rata-rata orang Indonesia di dalam waktu yang tidak terlalu lama menguasai bahasa Indonesia menurut aturan-aturan dasar/elementernya. Program jangka pendek dan jangka panjang yang lebih mantap perlu disusun. Di dalam penyusunan program ini perbaikan sistem pengajaran bahasa Indonesia di pelbagai lingkungan perlu diberi prioritas tinggi. Kegiatan penyuluhan pun perlu dilipatgandakan. Alangkah baik apabila di tiap-tiap lingkungan kerja ada sukarelawan-sukarelawan "polisi bahasa Indonesia". Setiap orang yang merasa memiliki pengetahuan sekadarnya tentang suatu aspek tertentu penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar wajib membantu orang lain yang sedang ada di dekatnya, apabila pada orang lain tersebut tampak kesalahan di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Hubungan atasan-bawahan tidak perlu dipermasalahkan di dalam kegiatan koreksi timbal balik ini. Si A yang kebetulan pada suatu aspek tertentu memiliki bekal yang lebih baik daripada bekal yang dipunyai B tanpa diminta harus mengoreksi B apabila B pada aspek tersebut tampil dengan hal-hal yang salah. Pada aspek tertentu yang lain si B lah yang harus mengoreksi A, oleh karena B memiliki bekal yang lebih daripada bekal yang dipunyai A. Meskipun A, misalnya, di dalam kedinasan berkedudukan lebih tinggi daripada B, kegiatan saling mengoreksi itu harus dapat dilakukan secara mulus. Pelafalan yang salah, misalnya "k a n" yang dilafalkan "k e n", "t e t a p" yang dilafalkan "t e t e p", "d a p a t" yang dilafalkan "d a p e t" patut dicatat sebagai salah satu mata acara di dalam putaran kegiatan koreksi timbal balik itu. Masih ada hal-hal lain yang dapat merindukan kehadiran tata bahasa Indonesia yang baku, kiranya tepat apabila di dalam penyusunan program tersebut pembakuan tata bahasa pun ditempatkan pada barisan terdepan. Mudah-mudahan dengan program yang lebih mantap dan lebih berbobot di dalam waktu yang tidak terlampau lama orang tidak akan membaca atau mendengar lagi kalimat seperti yang ditulis di bawah ini :

- a. "Harga eceran d a r i p a d a " bahan baku ini bervariasi dst".
- b. "Semua orang telah sibuk membantu M, k e s i b u k a n m a n a mengakibatkan dst".

Seperti yang diperlihatkan oleh kedua contoh di atas ini, kata "daripada" dan kata "mana" sering digunakan pada tempat yang salah. Sekali lagi, apa yang dikemukakan oleh penyaji kertas kerja ini (dengan menyertakan beberapa contoh) merupakan kenyataan yang menuntut percepatan/penanganan. Kalau penanganan ini tetap berlangsung menurut pola yang berlaku sampai saat ini, orang tidak boleh optimistis akan dapat mencapai hasil yang menggembirakan di dalam waktu yang singkat. Tidak kalah pentingnya dengan penyusunan program untuk memungkinkan rata-rata orang Indonesia di dalam waktu yang tidak terlalu lama menguasai bahasa Indonesia menurut aturan-aturan dasar/elementernya, pengikisan wabah yang sedang melanda sejumlah besar orang Indonesia yang daya tahannya rendah perlu diprogramkan serentak dengan program yang disebut pertama. Terapi kejuatan dengan penerapan sanksi yang serasi kiranya patut dipertimbangkan di dalam penyusunan program pengikisan wabah ini. Adapun yang dilukiskan sebagai wabah tak lain dan tak bukan kegandrungan tersesat kepada bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Pengikut sertaan pemuda di dalam program ini perlu dipertimbangkan secara serius. Pengalaman telah membuktikan bahwa pelbagai masalah yang mula-mula dipandang amat-amat sulit akhirnya terpecahkan juga setelah pemuda mendobraknya. Hendaknya kongres ini pada akhir sidangnya nanti dapat mengambil putusan yang berisi antara lain rekomendasi kepada pemerintah tentang program-program yang disarankan di atas.

Ringkasan dan Saran

1. Penyaji kertas kerja melihat pemberian kesempatan untuk menyumbangkan fikirannya sebagai suatu kehormatan yang perlu ditanggapinya sebaik mungkin.
2. Bahasa merupakan penopang kebudayaan suatu bangsa. Bahasa nasional merupakan salah satu butir penting di dalam satu unsur yang turut membentuk kesadaran nasional. Demikian pulalah posisi bahasa Indonesia terhadap bangsa Indonesia.
3. Kenyataan bahwa masih cukup banyak orang Indonesia yang tidak/ku-rang mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar menurut aturan-aturan dasar/elementer dan masih banyak orang Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia pada posisi di bawah posisi bahasa asing (khususnya bahasa Inggris) membuktikan bahwa bobot dan kadar

pengamalan kesadaran akan posisi bahasa Indonesia di dalam pembentukan bangsa dan pembentukan watak tidak memadai.

4. Repelita IV perlu diisi dengan program yang lebih mantap untuk menutup kekurangan-kekurangan yang masih menandai akhir PELITA III.

DAFTAR PUSTAKA

1. "MAX HAVELAAR" oleh E. DOUWES DEKKER – MULIATULI.
2. "NATIONAL SECURITY – Political, Military and Economic Strategies in The Decade Ahead" (terbitan FREDERICK A. Praeger – 1963 New York London).
3. "NATIONALITY IN HISTORY AND POLITICS" – FREDERICK HERTZ.
4. "INTERN ENCYCLOP OF THE SOCIAL SCIENCES" – COLLIER'S WILLIAM – VOL 11.
5. "INLEIDING TOT DE WETENSCHAP DER POLITIEK" – JI. BARRENTSZ.
6. "GRONDSLAGEN DER SAMENLEVING" – BOUMAN.

MARI KITA LAKSANAKAN CITA—CITA SUMPAH PEMUDA

Samsuri
IKIP Malang

Pengantar

Bagian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang menyatakan bahasa Indonesia dijunjung sebagai bahasa kesatuan bangsa Indonesia, merupakan suatu pemecahan masalah kebahasa-nasionalan yang cemerlang bagi kita, sekaligus menunjukkan betapa gandrungnya pendiri-pendiri Negara Republik Indonesia pada waktu itu akan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bahasa Indonesia itu diinginkan sebagai alat komunikasi antarsuku dan sekaligus alat kebudayaan yang tunggal. Pemecahan masalah bahasa kesatuan/persatuan itu demikian pentingnya, sehingga kita sekarang ini terlepas dari malapetaka perpecahan karena bahasa kesatuan/persatuan, seperti yang masih terdapat di berbagai negara, biarpun negara-negara itu telah lama mengenyam kebebasan politik.

Masalah bahasa memang merupakan hal yang sensitif, dan hal itu dapat dilihat pada berbagai peristiwa keguncangan politik karena soal bahasa (nasional). Di Filipina, yang dari jauh kelihatan tenang, di dalam negeri sendiri tidaklah demikian mengenai soal bahasa nasional itu. Suku-suku yang tidak berbahasa Tagalog, yang dijadikan bahasa nasional Filipina dengan nama Pilipino, baik secara terang-terangan maupun tidak banyak yang menyangsikan kebijaksanaan pemilihan bahasa itu sebagai bahasa nasional, dan mereka itu sering menyatakan bahwa bahasa Inggris cukup baik dipakai sebagai bahasa pemerintahan, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Di India tidak jarang terjadi huru-hara karena tiap daerah mempunyai bahasa daerah yang diresmikan sebagai bahasa resmi daerah itu di samping bahasa Hindi, biarpun bahasa Inggris masih tetap memegang peranannya sebagai alat komunikasi nasional. Bahasa Inggris di India telah demikian dalamnya tumbuh di masyarakat, sehingga orang-orang India sendiri mengandaikan sebuah bahasa Inggris dialek India, yaitu bahasa Inggris yang mereka pakai. Orang-orang Tamil,

umpamanya, mempertanyakan kelebihan bahasa Hindi atas bahasanya, yaitu bahasa Tamil, yang secara tertulis dan lisan mempunyai tradisi sastra yang sangat tinggi. Bahkan, dalam negara yang tampaknya mantap, seperti Kanada, masalah bahasa Perancis yang dianggap bahasa kedua di Kanada, sedangkan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama dalam komunikasi negara itu, sering menimbulkan perdebatan dan keributan politik di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya berbahasa Perancis. Demikian beberapa contoh masalah kebahasa-nasionalan di negara-negara yang kurang beruntung dibandingkan dengan negara kita.

Bahasa merupakan alat atau wahana kebudayaan, dan bahasa Indonesia ialah alat atau wahana kebudayaan Indonesia. Terdapat hubungan yang erat sekali antara perkembangan bahasa dan perkembangan kebudayaan yang diwahanainya. Dan dapat dinyatakan di sini bahwa bahasa dan pemakaiannya merupakan cermin kebudayaan itu. Yang menjadi masalah ialah bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang berkembang mengikuti perkembangan kebudayaan dari tahap yang satu ke tahap yang lain, seperti umpamanya bahasa Inggris, yang terus mengikuti perkembangan kebudayaan Inggris dari jaman primitif, melalui jaman kebangkitan dan berbagai jaman pra-industri, sampai pada jaman industri atau modern sekarang ini. Kebudayaan Indonesia sendiri seakan-akan muncul dan diinginkan sebagai kebudayaan modern dalam masyarakat modern dengan pendidikan tingginya, ilmu pengetahuan dan teknologi modern, pemerintahan modern, pendek kata seluruh kehidupan dalam masyarakat itu lebih banyak dipengaruhi oleh nalar daripada emosi. Karena bahasa Indonesia boleh dikatakan ditempel dari bahasa yang boleh dikatakan mewahanai kebudayaan pra-industri, khususnya pra-ilmiah, bahasa nasional kita benar-benar mempunyai misi yang berat, karena harus berkembang secara luar biasa, dapat menjadi alat kebudayaan modern dalam masyarakat modern. Beribu-ribu konsep baru harus diserap, di samping harus tegak sebagai bahasa Indonesia yang ditempel dari bahasa Melayu. Lagi pula, ber-puluh juta warga negara Indonesia tidak mendapat pendidikan bahasa Indonesia yang baik, sehingga di sini pun bahasa Indonesia menjadi "bulan-bulanan" pemakainya. Hal itu ditambah pula oleh keadaan masyarakat Indonesia yang secara psikologis tidak menguntungkan perkembangan bahasa Indonesia, yaitu bahwa masyarakat Indonesia cenderung tipis sekali disiplinnya. Pengaruh timbal-balik antara perkembangan kebudayaan dan bahasa Indonesia sangat merugikan perkembangan bahasa Indonesia sendiri.

Apabila kita berbicara tentang bahasa Indonesia seakan-akan kita hanya

menghadapi sebuah bahasa Indonesia saja, padahal sebenarnya ada beberapa bahasa Indonesia, atau berbagai dialek bahasa Indonesia, di samping bahasa Indonesia baku. Pada hemat kami, bahasa Indonesia baku ialah bahasa Indonesia yang dicita-citakan oleh Sumpah Pemuda, yaitu bahasa yang mempersatukan suku-suku yang terdapat di Indonesia menjadi sebuah bangsa, ialah bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bahasa Indonesia baku ialah Bahasa Indonesia yang dipakai oleh semua warga negara Indonesia, yang dalam komunikasi tidak atau sedikit mungkin menimbulkan salah paham. Oleh karena itu, bahasa Indonesia baku ialah bahasa Indonesia yang sedikit mungkin terpengaruh oleh bahasa Daerah dan bahasa asing, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan salah paham. Sebuah contoh. Seorang Jawa berasal dari Klaten, Jawa Tengah, datang ke Jakarta dan bertemu kawan lamanya, seorang yang berasal dari Ujung Pandang. Orang dari Klaten itu banyak urusannya di Jakarta, dan karena itu berkata kepada kawannya itu: "Besok saja saya datang ke rumahmu, karena sekarang ini saya masih sibuk." Keesokan harinya sang kawan lama dengan keluarganya mengelu-elukan kedatangan kawan dari Klaten itu, tetapi berapa pun lamanya ditunggu, kawan dari Klaten itu tidak kunjung datang hari itu. Orang Klaten itu bukanlah pembohong, tetapi karena bahasa Indonesianya memakai kata *besok* dengan pengertian bahasa Jawa 'kelak', terjadilah kerusakan komunikasi. Demikianlah pengaruh bahasa Daerah, yang mungkin kecil saja, dapat merusakkan komunikasi. Dan karena itu, kalimat yang dipakai orang dari Klaten itu tidak termasuk Bahasa Indonesia baku.

Mungkinbanyak orang Indonesia yang terpelajar tidak memperoleh pendidikan bahasa Indonesia secara formal, namun mereka sebagai warga negara Indonesia, dibebani kewajiban untuk sesegera mungkin menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada bahasa Indonesia maupun pada pemakaiannya. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu merupakan ciri warga negara Indonesia yang baik dan ciri orang Indonesia terpelajar, yang mempunyai tanggung jawab kesatuan dan persatuan bangsa. Di negara-negara yang telah berkembang, seperti Amerika Serikat atau Inggris, setahu kamisemua warga negara yang terpelajar mempunyai ciri penguasaan bahasa Inggris yang baku. Terlebih yang menduduki jabatan yang cukup tinggi mempunyai kewajiban untuk memakai bahasa Inggris yang baku dan baik. Pada hemat kami, kewajiban semacam itu terlebih lbagi diletakkan pada kita sebagai warga negara yang sedang berkembang untuk menguasai bahasa Indonesia baku. Kita mestilah mempunyai kebanggaan untuk menguasai dan menggunakan bahasa

Indonesia baku, sebagai alat komunikasi yang mengacu ke kebudayaan nasional, di samping penguasaan kita akan bahasa Indonesia yang tidak baku. Hal-hal yang dijelaskan di atas ini semua adalah imperatif-imperatif, hal-hal yang seharusnya kita lakukan dalam masyarakat kita yang sedang membangun ini. Tetapi, bagaimana kenyataannya?

Penguasaan dan Penggunaan Bahasa Indonesia

Secara kebahasaan (kontrastif) tidak ada alasan bagi orang-orang Indonesia untuk tidak menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perbedaan struktural antara bahasa-bahasa Daerah dan bahasa Indonesia tidaklah benar seperti, umpamanya, perbedaan antara bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, baik dalam bidang fonologi, pembentukan kata, maupun bidang tata kalimat. Beberapa contoh adalah sebagai berikut. Ucapan kata-kata *akan*, *datang*, dan *menerangkan* kiranya dapat dilakukan dengan baik oleh siapa pun, termasuk anak-anak di sekolah taman kanak-kanak. Tetapi, alih-alih ucapan yang sederhana seperti kata-kata di atas, orang-orang Indonesia tertentu mengucapkannya sebagai *aken*, *dateng*, dan *menerangken*, yang mengingatkan kita akan ucapan bahasa Indonesia yang dipakai dalam suasana tertentu, umpamanya di pasar, jadi bukanlah bahasa Indonesia baku. Kami menyadari bahwa pengaruh ucapan bahasa Daerah memang besar, namun tidaklah sedemikian besarnya sehingga kita tidak dapat mengucapkan bunyi-bunyi Bahasa Indonesia itu sesuai dengan kaidah-kaidah fonologi Bahasa Indonesia. Jika orang-orang yang mengucapkan kata-kata di atas sebagai *aken*, *dateng*, dan *menerangken* dapat mengucapkan kata *makan*, *sarang*, *merayakan*, jadi sesuai dengan kaidah-kaidah fonologi bahasa Indonesia, sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka itu mengucapkan kata-kata di atas menyimpang dari kaidah-kaidah fonologi bahasa Indonesia.

Demikian pula dalam bidang tata bahasa, sebenarnya perbedaan antara bahasa Daerah dan bahasa Indonesia tidaklah besar, biarpun memang ada. Dan dengan sedikit usaha di pihak pemakai bahasa Indonesia, kami yakin bahwa pemakai bahasa Indonesia dapat dengan mudah menguasai tata bahasa Indonesia dengan baik. Pembentukan kata-kata seperti *menerapkan* dan *penerapan* dari kata *terap*, umpamanya, tidaklah di luar kemampuan pemakai bahasa Indonesia pada umumnya, sehingga orang tidak perlu geleng-geleng melihat bentukan *mentrapkan* atau *mengetrapkan*, dan *pentrapan* atau *pengetrapan*, karena pemakai bahasa Indonesia pada umumnya dengan mudah dapat membentuk kata-kata *menerangkan* dan *penerangan*, dari kata *terang*, dan bukanlah *mentrangkan* atau *mengetrangkan*, dan *pentrangan* atau *penge-*

trangan. Demikian pula pembentukan kalimat-kalimat sederhana seperti 1-3 di bawah ini :

- (1) Dengan Tim Penyusun yang baru tersebut menghasilkan beberapa perubahan antara lain : 1)
- (2) Kepada peserta dikenakan biaya pameran sebesar 350.000 rupiah.¹⁾
- (3) Kita harus berusaha memperbesar terhadap peningkatan ekspor komoditi non-BBM.¹⁾

mestinya dapat dikerjakan tanpa kesukaran dan kesalahan, karena kebanyakan struktur bahasa Daerah tidak berapa berbeda dari struktur Bahasa Indonesia. Alih-alih kalimat 1 - 3 di atas, pemakai Bahasa Indonesia dapat dengan mudah mengatakan (menuliskan) :

- (1a) Tim Penyusun yang baru tersebut menghasilkan beberapa perubahan, antara lain-lain :
- (2a) Peserta dikenakan biaya pameran sebesar 350.000 rupiah.
- (3a) Kita harus berusaha memperbesar peningkatan ekspor komoditi non-BBM

Mungkin dalam bahasa lisan terdapat pengucapan kalimat-kalimat 1 - 3 di atas, karena dalam bahasa lisan orang mudah membuat kesalahan kecil seperti kerancuan atau kontaminasi, pemakaian kata depan yang kurang tepat, dan lain sebagainya. Tetapi, kalimat-kalimat yang kami kutip di atas berasal dari majalah dan siaran TVRI, yang dibacakan oleh seorang pejabat. Dengan kata lain, ketiganya adalah kalimat-kalimat tertulis, sehingga kesalahan kecil seperti di atas dapat dengan mudah dihindarkan.

Mungkin ada di antara kita yang berpikir, bahwa kemungkinan penulis-penulis kalimat-kalimat di atas itu kurang berpendidikan. Baiklah kami ambilkan beberapa kalimat yang kami kutip dari laporan akhir penelitian berbagai sarjana yang mengajar di perguruan tinggi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti berikut :

- (4) Pada bagian di atas (III - IV) memberikan gambaran betapa pentingnya peranan Kanjeng Panembahan Cokrodiningrat.

- (5) Dalam masyarakat yang sedang berkembang ada kecenderungan memiliki tingkat fertilitas yang tinggi.
- (6) Dua aliran besar yang mendominasi pemikiran sosiologi modern, yaitu aliran fungsional dan aliran konflik, saling memiliki kelemahan di samping kekuatannya masing-masing.

Pada kalimat (4) terdapat kelebihan kata depan *pada*; pada (5) dapat diselipkan kata *bahwa penduduk* di antara kata *kecenderungan* dan kata *memiliki*, atau terdapat kelebihan kata depan *dalam* diganti kata *ada* dengan awalan *ber*; sedangkan pada (6) kata *saling* perlu diganti dengan kata *sama-sama*. Tampaklah kesalahan-kesalahan kecil sebenarnya, tetapi karena pemakaian pemakaiannya adalah sarjana-sarjana kesilapan itu menjadi sangat besar.

Namun demikian, hendaklah kita ingat bahwa penulisan sebuah karangan, betapapun pendeknya, tidak hanya berurusan dengan pembentukan kata-kata dan kalimat-kalimat saja. Dari bacaan kami yang berupa laporan-laporan akhir penelitian yang dihasilkan oleh Proyek Penelitian Madura, yang kami koordinasikan, terdapat kekeliruan tentang penggunaan kata depan, pembentukan kata dan kalimat, sampai pada soal-soal verbositas, tautologi, dan lain sebagainya. Apabila Dr. Sunardji dalam disertasinya, *Pengajaran Mengarang di SMP*, menganjurkan perbaikan-perbaikan, kami terpaksa berpendapat, bahwa pelajaran mengarang di perguruan tinggi masih diperlukan sekali.

Perlu kami nyatakan di sini, bahwa dari pengamatan kami tentang penggunaan bahasa Indonesia pemakaian bahasa nasional kita mengalami kenaikan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang pertama dapat dilihat pada pemakaian bahasa Indonesia oleh rakyat kita di desa-desa dan ditambahnya penerbitan majalah dan koran baru selama lima tahun terakhir ini. Adapun peningkatan kualitas dapat dilihat pada penggunaan bahasa Indonesia yang relatif baik dalam majalah-majalah dan surat kabar-surat kabar. Majalah TEMPO, umpamanya, menggunakan bahasa Indonesia yang cukup baik. Demikian juga majalah OPTIMIS, biarpun editorialnya kadang-kadang memakai bahasa Indonesia yang kami kualifikasikan sebagai *kolokial*, karena memakai kata-kata seperti *lha*, *sepertinya*, *repotnya*, *yang namanya*, yang merupakan pungutan (terjemahan) dari bahasa Jawa. Rupanya media massa kita telah sadar, bahwa pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu sekali bagi pembinaan penguasaan bahasa Indonesia oleh rakyat kita, khususnya yang belum pernah memperoleh pendidikan bahasa Indonesia

yang baik. Namun, kami tidak dapat menerangkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia oleh RRI dan TVRI, karena kecuali kami tidak selalu mengikuti karena program-programnya tidak menarik, kami tidak mempunyai data observasi yang cukup. Hanya bahasa Indonesia yang dipakai oleh penyiar-penyiar, khususnya pembaca-pembaca berita, kami rasa masih perlu ditingkatkan. Bentuk kalimat-kalimat, seperti pemakaian kata depan *terhadap*, *daripada*, dan lain-lain yang keliru, ucapan dan khususnya intonasi sangat kurang menunjukkan bahasa Indonesia yang baku.

Apabila penggunaan bahasa Indonesia dalam majalah-majalah dan koran-koran (tertentu) boleh dikatakan cukup baik, bagaimana penggunaan bahasa nasional kita dalam bidang lain? Memang agak mengejutkan bahwa ternyata penggunaan bahasa Indonesia oleh kebanyakan sarjana kita masih kurang baik. Paling tidak dari laporan-laporan akhir penelitian dan dari makalah-makalah seminar yang diadakan oleh Proyek Penelitian Madura, kami terpaksa menyimpulkan hal di atas. Tentulah dapat diperdebatkan, apakah data yang kami miliki itu mewakili penguasaan bahasa Indonesia para sarjana seluruh Indonesia. Dan kami sendiri ingin menjawab, mudah-mudahan tidak, karena kami ingin sekali sampai pada suatu kesimpulan, bahwa bahasa Indonesia para sarjana Indonesia benar-benar dapat dibanggakan. Hal ini ada sangkut-pautnya dengan tugas para sarjana di perguruan tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila bahasa yang dipakai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak baik, bagaimana kita dapat mengharapkan pertumbuhan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kita?

Kami agak masgul melihat penggunaan bahasa Indonesia oleh para pejabat pada umumnya, yang diwawancarai TVRI dan disiarkan melalui media masa itu. Tampak dengan nyata penguasaan bahasa Indonesia lisan pejabat-pejabat itu kurang baik. Dengan sengaja hal ini tidak banyak kami kemukakan, karena data bahasa para pejabat itu tidak dapat kami peroleh, tetapi seandainya pernyataan kami itu dibantah, sebenarnya dengan mudah kita dapat menyaksikan penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik itu, khususnya pada Siaran Berita jam tujuh malam, yang oleh beberapa orang disebut "Siaran Pejabat", karena TVRI selalu mengemukakan berita-berita mengenai pejabat-pejabat, dari Presiden, melalui para Menteri dengan Dirjen-Dirjennya, sampai dengan para Gubernur. Pemakaian bahasa Indonesia yang kurang membanggakan itu merangkum pula pembacaan "laporan keberhasilan tugas", jadi penggunaan bahasa Indonesia tulisan, oleh para pejabat itu. Apabila apa yang kami lihat itu betul, yaitu bahwa contoh yang

diberikan oleh kebanyakan pejabat tinggi dan oleh kebanyakan cerdik pandai kita dalam pemakaian bahasa Indonesia itu kurang membanggakan, kami takut bahwa apa yang biasa disebut dengan "generasi penerus" tidak dapat memetik contoh kedisiplinan yang tinggi dalam penggunaan bahasa Indonesia, dan penguasaan "generasi penerus" akan bahasa Indonesia itu kelak malahan lebih buruk.

Hal yang mengecewakan di atas itu tentang penguasaan bahasa Indonesia tidak dikurangi oleh masih banyaknya orang-orang Indonesia yang suka memasukkan kata-kata asing dalam bahasa Indonesia mereka, biarpun kata-kata dan konsep-konsepnya dalam bahasa Indonesia terdapat pula. Keadaan itu lebih diperburuk oleh penggunaan kata-kata, nama-nama, dan semboyan-semboyan dari bahasa asing, seperti dari bahasa Sangskrit, yang jelas menunjukkan ketidak-nasionalan. Kita hendaknya ingat, bahwa pemakaian kata-kata, nama-nama, dan semboyan-semboyan dalam bahasa Indonesia akan jauh merasuk ke dalam hati sanubari kita daripada kata-kata, nama-nama, dan semboyan-semboyan asing yang tidak kita pahami itu. Hal itu semua memang menyangkut sikap masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia dan penggunaannya, yang akan kami uraian di bawah ini.

Sikap Masyarakat Indonesia terhadap Bahasa Indonesia

Telah kami jelaskan bahwa terdapat hal-hal yang menggembirakan pada pemakaian bahasa Indonesia, baik secara kuantitatif, yaitu dengan peningkatan jumlah pemakai bahasa nasional kita, khususnya di desa-desa, maupun secara kualitatif, yaitu dengan peningkatan disiplin dalam menerapkan kaidah-kaidah pemakaian bahasa Indonesia baku, khususnya oleh majalah-majalah dan koran-koran tertentu. Sayangnya masih terdapat lebih banyak sektor masyarakat kita yang penguasaan dan penggunaannya akan bahasa nasional kita belum dapat dibanggakan. Jelas kiranya bahwa hal itu mencerminkan sikap masyarakat kita yang kurang positif terhadap bahasa Indonesia baku dan pemakaiannya.

Kita ketahui bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional termasuk salah satu bagian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan yang jelas sejelas-jelasnya diinginkan agar bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempersatukan berbagai suku bangsa menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Namun demikian, dalam GBHN tahun 1978 maupun tahun 1983 tidak terdapat bahasa Indonesia sebagai unsur penting Wawasan Nusantara, sedangkan Wawasan Nusantara pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat persatuan/kesatuan kita.²⁾ Hal itupun merupakan cermin pula

betapa sikap masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Jika wakil-wakil rakyat yang terhormat tidak lagi merasa perlu untuk memakai bahasa Indonesia sebagai simpai persatuan dan kesatuan kita, dapatkah kita mengharapkan masyarakat Indonesia akan menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta menggunakannya sesuai dengan kaidah-kaidahnya?

Dalam keadaan kebudayaan kita, baik bidang politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, administrasi, keamanan, dan lain sebagainya berjalan dengan disiplin yang minim, mau tidak mau alatnya, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan pemakaian yang setara pula, yaitu dengan disiplin yang minim. Yang menjadi masalah dalam penggunaan bahasa Indonesia sekarang ialah dapatkah kita biarkan apa yang biasa disebut dengan "generasi penerus" mewarisi nilai ini, yaitu kedisiplinan pemakaian bahasa Indonesia yang rendah, dari apa yang biasa disebut dengan "generasi perinstis"? (yang sebenarnya merupakan konsekuensi saja dari rendahnya disiplin kehidupan kita pada umumnya!). Penggunaan bahasa oleh anak-anak kita tidak dapat "keluar" dari penggunaan bahasa dalam masyarakat, yang merangkum keluarga, sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Di sekolah mungkin ibu dan bapak guru berusaha meningkatkan dan membina pemakaian bahasa murid-muridnya, tetapi waktu di luar sekolah pemakaian bahasa itu tidak lagi dikendalikan oleh para guru, sehingga mau tidak mau bahasa yang dipakai oleh murid-murid itu tidak (jauh) berbeda dari bahasa yang dipakai oleh masyarakat umum. Hal itu akan demikian, jika semua guru menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetapi jika hanya guru-guru bahasa Indonesia saja yang menguasai bahasa nasional kita dengan baik dan benar, maka akibatnya akan lebih buruk lagi bagi penguasaan bahasa Indonesia oleh murid-murid, sebab hanya dalam jam-jam pelajaran bahasa Indonesia saja anak-anak kita menggunakan bahasa nasional dengan baik dan benar, sedangkan waktu selebihnya penggunaan bahasa Indonesia mereka tidak terkendalikan dan memakai dan meniru bahasa yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya.

Seperti kami uraikan di atas, dari laporan-laporan akhir penelitian sarjana-sarjana di perguruan tinggi di Jawa Timur dan Jawa Tengah kami mendapat gambaran bawa penguasaan bahasa Indonesia oleh kebanyakan dosen-dosen kita di perguruan tinggi tidak dapat dikatakan menggembirakan. Pertanyaan yang segera timbul ialah, bagaimana dengan bahasa Indonesia para mahasiswa kita? Kami hanya mendengar dari rekan-rekan yang biasa membimbing penulisan tesis atau skripsi, bahwa bahasa Indonesia para mahasiswa kurang baik, dan karena itu mata kuliah mengarang mesti diberikan, tidak

saja di tingkat pertama, melainkan sebaiknya selama pendidikan mereka di perguruan tinggi itu. Sikap kebanyakan dosen dan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia dan pemakaiannya mestilah diubah, jika masyarakat kita menginginkan melepaskan diri dari ketidak-bebasan dari dunia luar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka itu hendaklah sadar benar bahwa penguasaan bahasa Indonesia merupakan *conditio sine quanon* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang dibebankan oleh GBHN pada perguruan tinggi. Jalan menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia hanya satu, yaitu pengetahuan dan teknologi di Indonesia hanya satu, yaitu melalui penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang dapat mengumpulkan pengetahuan yang berlimpah-limpah melalui bahasa asing, tetapi bagaimana mengembangkannya di Indonesia?

Bagaimana sikap para orangtua terhadap bahasa Indonesia dan penggunaannya kami tidak dapat berbicara, karena kami tidak mempunyai data tentang hal itu, atau tidak pernah mengadakan observasi tentang sikap orangtua Indonesia terhadap bahasa Indonesia dan penggunaannya. Orangtua yang masih berpegang teguh pada kebudayaan daerah agaknya akan menghendaki putera-puterinya untuk memakai bahasa daerah, alih-alih bahasa nasional, dan karena itu penggunaan bahasa Indonesia akan terlihat sangat sedikit dalam keluarga-keluarga seperti itu. Namun, karena koran-koran banyak yang dicetak dalam bahasa Indonesia, ada kemungkinan anak-anak dalam keluarga seperti di atas itu masih menggunakan bahasa Indonesia, biarpun secara pasif. Di samping itu media masa yang lain, yaitu RRI dan TVRI, akan memainkan peranannya pula dalam memberi kesempatan kepada anak-anak di rumah untuk mendengarkan bahasa Indonesia. Warga negara yang modern akan menguasahkan penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang seimbang di rumah, dalam arti diskusi-diskusi yang mungkin diadakan di keluarga diadakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan hal-hal yang boleh dikatakan bersifat kebudayaan daerah dibicarakan dalam bahasa daerah. Untuk mengetahui lebih tepat lagi memang diperlukan penyelidikan sosiolinguistik tentang pemakaian bahasa di keluarga-keluarga di Indonesia. Dalam hal ini, khususnya untuk membina penguasaan bahasa Indonesia di dalam keluarga, peranan buku-buku dalam bahasa Indonesia sangat penting. Dan sekaligus kebiasaan membaca dapat dipupuk dengan baik, yang merupakan modal dalam menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi.

Harapan-harapan.

Sebenarnya kita boleh mengucapkan syukur bahwa media masa yang penting, yaitu majalah dan koran, telah sadar akan fungsinya dalam memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengingat luasnya daerah penyebaran koran dan majalah itu, kita boleh menilai, bahwa kira-kira sepertiga dari masalah kita telah terpecahkan. Apabila pada waktu yang sama RRI dan TVRI mengikuti contoh yang baik itu dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula, kita dapat mengatakan bahwa 50% masalah penguasaan bahasa Indonesia dapat dipecahkan. Mudah-mudahan Departemen Penerangan dengan menterinya yang masih muda dan sangat gesit itu segera mengikuti jejak majalah dan koran kita. Apabila BBC di Inggris dapat menghadirkan bahasa Inggris yang bagus melalui penyiar-penyiarinya, pembaca-pembaca warta beritanya, melalui wartawan-wartawannya yang terkenal berbahasa Inggris yang bagus dan bersih dari kesalahan, sehingga akhirnya dianggap oleh umum bahwa bahasa Inggris baku ialah bahasa Inggris BBC, tentulah Departemen Penerangan kita dapat berbuang yang sama dalam memelihara penggunaan bahasa Indonesia, yang tidak saja baik dan benar, tetapi juga bagus. Siapa tahu, bahwa kelak masyarakat kita sampai ke kesimpulan bahwa bahasa Indonesia baku ialah bahasa Indonesia Departemen Penerangan?

Bagaimana dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kita? Tentulah kita akan merasa "risi", jika seandainya jajaran DEPDIKBUD (Masyaallah!) akan ketinggalan dalam memelihara disiplin penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika demikian, lalu masyarakat akan bertanya, apa gunanya DEPDIKBUD memelihara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Maafkan, kami tidak tahu akronimnya!)? Kami harapkan, agar paling tidak para guru (SEMUA guru, dan tidak hanya guru bahasa Indonesia) dan para dosen (TERMASUK dosen bahasa Indonesia!), serta semua pejabat, dari Menteri DEPDIKBUD sampai ke kepala-kepala sekolah dasar, dan dari rektor sampai ke ketua-ketua jurusan, tidak saja menggunakan Bahasa lisan, tetapi juga bahasa Indonesia tulisan yang baik dan benar. Jika hal itu tercapai, kami yakin bahwa para murid dan mahasiswa, yang merupakan apa yang disebut dengan "generasi penerus", akan mengikuti jejak "generasi perintis" untuk memiliki disiplin pemakaian bahasa Indonesia yang setinggi-tingginya. Hanya dengan demikian kita dapat nanti mengatakan bahwa pekerjaan pendidikan kita berhasil, biarpun baru dalam bidang pendidikan penguasaan bahasa Indonesia baku saja.

Yang berikut ialah dalam bidang politik, yaitu pemerintahan dan perwa-

kilan rakyat. Dari Presiden sampai dengan Lurah di seluruh Indonesia orang mestilah memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Para Menteri dan seluruh jajarannya sampai eselon yang serendah-rendahnya, pendek kata seluruh aparatur pemerintahan, mesti menerapkan disiplin yang tinggi dalam penggunaan bahasa Indonesia baku, mungkin sebagai latihan untuk menerapkan disiplin dalam berbagai bidang tugas mereka. Di balik itu, kadar tinggi-rendah disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia baku akan menunjukkan ketinggian disiplin mereka dalam berbagai tugas mereka. Demikian pula para wakil rakyat yang terhormat di MPR dan DPR, baik pusat maupun daerah I dan II, semuanya mesti menjadi contoh bagi yang mewakilinya dalam disiplin mereka untuk memakai bahasa Indonesia baku, agar dengan mudah dicontoh oleh para rakyat yang memerlukan teladan bagaimana membangun tanahair dan bangsa ini, termasuk pembangunan bahasa nasional yang tidak boleh dilupakan seumur hidupnya. Pidato-pidato para wakil rakyat yang terhormat mestilah dalam bahasa Indonesia baku, sesuai dengan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia dan sesuai dengan santun bahasa Indonesia.

Mungkin ada orang yang bertanya, apa yang diperlukan, informasi yang jelas biarpun bahasa Indonesianya kurang, atau bahasa Indonesia yang baik, tetapi informasinya yang kurang jelas? Jawaban kami: Kita sampaikan informasi yang benar dan jelas dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti telah kami singgung di atas, bahasa Indonesia ada beberapa ragamnya. Kaidah-kaidah santun bahasa ialah penggunaan bahasa sesuai dengan situasi wacana. Pada waktu seorang Dirjen menjelaskan masalah kepada orang-orang desa atau kepada orang-orang di pasar, situasinya berbeda dengan sang Dirjen itu memberi keterangan kepada para mahasiswa di sebuah kampus. Dalam keadaan begitu sang Dirjen mestilah tahu memakai bahasa yang mana. Tetapi kelirulah dia apabila dalam dua situasi yang berbeda itu sang Dirjen memakai bahasa Indonesia yang sama saja.

Kami kira tidak perlu kami jelaskan bahwa peningkatan disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menyangkut seluruh rakyat, khususnya yang telah mengenyam pendidikan, baik formal maupun non-formal. Kita mesti selalu ingat pemeo: Bahasa menunjukkan bangsa. Artinya, orang dapat dilihat tinggi-rendah budi pekertinya dari bahasa yang dipakainya. Bahasa seorang pejabat yang tinggi tentulah berbeda dari bahasa seorang gelandangan. Namun demikian, Sumpah Pemuda tahun 1928 ditujukan kepada semua rakyat Indonesia, yang amanatnya ialah: **PAKAILAH BAHASA**

gelandangan. Namun demikian, Sumpah Pemuda tahun 1928 ditujukan kepada semua rakyat Indonesia, yang amanatnya ialah: **PAKAILAH BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR, KARENA BAHASA INDONESIA IALAH PEMERSATU BANGSA!**

CATATAN—CATATAN

- (1) Dua kalimat pertama ini kami ambil dari majalah **OPTIMIS**, No. 43, Agustus 1983, sedangkan yang ketiga ialah sebuah berita dari TVRI.
- (2) Surat kami bertanggal 12 April 1983 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mengingatkan tidak termuatnya bahasa Indonesia dalam GBHN tahun 1978 sebagai unsur penting Wawasan Nusantara, dan reformulasi kami tentang pasal 1, b dan 2, b dalam Wawasan Nusantara, untuk juga menunjukkan erat hubungan antara bahasa Indonesia, sebagai alat kebudayaan, dan Kebudayaan Indonesia, termasuk bidang politik, dijawab oleh Sekretaris Jenderal MPR dengan suratnya 18 April 1983, yang menyatakan bahwa saran kami akan diteruskan kepada Badan Pekerja MPR yang akan bertugas menyusun Rancangan Ketetapan MPR tentang GBHN Periode 1988 — 1993 yang akan datang.

BACAAN PILIHAN

Harimurti Kridalaksana, 1974, *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*, Kumpulan Karangan, Penerbit Nusa Indah, Percetakan Arnoldus, Ende-Flores.

Pride, J.B. and Janet Holmes (Eds.), 1972, *Sociolinguistics*, khususnya Part Two, "Standard Language and National Language", pp. 95 - 155, dan Part Three, "Dialect and Stylistic Variation", pp. 157 - 251, dan Part Four, "Acquisition and Proficiency", pp. 267 - 366., Penguin Books.

BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH DILIHAT DARI SEGI SOSIOPOLITIKOLINGUISTIK

Jos. Daniel Parera
IKIP Jakarta

Pendahuluan

Kenyataan akan adanya beberapa bahasa atau kelompok bahasa dalam suatu daerah geografis atau dalam satu ikatan persatuan berbentuk negara akan membawa problem dalam daerah dan persatuan itu sendiri. Problem itu memerlukan pemecahan dan pengambilan kebijaksanaan yang tepat untuk memelihara antar hubungan yang baik dan wajar di antara para penutur bahasa-bahasa tertentu itu. Problem dan tindakan kebijaksanaan yang dihadapi dapat dibedakan atas :

- (1) Problem dan tindakan politik : Pada satu saat diperlukan satu tindakan untuk menhadapi problem nasional dalam soal komunikasi berbahasa. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas ditentukan salah satu di antara pelbagai bahasa yang hidup dalam daerah kesatuan itu menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional dan atau bahasa resmi. Tindakan ini tergolong dalam tindakan politik. Dalam uraian selanjutnya akan tampak bagaimana tindakan politik dalam soal bahasa ini dilaksanakan berdasarkan beberapa pertimbangan dan dengan pelbagai cara.
- (2) Problem dan tindakan sociolinguistik : Berdasarkan tindakan politik tersebut di atas maka akan ada dan terjadi pergeseran sosial dalam berbahasa sebagai kelanjutan dari perbedaan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan agama para pendukung bahasa-bahasa tersebut di atas itu. Tindakan politik juga berdasarkan tingkah laku sosial masyarakat berbahasa antar sesamanya. Uraian penulis selanjutnya akan menjelaskan maksud daripada problem dan tindakan sociolinguistik ini.
- (3) Problem dan tindakan linguistik : Kenyataan adanya beberapa bahasa

dalam satu daerah geografis atau satu bentuk kesatuan negara akan membawa pula problem linguistik atau bahasawi. Adanya variasi bahasa dan pemakaian dalam tutur sebagai hasil interferensi dan juga sebagai satu dorongan naluri untuk menyesuaikan diri dalam tindakan berbahasa antara sesama kelompok yang berbeda bahasa.

Keseluruhan tindakan dalam menghadapi problem tersebut di atas kami satukan dengan pengertian Sosiopolitiklinguistik. Dan pembicaraan mengenai masalah ini akan lebih berat kepada soal sosial-politik daripada pada soal linguistik. Problem dan tindakan tersebut di atas kiranya telah menjadi kenyataan pula di Indonesia. Walaupun bangsa dan negara Indonesia belum selesai dan belum seluruhnya menjamah problem dan mengambil tindakan tersebut di atas, namun situasi Indonesia terasa lebih menguntungkan daripada negara yang sedang berkembang lainnya, termasuk negara bangsa tetangga Indonesia.

Salah satu warisan sosial dan politik yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah sikap patriotik dan penuh kesadaran serta toleransi dari para pejuang bangsa dalam menentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional, bahasa Persatuan dan bahasa Resmi Republik Indonesia. Dan untuk itu kedudukan bahasa Indonesia mendapatkan hak juridis, politik utama dan pertama dengan pengukuhan dalam pasal 36 UUD 1945. Kendati pun demikian warisan patriotik dan toleransi sering terganggu dan dirasakan belum teguh benar. Untuk beberapa waktu lamanya para pembina dan peminat sosiopolitik masih enggan dan waswas membicarakan secara pasti dan bertanggung jawab hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Daerah di Republik Indonesia. Terkaitlah sudah bahasa dan bangsa, bahasa dan suku, bahasa dan daerah. Pembicaraan dan pembahasan secara linguistik sudah sering diadakan dan sering menjadi objek yang baik bagi para linguist akan tetapi setiap demi setiap kelihatan penghindaran dari pembicaraan yang menyangkut masalah hubungan secara sosial dan politik. Patriotisme dan Toleransi Angkatan 45 belum terwaris secara dalam pada generasi penerus.

Penulis berpendapat bahasa keberanian dan kesepakatan menghadapi problem dan tindakan sosial politik para pejuang bangsa yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 36 dan penyelesaiannya perlu dibina dan dikembangkan terus. Dan pembicaraan hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Daerah sebagai problem dan tindakan kebijaksanaan yang ditempuh didasarkan dan didorong oleh keberanian yang dimiliki oleh para pejuang bangsa, didasar-

kan pula pada rasa persatuan dan kebangsaan bangsa Indonesia. Ada kemauan politik.

Hal lain yang perlu penulis kemukakan pula dalam pendahuluan ini ialah pembicaraan mengenai problem dan tindakan pengisian pasal 36 UUD 1945 harus dimasalahkan dan dibicarakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia memasalahkannya dalam satu nafas dan satu kerangka, ialah persatuan bangsa. Bangsa Indonesia membicarakan hubungan bahasa Indonesia dan bahasa Daerah dengan tujuan persatuannya dan ia bertanggung jawab atas persatuan itu sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai commitment terhadap persatuan dan bangsanya. Kami kemukakan persoalan ini berdasarkan pada pengalaman bahwa sering orang asing secara teoritis membicarakannya pula. Orang asing menghadapi masalah ini sebagai objek ilmu belaka.

Orang asing/sarjana asing tidak terlibat dalam persatuan bangsa. Para sarjana asing akan membicarakannya dari sudut ilmu dan kurang mempunyai motivasi bangsa Indonesia yang tertentu, dan malah mungkin bertentangan dengan tujuan pembicaraan bangsa Indonesia sendiri. Penulis kemukakan ini karena hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Daerah di Indonesia bukanlah hubungan antara mayoritas dan minoritas. Bangsa Indonesia bukanlah berasal dari bahasa golongan atau suku mayoritas. Di sinilah letak keunikan hubungan bahasa Indonesia dan bahasa Daerah. Dapat penulis katakan bahwa hubungan bahasa Indonesia dan bahasa Daerah adalah hubungan batiniah, hubungan antara persatuan bangsa dan kebangsaan Indonesia.

Landasan Hukum

Untuk memberikan dasar hukum dan dasar persatuan bagi tindakan politik dalam hubungan bahasa Indonesia dan bahasa Daerah di Indonesia, penulis kutip pasal yang berhubungan dengan itu dalam UUD 1945; kami kaitkan dengan apa yang dikatakan tentang itu dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lalu penulis berikan komentar.

(1) Bunyi pasal 32 UUD 1945.

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Penyelasan :

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju

ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

2) Bunyi Pasal 36 UUD 1945.

Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia.

Penjelasan :

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan.

(3) GBHN, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, mengenai KEBUDAYAAN NASIONAL.

(a) Meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional untuk memperkuat kepribadian bangsa, kebangsaan nasional dan kesatuan nasional, termasuk menggali dan memupuk kebudayaan Daerah sebagai unsur-unsur penting yang memperkaya dan memberi corak kepada kebudayaan nasional.

(b) Membina dan memelihara tradisi-tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta ke-manfaatan nasional untuk mewariskan kepada generasi muda.

(c) Pembinaan Kebudayaan nasional harus sesuai dengan norma-norma Pancasila.

Disamping itu untuk mencegah tumbuhnya nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal, juga ditujukan untuk menanggulangi Pengaruh Kebudayaan asing yang negatif serta di lain pihak cukup memberikan kemampuan masyarakat untuk menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan, selama tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa.

Di samping itu untuk mencegah tumbuhnya nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal, juga ditujukan untuk menanggulangi Pengaruh Kebudayaan asing yang negatif serta di lain pihak cukup memberikan kemampuan masyarakat untuk menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan

dalam proses pembangunan, selama tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa.

(d) GBHN, Tap MPR Nomor II/MPR/1983, tentang Kebudayaan.

- (1) Nilai Budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa, harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan.
- (2) Kebudayaan nasional terus dibina dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila.
- (3) Dengan tumbuhnya kebudayaan bangsa yang berkepribadian dan berkesadaran nasional maka sekaligus dapat dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit serta ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedang di lain pihak ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.
- (4) Tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dibina dan dikembangkan secara lebih nyata, dalam usaha untuk memperkokoh kesetiakawanan nasional, lebih menanamkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan sederhana, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan kesatria.
- (5) Usaha-usaha pembaharuan bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya, dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan serta memantapkan ketahanan nasional.
- (6) Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar.
- (7) Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu sarana identitas nasional.
- (8) Dalam pembinaan kesenian perlu dikembangkan tumbuhnya kreativitas seniman yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (9) Pembinaan kesenian daerah ditingkatkan dalam rangka mengembangkan kesenian nasional agar dapat memperkaya kesenian Indonesia beraneka ragam.

- (10) Tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak khas kepada kebudayaan nasional.

Uraian dan Komentar Antar Hubungan Pasal-pasal dan GBHN

Pasal 32 (mengenai kebudayaan) dan pasal 36 (mengenai bahasa) mempunyai hubungan yang erat. Hubungan itu lebih jelas tampak dalam penjelasan masing-masing pasal. "Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa", demikian bunyi salah satu kalimat penjelasan pasal 32. "Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan" demikian bunyi sebuah kalimat penjelasan pasal 36 UUD 45.

Karena bahasa merupakan bagian dari kebudayaan (dengan istilah sekarang salah satu unsur kebudayaan) dan bahasa merupakan alat komunikasi pendukung utama serta perekam kebudayaan sebuah bangsa, suku, marga, pribadi dalam bentuk tutur dan sebagaimana, dan tidak ada bangsa yang tidak mempunyai bahasa (walaupun sangat sederhana), Maka bahasa pun merupakan puncak dari kebudayaan bangsa (di sini daerah-daerah pemilik dan penutur bahasa tertentu) dan merupakan buah usaha budi bangsa (daerah tersebut). Itu sebabnya sebunyi dengan penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, bahasa-bahasa daerah yang dihormati dan dipelihara negara, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Juga di sini perlu diisi pengertian dan sebagainya" dalam penjelasan pasal 36 (bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya). Dan sebagainya memuat semua bahasa yang masih mempunyai pendukungnya dan penuturnya dalam wilayah Republik Indonesia/Jika kita membaca GBHN tahun 1983 khusus mengenai Kebudayaan Nasional, maka tampak belum ada penghaluan dan pemberian garis besar kebijaksanaan daripada pasal 36 UUD 46 atau mengenai Bahasa. Penyebutan Bahasa Nasional dapat diartikan bahwa bahasa Indonesia hanya menjadi bahasa resmi dalam komunikasi fungsional bangsa Indonesia. Atau apakah Bahasa Negara idem dito Bahasa Nasional? Di lain pihak orang dapat mengatakan sebagai berikut : Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia adalah Bahasa Nasional, adalah bahasa Bangsa Indonesia, sedangkan salah satu bahasa daerah di sini bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Bagaimana proses ia menjadi bahasa negara tidak perlu dipersoalkan lagi. Semua orang telah tahu.

Jika kami membaca beberapa Undang-Undang Dasar/Konstitusi Negara-negara yang mengenal dan mempunyai beberapa bahasa dalam ne-

garanya (dan sering mereka bedakan atas bahasa mayoritas dan minoritas), maka akan jelas pula bahwa dibedakan antara bahasa nasional dan bahasa negara.

Walaupun konstituante hasil Pemilu Indonesia tahun 1956 telah dibubarkan, namun penulis masih dapat mencatat salah satu konsep mereka mengenai bahasa. Golongan E dari penggolongan Konstituante dengan nomor urut (10) membuat perumusan mengenai bahasa sebagai berikut :

Perumusan Bahasa (No. 12/K/1958)

1. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia; disertai dengan penjelasan. "Yang dimaksud dengan bahasa negara ialah bahasa resmi, bahasa Kebangsaan bangsa Indonesia".
2. Pemakaian, pemeliharaan dan perkembangan bahasa daerah diatur dengan Undang-Undang atau atas kuasa Undang-Undang. Pemakaian pengertian bahasa Nasional mungkin untuk dibedakan dengan bahasa daerah. Sedangkan pemakaian bahasa negara terasa pada pelaksanaan dari atas oleh sebagian orang bukan merupakan atribut terhadap bahasa, melainkan sebuah nomen biasa yang dapat digantikan dengan Republik Indonesia. Hubungannya menyatakan hubungan milik dalam arti yang luas. Dalam hubungan dengan pembicaraan mengenai bahasa Daerah penulis mengusulkan pemakaian bahasa nasional sebagai variasi untuk bahasa Indonesia.

Kedudukan bahasa Indonesia dan konstataasi Kenyataan

Penataan kembali kedudukan bahasa Indonesia secara geografis, sosiologis terhadap bahasa daerah mungkin masih ada gunanya. Kiranya tidak dapat disangkal bahwa sejak Sumpah Pemuda bahasa Indonesia telah menjalankan fungsinya yang amat penting dalam pernyataan-pernyataan kebangsaan, dan sebagai alat komunikasi sosial dalam perjuangan kesatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan hak juridis politis bahasa Indonesia seperti penulis sebutkan di atas dapatlah dicatat wewenang dari bahasa Indonesia sebagai berikut :

- (1) Bahasa Indonesia mempunyai wewenang dan hak untuk menyebar dan meluas ke seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Bahasa Indonesia mempunyai wewenang dan hak untuk secara horisontal dan vertikal memasuki strata-strata sosial dan sektor pembidangan apa saja dalam struktur masyarakat Indonesia (sampai lapisan yang paling bawah dan terperinci).

Dengan kewenangan seperti itu penulis masih dapat memberikan beberapa konstataasi sebagai berikut :

- (1) Secara geografis dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia telah mencapai seluruh wilayah Republik Indonesia baik melalui sistem pendidikan maupun melalui sistem pemerintahan, pers, radio dan bentuk mass media lainnya.
- (2) Akan tetapi secara sosial dapatlah dicatat bahwa bahasa Indonesia belum mencapai sasarannya. Ia belum turun sampai lapisan masyarakat baik tingkat tinggi, menengah maupun tingkat bawah. Dengan pengertian ia belum menjadi bahasa pergaulan/percakapan walaupun dengan pelbagai variasi. Mungkin kenyataan (2) ini tidak/belum secara terbuka diakui, akan tetapi dalam kebijaksanaan yang terpenggal-penggal ada pengakuan bahwa bahasa Indonesia belum menjamah lapisan-lapisan masyarakat Indonesia secara penuh. Penulis mencatat beberapa kebijaksanaan yang pada satu pihak diterima sebagai unsur penghambat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia akan tetapi pada pihak yang lain diterima sebagai satu kenyataan perlu diperhatikan pula.

Beberapa contoh kebijaksanaan dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

- (1) Di beberapa daerah pendidikan sekolah dasar selama tiga tahun pertama dilaksanakan dalam bahasa daerah; bahasa daerah dipakai sebagai bahasa pengantar. Kebijakan ini tetap masih diterima dan dibenarkan.
- (2) Taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak di daerah pun selalu mengantarkan bimbingannya dalam bahasa daerah. Nyanyian diadakan dalam bahasa daerah. Kenyataan ini pun menjalar sampai ke kota besar, seperti Jakarta.
- (3) Bahasa Daerah dipergunakan dalam Siaran Pedesaan.
- (4) Dengan adanya studio Televisi di Daerah/Ibu Kota Propinsi, maka diadakan pula siaran daerah baik berupa kesenian maupun penerangan. Lenong di TVRI Jakarta juga mempergunakan dialek Jakarta.
- (5) Adanya izin penerbitan harian dan majalah dalam bahasa daerah. Paling kurang ada pula kolom atau rubrik yang khusus untuk bahasa daerah/karangan dalam bahasa daerah.
- (6) Pada umumnya orang lapangan berbicara dalam bahasa daerah dalam kampanye Pemilu.
- (7) Doa dan Sembahyang di beberapa daerah masih dilaksanakan dalam

bahasa daerah.

- (8) Pengajaran bahasa daerah masih diizinkan dalam beberapa daerah untuk tingkat SMA.
- (9) Pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dipergiat dan diutamakan.
- (10) Di pesantren-pesantren bahasa Arab telah diajarkan pada permulaan pendidikan dan bahasa Indonesia menjadi nomor dua dalam perhatian anak didik.

Kenyataan di atas ini penulis sebutkan sebagai contoh. Ia merupakan akibat situasi konkrit dan juga karena kebijaksanaan yang tertentu pula. Dengan demikian pengembangan bahasa Indonesia untuk masuk sampai ke lapisan masyarakat berjalan lambat sekali. Kenyataan yang lebih umum menunjukkan bahwa dalam pergaulan antar sesama suku, daerah, terasa lebih akrab, lebih umum, lebih menunjukkan persamaan daripada perbedaan jika dipergunakan bahasa daerah.

Penulis dapat mengatakan bahwa bahasa Indonesia pada dewasa ini baru memenuhi tugasnya sebagai bahasa Resmi bahasa Negara, bahasa yang menjalankan fungsi Kenegaraan secara Umum. Ia belum menjadi bahasa tutur dan bahasa Budaya Bangsa.

Bahasa Daerah Dalam Masyarakat

Hal yang perlu dicatat pada dewasa ini di Indonesia ialah bahwa bahasa daerah masih memegang peranan penting dalam hubungan tindak berbahasa masyarakat Indonesia. Bahasa daerah merupakan salah satu puncak warisan budaya daerah atau setempat. Perbedaan antara daerah, suku di Indonesia masih dicirikan oleh pelbagai hal (seperti makanan, pakaian, agama, struktur keluarga) dan juga termasuk bahasa. Penulis kemukakan fungsi bahasa daerah dalam masyarakat sebagai berikut :

(1) Bahasa Daerah Memegang fungsi Utama

Dalam situasi dan peristiwa tertentu jelas tampak bahasa daerah memegang fungsi utama. Pernyataan Adat Istiadat dalam segala bentuknya tetap dinyatakan dalam bahasa daerah. Manifestasi kesenian (dalam arti luas) tetap dan malah lebih mantap dinyatakan dalam bahasa daerah. (baca : Abud Prawirasumantri, Budaya Djaja, nomor 76, tahun 7, September 1974, hal 531 — 537 : Pemakaian bahasa Sunda dalam pemerintah daerah di Jawa Barat).

(2) Bahasa daerah memegang fungsi Pembantu

Fungsi Pembantu bahasa daerah terjadi pada saat, situasi, peristiwa bahasa-bahasa daerah dipakai berdampingan dengan bahasa Indonesia. Situasi seperti ini dijumpai oleh Abud Prawirasumantri pada pelaksanaan tugas para pamong desa di Jawa Barat. Dalam komunikasi resmi antara rakyat dengan pemerintah biasanya digunakan bahasa Indonesia, akan tetapi pada situasi tertentu dan dengan motivasi tertentu digunakan bahasa daerah. Dalam fungsi pembantu ini pula kami masukkan pengajaran dan pendidikan dengan bahasa daerah pada permulaan pendidikan di Taman Kanak-Kanak dan juga pada pendidikan 3 tahun pertama Sekolah Dasar.

(3) Bahasa Daerah memegang fungsi Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan ini ialah bahasa daerah yang dipergunakan dalam situasi kekeluargaan saja. Di luar lingkungan ini bahasa daerah tidak dipergunakan, kecuali dalam keadaan khusus tertentu. Dalam fungsi ini dimasukkan pula fungsi bahasa daerah dalam hubungan rahasia. Jika kita lihat secara kasar dan kita catat secara umum saja, maka jelas tampak bahwa bahasa daerah di Indonesia masih menjalankan ketiga fungsi tersebut di atas. Kemungkinan ini akan selalu terbuka dan terjadi. Bahasa Indonesia, dialek-dialek bahasa Indonesia, bahasa daerah dan variasi-variasinya di Indonesia akan tetap berlangsung.

Dalam hubungan ini ingin penulis tunjukkan dua hasil observasi yang telah diadakan dalam rangka bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Pertama karangan/observasi Nancy Tanner : "Speech and Society among the Indonesian Elite, A case Study of a multilingual Community". (*Antropological Linguistic*, Vol. 9, number 3, hal. 15 – 40, March 1967). Kedua karangan Abud Prawirasumantri : "Pemakaian Bahasa Sunda dalam pemerintahan desa di Jawa Barat". *Budaya Djaja*, 76, tahun ke 7, September 1974, hal. 531 – 537). Dua artikel ini menarik perhatian dan membuktikan betapa besar peranan komunikasi bahasa daerah antar penutur dan pendukungnya. Kiranya observasi dan survei pemakaian bahasa daerah semacam ini lebih banyak lagi dilakukan, karena ia memberikan bahan dalam pembentukan kebijaksanaan Pembinaan Bahasa di Indonesia.

Bahasa Indonesia dan Wawasan Nusantara

Setelah kami bicarakan beberapa hal dalam hubungan dengan bahasa

Indonesia bahasa daerah, maka kiranya perlu konsep pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dirangkaikan dengan konsep Pembinaan Wawasan Nusantara. Ketetapan MPR. R.I. No. IV/MPR/1973 tentang GBHN telah memberikan pula garis besar penghaluan wawasan Nusantara, khusus dalam hubungan dengan perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya. Penghalusan itu berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
- (2) Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dimiknati oleh bangsa.

Terhadap kepada penghaluan ini ingin kami tambahkan khusus mengenai bahasa Indonesia, mengingat penting dan besarnya peranan bahasa Indonesia dalam rangka pembinaan Wawasan Nusantara Kesatuan bangsa secara sosial budaya. Lalu penulis tambahkan sebagai berikut :

- (3) Bahwa bahasa bangsa adalah satu, ialah bahasa Indonesia, adanya pelbagai macam bahasa daerah di Indonesia menunjukkan kekayaan bangsa dan menjadi modal serta landasan peminan bahasa Indonesia. Bahasa daerah sebagai pernyataan dan pendukung kebudayaan daerah yang pelbagai ragamnya itu akan dipelihara oleh bangsa sejauh dan selama ia dapat dinikmati oleh bangsa.

Pernyataan tersebut di atas itu memberikan motivasi umum kepada pembinaan bahasa bangsa. Semua itu adalah pernyataan politis daripada bangsa. Tugas kita sekarang ini ialah memberi isi kepada pernyataan politis tersebut di atas itu.

Sikap Sosiopolitikolinguistik antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah

Ada suatu keuntungan bagi Republik Indonesia bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang satu mayoritas penduduk/pendukung di Indonesia. Akan tetapi tingkah laku berbahasa dalam hubungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah ditentukan oleh tingkatan laku sosial, hubungan sosial budaya, ekonomis dan politisk antar penutur bahasa daerah dan pemakai

bahasa Indonesia. Tingkah laku sosial ini menentukan pula variasi berbahasa para penutur dan pendukung tersebut. Secara teoritis dapat disebutkan beberapa sikap sosiopolitikolinguistik dari pada pemakainya sebagai berikut :

(a) Sikap Pluralistis.

Secara sadar dan tidak sadar, sikap pluralistis dalam berbahasa di Indonesia masih berlangsung. Pemakaian bahasa daerah secara sosial politis belum dan tidak mendapatkan tantangan apa pun. Malah beberapa kebijaksanaan mengizinkannya. Kesempatan hidup berdampingan dan penggunaan berdampingan dengan bahasa Indonesia masih diperlakukan secara wajar. Dan mungkin itu sesuai pula dengan bunyi pasal 36 UUD 45 dan penjelasannya. Sampai di mana sikap pluralistis ini berlangsung diperlakukan satu Kebijakan Politik Bahasa Nasional.

(b) Sikap Integratif

Sikap integratif menyatakan satu kecenderungan untuk sepenuhnya mempergunakan bahasa Indonesia, dan bahasa daerah lama kelamaan secara gramatika sama sekali melebur dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

(c) Sikap Asimilatif

Sikap asimilatif atau pembauran dari bahasa Daerah ke dalam bahasa Indonesia akan menghilangkan sama sekali identitas bahasa Daerah. Sikap asimilatif ini dapat di laksanakan secara paksaan, secara persuasi atau melalui sistem pendidikan.

Sikap lain yang ekstrim tidak kami sebutkan di sini, karena hal ini menurut penilaian kami tidak akan berlaku dalam masyarakat Pancasila Bangsa Indonesia. Sikap sosiopolitikolinguistik ini erat berhubungan dengan sikap sosiokultural para pendukungnya. Sikap ini dapat bersifat aktif dan pula bersifat pasif. Sikap ini pun dapat diterima sebagai Penguasaan posisi dan kedudukan Bahasa Daerah dengan romantisme dan kebanggaan akan nilai budaya yang tersimpan dalam bahasa daerah. Sejauh mana arah pluralistis, sikap integratif dan atau asimilatif ini dikembangkan dan berkembang akan ditentukan oleh masyarakat sendiri. Faktor-faktor yang ikut menentukan sikap-sikap ini dapat disebut seperti : faktor pemerintah dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terpusat mengenai masalah bahasa ini. Akan tetapi di samping faktor kebijaksanaan pemerintah sikap-sikap ini akan ditentukan

pula oleh mobilitas penduduk pendukung bahasa-bahasa, dimensi kebudayaan bahasa daerah tertentu, dimensi kekuasaan dari pendukung bahasa daerah. Ini semua akan menentukan sikap politik berbahasa dalam hubungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara geografis dan sosial tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat pula dielakkan. Untuk maksud tersebut kiranya pendapat dan harapan mengenai pembinaan dan penempatan bahasa daerah dalam ekrangka keeseluruhan pembinaan bahasa Indonesia perlu lebih banyak dikemukakan dan dibicarakan secara terang, wajar, objektif dan penuh tanggung jawab.

Keuntungan lain dari sikap sosiopolitikolinguistik dari Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia pada dewasa ini ialah bahwa kita generasi Indonesia baik generasi Sumpah Pemuda maupun generasi 45 apalagi generasi penerus tidak mempunyai ikatan dan kaitan kultural, psikologis, sosial dengan bahasa Indonesia di masa yang silam. Masalah yang timbul dalam kerangka pembinaan bahasa daerah ialah ikatan dan kaitan kultural, sosial dan psikologis antara pendukungnya dengan bahasa daerah. Dalam hubungan inilah kami sebutkan faktor-faktor lain yang menentukan sikap sosiopolitikolinguistik pendukung bahasa daerah terhadap kepada bahasa Indonesia.

Kami mencatat bahwa sikap pendukung bahasa Daerah terhadap Bahasa Indonesia sudah jelas. Ini satu modal dan keuntungan yang tidak terbandingkan di dunia ini. Akan tetapi yang belum jelas/pasti ialah sikap Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia terhadap kepada Bahasa Daerah. Hal-hal inilah masih perlu ditentukan dalam masa-masa yang datang sebagai bahan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Penutup

Pembicaraan kami ini hanya sekedar sumbangan pikiran kepada mereka-mereka yang berwenang dalam hal Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Juga kami buat untuk umum karena masalah pembinaan dan pengembangan bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, secara intensif dan menyeluruh pada satu saat berhadapan dengan Politik/Kebijaksanaan Nasional mengenai Bahasa. Dan ini akan mengenai dan menyangkut *rasa* dan *rasio* masyarakat Indonesia pendukungnya.

DAFTAR BACAAN

- (1) Fishman, A. Joshua. *Reading in the Sociology of Language*, Mouton The Hague, Third Printing, 1972.
- (2) Halim, Amran, "Fungsi Politik Bahasa Nasional," *Budaya Djaja*, tahun ke 8, no. 82, Maret 75.
- (3) Haugen, Einar, "The Curse of Babel" dalam *Dialogue*, vol. 7, no. 2, 1974.

DISIPLIN NASIONAL DAN PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA

Nurdin Yatim
Direktur Pusat Bahasa
Universitas Hasanuddin

Pendahuluan

Sebagai sebuah makalah yang menyoroti masalah disiplin nasional dalam hubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, ada baiknya kalau terlebih dahulu di sini dilihat kata *disiplin* itu sendiri dari segi bahasa, baik secara etimologis maupun secara sosiosemantis. Kata disiplin berasal dari kata *descepline* (OF, ME), *disciplina* – *discipulus* – *disciple* (L), yang berarti murid, orang yang menuntut pelajaran. Ini juga berarti pengikut suatu aliran. Perkembangan semantik kata ini dalam bahasa-bahasa Barat telah membawanya kepada pengertian sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari secara akademis. Kata disiplin juga diartikan sebagai latihan-latihan yang diberikan kepada seseorang untuk membina watak (karakter), efisien, kedisiplinan, serta kemampuan kontrol diri seseorang (Guralnik, 1972).

Secara sosiosemantis dalam bahasa Indonesia, kata disiplin difahami sebagai :

- (1) latihan batin dan watak bagi seseorang dengan maksud agar segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib (disekolah atau kemiliteran),
- (2) ketaatan pada aturan dan tata tertib (dalam kemiliteran dsb.). (Poerwadarminta, 1976).

Pengertian yang didapati dalam kamus umum bahasa Indonesia ini disebut pengertian yang bersifat sosiosemantis oleh karena pengertian inilah yang dikenal secara umum oleh masyarakat penutur bahasa Indonesia. Pengertian lain, pengertian sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari secara akademis hanya dikenal oleh kelompok masyarakat kecil, kelompok masyarakat intelektual, yang memiliki kaitan kehidupan dengan dunia perguruan tinggi.

Kelompok masyarakat intelektual telah berkenalan dengan sejumlah

disiplin dalam perguruan tinggi. Setiap disiplin mempunyai otoritas tersendiri yang terjabar dalam terminologi, metodologi, serta bidang telaah masing-masing. Oleh karena itu, sangatlah wajar kalau pergaulan dengan disiplin-disiplin ini telah memberikan kepada kita penghayatan yang lebih jelas dan nyata terhadap makna sosiosemantis kata disiplin dalam bahasa Indonesia.

Kalau kita memfokuskan pandangan kita kepada ilmu bahasa itu sendiri sebagai disiplin, maka akan terlihatlah bahwa bahasa itu sendiri berdisiplin (dalam pengertian sosisemantis BI). Bahasa adalah sebuah atau sejumlah sistem/aturan (Dinnen, 1967) yang harus diikuti (diindahkan) oleh pemakai (penutur) bahasa itu agar terjalin saling menerti atas pesan-pesan komunikasi yang disampaikan oleh para interlocutor. Tanpa ketaatan terhadap aturan tata tertib bahasa, tanpa disiplin dalam penggunaannya, maka kemungkinan kesalahfahaman akan sangat tinggi, bahkan sangat mungkin seorang interlocutor tidak dapat mengerti apa yang dimaksud oleh interlocutor lainnya.

Bahasa Nasional

Setiap bangsa berusaha mengembangkan bahasa nasionalnya masing-masing. Ada sejumlah bangsa yang melakukan usaha ini hanyalah dengan meneruskan tradisi pemakaian bahasa yang telah lama digunakan dan mempunyai nilai kesejarahan yang panjang sejajar dengan perkembangan bangsa itu sendiri. Ada pula sejumlah bangsa yang mengembangkan bahasa nasionalnya dari bahasa asing yang telah lama berfungsi komunikatif dalam masyarakat itu. Sementara itu, sejumlah bangsa tertentu masih saja berjuang untuk memberikan posisi sewajarnya kepada bahasa nasionalnya.

Bahasa Indonesia, bahasa nasional bahasa Indonesia, mempunyai sejumlah keistimewaan baik dalam sejarahnya, maupun dalam perkembangannya hingga kepada bentuknya sekarang ini. Bahasa ini adalah hasil kesepakatan sosial yang dimulai dengan kesepakatan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan inter-etnik (*lingua franca*) di Nusantara. Tanpa paksaan dalam bentuk apa pun, bahasa Melayu diterima sebagai bahasa perhubungan yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi antara berbagai masyarakat suku bangsa yang masing-masing memiliki latar belakang bahasa dan budaya masing-masing. Kesepakatan sosial ini ditingkatkan pada tahun 1928 dengan memasukkannya sebagai salah satu dari tiga unsur Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan kesepakatan sosial bahwa bahasa persatuan yang disepakati itu adalah bahasa Indonesia. Kesepakatan

an sosial ini ditingkatkan lagi dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kesepakatan sosial ini seterusnya digaribawahi pada tahun 1978 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang menggariskan bahwa "pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar" (Halim, 1980).

Tidaklah setiap bahasa nasional di dunia ini berfungsi selengkap dan seluas bahasa Indonesia. Di Singapura misalnya, bahasa nasional mereka adalah bahasa Melayu, tetapi bahasa resminya adalah empat yakni bahasa Inggris, Mandari, Melayu dan Tamil. Lebih khusus lagi, bahasa kerja di negeri ini hanya dua yakni bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Sementara itu, banyak bahasa nasional yang belum lagi berfungsi baik sebagai bahasa pemersatu. Hal ini dapat ditunjuk dalam situasi-situasi yang terdapat di Filipina dengan konsep bahasa Pilopinonya, dan di India dengan bahasa Urdhu yang belum lagi mencapai tingkat kesepakatan sosial yang memadai.

Pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional perlu difahami dalam jbaran yang lebih khusus. Dalam politik bahasa nasional (Halim, 1976) diuraikan bahwa dalam kedudukannya sebagai (1) lambang kebanggaan kebangsaan, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya. Sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, bahasa Indonesia dimaklumi pula sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, perlu pula diketahui penjabarannya, yakni fungsi-fungsinya sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Kejelasan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara telah meletakkan dasar disiplin tersendiri dalam penggunaan bahasa Indonesia bagi seluruh bangsa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia ini perlu diketahui dengan jelas karena hal ini sangat bermanfaat untuk memberikan jangkauan nasional terhadap komunikasi pembangunan kita, sekaligus memberikan situasi yang menguntungkan terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri.

Disiplin dalam Penggunaan Bahasa Indonesia

Agar pendekatan masalah ini lebih bersifat akademis, perlu kiranya terlebih dahulu diberikan gambaran singkat tentang situasi sosio-linguistik kebahasaan di Indonesia. Sudah sama dimaklumi bahwa di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, terdapat tidak kurang dari 400 buah bahasa daerah yang masih tetap berfungsi komunikatif di seluruh Indonesia. Di antara bahasa daerah ini, ada sejumlah bahasa daerah yang mempunyai jumlah penutur yang cukup besar seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bali, Madura, Bugis dan Makassar. Bahasa-bahasa daerah tersebut ini bahkan memiliki tradisi tulis serta mempunyai nilai kesejarahan yang berkaitan erat dengan sejarah sosial budaya dan politik penuturnya di masa lampau.

Kenyataan sosiolinguistik lain yang tampak ialah bahwa perkembangan bahasa Indonesia sendiri dalam fungsinya yang komunikatif telah memungkinkan munculnya berbagai-bagai ragam (*variety*) yang digunakan baik untuk memperoleh rasa keintiman, maupun sebaliknya untuk memperoleh kesan keterpisahan (*exclusive*). Ada ragam bahasa Indonesia yang menampakkan ciri lokal (dialek), dan ada ragam bahasa yang menampakkan ciri kedudukan sosial seseorang (sosiolek). Pembicaraan tentang ragam ini memerlukan waktu lama, karena dalam setiap bahasa itu terdapat banyak sekali ragam, dan ragam inilah oleh sosiolinguistik dianggap sebagai penggunaan bahasa dalam kenyataan yang sesungguhnya. Bahasa baku pun dianggap sebagai salah satu ragam yakni ragam baku.

Pembicaraan tentang disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia, pada hemat kami, harus dikaitkan dengan kedua kenyataan sosiolinguistik kebahasaan di Indonesia.

1. Disiplin yang dilihat dalam kaitan penggunaan bahasa Indonesia di tengah-tengah penggunaan bahasa daerah. Kapan kita harus berbahasa Indonesia, dan kapan kita wajar berbahasa daerah perlu diketahui secara pasti oleh seluruh bangsa Indonesia. Penegakan disiplin ini hanya dapat berlangsung bilamana kita mengetahui dengan pasti batas-batas antara keduanya.
2. Disiplin yang dilihat dalam kaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia (ragam) baku. Kapan kita harus menggunakan bahasa baku, dan kapan kita wajar menggunakan bahasa nonbaku (sosiolek, dialek, dan sebagainya) perlu pula diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia.

Untuk menegakkan disiplin nasional dalam penggunaan bahasa Indonesia yang berkaitan dengan butir 1 di atas, baiklah di sini kami kutipkan hasil

seminar Politik Bahasa Nasional (Bahasa dan Sastra No. 1, 1975) sebagai berikut :

"Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Makassar dan Batak berfungsi sebagai (1) ambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga masyarakat-daerah. Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di satu daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah".

Kutipan ini cukup jelas memberikan pengarahannya kapan seharusnya bahasa Indonesia digunakan, dan kapan kita berada dalam kewajiban untuk menggunakan bahasa daerah. Dengan mengindahkannya, niscayalah salah satu aspek dalam disiplin nasional berbahasa Indonesia akan terpenuhi.

Aspek disiplin yang kedua, yang berkaitan dengan butir dua adalah aspek yang lebih rumit, karena peningkatan disiplin penggunaan bahasa Indonesia di sini dikaitkan pula dengan peningkatan mutu penggunaan bahasa itu sendiri.

Akan hal ini, Bapak Menteri P dan K, Dr. Daoed Joesoef (1980), telah memberikan pengarahannya sebagai berikut : Masalah disiplin di dalam penggunaan bahasa Indonesia pada dasarnya menyangkut sikap terhadap bahasa Indonesia. Disiplin penggunaan bahasa Indonesia dapat diukur atas ketaatan kepada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku dan atas dasar penggunaan kata-kata atau ungkapan-ungkapan bahasa asing di dalam kalimat bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar menurut adanya ketaatan yang relatif tinggi terhadap kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan tata cara sosial budaya bangsa kita. Disiplin di dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga ditandai oleh penggunaan bahasa Indonesia tanpa kata-kata atau ungkapan-ungkapan bahasa asing yang sebenarnya tidak diperlukan.

Mutu bahasa Indonesia yang digunakan dapat diukur atas dasar ketepatan pilihan kata dan bentuk kalimat dengan kaidah bahasa Indonesia baku, dan ketepatan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang mendahului dan/atau mengiringinya. Ketepatan pilihan kata dan bentuk kalimat dapat diukur atas dasar apakah kata dan bentuk kalimat yang dipilih itu dengan setepat-tepatnya dapat mengungkapkan pesan dan isi pikiran yang rumit dan hubungan isi pikiran yang abstrak.

Di sini jelas bahwa kehendak untuk melaksanakan disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu pula dibarengi pengetahuan yang memadai tentang kaidah-kaidah bahasa baku. Usaha untuk mempelajari bahkan mendalami kaidah-kaidah baku sangat diperlukan karena hanya dengan demikian kita dapat menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan penggunaan bahasa ragam nonbaku seperti dialek dan sosiolek rendah.

Ragam baku adalah ragam bahasa yang dikodifikasi. Ragam ini bersumber dari pemakaian bahasa oleh para penjaga gerbang kebahasaan (*language gatekeepers*) (Stewart, 1968). Termasuk dalam kategori penjaga gerbang ini adalah para ahli bahasa, guru bahasa, penulis, wartawan, dan sebagainya. Oleh karena itu, ragam bahasa ini mempunyai jangkauan nasional terlebih-lebih setelah dibukukan dalam bentuk-bentuk pedoman ejaan, kamus umum, tata bahasa, contoh teks dan lain-lain, dan sekaligus memperoleh kekuatan otoritas.

Langkah-langkah Konkret

Kenyataan yang amat menggembirakan yakni adanya semangat untuk mendorong disiplin dalam penggunaan bahasa nasional kita telah meluas di seluruh penjuru tanah air. Kritikan-kritikan terhadap penggunaan bahasa Indonesia nonbaku dalam peristiwa kebahasaan yang seharusnya penggunaan bahasa baku sudah cukup sering kita dengar baik secara langsung, maupun melalui media-media massa. Begitu pula halnya dengan penggunaan bahasa daerah oleh kelompok-kelompok penutur bahasa daerah tertentu, di tempat yang sewajarnya bahasa Indonesia digunakan, misalnya dalam situasi pertuturan yang dihadiri pula oleh orang-orang bukan penutur bahasa daerah tersebut.

Kritikan-kritikan terhadap rendahnya penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada umumnya mengarah kepada guru sebagai terminal terakhir. Pada gilirannya, guru, tanpa memasalahkan jaminan kesejahteraan misalnya, meneruskan kritik ini pada materi pengajaran itu sendiri.

Sebagai sebuah bahasa yang berkembang, terlalu banyak masalah kebahasaan yang muncul baik dalam aspek tata bahasa lebih-lebih dalam aspek kosa kata bahasa ini. Masalah ini dirasakan bukan hanya oleh orang awam tetapi oleh mereka yang termasuk dalam golongan penjaga pintu kebahasaan itu sendiri. Kecenderungan untuk tetap menggunakan bahasa daerah masing-masing mungkin dapat dianggap sebagai ketidakdisiplinan hanyalah bila dihubungkan dengan situasi pertuturan yang sewajarnya menggunakan bahasa nasional. Begitu pula halnya dengan penggunaan bahasa asing. Tetapi

pencampuradukan dua unsur tersebut dalam penggunaan bahasa Indonesia mungkin dapat dianggap sebagai kecenderungan penggunaan ragam-ragam baru, baik yang bersifat ragam lokal maupun yang bersifat ragam sosial.

Langkah-langkah konkret dalam hubungan dengan hal yang terakhir inilah diperlukan. Bagaimana seorang guru dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada muridnya, dan bagaimana seorang wartawan menulis dengan tepat untuk pembacanya serta lain-lain penjaga pintu kebahasaan kepada objeknya masing-masing memerlukan pegangan yang memadai. Sebagai sebuah bahasa nasional di negara yang sedang berkembang ini, peranan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa amat berarti. Lembaga inilah yang menjadi pemimpin dari seluruh penjaga pintu kebahasaan, mereka yang masih sering mempertunjukkan ketidaksefahamannya antara satu dengan yang lainnya. Sumber yang diperoleh dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memiliki wibawa nasional yang sangat berperanan dalam menentukan pilihan bentuk kebahasaan termasuk ke dalam ragam baku ataukah ragam sosial/lokal.

Hingga kini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah melakukan langkah-langkah yang amat berarti dalam bidang riset dan penulisan hasil riset. Langkah-langkah ini jelas masih bersifat teoretis. Para guru bahasa dan para penjaga pintu kebahasaan lainnya sangat memerlukan tulisan-tulisan yang bersifat praktis sebagai pedoman dalam penggunaan bahasa baik dan benar dalam arti baku secara nasional. Hingga saat ini barulah pedoman Ejaan Yang Disempurnakan, Pedoman Penulisan Istilah, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dapat diperoleh secara meluas. Isinya pun jelas jauh dari kemampuan memenuhi kebutuhan dalam bidangnya masing-masing. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan memuat contoh-contoh yang amat terbatas begitu pula halnya Pedoman Penulisan Istilah. Kamus Umum Bahasa Indonesia, di samping kekurangan-kekurangan teknis pencetakannya, juga terdapat banyak sekali ejaan di dalamnya yang tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip pedoman penulisan istilah.

Kamus istilah yang sudah cukup banyak jumlahnya jelas belum dapat diperoleh umum secara gampang. Masalah lain yang tampak adalah kurangnya usaha untuk menggunakan kata-kata dari unsur bahasa daerah. Kalaupun ada mungkin hanya dari bahasa Jawa dan Sunda. Adalah juga langkah-langkah konkret yang diperlukan memasukkan kedalamnya istilah-istilah yang dipungut dari bahasa-bahasa daerah lain. Jika istilah politik dan pemerintahan banyak diambil dari bahasa Jawa/Jawa-Kuno/Sansekerta, kami kira akan lebih kayalah bahasa Indonesia ini kalau istilah-istilah kemaritiman di-

perkaya dengan sumber dari bahasa Bugis/Makassar yang penuturnya telah dikenal. Istilah masakan diperkaya dengan kosa kata bahasa Minang, istilah fauna/flora diperkaya dengan kosa kata dari bahasa-bahasa di Kalimantan, Irian Jaya dan lain-lain.

Kalau seluruh bahasa daerah di Indonesia merasa telah menyumbangkan sesuatu ke dalam perkembangan bahasa Indonesia kami yakin rasa memiliki bahasa nasional ini semakin besar pula di kalangan bekas penutur bahasa-bahasa daerah. Ini penting terutama bila waktunya penggunaan bahasa Indonesia sudah demikian luas dan diterima baik untuk kepentingan praktis maupun sebagai lambang kebanggaan.

Kami percaya kebinekaan dalam dunia kebahasaan di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Kita akan menuju kepada kesatuan bahasa yakni sebuah bahasa nasional yang kaya, yang menguntungkan dalam penggunaan praktis dan memberi rasa kebanggaan yang tinggi. Sejalan dengan rasa kebanggaan yang bersifat nasional ini, akan muncullah pula rasa keintiman dalam penggunaannya.

Rasa keintiman dalam penggunaan bahasa Indonesia perlu diberi tanah persemaian yang subur. Situasi psikologi yang mendukung perlu diciptakan. Situasi seperti ini perlu disulut secara nasional dan di sini pulalah peranan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sangat menentukan. Api yang disulut oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini dikobarkan pula di daerah-daerah, di pusat-pusat pengembangan bahasa yang ada di universitas-universitas/ perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Penciptaan keintiman nasional, salah satu fungsi siosiolinguistik penggunaan bahasa Indonesia tidak akan tercapai tanpa memberikan langkah-langkah konkret pula. Bahasa Indonesia tidak akan mampu mengambil alih peranan penciptaan situasi keintiman yang sudah berakar lama dalam kehidupan bahasa daerah kecuali bahasa ini mampu mengambil alih peranan-peranan yang telah lama dilakukan oleh bahasa-bahasa daerah. Sebagai contoh penyiaran cerita wayang melalui TVRI secara nasional hanya akan menumbuhkan keintiman di kalangan penutur bahasa Jawa, kalau wayang itu tidak menggunakan bahasa Indonesia. Ia tidak akan terasa dimiliki oleh penutur bahasa lain. Di sini diperlukan langkah-langkah yang betul-betul berani mencoba demi tujuan tercapainya keintiman yang dimaksud.

Penutup

Makalah ini ditulis dengan suatu pemikiran bahwa peserta kongres ini terdiri dari berbagai-bagai ahli dari berbagai-bagai disiplin. Oleh karena

itu, uraian yang dikemukakan di sini lebih bersifat umum. Namun demikian, tidaklah tertutup kesempatan untuk membicarakan kasus-kasus khusus yang berhubungan dengan disiplin tidaknya seorang penutur bahasa Indonesia. Hal ini penting, oleh karena disiplin dalam pemakaian bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, tidak bisa dipisahkan dari usaha pembinaan disiplin nasional secara umum.

Para penutur bahasa Indonesia yang berada dalam ruang seminar ini adalah kelompok kecil, masyarakat intelektual, yang menghayati makna sosiosemantis maupun makna khusus kata disiplin penggunaan bahasa Indonesia secara luas dengan jalan mendahulukan peningkatan disiplin penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi kelompok ini, untuk kemudian menjadi penutur masyarakat awam.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan berkembang. Oleh karena itu diperlukan usaha pembinaan di dalam perkembangannya secara terus menerus. Hal ini bukanlah tugas dan kewajiban para ahli bahasa dan bahasawan semata-mata, melainkan tugas dan kewajiban seluruh bangsa Indonesia. Dalam hubungan ini, diperlukan disiplin penggunaan bahasa Indonesia di tempat yang seharusnya di samping penggunaan bahasa daerah di tempat yang sewajarnya, serta disiplin penggunaan bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi resmi.

Pada gilirannya ini, perlu pula dihimbau lembaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Nasional untuk dengan segera menerbitkan dan menyebarluaskan bahan-bahan penuntun bahasa Indonesia baku khususnya dalam bentuk tata bahasa.

Rujukan :

1. *Bahasa dan Sastra* (Majalan) No. 1, 1975, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, Indonesia.
2. Dinnen, Francis P. 1976 *An Introduction to General Linguistics*, Holt, Rinehart and Winston, New York, USA.
3. Guralnik, David B. (ed.), 1972. *Webster's New World Dictionary of the American Language*, second college ed World Publishing Times Mirror, New York, USA.
4. Halim, Amran, 1976, "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia" dalam *Politik Bahasa Nasional* oleh Amran Halim (ed.), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Nasional, Jakarta.
5. ———, 1980, "Bahasa Indonesia Baku" dalam majalah *Analisis Kebudayaan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Joesoef, Daoed, 1980 "Mutu dan Disiplin Penggunaan Bahasa Indonesia" dalam Majalah *Analisis Kebudayaan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Stewart, William A., 1968, "A Sociolinguistic Typology for Describing National Multilingualism", dalam *Reading in The Sociology of Language*. Mouton The Hague.

ANGKA STATISTIK SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR MASALAH KEBAHASAAN : DENGAN MENAMPILKAN PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI KASUS KHUSUS

Husen Abas

Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Ujung Pandang

Pendahuluan

Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983 menggariskan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar. Di samping itu, pada saat yang bersamaan, pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan bahasa nasional itu, pembinaan bahasa daerah menampakkan eksistensinya.

Fungsi utama suatu bahasa (nasional atau daerah) ialah sebagai alat komunikasi. Di samping itu, bahasa juga merupakan sebagian dari kekayaan budaya masyarakat yang mempergunakan bahasa itu. Bahasa, dengan demikian, merupakan suatu nilai (value) dan norma (norm) budaya.

Kepulauan Nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, besar dan kecil, didiami oleh banyak suku bangsa (*ethnic groups*). Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya ng bahasanya sendiri. Akibatnya terdapat kurang lebih 400 bahasa daerah di Indonesia yang di samping berfungsi sebagai alat komunikasi intra-suku (*intra ethnic communication*), juga berfungsi sebagai sarana penunjang bahasa Indonesia seperti telah disebutkan di atas dan sarana pendukung kebudayaan daerah. Eksistensi bahasa daerah dijamin oleh Bab XV, Pasal 36, UUD 1945. Statusnya sebagai norma etnik (*ethnic norm*) dijamin oleh GBHN, terutama bahasa-bahasa daerah yang memiliki sistem penulisan sendiri, tradisi kesusasteraan tertulis, dan pendukung/penutur yang jumlahnya cukup besar.

Salah satu bahasa daerah yang terdapat di daerah Riau dan Kepulauan sekitarnya telah berkembang menjadi bahasa nasional. Bahasa daerah itu mula-mula dipergunakan sebagai alat komunikasi intra-etnik, kemudian meningkat fungsinya sebagai alat komunikasi inter-etnik ('lingua franca') dan akhirnya diresmikan menjadi bahasa nasional. Penerimaan bahasa Melayu secara sukarela oleh suku bangsa-suku bangsa lainnya yang jumlahnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah suku bangsa Melayu (misalnya suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, dan lain-lain) merupakan suatu proses kristalisasi kebudayaan yang menakjubkan. Norma kebudayaan yang didukung oleh kelompok etnik yang jumlah anggotanya jauh lebih besar menyingkirkan diri untuk memberikan tempat kepada norma kebudayaan lain yang didukung oleh kelompok etnik yang jumlah anggotanya jauh lebih sedikit. Norma kebudayaan yang demikian ini disebut oleh Isman (1977) sebagai norma-supra etnik (*supra-ethnic norm*) yang secara alamiah diterima oleh seluruh kelompok etnik lainnya sebagai norma kebudayaan milik bersama. Dengan demikian norma kebudayaan itu memiliki daya ikat yang kuat dan memberikan identitas baru yang bersifat nasional.

Proses kristalisasi kebudayaan di atas dalam jangka waktu yang relatif singkat (kurang lebih 60 tahun, jika pemberian status sebagai bahasa resmi kedua di dalam tahun 1865 dijadikan titik pangkal, dan kurang lebih 20 tahun jika titik pangkalnya adalah bangkitnya kesadaran nasional yang dinyatakan dalam bentuk organisasi untuk pertama kalinya di dalam tahun 1908) telah dialami oleh bahasa Melayu yang mengkristal menjadi bahasa Indonesia yang dimanifestasikan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Akhli-akhli bahasa sedunia sangat kagum terhadap proses ini.

Keadaan kebahasaan sebagai Masalah Masyarakat

Mulai dekade kedua tahun tujuh puluhan bahasa tidak lagi hanya dianggap sebagai alat komunikasi belaka, tetapi juga sudah dipergunakan sebagai salah satu indeks dari 'Kehidupan Layak Lahiriah' (*Physical Quality of Life*) dari suatu bangsa. Sebab Andrew B. Gonzalez (1979 : 5) telah mengemukakan bahwa pembangunan bangsa secara menyeluruh tidak hanya mencakup kemajuan-kemajuan material yang dapat dinyatakan di dalam angka-angka (GNP), tetapi juga harus mencakup kemajuan-kemajuan yang tidak dapat ditakar dengan uang yang merupakan bahagian dari kesejahteraan manusia dalam bentuk mutu kehidupan yang memadai dan layak.

The Overseas Development Council, suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Amerika Serikat khusus untuk menangani masalah pembangun-

an dunia, telah mengusulkan suatu Indeks Kehidupan Layak Lahirian (PQLI) yang mencakup, di samping GNP, juga harapan kehidupan berlanjut (*life expectancy*) pada usia 1 tahun, kematian bayi (*infant mortality*), dan melek aksara (*literacy*). Sementara itu, The Development Academy of the Philippines telah pula mengemukakan kesempatan belajar (*learning*) sebagai salah satu indikator kehidupan yang layak bagi manusia yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kesejahteraan masyarakat (Mangahas, 1976).

Erat hubungannya dengan kesempatan belajar yang dikemukakan oleh DAP dengan melek huruf yang diketengahkan oleh ODC adalah bahasa. Oleh sebab itu, faktor bahasa ini penting sekali perannya di dalam pembangunan sosial secara menyeluruh suatu bangsa.

Sebagaimana kita ketahui pembangunan sosial yang menyeluruh merupakan masalah yang sangat kompleks. Ada satu hal yang sangat diperlukan untuk berhasilnya pembangunan sosial itu, yaitu mutlaknya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab penguasaan terhadap hal itu dapat mempecepat laju pembangunan. Untuk tiba pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan yang dimaksud kesempatan belajar harus terbuka lebar bagi anak-anak warganegara suatu negara.

Sebagaimana sudah diterangkan di depan, Indonesia memiliki rakyat yang terdiri / dari beraneka ragam suku bangsa. Tiap-tiap suku mempunyai bahasanya sendiri. Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang multi-etnik dan multi-bahasa. Di samping adanya bahasa nasional (bahasa Indonesia), terdapat pula banyak bahasa daerah. Akibatnya keadaan kebahasaan lebih banyak bersifat heterogen dari pada homogen, terutama di daerah-daerah di luar pulau Jawa. Pulau Sulawesi yang terbagi menjadi empat propinsi daerah tingkat satu dapat dijadikan contoh sebagai kawasan yang memiliki keadaan kebahasaan yang sangat heterogen. Keadaan kebahasaan yang demikian ini lebih banyak merupakan masalah masyarakat daripada merupakan masalah individu dan keadaan ini dapat menjadi faktor yang berpengaruh di dalam pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Adalah wajar apabila bahasa sebagai salah satu masalah sosial dari suatu bangsa yang sedang membangun yang merupakan indikator dari keadaan kebahasaan (*language welfare*) menjadi perhatian utama masyarakat bersangkutan.

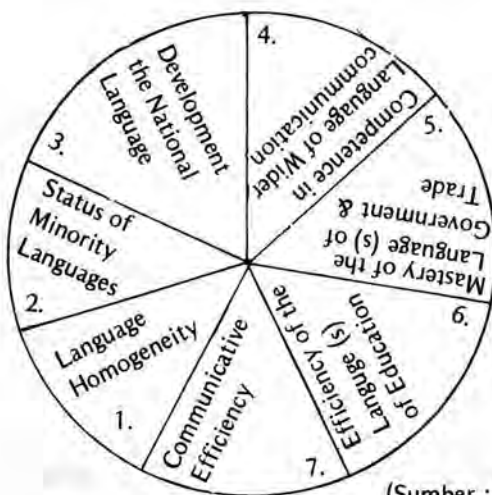
Di samping situasi kebahasaan homogen/heterogen (*language homogeneity*) sebagai salah satu indikator masalah kebahasaan di suatu kawasan atau daerah seperti disebutkan di atas, Gonzalez mengemukakan enam indikator

lainnya. Dengan demikian terdapat tujuh indikator keadaan kebahasaan, yaitu :

- (1) Keadaan kebahasaan yang homogen atau heterogen di suatu daerah atau negara.
- (2) Kedudukan atau status bahasa-bahasa yang mempunyai jumlah penutur yang sedikit.
- (3) Pembinaan dan pengembangan bahasa nasional.
- (4) Kompetensi anggota masyarakat di dalam mempergunakan bahasa yang berkedudukan sebagai bahasa komunikasi luas.
- (5) Penguasaan yang baik dari anggota masyarakat terhadap bahasa-bahasa yang dipergunakan di dalam pemerintahan dan perdagangan.
- (6) Daya-guna bahasa-bahasa pengantar yang dipergunakan pada semua jenjang lembaga pendidikan.
- (7) Daya-guna komunikasi massa (Gonzalez, 1979).

Ketujuh indikator keadaan kebahasaan yang merupakan masalah masyarakat (social concern) ditempatkan oleh Gonzalez pada suatu diagram sebagaimana tertera di bawah ini :

Diagram
Indikator-Indikator Keadaan Kebahasaan
sebagai Masalah Sosial



(Sumber : Gonzalez, 1979)

Untuk mengetahui indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruh (*'overall index of language welfare'*) suatu daerah atau negara, setiap indikator sebagaimana tertera di atas diberi nilai antara 1 sampai 5. Untuk Indonesia indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruh adalah 3,17 menurut Gonzalez. Angka ini diperoleh setelah memberikan nilai kepada tiap indikator sebagai berikut : nilai 2 kepada indikator 1, nilai 5 kepada indikator 2, nilai 4 kepada indikator 3, nilai 3 kepada indikator 4, nilai 5 kepada indikator 5, nilai 3 kepada indikator 6, dan nilai 4 kepada indikator 7.

Jika kita mentrapkan sistem penilaian Gonzalez ini untuk mendapatkan indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruh dari pulau Sulawesi, maka kita akan mendapatkan angka 2,7. Angka ini didapat jika kita berikan nilai 4 kepada indikator 1, nilai 3 kepada indikator 2, nilai 4 kepada indikator 3, nilai 2 kepada indikator 4, nilai 3 kepada indikator 5, nilai 3 kepada indikator 6, dan nilai 3 kepada indikator 7. Indeks ini cukup rendah jika kita bandingkan dengan indeks untuk Indonesia secara keseluruhan. (Menurut Tabel Overall Index of Language Welfare dari Gonzalez, angka indeks tertinggi adalah 4,86 yang dicapai oleh 3 negara di kawasan Pasifik yaitu Jepang, Selandia Baru dan Amerika Serikat, sedang angka indeks yang paling rendah adalah, 1,3 yang diberikan kepada Papua New Guinea).

Suatu daerah, kawasan, ataupun negara indeks keadaan kebahasaannya dapat ditentukan melalui proses seperti disebutkan di atas. Indeks keadaan kebahasaan ini perlu diketahui oleh para ahli bahasa dan pejabat yang berwenang di bidang kebahasaan guna dipergunakan sebagai salah satu landasan kebijaksanaan baik untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek di dalam mengatasi suatu masalah kebahasaan ataupun merencanakan pembinaan dan pengembangan suatu bahasa. Sebab semakin rendah indeks itu, semakin rawan keadaan kebahasaan suatu daerah, kawasan, ataupun negara.

Untuk Indonesia, nilai indikator no. 1 masih tetap akan rendah untuk masa yang akan datang. Tetapi nilai-nilai untuk indikator-indikator 3, 4, 6 dan 7 akan beranjak naik, dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama indikator-indikator itu akan mencapai nilai maksimum. Dengan demikian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintah, sarana pengembangan kebudayaan, sarana pendidikan dan pengajaran, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta sarana komunikasi luas untuk kawasan Asia Tenggara akan menjadi semakin mantap dan kuat.

Sensus Penduduk sebagai Indikator Masalah Kebahasaan

Sensus penduduk yang diselenggarakan di dalam tahun 1971 menunjukkan bahwa seluruh penduduk adalah 118.367.850 orang. Dari jumlah seluruh penduduk ini, 48,275.879 orang adalah penutur bahasa Indonesia. Tabel 1 yang tertera di bawah ini memuat hasil sensus penduduk tahun 1971 selengkapnya yang berhubungan dengan jumlah penutur bahasa Indonesia, di kota dan pedesaan, dari empat pulau yang besar dan pulau-pulau lainnya yang kecil.

Pulau Sumatra pada tahun 1971 memiliki jumlah penduduk 20.801.177 orang. 13.151.237 orang di antaranya atau 63,22% merupakan penutur bahasa Indonesia. Mereka ini berdiam di kota sebanyak 3.056.744 orang, dan berdiam di pedesaan sebanyak 10.094.493 orang.

Tabel 1
PENUTUR BI DALAM TAHUN 1971

Pulau	Penutur Bahasa Indonesia			Jumlah Seluruh Penduduk	PBI
	Kota	Pedesaan	Jumlah		
Sumatra	3.056.744	10.094.493	13.151.237	20.801.177	63.22
Jawa	9.325.596	15.976.532	25.301.128	76.029.636	33.28
Kalimantan	774.009	1.950.762	2.724.771	5.152.572	52.68
Sulawesi	925.291	2.998.164	3.923.455	8.525.364	46.02
Pulau-pulau Lainnya	624.206	2.551.082	3.175.288	1.859.102	40.40
Jumlah	14.705.846	33.570.033	48.275.879	118.367.850	40.78

Catatan : PBI = Penutur Bahasa Indonesia
 Pulau-pulau Lainnya = Bali, Nusa Tenggara Barat dan
 Timur Kepulauan Maluku, dan Irian
 Jaya
 (Sumber Biro Pusat Statistik Seri
 E. Jakarta).

Pulau Jawa mempunyai penduduk sebanyak 76.029.636 orang dan 33,28% dari jumlah ini (25.301.128 orang) adalah penutur bahasa Indonesia. Dari jumlah penutur bahasa Indonesia itu, 9.325.596 orang berdiam di kota dan 15.975.532 orang berdiam di desa.

Terdapat 2.724.711 orang atau 52,88% penutur bahasa Indonesia dari jumlah seluruh penduduk pulau Kalimantan yang banyaknya 5.152.571 orang di antara penutur bahasa Indonesia itu 774.009 orang tinggal di kota dan 1.950.762 orang tinggal di pedesaan.

Pulau Sulawesi mempunyai penduduk sebanyak 8.525.364 orang di dalam tahun 1971. Dari jumlah seluruh penduduk ini, 3.923.455 orang atau 46,02% merupakan penutur bahasa Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu 925.291 orang berdiam di kota dan 2.998.164 orang berdiam di desa.

Tabel 1 lebih lanjut memberikan jumlah penutur bahasa Indonesia di pulau-pulau lainnya di Indonesia yaitu 3.175.288 orang. Jumlah ini merupakan 40,40% dari jumlah seluruh penduduk pulau-pulau tersebut yang besarnya 7.859.102 orang. Penutur bahasa Indonesia itu, 624.206 orang di antaranya berdiam di pedesaan.

Tabel 2 memuat proyeksi jumlah seluruh penduduk dan penutur bahasa Indonesia untuk tahun-tahun 1981, 1991, 2001 dari pulau-pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan kumpulan pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia. Proyeksi yang dibuat oleh penulis (Abas, 1978) itu menunjukkan bahwa jumlah seluruh penduduk Indonesia di dalam tahun 1981 adalah 149.633.710 orang, 49,66% daripadanya (74.308.946 orang) merupakan penutur bahasa Indonesia; jumlah seluruh penduduk Indonesia di dalam tahun 1991 adalah 189.346.603 orang dan dari jumlah ini 59,47% atau 112.621.128 orang merupakan penutur bahasa Indonesia; dan jumlah seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2001 adalah 239.851.645 orang di mana 165.540.614 orang di antaranya atau 69,01% merupakan penutur bahasa Indonesia.

Tabel 2
PROYEKSI JUMLAH PENUTUR BI
UNTUK TAHUN-TAHUN 1981, 1991, dan 2001

Pulau	1971	1981	1991	2001
Jumlah untuk PBI	13.151.273	21.206.312	33.437.405	48.025.637
Seluruh JSP	20.801.177	27.792.618	37.133.941	49.614.959
Sumatra %	63,22	76,32	90,04	96,79
Jumlah untuk PBI	25.301.128	37.700.334	55.468.147	81.945.586
Seluruh JSP	76.029.636	93.959.656	116.118.103	143.385.162
Jawa %	33,27	40,12	47,76	57,10
Jumlah untuk PBI	2.724.771	4.299.312	6.783.717	10.561.946
Seluruh JSP	5.152.571	6.705.937	8.727.603	11.385.749
Kalimantan %	52,88	64,11	77,72	92,98
Jumlah untuk PBI	3.923.455	6.190.668	9.611.522	14.143.574
Seluruh JSP	8.525.364	11.095.540	14.440.559	18.794.016
Sulawesi %	46,02	55,79	66,55	75,25
Jumlah untuk PBI	3.175.288	4.912.320	7.330.337	10.863.871
Seluruh JSP	7.859.102	10.079.959	12.928.397	16.581.759
Pulau-pulau lainnya %	40,40	48,73	56,69	65,61
Jumlah untuk PBI	48.275.879	74.308.946	112.621.128	165.540.614
Seluruh JSP	118.367.850	149.633.710	189.348.603	239.851.645
Indonesia %	40,78	49,66	59,47	69,01

Catatan : PBI = Penutur Bahasa Indonesia

JSP = Jumlah Seluruh Penduduk

(Sumber : Biro Pusat Statistik Serie E, Jakarta).

Dari Tabel 2 di atas dapat pula diketahui bahwa proyek jumlah seluruh penduduk pulau Sulawesi untuk tahun 1981 adalah 11.095.540 orang, di mana 6.190.668 orang (55,79%) daripadanya adalah penutur bahasa Indonesia; untuk tahun 1991 jumlah seluruhnya adalah 14.440.559 orang, 9.611.522 (66,55%) di antaranya adalah penutur bahasa Indonesia; dan untuk tahun 2001 jumlah seluruhnya menjadi 18.794.016 orang dan jumlah penutur bahasa Indonesianya menjadi 14.143.574 orang atau 75,25%.

Dari proyeksi jumlah seluruh penduduk pulau Sulawesi untuk tahun-tahun 1981, 1991, dan 2001 seperti disebutkan di atas, penduduk Propinsi Sulawesi Selatan diproyeksikan berjumlah 6.741.521, 8.773.916, dan 11.419.027 orang untuk masing-masing tahun. Selanjutnya jumlah penutur bahasa Indonesia untuk tahun-tahun yang disebutkan itu, diproyeksikan masing-masing berjumlah 2.903.941, 4.582.018, dan 7.229.792 orang. Jumlah-jumlah ini memberikan prosentase masing-masing sebesar 43,07%, 52,22%, dan 63,31%.

Tabel 3 di bawah ini akan memperjelas situasi yang digambarkan di atas itu.

Tabel 3
PROYEK JUMLAH PENDUDUK DAN PBI
PROPINSI SULAWESI SELATAN

Propinsi		1971	1981	1991	2001
Sulawesi Selatan	PBI	1.840.428	2.903.941	4.582.016	7.229.792
	JSP	5.179.911	6.741.521	8.773.916	11.419.027
	%	39,53	43,07	52,22	63,31

Sumber : Biro Pusat Statistik Serie E, Jakarta)

Sebagaimana kita ketahui, di dalam tahun 1980 yang ialu telah diselenggarakan sensus penduduk di seluruh Indonesia. Sayang sekali laporan lengkap dari sensus penduduk itu belum disusun. Namun demikian, penulis memperoleh data tentang jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Selatan dan banyaknya penutur bahasa Indonesia yang berdiam di Propinsi ini dari kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Selatan yang berhasil diolah berdasarkan sensus penduduk 1980.

Menurut sensus 1980 jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Selatan adalah

6.059.564 orang. Dari jumlah ini, terdapat sejumlah 2.535.801 orang penutur bahasa Indonesia, atau 41,87% dari jumlah seluruh penduduk. Di bawah ini hasil sensus penduduk 1971 dan 1980 bersama-sama dengan proyeksi jumlah penduduk dan penutur bahasa Indonesia untuk tahun 1981 ditampilkan guna melihat sampai di mana ketetapan proyeksi kependudukan yang dilakukan itu.

Hasil Sensus Penduduk 1971 :	Jumlah PBI	:	1.840.428
	Jumlah Seluruh Pen-		
	duduk	:	5.179.911
	% PBI	:	39,53%
Hasil Sensus Penduduk 1980 :	Jumlah PBI	:	2.535.801
	Jumlah Seluruh Pen-		
	duduk	:	6.059.564
	% PBI	:	41,87%
Proyeksi untuk tahun 1981 :	Jumlah PBI	:	2.903.941
	Jumlah Seluruh Pen-		
	duduk	:	6.741.521
	% PBI	:	43,07%

Andaikata sensus penduduk diselenggarakan di dalam tahun 1981 dan bukan di dalam tahun 1980, seperti yang telah berlangsung, maka jumlah PBI hasil sensus dan hasil proyeksi tidak akan terlalu berbeda besar. Demikian juga halnya dengan jumlah seluruh penduduk hasil sensus dan jumlah seluruh penduduk hasil proyeksi. Dari angka-angka yang ditulis di atas, kita melihat bahwa perbedaan antara jumlah penutur bahasa Indonesia hasil proyeksi untuk tahun 1981 dengan jumlah penutur bahasa Indonesia hasil sensus 1980 adalah 368.140 orang. Sedangkan jumlah seluruh penduduk hasil proyeksi untuk tahun 1981 berbeda sebanyak 681.957 orang dengan jumlah seluruh penduduk dari hasil sensus 1980. Kedua perbedaan itu nampaknya agak terlalu besar untuk jangka waktu satu tahun. Namun demikian, perbedaan-perbedaan itu masih berbeda dalam batas-batas toleransi statistik.

Berangkat dari asumsi bahwa proyeksi kebahasaan yang telah dilakukan itu mempunyai derajat ketetapan yang marjinal (atau secara negatif dikatakan : mempunyai derajat ketidak-tepatan yang masih dapat ditolerir), maka di bawah ini dimuat Tabel 4 yang berisi proyeksi tahun berapa ketika suatu propinsi memiliki penduduk 100% merupakan penutur bahasa Indonesia

sehari-hari. Dengan kata lain, jumlah seluruh penduduk sama dengan jumlah penutur bahasa Indonesia.

Proyeksi itu menunjukkan bahwa Metropolitan Jakarta Raya sejak tahun 1981 yang lalu telah memiliki penduduk yang seluruhnya merupakan penutur bahasa Indonesia.

Tabel 4
TAHUN KETIKA TIAP—TIAP PROPINSI
AKAN MEMPUNYAI PENDUDUK 100% PENUTUR
BAHASA INDONESIA

Propinsi	Tahun Ketika Penduduk 100% PBI
Metropolitan Jakarta Raya	1981
Irian Jaya (Daerah Pesisir)	1981
Riau	1991
Jambi	1991
Sumatra Selatan	1991
Sulawesi Utara	1991
Maluku	1991
Sumatra Utara	2001
Sumatra Barat	2001
Bengkulu	2001
Kalimantan Timur	2001
Sulawesi Tengah	2001
Daerah Istimewa Aceh	2011
Lampung	2011
Kalimantan Barat	2011
Kalimantan Tengah	2011
Kalimantan Selatan	2011
Nusa Tenggara Timur	2011
Sulawesi Tenggara	2021
Jawa Barat	2031
Darah Istimewa Yogyakarta	2031
Sulawesi Selatan	2031
Jawa Tengah	2041

Propinsi	Tahun Ketika Penduduk 100% PBI
Jawa Timur	2041
Bali	2041
Nusa Tenggara Barat	2041
Timor Timur	*)

*) belum ada data

(Sumber : Biro Pusat Statistik
Seri E. Jakarta)

Demikian pula halnya dengan daerah pesisir Irian Jaya. Sedangkan propinsi-propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat baru pada tahun 2041 yang akan datang seluruh penduduknya merupakan penutur bahasa Indonesia. Propinsi-propinsi lainnya di antara kedua tahun itu.

Untuk pulau Sulawesi yang mempunyai empat propinsi, tahun-tahun ketika keempat propinsi itu akan mempunyai penduduk yang 100% penutur bahasa Indonesia berbeda-beda. Propinsi Sulawesi Utara yang paling lebih dahulu memiliki penduduk yang seluruhnya merupakan penutur bahasa Indonesia, yaitu pada tahun 1991. Kemudian disusul oleh propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2001, oleh propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021, dan terakhir oleh propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2031.

Implikasi daripada proyeksi kebahasaan berdasarkan sensus penduduk yang telah diutarakan di atas ialah pendeteksian yang dini dan pengenalan kita pada masalah kebahasaan yang akan muncul. Dengan demikian pada ahli bahasa dan pejabat yang berwenang di bidang kebahasaan dapat mempersiapkan segala sesuatunya guna mengatasi masalah itu atau sedapat-dapatnya memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh masalah kebahasaan tersebut.

Pengembangan Bahasa Indonesia

Dalam rangka memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, pengembangan bahasa Indonesia mutlak harus dilaksanakan secara sadar, terarah, dan berencana. Pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dalam konteks pembangunan nasional. Arah pengembangan itu ialah menjadikan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintahan yang efektif, sebagai sarana pengembangan kebudayaan,

ilmu pengetahuan, dan teknologi modern yang lebih daripada memadai, dan sebagai sarana pendidikan dan pengajaran yang serba guna. Terciptanya atribut-atribut kesaranaan bahasa Indonesia tersebut tidak hanya melalui proses alamiah yang merupakan anugerah Tuhan, tetapi lebih banyak melalui proses perencanaan yang merupakan hasil acuan pemikiran para ahli bahasa sendiri.

Pada bagian depan dari makalah ini telah disebutkan bahwa Gonzales memberikan angka 3,7 kepada indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruh (*'overall index of language welfare'*) dari bahasa Indonesia. Dari ketujuh indikator masalah kebahasaan, baru dua indikator yang mencapai nilai maksimum, yaitu indikator mengenai kedudukan atau status bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya hanya sedikit (*minority languages*) dan indikator mengenai penguasaan yang baik dari anggota masyarakat terhadap bahasa-bahasa yang dipergunakan di dalam pemerintahan dan perdagangan. Dua indikator lainnya, yaitu indikator no. 3 (pembinaan dan pengembangan bahasa nasional) dan indikator no. 7 (daya-guna komunikasi massa) bernilai 4; sedangkan indikator-indikator no. 4 dan no. 6 mendapat nilai 3; dan nilai 2 diberikan kepada indikator no. 1, yaitu keadaan kebahasaan yang homogen atau heterogen di suatu daerah atau negara.

Untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar dia dapat mencapai atau sedikit-dikitnya mendekati angka 5 sebagai indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruhnya, maka nilai indikator 1 mutlak harus ditingkatkan secara spektakuler. Demikian pula halnya dengan nilai-nilai untuk indikator-indikator no. 4 dan no. 6 perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Untuk indikator-indikator no. 3 dan no. 7 peningkatannya dilakukan dengan menggalakkan pemakaian bahasa Indonesia di dalam seminar-seminar dan simposium-simposium ilmiah yang bertaraf internasional dan menyebarluaskan tulisan-tulisan ilmiah populer ke pelosok-pelosok tanah air secara berkala.

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia guna menjadi sarana yang berdaya-guna untuk mensukseskan Pembangunan Nasional, makalah ini akan membicarakan lebih lanjut tentang indikator-indikator No. 1, no. 4, dan no. 6.

Keadaan Kebahasaan Yang Homogen atau Heterogen Di Suatu Daerah Atau Negara

Sudah disebutkan di depan bahwa nilai suatu indikator terletak antara angka 1 dan 5 sesuai dengan keadaan kebahasaan negara atau daerah yang bersangkutan. Apabila negara atau daerah itu mempunyai banyak

kelompok etnik yang memiliki bahasanya masing-masing, maka nilai indikatornya adalah 1. Nilai 2 diberikan kepada suatu negara atau daerah yang mempunyai kelompok etnik yang memiliki bahasanya sendiri-sendiri tetapi satu atau dua kelompok etnik itu menonjol dari yang lain-lainnya. Terjadi semacam perlombaan untuk menjadi kelompok etnik yang dominan. Jika di dalam negeri itu terdapat suatu kelompok etnik yang merupakan separuh dari jumlah seluruh penduduk, maka nilai indikatornya adalah 3; apabila kelompok etniknya merupakan tiga perempat dari seluruh penduduk, maka nilai indikatornya adalah 4. Nilai 5 dicapai oleh indikator no. 1 itu apabila seluruh penduduk suatu negara atau daerah terdiri dari hanya satu etnik saja yang memiliki bahasanya sendiri.

Gonzalez memberikan nilai 2 kepada indikator ini yang sebenarnya tidak begitu sesuai lagi dengan keadaan kebahasaan sekarang di Indonesia. Pada saat ini, Indonesia sepatutnya mendapat nilai 4 untuk indikator no. 1. Dan pada tahun dua ribuan yang akan datang nilai indikator tersebut akan menjadi 5, sesuai dengan proyeksi kependudukan yang dimuat pada Tabel 4. Keadaan kebahasaan pada waktu itu di Indonesia akan menjadi homogen, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia menjadi mantap. Peranan dan fungsi bahasa daerah menjadi semakin kecil dan sempit. Keadaan ini dapat merupakan suatu masalah.

Kompetensi Anggota Masyarakat Di Dalam Mempergunakan Bahasa Yang Berkedudukan Sebagai Bahasa Komunikasi Luas Untuk Hubungan Internasional Dan Untuk Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Indikator ini memiliki hubungan yang sangat penting dengan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sosial dan kebahasaan pada khususnya, di mana untuk hubungan perdagangan internasional dan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling mutakhir mempergunakan sarana bahasa komunikasi luas (*language of wider communication*). Kompetensi di dalam bahasa komunikasi luas sangat bermanfaat di dalam perdagangan dan perundingan internasional, seminar/simposium ilmiah antar bangsa. Nilai yang diberikan oleh Gonzalez untuk indikator no. 4 ini adalah 3. Deskripsi indikatornya adalah : suatu golongan elit yang minoritas memiliki penguasaan suatu bahasa komunikasi luas secara pasif dan aktif yang memadai untuk mengadakan hubungan-hubungan internasional dan untuk mengerti secara positif literatur ilmiah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penguasaan anggota masyarakat terhadap bahasa komunikasi luas (bahasa

Inggris, misalnya) di dalam permulaan tahun 80-an sekarang ini jauh lebih baik dan meluas jika dibandingkan dengan deskripsi indikasi di atas. Nilai indikator ini, dengan demikian, haruslah paling sedikitnya 4 kalau bukan 5. Sebab deskripsi indikasi untuk nilai 4 adalah : sejumlah kecil kader-kader yang memiliki pendidikan baik anggota berbagai kelompok etnik mempunyai kompetensi yang aktif dan pasif di dalam suatu bahasa komunikasi luas yang bertindak sebagai penerjemah di dalam hubungan internasional dan penyebarluasan pengetahuan tentang ilmu dan teknologi yang tertulis di dalam bahasa komunikasi luas itu.

Deskripsi indikasi untuk nilai 5 hampir sama dengan untuk nilai 4. Hanya jumlah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi aktif dan pasif di dalam bahasa komunikasi luas itu jauh lebih besar.

Implikasi dari indikator ini ialah tetap diperlukannya bahasa komunikasi luas oleh negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Bahasa komunikasi luas itu dapat berupa bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Bahasa Melayu (bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa Malaysia di Malaysia, bahasa Kebangsaan di Singapore, dan bahasa Melayu di Brunei) untuk mengadakan hubungan-hubungan antar bangsa di kawasan Asia Tenggara sudah dapat digolongkan ke dalam kategori bahasa komunikasi luas. Kelemahannya hanyalah bahasa Melayu belum dipergunakan secara luas di dalam tulisan-tulisan ilmiah dan teknologi.

Daya-guna Bahasa-bahasa Pengantar Yang Dipergunakan Pada Semua Jenjang Lembaga Pendidikan

Di dalam hal penentuan bahasa pengantar di semua jenjang lembaga pendidikan di Indonesia ketentuannya sudah ada, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa daerah dapat dipergunakan pada dua tahun yang pertama sebagai bahasa-bantu guna memperkuat pengertian anak didik. Tetapi kenyataan yang ada, bahasa Indonesia telah dipergunakan dari TK sampai di PT. Seharusnya nilai untuk indikator ini adalah 5 dan bukannya 3 sebagaimana yang diberikan oleh Gonzalez. Hal ini sesuai dengan deskripsi indikasi yang dituntut, yaitu adanya suatu bahasa yang dimengerti dan dipergunakan oleh hampir semua orang yang juga dipergunakan sebagai bahasa untuk buku-buku dan penerbitan lainnya dan sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan.

Di dalam hal pembinaan dan pengembangan bahasa nasional, Indonesia jauh lebih maju jika dibandingkan, misalnya, dengan Pilipina. Meskipun demikian, Gonzalez memberikan nilai 4 kepada indikator ini. Sesuai dengan tuntutan nilai 5 yang bunyinya adalah : bahasa nasional dipergunakan seba-

gai bahasa pengantar di dalam tulisan-tulisan ilmiah terutama di bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka adalah wajar apabila indikator ini mendapat nilai 5.

Penutup

Identifikasi masalah kebahasaan melalui indeks keadaan kebahasaan secara menyeluruh sebagaimana telah dikemukakan di depan, dapat memberikan gambaran yang nyata tentang masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu negara, daerah, ataupun kawasan. Dengan mengetahui masalahnya, suatu tindakan yang tepat dan terarah untuk mengatasinya dapat diambil.

Masalah kebahasaan yang mungkin timbul dapat pula didikasi sedini mungkin melalui proyeksi kebahasaan yang mendasarkan diri pada sensus penduduk. Proyeksi jumlah penutur bahasa Indonesia di dalam tahun 2000-an seperti yang dimuat oleh Tabel 4, memberikan petunjuk kepada para ahli bahasa dan pejabat kebahasaan yang berwenang tentang nasib bahasa daerah yang banyak jumlahnya itu. Sebab paling lambat di dalam tahun 2041 yang akan datang seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya diperkirakan berkisar 350 juta orang semuanya akan menjadi penutur bahasa Indonesia. Lalu bagaimana nasib bahasa daerah? Pertanyaan ini dapat dijawab oleh para ahli bahasa dan perencana bahasa. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedikitnya telah mulai menjawab pertanyaan tersebut dengan menyelenggarakan penelitian-penelitian kebahasaan di daerah-daerah. Serangkaian penelitian tentang bahasa daerah, baik yang memiliki jumlah penutur yang kecil maupun yang memiliki jumlah penutur yang besar, telah dilakukan dan laporan-laporan hasil penelitian itu telah diterbitkan.

Seperti diterangkan di dalam butir 4.2 di depan, bahasa Melayu (yaitu : bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa Melayu di Brunei dan bahasa Kebangsaan di Singapore) memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi bahasa komunikasi luas (*language of wider communication*) di kawasan asia Tenggara, menggantikan bahasa Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Husen. 1978. Bahasa Indonesia as a unifying language of wider communication : a historical and sociolinguistic perspective. Unpublished dissertation. Manila, Ateneo—PNC Consortium for a Ph.D. in Linguistics.
- , 1980. Tempat dan peranan kajian bahasa di dalam kajian Wilayah Asia Pasifik : suatu tinjauan sosiolinguistik. Makalah disampaikan pada Seminar Ilmiah Terbatas; "Indonesia dan Perkembangan Asia—Pasifik", 19–21 Mei 1980. Ujung Pandang, Universitas Hasanuddin.
- , 1982. "Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan modern dan komunikasi luas di kawasan Asia Tenggara : suatu justifikasi statistik. Di dalam Pelangi bahasa, suntingan Harimurti Kridalaksana dan Anton M. Moeliono, 273 – 289. Jakarta, Bhratara.
- Asmah Hj. Omar, ed. 1975. Essays on Malaysian linguistics. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Fishman, Joshua A., ed. 1974. Advanced in language planning. The Hague, Mouton.
- Gonzalez, Andrew B., FSC 1979. Language and social development in the Pasific area. Paper presented in the XIVth Pasific Congress. Khabarovsk, USSR, mimeographed.
- Halim, Amran, ed. 1976. Politik Bahasa Nasional. 2 jilid. Jakarta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Isman, Jakob. 1977. "The role of the national language in fostering national identities in Indonesia". Forum Pendidikan 3.1 353–67.
- Kridalaksana, Harimurti. 1974. Fungsi bahasa dan sikap bahasa, Ende, Nusa Indah.

- , dan Anton M. Moeliono, eds. 1982. *Pelangi bahasa*. Jakarta, Bhara-tara.
- Mangahas, Mahar. 1976. "The measurement of the Philippines national welfare. In *Measuring Philippines Development*, ed. by Mahar Mangahas, 1—40.
- Moeliono, Anton M. 1971. "Bahasa Indonesia dan pembakuannya". Dalam *Seminar Bahasa Indonesia 1968*, suntingan Harimurti Kridalaksana dan Djoko Kentjono. Ende, Nusa Indah.
- Rubin, Joan and Bjorn H. Jernudd, eds. 1971. *Can language be planned? Sociolinguistic Theory and practice for developing nations*. Honolulu, University Press of Hawaii.

Monograf :

- Biro Pusat Statistik, Erie E. 1975. *Sensus penduduk 1971*. 27 jilid Jakarta, BPS.
- Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, 1982. *Laporan sementara sensus penduduk 1980 untuk Propinsi Sulawesi Selatan*.

REAKSI SUBJEKTIF TERHADAP BAHASA INDONESIA BAKU DAN NONBAKU : SEBUAH PENGKAJIAN SIKAP BAHASA

Asim Gunarwan
Universitas Indonesia

Pengantar

Satu hal yang menarik dari usaha-usaha perencanaan bahasa di negara-negara lain adalah adanya kecenderungan bahwa ketidakberhasilan usaha-usaha-usaha itu disebabkan ketidakberterimaan apa yang direncanakan itu oleh bagian masyarakat yang berpengaruh atau yang dominan. Di Israel, misalnya, usaha pembakuan lafal dengan menetapkan lafal bahasa Ibrani ragam *Sephardi* sebagai lafal baku mengalami kegagalan karena golongan yang berpengaruh di negara itu, yaitu golongan *Ashkenazi*, kaum imigran Yahudi dari Eropa, tidak menerimanya. Demikian pula, Irlandia tidak berhasil menghidupkan kembali bahasa Irlandia karena golongan yang dominan di negara itu, yaitu golongan yang bukan petani, lebih suka berbahasa Inggris dan sudah puas dengan kedudukan bahasa Irlandia sebagai bahasa seremonial belaka.

Yang juga menarik dari usaha-usaha perencanaan bahasa adalah langkanya evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dalam hal pembakuan bahasa, evaluasi itu bahkan merupakan masalah tersendiri : adalah sulit untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilannya secara tepat. Sulitnya pengukuran itu antara lain karena pembakuan bahasa biasanya tidak disertai dengan pemerian mendetil mengenai sasarannya dan tidak pula diberi kerangka acuan waktu bilamana hasilnya kira-kira akan tercapai. Hal ini memang sukar sekali dilakukan karena masalah-masalah dalam pembakuan bahasa dapat kita katakan termasuk masalah-masalah yang menurut Rittel dan Webber (1973), seperti dikutip Rubin (183 : 338), adalah "masalah-masalah kejam" ("*wicked problems*"), yaitu masalah-masalah yang kompleks, sukar dirumuskan, dan sukar dipecahkan. Satu ciri lain "masalah kejam" itu ialah bahwa ia tidak mengenal aturan berhenti. Apalagi pembakuan itu sendiri

memang suatu proses yang tidak pernah berhenti. Menurut Amran Halim (1979 : 29), pembakuan itu "berlangsung terus menerus selama bahasa yang bersangkutan tetap digunakan oleh masyarakat yang hidup tumbuh, dan berkembang sedemikian rupa sehingga, sebenarnya, tidak dapat dikatakan dengan pasti di mana pangkal dan di mana ujungnya."

Makalah ini adalah laporan mengenai penelitian kecil yang tujuannya adalah mengevaluasi kira-kira sampai seberapa jauh usaha pembakuan bahasa Indonesia berterima oleh masyarakat. Khususnya penelitian itu bertujuan mencari informasi bagaimana *sikap* sebagian masyarakat mahasiswa, sebagai calon bagian masyarakat yang berpengaruh, terhadap bahasa Indonesia baku. Informasi mengenai sikap bahasa itu setidaknya-tidaknya mempunyai arti penting apabila ia dikaitkan dengan keberterimaan di atas : orang atau kelompok masyarakat sukar diharapkan mau menerima sesuatu kalau mereka mempunyai sikap negatif terhadapnya. Apa yang terjadi di Kepulauan Fro di Atlantik Utara adalah contoh yang jelas. Sebagian besar penduduk kepulauan itu tidak mau menerima dipakainya dialek selatan sebagai wahana sesuatu yang serius karena mereka mempunyai sikap negatif terhadap dialek itu, yang mereka anggap sebagai "bahasa orang selatan yang terbelakang" (Ferguson, 1983 : 39). Akhirnya mereka berhasil dengan gemilang mengembangkan bahasa baku mereka setelah mereka memilih dialek tengah, yang mereka asosiasikan dengan hal-hal yang positif, sebagai dasar pembakuan itu.

Metode

Cara yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik "samaran berbanding" (*matched guise*) yang pernah dipakai oleh Lambert dan kawan-kawan (1960). Teknik ini mirip dengan teknik diferensial semantik yang dikemukakan oleh Osgood, Suci, dan Tannenbaum. Bedanya adalah bahwa apabila pada teknik Osgood dkk. itu yang ditelaah adalah reaksi subjek terhadap kata-kata lepas, pada teknik Lambert dkk. itu yang ditelaah adalah reaksi subjek terhadap bahasa.

Lambert memakai teknik tersamar itu untuk menjelaskan dasar sosio-psikologis pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Secara singkat, teori belajar bahasa yang dikemukakan Lambert mengatakan bahwa agar seseorang berhasil dalam belajar bahasa kedua atau bahasa asing, secara psikologis ia harus siap mengambil alih berbagai aspek tingkah laku yang merupakan ciri-ciri anggota kelompok lingustik-kultural yang lain itu. Kecenderungan etnosentrisnya dan sikapnya terhadap anggota kelompok yang lain

itu, menurut Lambert, ikut menentukan seberapa jauh orang yang belajar bahasa kedua atau bahasa asing itu akan berhasil (Gardner dan Lambert, 1972 : 3). Sikap itu, dalam kaitannya dengan tujuan belajar bahasa, dapat berupa sikap instrumental dan sikap integratif, yang masing-masing dapat positif atau negatif. Menurut Lambert lagi, dalam menentukan keberhasilan belajar bahasa sikap instrumental kurang efektif daripada sikap integratif.

Teknik Lambert itu, seperti mula-mula diterapkan, menggunakan beberapa dwibahasawan yang dapat berbicara dalam dua bahasa yang bersangkutan dengan baik dan lancar. Masing-masing dari dwibahasawan yang akan menyamar sebagai dua orang yang berbeda itu diminta berbicara dua kali, pertama dalam bahasa yang satu dan kemudian dalam bahasa yang lain. Kedua wacana itu direkam dan sejumlah subjek kemudian diminta mendengarkan hasil rekaman itu. Kepada subjek dijelaskan bahwa mereka diminta menilai kepribadian atau ciri-ciri "orang-orang" yang suaranya telah mereka dengarkan itu dengan menggunakan skala penilaian, seperti kalau kita mengukur makna konotatif kata-kata dengan menggunakan teknik Osgood dkk., atau kalau kita mengukur sikap afektif dengan menggunakan teknik Likert. Inilah kuncinya : subjek tidak diberi tahu, dan diusahakan jangan sampai mereka mendapat kesan, bahwa untuk setiap pasang wacana mereka sebenarnya telah mendengarkan dua orang yang berbeda.

Penalaran mengapa untuk satu samaran dipakai seorang dwibahasawan dengan dua wacana (dalam dua bahasa), dan mengapa kedua wacana itu diusahakan agar isinya sepadan, adalah agar diperoleh jumlah maksimal faktor yang sama. Karena faktor-faktor yang lain sama, yang berbeda tinggal variabel independennya, yaitu masing-masing dari kedua bahasa yang dipakai. Dengan demikian, perbedaan yang terdapat dalam variabel dependennya, yaitu nilai pada skala penilaian, dapat dikatakan hanyalah sebagai akibat pengaruh bahasa yang dipakai.

Dengan berkembangnya sosiolingustik, teknik Lambert yang mula-mula dipakai dalam pengkajian pengajaran bahasa itu kemudian dipakai untuk mengukur reaksi subjek terhadap bahasa, dialek, gaya bahasa, dan bahasa berakson dengan kerangka teori antardisiplin itu. Di dalam penelitian ini, seperti disebutkan di atas dipakai teknik Lambert itu untuk mengukur sikap bahasa dalam kaitannya dengan usah apembakuan bahasa Indonesia. Alasan mengapa dipilih teknik ini, dan mengapa tidak dipakai cara menanyakan langsung melalui kuesioner, adalah bahwa teknik Lambert itu dianggap lebih baik karena pada dasarnya teknik itu memancing jawaban secara tidak langsung

sehingga dapat diharapkan bahwa jawaban itu lebih sah. Kalau responden atau subjek ditanya langsung, ada kemungkinan mereka memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemungkinan ini menjadi lebih besar kalau yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang menyangkut diri subjek dengan sesuatu yang bersifat nasional, seperti bahasa Indonesia baku itu.

Pelaksanaan

- a) *Instrumen penelitian.* Agak berbeda dengan penelitian yang menggunakan teknik Lambert yang asli, yang hanya memakai wacana lisan sebagai stimulasinya, penelitian ini menggunakan dua macam wacana, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Stimulasi dalam bentuk wacana tulis itu dimaksudkan sebagai bahan latihan bagi subjek untuk mengerjakan eksperimen dengan stimulasi lisan nantinya. Dengan demikian penekanannya adalah pada stimulasi dalam bentuk wacana lisan itu.

Masing-masing dari wacana itu, baik yang tulisan maupun yang lisan, terdiri dari dua versi yang isinya kira-kira sama, yang satu dalam bahasa Indonesia baku (BIB) dan yang lain dalam bahasa Indonesia nonbaku (BIN). Di dalam penelitian ini tidak dipakai kelompok pembanding (*control group*), tetapi kebakuan dan ketidakbakuan versi-versi itu telah dikonfirmasi oleh beberapa ahli bahasa Indonesia.

Wacana tulis yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari satu paragraf dan diangkat dari sebuah buku astrologi. Dengan sengaja dipilih topik mengenai pengaruh bintang terhadap kehidupan manusia agar subjek mengira bahwa eksperimen ini ialah eksperimen mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri seseorang, seperti dikesankan kepada mereka. Versi BIB dan versi BIN wacana tulis ini kira-kira sama panjang.

Wacana lisan terdiri dari dua topik. Wacana topik pertama, mengenai angin puyuh, dibawa oleh pria dan diangkat dari sebuah artikel dalam sebuah jurnal internasional. Perubahan-perubahan dibuat sedemikian rupa sehingga kesan "luar negeri" tidak ada. Versi BIB dan versi BIN untuk topik ini kira-kira juga sama panjang. Wacana topik kedua mengenai baik-buruknya bersalin di rumah. Wacana ini diangkat dari sebuah buku mengenai kesehatan ibu, dan dibawa oleh wanita. Versi BIB dan versi BIN untuk wacana ini kira-kira juga sama panjang.

Wacana tulis tersebut di atas dimuat dalam lembar jawaban yang diberikan kepada subjek. Wacana lisannya direkam, dan agar wacana

ini terdengar wajar, kedua orang yang diminta membawakannya diminta berlatih lebih dulu sebelum suara mereka direkam. Diusahakan agar nada dan kecepatan berbicara mereka dalam membawakan kedua versi topik masing-masing itu sama. Urutan stimulasi lisan ini adalah :

- (1) topik pertama versi 1 (dalam BIB, dibawakan pria),
- (2) topik kedua versi 2 (dalam BIN, dibawakan wanita),
- (3) topik pertama versi 2 (dalam BIN, dibawakan pria), dan
- (4) topik kedua versi 1 (dalam BIB, dibawakan wanita).

Untuk mengecek apakah subjek dapat membedakan bahasa baku dari bahasa nonbaku, setelah mengerjakan eksperimen mereka diberi tes yang terdiri dari 20 kalimat, 5 di antaranya adalah kalimat baku. Yang harus mereka lakukan di sini adalah membutuhkan tanda cek di depan kalimat-kalimat baku. Kepada subjek juga ditanyakan apakah mereka mengetahui apa yang disebut teknik Lambert atau *matched guise* itu. Mereka diminta menjawab pertanyaan itu dengan jawaban "ya" atau jawaban "tidak".

- b) *Subjek*. Subjek atau penilai di dalam penelitian ini adalah 82 orang mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan mayoritas mereka adalah wanita. Sebenarnya ada 86 orang yang ikut di dalam eksperimen ini sehingga lembar jawaban yang masuk berjumlah 86. Dari 86 lembar jawaban itu 2 tidak dihitung karena yang mengisi adalah mahasiswa Jepang yang bahasa Indonesianya belum terlalu baik, 1 tidak dihitung karena yang mengisi sudah tahu teknik Lamber itu (dari kuliah sosiolinguistik), dan 1 lagi tidak dihitung karena sebagian besar skala penilaian tidak diisi. Ke-82 subjek itu dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : Kelompok 1 (K1), yang terdiri dari mahasiswa baru (semester ke-1), berjumlah 36 orang; Kelompok 2 (K2), yang terdiri dari mahasiswa semester ke-3, berjumlah 27 orang; dan Kelompok 3 (K3) berjumlah 19 orang dan terdiri dari mahasiswa semester ke-5, ke-7, dan ke-9. K1 terdiri dari mahasiswa seksi Inggris, Jepang, Arab, dan jurusan Indonesia dan K2 dan K3 terdiri dari mahasiswa seksi Inggris, Jepang, dan Arab. Maksud pengelompokkan itu ialah untuk mengetahui apakah ada perbedaan pola penilaian di antara ketiganya.

Jumlah subjek di atas jelas tidak mewakili populasi, yaitu semua mahasiswa Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, apalagi populasi dalam arti yang lebih luas, yaitu semua mahasiswa Universitas Indonesia. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa kesimpulan-kesimpulan

yang dapat ditarik dari data yang diperoleh dari jawaban ke-82 orang itu tidak perlu diperhatikan, apalagi kalau kita ingat bahwa untuk pengkajian-pengkajian model Lambert ini jumlah subjek atau penilai cenderung tidak besar. Dalam pengkajian El-Dash dan Tucker (1975), misalnya, subjek berjumlah 80 orang. Seterusnya dapat kita catat bahwa di alam pengkajian Elyan dkk. (1978) subjek berjumlah 76 orang; Gould (1977) 91 orang; dan Fraser (1973) 50 orang. Di dalam pengkajian Gardner dan Lambert di Filipina, yang terkenal dengan nama *Philippine Study* itu, jumlah subjek "hanya" 103 orang saja.

- c) *Prosedur Eksperimen.* Eksperimen diberikan pada jam kuliah dan memakan waktu kira-kira 45 menit. Kepada Subjek mula-mula dijelaskan bahwa tujuan eksperimen itu ialah menilai kepribadian orang. Kemudian mereka diberi penjelasan bagaimana mengerjakan eksperimen itu. Penjelasan diberikan secara lisan berdasarkan petunjuk tertulis yang dibagikan kepada mereka. Setelah penjelasan diberikan, subjek diminta mengerjakan eksperimen bagian pertama, yaitu menilai "orang-orang" yang telah menulis dua paragraf itu, yang seperti disebutkan di atas yang pertama dalam BIN dan yang berikutnya dalam BIB. Isi kedua paragraf itu diberitahukan lebih dulu agar subjek dapat memusatkan perhatian kepada bahasanya saja. Setelah semua subjek selesai dengan penilaian mereka untuk bagian pertama ini, mereka diminta mengerjakan eksperimen bagian kedua, yang urutannya adalah seperti disebutkan pada butir 3a di atas. Isi tiap-tiap warna diberitahukan kepada subjek sebelum wacana yang bersangkutan diperdengarkan. Eksperimen ini diakhiri dengan subjek mengerjakan tes kecil yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah mereka dapat membedakan kalimat baku dari kalimat nonbaku.
- d) *Analisis.* Yang pertama-tama dilihat pada setiap lembar jawaban adalah beberapa kesalahan dibuat oleh subjek yang bersangkutan pada tes kalimat baku itu. Hal ini dimaksudkan untuk memilih-milih lembar jawaban lebih jauh. Subjek yang "tidak lulus" dalam tes ini tidak akan dihitung, dalam arti lembar jawabannya tidak akan diikutsertakan, karena ia dianggap tidak dapat membedakan bahasa baku dari bahasan nonbaku. Langkah selanjutnya ialah mentabulasikan jawaban tiap-tiap subjek yang berupa angka-angka penilaian itu ke dalam lembar tabulasi. Angka rata-rata penilaian atas tiap-tiap ciri (*trait*) pada enam skala penilaian itu merupakan data mentah dalam penelitian ini. Analisis dibuat atas

dasar angka rata-rata penilaian itu. Untuk mengukur signifikansi dipakai pengujian- t (t -test).

Hasil Penelitian

- a) *Tes kalimat baku.* Dari hasil tes kecil yang dimaksudkan untuk memilah subjek yang tidak dapat membedakan kalimat baku dari kalimat non-baku itu ternyata bahwa 4 orang membuat 1 kesalahan (jumlah kesalahan terkecil) dan 1 orang membuat 8 kesalahan (jumlah kesalahan terbesar). Perincian selanjutnya adalah : 13 orang membuat 2 kesalahan, 17 orang 3 kesalahan, 20 orang 4 kesalahan, 13 orang 5 kesalahan, 6 orang 6 kesalahan, dan 3 orang membuat 7 kesalahan. Jumlah kalimat yang diteskan adalah 20 buah. Kalau nilai batas lulus kita tentukan 60 (atau betul 12), berarti semua subjek lulus dari tes kecil itu, dan dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ke-82 subjek itu dapat membedakan, dalam tingkat yang berbeda-beda, mana yang kalimat baku dan mana yang bukan. Berdasarkan hal ini, semua data dari ke-82 lembar jawaban itu diolah seluruhnya.

Adalah menarik bahwa pada umumnya subjek mengira bahwa kalimat-kalimat

Seperti Bapak ketahui, bahwa penyakit ini disebabkan virus.

Meskipun ia sudah kaya, tapi ia belum merasa kaya.

Bagi mereka yang tertarik, dipersilahkan datang.

Kami tidak bisa merubah kebiasaan jelek ini.

Menurut Prof. Hasan, maka reboisasi perlu segera dilaksanakan.

adalah kalimat-kalimat baku. Kalau kecenderungan ini terdapat pula pada masyarakat yang lebih luas, terutama pada bagian masyarakat yang dominan, berarti bahwa para perencana bahasa harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengalahkan bentuk-bentuk yang menyaingi padanan bakunya itu.

- b) *Stereotype.* Stereotype dapat kita katakan sebagai gambaran atau nosi yang dapat bersifat tetap yang dimiliki oleh banyak orang mengenai orang sebagai anggota suatu kelompok atau mengenai kelompok itu sendiri. Menurut Gardner dan Lambert (1972 : 98), ada dua cara orang memperoleh stereotype itu. Pertama, ia dapat memperolehnya dari

pengalaman langsung dengan kelompok itu. Kedua, ia dapat memperolehnya secara tidak langsung, yaitu melalui sikap yang ia peroleh dari sikap orang-orang penting di lingkungan sosialnya terhadap kelompok itu. Orang-orang penting itu sendiri mungkin memperolehnya sikap itu dari pengalaman langsung mereka dengan kelompok itu atau mungkin juga mereka memperoleh sikap itu dari pengalaman tidak langsung, atau kalau langsung intensitasnya rendah, dengan kelompok tersebut.

Pada dasarnya stereotipe itulah yang dipancing dengan menggunakan teknik Lambert itu. Pada penelitian ini, misalnya, subjek secara tidak langsung diminta untuk menggambarkan stereotipe mereka terhadap orang atau orang-orang yang biasanya menggunakan bahasa Indonesia baku (BIB) dan orang atau orang-orang yang biasanya menggunakan bahasa nonbaku (BIN). Akan tetapi kalau kita bandingkan kedua stereotipe itu. Akan tetapi, berhubung dengan keterbatasan ruang dan waktu, dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu mencari informasi mengenai usaha pembakuan, kita lihat saja bagaimana stereotipe subjek terhadap kedua penutur baku dalam eksperimen ini, yang sekaligus mencerminkan stereotipe subjek terhadap orang-orang yang biasanya menggunakan BIB itu. Stereotipe ini dapat kita baca pada Tabel 1, 2, dan 3 berikut ini.

TABEL 1. Angka rata-rata penilaian subjek terhadap penulisan wacana BIB dan urutan ciri-cirinya.

Ciri	Kelompok			
	K1	K2	K3	K1 + K2 + K3
(1) Kepandaian	5.80 [3]	5.62 [4]	5.00 [1½]	5.47 [3]
(2) Kesopanan	5.87 [1]	6.00 [1]	5.05 [5]	5.64 [2]
(3) Pendidikan	5.65 [5] 6/	5.14 [9]	5.15 [4]	5.31 [6]
(4) Kedudukan Sosial	5.18 [9]	5.37 [7]	4.73 [8]	5.09 [8]
(5) Kemenarikan Hati	5.37 [8]	5.25 [9]	4.63 [9]	5.08 [9]
(6) Kewibawaan	5.75 [4]	5.55 [5]	4.88 [6]	5.39 [5]
(7) Kejujuran	4.93 [11]	5.11 [10]	4.52 [10]	4.85 [10]
(8) Kepercayaan Diri	5.65 [5/6]	5.44 [6]	4.78 [7]	5.29 [6]
(9) Rasa Humor	3.78 [12]	3.62 [12]	3.83 [12]	3.74 [12]
(10) Keramahan	3.12 [10]	4.74 [11]	4.42 [11]	4.76 [11]
(11) Ketenangan	5.84 [2]	5.74 [3]	5.38 [3]	5.65 [1]
(12) Kepemimpinan	5.56 [1]	5.81 [2]	5.00 [½]	5.45 [4]

TABEL 2. Angka rata-rata penilaian subjek terhadap pembawa wacana **BIB topik 1** urutan ciri-cirinya.

Kelompok Ciri	K1	K2	K3	K1 + K2 + K3
(1) Kepandaian	5.55 [2]	5.14 [2]	5.31 [2]	5.37 [2]
(2) Kesopanan	5.83 [1]	5.59 [1]	5.42 [1]	5.61 [1]
(3) Pendidikan	5.41 [3/4]	4.85 [4/5]	5.10 [4/5]	5.12 [3]
(4) Kedudukan Sosial	5.11 [8]	4.88 [5]	4.83 [9]	4.94 [8/9]
(5) Kemenarikan Hati	5.08 [9]	4.51 [10/11]	4.94 [7/8]	4.84 [10]
(6) Kewibawaan	5.27 [6]	4.85 [6/7]	5.05 [6]	5.05 [4/5]
(7) Kejujuran	5.00 [10]	4.96 [4]	5.10 [4/5]	5.02 [7]
(8) Kepercayaan Diri	5.36 [5]	4.66 [9]	5.22 [3]	5.08 [6]
(9) Rasa Humor	3.77 [12]	3.29 [12]	3.61 [12]	3.55 [12]
(10) Keramahan	4.83 [11]	4.51 [10/11]	4.63 [11]	4.65 [11]
(11) Ketenangan	5.16 [7]	4.74 [8]	4.94 [7/8]	4.94 [8/9]
(12) Kepemimpinan	5.41 [3/4]	5.03 [3]	4.73 [10]	5.05 [4/5]

TABEL 3. Angka rata-rata penilaian subjek terhadap pembawa wacana **BIB topik 2** dan urutan ciri-cirinya.

Kelompok Ciri	K1	K2	K3	K1 + K2 + K3
(1) Kepandaian	5.11 [3]	5.29 [5]	5.21 [2/3]	5.20 [3]
(2) Kesopanan	5.52 [1]	5.48 [1]	5.52 [1]	5.50 [1]
(3) Pendidikan	5.47 [2]	5.40 [2/3]	5.21 [2/3]	5.36 [2]
(4) Kedudukan Sosial	4.77 [8]	4.81 [8]	4.73 [11]	4.77 [10/11]
(5) Kemenarikan Hati	4.82 [10]	4.62 [10]	4.89 [10]	4.77 [10/11]
(6) Kewibawaan	4.83 [9]	4.70 [9]	5.00 [7]	4.84 [8]
(7) Kejujuran	4.68 [11]	5.34 [4]	4.94 [8/9]	4.98 [6]
(8) Kepercayaan Diri	5.02 [4]	5.40 [2/3]	5.10 [5]	5.17 [4]
(9) Rasa Humor	4.11 [12]	3.59 [12]	3.94 [12]	3.88 [12]
(10) Keramahan	4.94 [5]	4.70 [11]	4.94 [8/9]	4.86 [9]
(11) Ketenangan	4.88 [7]	4.96 [7]	5.05 [6]	4.96 [7]
(12) Kepemimpinan	4.88 [7]	4.96 [7]	5.05 [6]	4.96 [7]

Dilihat secara keseluruhan, angka-angka di dalam ketiga tabel di atas menunjukkan kecenderungan positif sehingga dapat kita katakan bahwa stereotipe subjek terhadap pemakai BIB cenderung positif. Nilai tengah skala penilaian adalah 4 dan sebagian besar angka-angka itu di atas 5. Perkecualian yang patut asas adalah angka untuk rasa humor; kecuali pada K1 Tabel 3, semua angka untuk butir penilaian ini adalah dibawah 4. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa subjek cenderung menstereotipekan pemakai BIB sebagai "orang yang tidak mempunyai rasa humor tinggi".

Angka-angka di dalam tabel-tabel itu dapat juga menunjukkan profil umum pemakai BIB. Profil ini dapat kita gambarkan dengan membuat urutan-urutan keduabelas ciri itu menurut angka masing-masing untuk setiap kelompok subjek dan untuk semua subjek. Seperti kita harapkan dari nilai rata-rata rasa humor yang rendah-rendah itu, ciri *rasa humor* itu pun menduduki titik terendah pada profil itu. Yang juga menarik adalah bahwa kecuali pada K1 (kelompok mahasiswa baru), ciri *keramahan* juga menduduki titik yang tinggi pada profil yang cenderung positif itu.

Stereotipe mengenai kejujuran pemakai BIB, yang mencerminkan stereotipe subjek terhadap orang-orang yang biasanya menggunakan BIB, tidak begitu seragam. Namun tampak ada kecenderungan bahwa kejujuran tidak menempati tempat yang tinggi pada profil itu : dari 12 angka yang menunjukkan urutan di dalam tabel-tabel di atas, 8 menduduki tempat rendah pada profilnya.

Implikasi lebih jauh dari angka-angka di dalam ketiga tabel di atas dapat kita tarik sendiri-sendiri. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa secara umum hasil eksperimen dengan menggunakan stimulasi wacana tulis sebanding dengan hasil eksperimen dengan menggunakan stimulasi wacana lisan. Karena itu hasil eksperimen dengan wacana tulis itu dipakai sepenuhnya dalam analisis ini. Berbeda dengan statusnya semula, yaitu sekedar sebagai bahan latihan sebelum subjek mengerjakan eksperimen berikutnya, wacana tulis itu disamakan statusnya dengan wacana lisan.

- c) *Sikap bahasa.* Sikap subjek secara keseluruhan terhadap BIB dapat dibaca dari ketiga tabel di atas. Dengan nilai tengah 4, semua ciri, kecuali ciri *rasa humor*, mempunyai nilai rata-rata di atas 4, yang berarti bahwa sikap mereka terhadap BIB itu berbeda di daerah positif. Masalahnya ada-

lah berapa derajat kepositifan itu. Pertanyaan ini perlu dijawab, pertama karena angka-angka di dalam tabel itu adalah angka-angka relatif, tidak mempunyai nilai absolut, dan kedua karena ada variabel independen lain, yaitu BIN, yang juga perlu kita perhitungkan.

Satu hal yang menghambat pembakuan adalah anggapan bahwa semua bentuk bahasa yang ada adalah saja saja, dan anggapan itu menurut Moeliono (1975 : 4) tercermin pada pendirian "asal orang mengerti". Untuk mengetahui bagaimana sikap subjek terhadap BIB dibandingkan dengan sikap mereka terhadap BIN, kita perlu membandingkan angka rata-rata tiap-tiap ciri yang diperoleh dari stimulus BIN. Karena tujuan kita adalah mengetahui perbandingan antara sikap terhadap BIB dan sikap terhadap BIN secara umum, di dalam hal ini subjek tidak dikelompok-kelompokkan seperti pada bagian terdahulu melainkan dijadikan satu saja. Perbandingan itu terlihat pada Tabel 4 berikut ini. Di situ angka rata-rata ciri *kepandaian* untuk variabel BIN sebesar 3,79 itu, misalnya, diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai ciri *kepandaian* untuk semua wacana dalam BIN, dan kemudian jumlah itu dibagi dengan tiga kali jumlah subjek yang memberikan penilaian.

TABEL 4. Perbandingan angka rata-rata penilaian semua subjek terhadap wacana dalam BIN dan terhadap wacana dalam BIB

Ciri \ Ragam	BIN	BIB	Perbedaan
(1) Kepandaian	3.79	5.34	+ 1.55
(2) Kesopanan	4.03	5.58	+ 1.55
(3) Pendidikan	3.48	5.26	+ 1.78
(4) Kedudukan Sosial	3.66	4.93	+ 1.27
(5) Kemenarikan Hati	3.77	4.89	+ 1.12
(6) Kewibawaan	3.34	5.09	+ 1.75
(7) Kejujuran	4.66	4.95	+ 0.29
(8) Kepercayaan Diri	4.25	5.18	+ 0.93
(9) Rasa Humor	4.28	3.72	- 0.56
(10) Keramahan	4.37	4.75	+ 0.38
(11) Ketenangan	3.99	5.20	+ 1.21
(12) Kepemimpinan	3.22	5.15	+ 1.83

Penilaian subjek terhadap BIB, dalam hubungannya dengan BIN, ciri demi ciri pada dasarnya adalah perbedaan antara angka untuk BIB dan angka untuk BIN. Perbedaan dengan nilai positif berarti pemakai BIB dinilai lebih positif daripada pemakai BIN untuk ciri yang bersangkutan. Sebaliknya, perbedaan dengan nilai negatif berarti bahwa pemakai BIB dinilai kurang daripada pemakai BIN untuk ciri yang bersangkutan.

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat kita katakan bahwa kecuali untuk *rasa humor*, pemakai BIB dinilai lebih daripada pemakai BIN. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum BIB dinilai lebih positif daripada BIN. Untuk *pendidikan* dan *kepemimpinan* pemakai BIB dinilai hampir 2 jenjang di atas pemakai BIN, sedangkan untuk *rasa humor*, yang pertama dinilai kira-kira $\frac{1}{2}$ jenjang di bawah yang kedua. Pengujian-t atas perbedaan angka rata-rata itu menghasilkan nilai $t = 6.02$. Dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) = 22, $t = 6.02$ itu diasosiasikan dengan $p < 0.01$ (sangat signifikan). Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa *derajat kepositifan sikap subjek terhadap BIB adalah sangat signifikan*.

Penutup

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memonitor keberterimaan pembakuan bahasa Indonesia oleh masyarakat, khususnya sebagian masyarakat mahasiswa. Informasi yang diperoleh mungkin bukan barang baru, tetapi bagaimana pun, informasi seperti itu sekali-sekali perlu dicari melalui penelitian. Adalah Richard Noss yang mengatakan bahwa perubahan dalam kebijaksanaan bahasa atau pelaksanaannya seharusnya didasarkan pada hasil penelitian. Bahkan kalau hasil penelitian itu hanyalah mengkonfirmasi kebijaksanaan yang sudah ada, konfirmasi itu sendiri merupakan nilai tersendiri (Noss, 1967 : 69).

Menggembirakan bahwa terbukti terdapat sikap positif terhadap BIB dari sebagian masyarakat yang kelak akan menjadi bagian masyarakat yang ikut berpengaruh itu. Menurut asumsi Labov (1967), perubahan sikap bahasa cenderung mendahului perubahan bahasa. Dalam hal ini kita dapat berharap bahwa adanya sikap yang baik itu akan mendorong masyarakat mahasiswa untuk lebih bergairah menggunakan BIB -- sesuai dengan situasinya. Akan tetapi dalam perencanaan bahasa tidak jarang kita temui harapan tinggal harapan. Sikap baik memang penting, tetapi bukanlah faktor satu-satunya yang menentukan keberhasilannya. Apalagi sikap itu sendiri, sebagai kesiapan

mental dan saraf, dapat menurun kalau tidak dibina terus.)

Salah satu cara pembinaan sikap yang secara tidak langsung adalah dengan tetap menjaga agar stereotipe positif tetap positif (dan akan lebih baik lagi kalau ditingkatkan) dan mengubah gambaran negatif menjadi positif. Di atas dikatakan bahwa ciri *kejujuran* cenderung menempati titik rendah pada profil pemakai BIB. Gambaran ini, kalau benar demikian, saya kira akan berubah membaik sesuai dengan semakin bersihnya pemerintahan kita seperti sedang diusahakan oleh pemerintah dewasa ini. Agaknya memang terlalu lemah kaitannya, tetapi bukanlah suatu hal yang sama sekali tidak mungkin bahwa pemerintahan yang bersih ikut membantu keberhasilan pembakuan bahasa Indonesia.

Satu hal lain yang ikut menentukan keberhasilan pembakuan adalah tersedianya kesempatan untuk mempelajari bentuk baku yang menjadi sasaran pembakuan, dan juga tersedianya kesempatan untuk mengalahkan bentuk nonbaku yang merupakan saingannya. Strategi yang otomatis dipilih untuk itu adalah, di samping upaya penyebaran kepada masyarakat umum, memperkenalkan bentuk baku di sekolah, dan di negara kita dimulai di SD dengan penalaran bahwa bahasa baku akan tumbuh bersama tumbuhnya anak-anak kita. Strategi ini memang baik, tetapi sebaiknya ada upaya lain yang bersifat darurat karena tanpa ini strategi itu dapat mengakibatkan apa yang oleh Haugen (1966 : 85) disebut *social confusion*.

Upaya darurat itu saya kira dapat dilakukan dengan mengintensifkan pengajaran bahasa Indonesia terutama di perguruan tinggi, serta memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa untuk mengenal bentuk-bentuk baku. Satu cara ialah dengan menyediakan publikasi dalam BIB seluas-luasnya, diperkuat dengan pemakaian BIB seluas-luasnya oleh dosen-dosen di dalam situasi yang menuntut dipakainya BIB. Untuk yang terakhir itu jelas diperlukan penataran. Untuk Pancasila ada penataran P-4 antara lain karena ia mempunyai kedudukan penting sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia baku juga mempunyai fungsi pemersatu, seperti dikatakan oleh Garvin dan Mathiot (1960), dan karenanya seharusnya ada penataran untuk itu. Penataran, atau sekurang-kurangnya penyuluhan yang lebih intensif, perlu juga diberikan kepada pengasuh dan kerabat kerja surat kabar, majalah, dan media massa yang lain. Pendekatan dan caranya perlu dipikirkan agar tidak timbul sikap negatif : orang yang dibuat malu karena kebiasaan berbahasanya, kalau Halliday (1968 : 169), sebagai manusia akan menderita luka yang mendasar.

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia baku perlu mendapat prioritas karena sukar kita bayangkan pengembangan pengetahuan dan teknologi modern akan berhasil baik tanpa bahasa Indonesia baku berhasil dikembangkan dan dikuasai secara luas.

Acuan dan Kepustakaan

- Cobarrubias, Juan dan Fishman, Joshua A. [penyunting]. 1983. *Progress in Language Planning; International Perspectives*. Berlin : Mouton.
- d'Anglejan, Alison dan Tucker, G. Richard. 1973. Sociolinguistics Correlates of Speech Styles in Quebec. Dalam Shyu, Roger W. dan Fasold, Ralph W. [penyunting].
- El-Dash, Linda dan Tucker, G. Richard. 1975. Subjective Reactions to Various Speech Styles in Egypt. *Linguistics* 166, 33 – 54.
- Elyan, Olwen dkk. 1979. RP-accented Female Speech : the Voice of Androgyny? Dalam *Sociolinguistics Patterns in British English*. Suntingan Trudgill, Peter. London : Edward Arnold.
- Ferguson, Charles A. 1983. Language Planning and Language Change. Dalam Cobarrubias, Juan dan Fishman, Joshua A. [penyunting].
- Fishman, Joshua A. [penyunting]. 1968. *Readings in the Sociology of Language*. The Hague : Mouton.
- Fraser, Bruce. 1973. Some 'Unexpected' Reactions to Various American-English Dialects. Dalam Shuy, Roger W. dan Fasold, Ralph W. [penyunting].
- Gardner, Robert C. dan Lambert, Wallace E. 1972. *Attitudes and Motivation in Second-Language Learning*. Rowley, Mass. : Newbury House Publishers.
- Garvin, Paul L. dan Mathiot, Madeleine. 1960. The Urbanization of the Guarani Language. Dalam Wallace, A.F.C. [penyunting]. *Men and Culture*. Philadelphia : University of Pennsylvania Press.
- Gould, Philip. 1977. Indonesian Learners Attitudes Towards Speakers of English. *RELJ Journal*, Vol. 8, No. 2, December, 69 – 84.
- Halim, Amran. 1978. Sikap Bahasa dan Pelaksanaan Kebijakan Bahasa Nasional. Makalah disampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia

- III. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1979. Faktor-faktor Sosial Budaya dalam Pembakuan Bahasa Indonesia. *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Tahun V, No. 6.
- Halliday, M.A.K. 1968. The Users and Use of Language. Dalam Fishman, Joshua A. [penyunting].
- Haugen, Einar. 1966. Linguistics and Language Planning. Dalam *Sociolinguistics*. Suntingan Bright, William. The Hague : Mouton.
- Labov, William. 1966. *The Social Stratification of English in New York City*. Washington, D.C. : Center for Applied Linguistics.
- Moeliono, Anton M. 1975. Ciri-ciri Bahasa Indonesia yang Baku. *Pengajaran Bahasa dan Sastra*, Tahun I, No. 3, 2 – 6.
- Morag, Shelomo. 1959. Planned and Unplanned Development in Modern Israeli Hebrew. *Lingua* 8, 242 – 263.
- Noss Richard. 1967. *Higher Education and Development in South-East Asia*, Vol. III, Part 2. Paris : Unesco.
- Ray, Punya Sloka. 1968. Language Standardization. Dalam Fishman, Joshua A. [penyunting].
- Rubin, Joan. 1983. Evaluation Status Planning. Dalam Cobarrubias, Juan dan Fishman, Joshua A [penyunting].
- Shuy, Roger W. dan Fasold, Ralph W. [penyunting]. 1973. *Language Attitudes : Current Trends and Prospects*. Washington, D.C. : Georgetown University Press.

PERANAN KORAN—KORAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA

Sayuti Kurnia
IKIP Jakarta

Pendahuluan

Peristiwa Sumpah Pemuda 55 tahun yang lalu mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sehingga ia mampu menjadi tali pengikat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bangsa Indonesia yang teguh. Dalam proses perjuangan mewujudkan bahasa persatuan tersebut, bahkan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia selanjutnya sejarah mencatat bahwa koran-koran Indonesia banyak memberikan andilnya sekalipun dalam peranan yang terakhir ini bahasa koran tiada luput dari kekurangan-kekurangannya.

Sejak awal munculnya koran-koran Indonesia, baik bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia telah dipilih oleh koran atau surat kabar Indonesia sebagai lambang komunikasi. Pilihan ini terjadi tiada lain, karena surat kabar terikat pada prinsip : aktualitas, periodisitas, publisitas dan universalitas dalam pekerjaannya. Terutama dalam hubungannya dengan publik pembaca, yakni bagaimana agar surat kabar dapat tersebar seluas-luasnya (publisitas) dan dengan demikian dapat mencapai pemasaran yang luas pula (komersialisatas). Hal ini hanyalah mungkin bila koran menggunakan bahasa yang paling luas dipakai dalam seluruh negeri, yakni bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia.

Hampir bersamaan waktunya dengan pembukaan sekolah-sekolah di Hindia Belanda pada tahun 1840-an -- mula-mula di Jawa guna memenuhi kebutuhan akan pegawai negeri Hindia Belanda dan lama kelamaan diperluas dengan pengajaran bagi rakyat -- di negeri kita telah terbit pula koran-koran yang dapat dimengerti oleh penduduk (baik yang berbahasa Belanda, Melayu dan bahasa Jawa). Dapat disebutkan misalnya tiga jenis koran berikut :

1. Koran-koran yang berbahasa Belanda tapi banyak menyuarakan dan memberikan simpati pada nasib bangsa Indonesia, seperti : Nieuws Bode, De Java Bode, Soerabaiasch Handelsblad, De Oost Post, Padangsche Handelsblad, dan lain-lain.
2. Koran-koran yang berbahasa Melayu, seperti : Soerat Chabar Betawie, Slomporet Melayoe, Bintang Timoer, Pelita Ketjil, Pertja Barat, Matahahrie, Tjahaja Moelja, dan lain-lain.
3. Koran-koran yang berbahasa Jawa, seperti : Bromartani, Retno Doemilah, dan lain-lain.

Kedua peristiwa ini (dibukanya sekolah-sekolah dan terbitnya koran-koran di Indonesia) penting artinya bagi perjuangan dan penentuan nasib bangsa kita nantinya, karena :

1. Segolongan kaum cendekia kita yang paham bahasa Belanda mempunyai bahan bacaan yang sama dengan bangsa Belanda. Dengan demikian perkembangan di bidang politik, sosial ekonomi dan sebagainya yang dibawakan koran-koran itu dapat mengubah pandangan dan cara berfikir kaum intelektual bangsa kita dalam menghadapi penjajah.
2. Dengan adanya koran-koran yang berbahasa Melayu, maka pengembangan bahasa Melayu semakin merata di kalangan bangsa kita; dan selanjutnya ia menjadi tali pengikat dan penghubung dalam mempersatukan jiwa bangsa kita.

Wartawan Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan surat kabar "Retno Doemilah" misalnya, berusaha menyadarkan bangsa kita dengan menyajikan tulisan-tulisan yang dapat menggugah harga diri, perasaan senasib sepananggungan dan kepercayaan pada diri sendiri, memupuk rasa tanggung jawab sosial bangsa kita yang berpendidikan, serta menanamkan pengertian dan cara-cara organisasi modern.

Dengan demikian interelasi antar pembukaan sekolah-sekolah yang dapat mencerdaskan bangsa kita di satu pihak, dengan pembentukan pendapat umum lewat bahasa dan koran-koran di pihak lain, pada kenyataannya telah melahirkan cara-cara perjuang adan pergerakan nasional bangsa kita menghadapi penjajah di kemudian hari, seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912) dan lain-lain. Perjuangan surat kabar dalam pergerakan nasional ini semakin nyata lagi pada abad ke-20.

Koran tertua yang berbahasa Melayu

Untuk mengetahui surat kabar Indonesia manakah yang pertama kali menggunakan bahasa "pribumi" alias bahasa Melayu (yang kemudian dibap-

tiskan menjadi dasar bahasa Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda), agaknya tidaklah sesulit menerka teka-teki : mana dulu ayam atau telur. Sebab pembuktiannya dapat dilakukan dengan penelitian yang cermat.

Soedarjo Tjokrosisworo dalam bukunya "Sekilas Perjuangan Surat Kabar" (penerbit SPS Jakarta, 1958, halaman 133) menyebutkan ada 3 koran tertua di Indonesia, yakni "Bromertani" yang terbit di Surakarta (29 Maret 1855); "Soerat Chabar Bahasa Melajoe" yang terbit di Surabaya (12 Januari 1856); dan "Soerat Chabar Betawie" yang terbit di Batavia (3 April 1856).

Dari pengamatan penulis terhadap koran-koran tua di Museum Pusat Jakarta, pendapat Soedarjo Tjokrosisworo agaknya benar. Surat kabar "Bromartani" memang tergolong surat kabar tertua di Indonesia, tapi bukan berbahasa Melayu melainkan berbahasa Jawa dengan tulisan aksara Jawa pula. Sedangkan koran yang pertama yang terbit di Indonesia ialah "Bataviasche Nouvelles" tanggal 8 Juli 1744 di Batavia dengan memakai bahasa Belanda sebagai lambang komunikasinya.

Dengan demikian surat kabar berbahasa Melayu yang tertua ialah "Soerat Chabar Bahasa Melajoe". Di Museum Pusat koran ini hanya ada terbitan nomor 2 (tanggal 12 Januari 1856) dan seterusnya, sedangkan nomor 1 tidak penulis jumpai. Formatnya kuarto, terdiri dari 4 halaman dan tiap halaman terbagi dalam 2 kolom. Diterbitkan oleh E. Foechrie di Surabaya. Isinya menyajikan pengumuman redaksi, pengumuman pemerintah, rubrik kabar-kabar, pengumuman lelang dan iklan. Mengenai bahasa Melayu yang dipakai koran ini dapat ditelaah berita berikut :

Chabar di Soerabaija, 8 Janoeari 1856

Pada hari Rebo ada soldadoe Walanda djaga di pendjagan besar dan toe-soek orang prampoean Djawa. Dari sebab lekas dapet obat, mangka itoe orang tinggal hidoep. Dari sebabnya, orang misi tida taoe, mangka itoe soldadoe soeda dipegang.

Berita di atas tidak saja gaya jurnalistiknya buruk, juga memakai bahasa Melayu pasar yang kurang baik tatabahasanya; jika dikaji menurut ukuran sekarang. Penulisan bahasa jelas masih berdasarkan perekaman lafal atau ucapan, tidak berpegang pada aturan ejaan, misalnya : soldadoe, dapet, prampoean, mangka, misi, taoe, soeda, dipedjagan, walanda. Padahal seharusnya

nya ditulis : serdadoe, dapat, perempoean, maka, masih, tahoe, soedah, dipendjagaan, Belanda.

Kira-kira setengah abad kemudian pemakaian bahasa Melayu dalam koran-koran nampak telah semakin baik, yakni menggunakan bahasa Melayu modern. Hal ini dapat kita telaah dalam surat kabar "Soenting Melajoe", sebuah koran tertua dalam kelompok surat kabar yang terbit pada permulaan abad ke-20. Koran ini merupakan surat kabar mingguan pertama yang ditujukan untuk kaum wanita. "Soenting Melajoe" berbentuk tabloid, terdiri dari 4 halaman dan tiap halaman terbagi dalam 3 kolom. Pemimpin redaksinya Datoe Soetan Maharadja, dan diterbitkan tiap hari Sabtu.

Di Museum penulis tidak menemukan nomor pertamanya, yang ada "Soenting Melajoe" mulai terbitan nomor 3 tahun I tanggal 20 Juli 1912 dan seterusnya. Isi koran ini banyak mengandung segi-segi pendidikan dan nasehat bagi kaum wanita dan pelajar. Di dalamnya banyak dijumpai artikel-artikel keanitaan, bentuk-bentuk sastra lama seperti syair, gurindam, pantun, cerita bersambung, ruang berita dan iklan. Mengenai bahasa surat kabar ini dapat ditelaah petikan berita "Soenting Melajoe" nomor 3, tanggal 20 Juli 1912 berikut :

Perbagai khabar

Padang, pada 20 Juli 1912.

Satoe kreta jang sedang dinaiki oleh doea orang nona Tjina dan seorang anak ketjil sesampainja ditepi kali moeara, koedanya terkejut menghempah masoek kebatang air moeara; hingga kedoeanja nona dan seorang anak ketjil toeroet masoek kedalam batang air itoe.

Oentoenglah ada banjak orang menoe-loeng hingga tiadalah koerang soatoe apa2 kepada penoempangnja.

Nampaklah bahasa dalam surat kabar ini menggunakan bahasa Melayu modern dialek Minangkabau yang cukup baik, yang hampir tidak ada bedanya dengan bahasa Indonesia sekarang, sekali pun di sana sini kita jumpai juga cacat-cacat ejaan.

Sejak bahasa Indonesia dibaptiskan menjadi bahasa persatuan surat

kar -- yang sebelumnya gigih memperjuangkan mempertahankan dan memperkokoh pemakaian bahasa Melayu itu -- menggunakan bahasa Indonesia sebagai lambang komunikasinya. Dan koran-koran senantiasa turut mengikuti dan mengembangkan bahasa Indonesia yang terus berkembang itu.

Penyerapan unsur-unsur bahasa asing

Surat kabar sebagai alat jurnalistik senantiasa melakukan pencatatan berbagai peristiwa sehari-hari yang hidup di masyarakat, dalam rangka fungsi utamanya menyampaikan informasi atau penerangan. Namun dalam hal menyampaikan informasi tersebut para wartawan acapkali merasakan, bahwa bahasa Indonesia masih jauh daripada cukup untuk menguraikan berbagai persoalan atau pun melukiskan sesuatu peristiwa dan kemajuan-kemajuan yang terjadi di masyarakat. Pada umumnya, karena kesederhanaan bahasa Indonesia istilah-istilah internasional di bidang teknologi, industri, sains, dan lain-lain kurang mampu dilukiskan oleh bahasa Indonesia. Padahal istilah-istilah baru tersebut setiap harinya selalu membanjiri redaksi surat kabar.

Maka agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dalam gerak langkah kemajuan dunia internasional terpaksa dalam menimba dan menyerap istilah-istilah bahasa asing dan bahasa daerah ke dalam kosa kata bahasa Indonesia, koran-koran memakai bahasanya "sendiri", yaitu bahasa Indonesia surat kabar yang mempunyai coraknya sendiri : bahasa spontan, bahasa yang hidup di masyarakat, sederhana dan mudah dalam melukiskan berbagai peristiwa di dunia.

Penerimaan unsur-unsur bahasa asing dan bahasa daerah yang turut memperkaya kosa kata bahasa Indonesia itu dapat melalui sastrawan, pimpinan nasional atau pejabat-pejabat, pengumuman-pengumuman resmi dan mass media seperti radio, televisi, film dan surat kabar. Akan tetapi dalam menimba dan menyerap istilah-istilah asing tersebut wartawan masih sering melakukannya dengan serampangan dan mengabaikan kaidah-kaidah peristilahan dan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Hal ini dapat dipahami karena sistem kerja surat kabar yang ingin serba cepat menyebabkan wartawan kurang mempunyai cukup waktu meneliti bahasanya. Akibatnya tidak jarang terjadi pemakaian istilah-istilah asing yang campur-baur yang kurang tepat dalam bahasa Indonesia yang cukup membingungkan masyarakat pembaca. Misalnya berita-berita berikut : 1) sebuah joint venture asuransi lahir, 2) Simposium negara2 non aligned mengenai penerangan, 3) gara2 target *the big two* pada PON VIII, 4) *follow upnya* :

setelah *training*, 5) asal semuanya terang2an lho, jangan main *back-steet*, 6) Kontrak-kontrak pembelian *garment* oleh Australia, 7) tiba giliran Elly Kasim jadi pengusaha *cassette*

Pemakaian istilah-istilah bahasa asing itu sebenarnya dapat dengan mudah dicerna maknanya oleh pembaca, seandainya wartawan bertindak lebih bijak dan cermat dengan cara menuliskan penjelasannya atau maknanya dalam bahasa Indonesia di belakang istilah-istilah asing itu dalam tanda kurng. Umpamanya : *joint venture* (usaha patungan), *the big two* (dua besar), *follow upnya* (kelanjutannya), *backstreet* (main belakang; serong), dan lain-lain.

Sumbangan surat kabar dalam menimba dan mengembangkan bahasa Indonesia tentunya akan lebih positif lagi jika seandainya wargawan lebih teliti dan seyogyanya mengindahkan kaidah-kaidah penyerapan istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan tersebut antara lain dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengindonesiakan istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dengan encari terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau sinonimnya. Seperti *tourist* (wisatawan, pelancong); *assembling* (perakitan), *pavilyun* (anjung-an); *non aligned* (nonblok); LNG (gas alam yang dicairkan); dan lain-lain.
2. Menyesuaikan penulisannya dengan sistem ejaan bahasa Indonesia, umpamanya : *revolution* (revolusi); *cassette* (kaset); *tourist* (turis); dan sebagainya.
3. Menyerap dan menuliskannya ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana adanya (karena cocok dengan sistem ejaan bahasa Indonesia), seperti radio, piano, pilot.
4. Meminjam sistem penulisan bahasa asing itu sendiri (untuk sementara), sementara belum ditemukan cara penulisannya dalam bahasa Indonesia, misalnya jalan *by pass*, dan sebagainya.

Beberapa istilah asing itu telah lazim diindonesiakan dalam koran-koran Indonesia, seperti juga istilah-istilah efektif, efisiensi, devaluasi, manipulasi, kudeta, fusi, dan lain-lain. Tapi sifat latah dan ingin pamer agaknya telah mendorong sebagian "kuli-kuli tinta" menulis istilah-istilah asing dengan cara serampangan dalam pemberitaan.

Penyerapan unsur-unsur bahasa daerah

Serupa halnya dengan unsur-unsur bahasa asing, pengaruh bahasa daerah

terhadap perkembangan bahasa Indonesia cukup pesat pula berkat peranan pers Indonesia, terutama koran-koran daerah dan surat kabar edisi nasional. Hal ini disebabkan, surat kabar sebagai cermin masyarakat selalu menggunakan bahasa yang hidup di masyarakatnya, sehingga banyak perbendaharaan kata dan ungkapan-ungkapan bahasa daerah yang ditimbanja.

Perbendaharaan bahasa daerah yang diindonesiakan koran-koran tersebut pada umumnya dapat digolongkan 2 macam. Pertama, kata-kata dari bahasa daerah yang benar-benar baru dipopulerkan sebagai bahasa Indonesia umum dengan cara menyesuaikannya dengankaidah-kaidah penyerapan kata dan istilah bahasa Indonesia. (Tapi sayang dalam hal ini jarang wartawan yang mau memberikan tambahan makna atau sinonim di belakang kata-kata itu dalam wujud bahasa Indonesia). Kedua, kata-kata, istilah atau ungkapan bahasa daerah yang sudah ada dalam bahasa Indonesia terus dipelihara pemakaiannya oleh koran-koran.

Dalam hal ini unsur bahasa daerah masing-masing sedpat mungkin dipertahankan tetapi sistem ejaannya sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, sehingga kalimat-kalimat dalam berita surat kabar itu terasa segar dan hidup. Umpamanya kata "nanar" dalam kalimat berita '... Chuck Wilbur yang nanar ...' Kata ini lebih terasa hidup daripada kata "sempoyongan" atau "terhuyung-huyung". Berita "... bencana alam di Belawan 1 April 1976 akibat angin puting beliung." (Mimbar Umum), lebih mengena bagi masyarakat Medan daripada kata "topan" atau "angin ribut", sebab ungkapan "angin puting beliung" hidup di masyarakat Melayu (Sumatera) dan maknanya khusus, yakni angin yang bertiup berputar-putar ke atas dengan derasny. Sedangkan kata "tali air" dalam berita "Camat Sidikalang Drs. J.C. Purba baru-baru ini telah turun ke lapangan meninjau tali air", amat serasi nilai bahasanya daripada kata "saluran air".

Surat kabar di Jawa juga merasa lebih "sreg" untuk mengguakan kata-kata atau istilah-istilah bahasa Sunda atau pun Jawa dalam pemberitaan. Misalnya : 1) Pagi itu sekitar jam 08.00 kakek Paiman selesai *babuang* di tepi sawah; 2) Sekeluarga meninggal setelah makan *nasi leye*. Kata *babuang* (Sunda) berarti buang air besar, sedang "nasi leye" (Jawa) adalah nasi gaolek yang beracun.

Demikian pula jika sura. kabar "Haluan" (Padang) menulis kata-kata daerah dalam berita-berita berikut : 1) "... dengan dibangunnya *jalan korong* Tanjung Pinang dengan Tapakis; 2) Bupati Solok juga telah menjanjikan akan menambah lagi bantuan untuk pembangunan *titian babuai* dimaksud; 3) Akan tetapi baru sampai di tengah2 sungai, air tiba-tiba *mahondoh* dengan dras.

Mengapa wartawan lebih suka menggunakan kata "titian babuai" daripada "jembatan"; memilih "mahondoh" daripada "meluap" serta memakai "jalan korong" daripada "jalan kecil"; tiada lain karena kata-kata bahasa daerah tersebut sudah mendarang daging di masyarakatnya.

Akan halnya bahasa Betawi, pengaruhnya juga telah menyebar demikian luas di wilayah tanah air. Kosakata dan gaya bahasa Betawi acap kali dipakai oleh koran-koran lokal, daerah dan nasional, karena pemakaian kata bahasa tersebut dalam surat kabar benar-benar mendukung situasi dan menilai peristiwa yang dikandung peristiwa itu. Misalnya berita-berita berikut : 1) ... dan tanpa banyak *cingcong* lalu JT membacok kepala D. Simatupang. "Cingcong" berarti berbuat tanpa pikir panjang. 2) ... Jusuf Meruk yang diketahui pasti *apa maunya*, sempat melakukan gebrakan-gebrakan meja. Gaya kalimat ini terasa Betawinya, misalnya dialek kata yang sudah di Indoniesiakan "apa maunya" berasal dari "ape maunye". Sedang kata "gebrakan" ternyata lebih hidup atau cocok mewakili situasinya, yakni tiruan bunyi (onomatope) benda yang dipukul; (dibandingkan memakai kata "memukul" dsb.)

Pemakaian kata-kata, istilah atau ungkapan baru asal bahasa daerah tersebut dinilai sebagian orang mungkin kurang bersifat keindonesiaan. Namun pada kenyataannya — berkat peranan koran-koran — unsur bahasa daerah tersebut populer dan diterima oleh masyarakat pemakai bahasa Indonesia. Ini berarti masyarakat mengakui kehadiran unsur-unsur bahasa daerah itu sebagai unsur bahasa Indonesia.

Sekarang seyogyanyalah menjadi tugas para ahli bahasa dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Nasional untuk mempertimbangkan, mengolah dan bila mungkin menerimanya sebagai kosakata bahasa Indonesia yang resmi dan baku.

Susunan kalimat

Dari uraian di atas jelaslah, seperti dikemukakan Mochtar Lubis, surat kabar merupakan salah satu alat terbaik untuk menyiarkan istilah-istilah baru, baik yang memperkaya perbendaharaan kata-kata yang baik maupun dalam arti yang buruk (Seminar Bahasa Indonesia 1972, halaman 69).

Pengertian buruk di sini akan bertambah rumit lagi bila wartawan kurang menguasai norma-norma tata bahasa dalam menyusun kalimat-kalimat suatu berita. Sebab, bagaimana mungkin orang dapat memakai kata-kata atau istilah-istilah yang tepat dalam konteksnya bila ia kurang menguasai cara-cara menyusun kalimat yang baik dan benar. Oleh karena itu penyusunan ka-

limat merupakan hal yang prinsipal pula dalam pemberitaan surat kabar.

Seberapa jauh surat kabar telah mematuhi tata bahasa bahasa Indonesia dapat ditelaah susunan kalimat berita-berita koran-koran berikut ini :

1. "Diantara jarak 28 km dari kampung Tanjung menuju Balaikarangan itu jalannya sama sekali dibangun baru dengan menebas hutan dataran tinggi. Karena sebelumnya memang tidak pernah ada jalan".

(harian Akcaya, 2 April 1976)

2. "Lalu lintas agak terganggu dengan banyaknya mobil2 pengantar sekolah setelah mengedrop anak tidak segera berangkat. Lebih2 sekolah Karangturi dimana lalu lintasnya ramai sekali".

(Suara Merdeka, 9 April 1976)

3. M. Darwis, selaku pemuka masyarakat Tj. Pisang menyatakan bahwa dengan dibangunnya jalan Tj. Pisang dengan Tapakis Lubuk Alung tsb berarti memperlancar roda perekonomian rakyat, yang mana selama ini rakyat Tj. Pisang kalau kepasar berjalan kaki kira2 sejauh 6 km."

(Haluan, 10 April 1976).

4. "Menurut Gupsu Marah Halim, menyatakan bhw dilihat perkembangan/kemajuan pembangunan saat ini yang dilakukan oleh Orde Baru, dibanding dengan 8 tahun sebelumnya menunjukkan tendensi yang meningkat terus."

(Mimbar Umum, 8 April 1976)

5. "Dalam rangka untuk peningkatan KB diwilayah Jakarta Timur, oleh petugas penerangan KB Walikota JT telah diadakan peninjauan kedaerah pedalaman dalam wilayah JT."

(Pos Kota, 13 April 1976).

Salah satu ciri bahasa jurnalistik, kalimat terbaik ialah kalimat yang terpendek. Maksudnya bahasa surat kabar itu harus dibuat sedemikian rupa; sederhana, singkat, padat dan jelas, di samping memenuhi kaidah-kaidah tatabahasa dalam melukiskan berbagai peristiwa.

Agaknya berita-berita berbagai koran di atas belum memenuhi persyaratan tersebut. Pembaca akan lebih jelas menangkap maknanya bila berita-berita itu disederhanakan dan diperbaiki sebagai berikut :

1. "Jalan pada jarak 28 km dari kampung Tanjung menuju Balaikarangan, pembangunannya baru dimulai dengan menebas hutan di dataran tinggi. Sebelumnya di kampung itu tidak ada jalan."
2. "Banyaknya mobil pengantar anak sekolah menyebabkan lalu lintas di kota Semarang agak terganggu, karena setelah mobil-mobil itu men-drop anak-anak mereka tidak segera berangkat. Kemacetan sering terjadi, lebih-lebih di sekolah Karangturi yang lalu lintasnya ramai sekali."
3. "M. Darwis, pemuka masyarakat Tanjung Pisang dengan Tapakis Lubung Alung tersebut berarti memperlancar roda perekonomian rakyat. Selama ini kalau rakyat Tanjung Pisang ke pasar, mereka berjalan kaki kira-kira sejauh 6 km."
4. "Gubernur Marah Halim menyatakan, bahwa kemajuan pembangunan yang dicapai pemerintah Orde Baru saat ini menunjukkan tendensi meningkat, dibandingkan dengan 8 tahun sebelumnya."
5. "Petugas-petugas KB Jakarta Timur meninjau daerah-daerah pedalaman di wilayahnya, guna meningkatkan program keluarga berencana."

Upaya penertiban dan pembinaan

Surat kabar banyak memberikan sumbangan dalam pengembangan bahasa Indonesia, akan tetapi hal itu acapkali masih dilakukan dengan kurang teliti dan cermat. Gejala-gejala yang masih memprihatinkan dalam pemakaian bahasa Indonesia tercermin dalam hal-hal berikut : 1) pemakaian singkatan dan akronim yang tidak berdisiplin; 2) penulisan ejaan yang kurang benar; 3) penyerapan istilah dan kata yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia; pemotongan bagian-bagian kata (apostrop); 4) susunan kalimat yang kurang baik dan 5) pengaruh bahasa dan dialek daerah dalam kalimat masih terasa di sana sini.

Surat kabar sebagai salah satu media komunikasi massa diproduksi secara massal dan penyebarannya dapat menjangkau pembaca yang luas. Oleh karena itu surat kabar dapat menjadi alat yang efektif dalam turut memajukan usaha pengembangan bahasa Indonesia.

Koran memiliki posisi dominan dalam hubungan dengan masyarakat. Ia merupakan alat yang ampuh, yang dapat membentuk opini umum, dapat mempengaruhi masyarakat pembaca, baik dengan hal-hal yang negatif maupun positif.

Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, pastilah surat kabar dapat memberikan pengaruh yang positif bila koran dapat mendidik masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dapat berperan sebagai "watch dog" dalam mengawal pemakaian bahasa Indonesia dari kerusakan.

Masalahnya bagaimana orang dapat memanfaatkan surat kabar secara efisien dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Agaknya hal itu haruslah dimulai oleh para wartawan atau orang koran sendiri.

Patut diakui koran memang berperan dalam mengembangkan istilah-istilah baru dalam gerak kemajuan dunia internasional di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan sebagainya. Dalam usaha mengindonesiakan istilah-istilah baru itu ke dalam bahasa Indonesia, beberapa surat kabar telah memainkan peranan penting, dengan cara menghadirkan rubrik semacam kamus dalam korannya, sehingga baik orang pers sendiri maupun masyarakat pembaca dapat memahami istilah-istilah atau kata-kata baru yang disiarkan surat kabar. Dapat disebutkan diantaranya *Kompas* yang mengetengahkan ruang "kamus pembaca" tahun 1968, lalu diganti "santun bahasa" setahun kemudian, dan sekarang muncul "bahasa kita" yang menyajikan pendapat pembaca tentang masalah kebahasaan.

Demikian pula *Sinar Harapan* menyediakan rubrik "kamus pembaca" pula, *Harian Waspada* dengan "kamus waspada" dan *Buana Minggu* menampikan kolom "perbendaharaan bahasa kita".

Upaya-upaya surat kabar membina dan mengembangkan bahasa Indonesia itu sebenarnya dapat terus dilakukan dengan berpedoman pada buku "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia" dan "Pedoman Umum Pembentukan Istilah" yang disusun secara resmi oleh Departemen P dan K.

Pembinaan dan gerakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dapat dilakukan oleh koran-koran melalui kegiatan redaksionalnya, misalnya :

1. Setiap redaksi surat kabar seyogyanya menyediakan "buku petunjuk" mengenai cara-cara menuliskan bahasa Indonesia yang benar dalam pemberitaan yang harus diketahui dan dikuasai oleh para wartawan, sehingga akan terdapat keseragaman dalam pemakaian bahasa Indonesia di dalam surat kabar.
2. Setiap esk yang bertugas mengedit dan menulis kembali (me-rewrite) tulisan-tulisan wartawan, seyogyanya pula dapat meneliti penggunaan bahasa Indonesia jurnalistik wartawan dan memperbaikinya, sebelum tulisan itu naik cetak.
3. Secara periodik ada baiknya bila seluruh anggota redaksi dan wartawan dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan soal-soal kebahasaan dalam surat kabarnya sebagai langkah introspeksi.
4. Setiap koran seyogyanya dapat membuka rubrik tetap semacam perkamusan atau "bina bahasa" yang di dalamnya dapat diterangkan mengenai istilah dan kata-kata baru serta masalah bahasa Indonesia lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
5. Para ahli bahasa diharapkan sumbangannya untuk terus-menerus meneliti bahasa surat kabar (mengoreksi, membahas kesalahan, dan lain-lain) melalui tulisan-tulisan populer di koran-koran, sehingga masyarakat pembaca dan orang pers dapat menarik pelajaran daripadanya.
6. Perlu adanya kerja sama yang baik dan teratur antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Nasional dengan pers dan instansi-instansi lain pemerintah maupun swasta yang tugasnya bersangkutan paut dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, agar senantiasa tercipta kesatubahasaan dalam pelaksanaan dan terhindari segala kesalahpahaman yang mungkin ada.

DAFTAR BACAAN

1. Buku-buku

- Anwar, Rosihan, *Ikhwal Jurnalistik*, PWI Pusat, Jakarta, 1974.
- Ali, Lukman, Editor. *Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Baru Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1967.
- Ensiklopedia Indonesia*, Van Hoeve, Bandung, 1953.
- Harahap, Parada, *ILmu Pers*, Akademi Wartawan, Jakarta, 1952.
- Hakim, A.A., *Kritis Mengupas Surat kabar*, Cipta Loka, Jakarta, 1970.
- Hoeta Soehoet, Drs. A.M., *Hubungan Saling Pengaruh Antara Pers dan Masyarakat*, PTP Press, Jakarta, 1970.
- , *Asal Mula Surat kabar*, PTP Press, Jakarta, 1970.
- Mess, Dr. C.A. *Tatabahasa Indonesia*, G. Kolf & Co, Bandung, 1953.
- Oey Hong Lie, Drs, *Publisistik Film*, Ichtiar, Jakarta, 1965.
- Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*, Departemen P dan K, 1975.
- Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Departemen P & K, 1975.
- Schramm, Wilbur, *The Process and Effect of Mass Communication*, University of Illinois, Urbana, New York, 1963.
- Singgih, Amin, *Bahasa Bangsa Indonesia*, Harapan Masa, Jakarta, 1973.
- Slametmulyana, Prof. Dr., *POLitik Bahasa Nasional*, Jembatan, Jakarta, 1966.
- , *Semantik*, Jakarta, Jakarta, 1964.
- , *Kaidah Bahasa Indonesia I, II*, Jembatan, Jakarta, 1959.
- Tair, M.A., *Kamus Bahasa Indonesia*, Taman Nusa, Jakarta, 1969.
- Takdir Alisjahbana, Sutan, *Sejarah Bahasa Indonesia*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1956.
- Tjokrosisworo, Sudarjo, *Sekilas Perjuangan Surat kabar*, SPG, Jakarta, 1958.
- Usman, Zuber, BA, *Kedudukan Bangsa dan Bahasa Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1960.

2. Majalah dan surat kabar
 - Akcaya, April 1976.
 - Berita Buana, Maret dan Juni 1974, Maret dan Juni 1976.
 - , Juni 1978.
 - Bromartani, tahun 1855.
 - Haluan, April 1976.
 - Kompas, April 1968, Mei dan Juni 1974, April 1976.
 - Medan Bahasa, nomor 7 dan 8, tahun 1954.
 - Merdeka, April 1976.
 - Mimbar Umum, April 1976.
 - Pelita, Maret 1976.
 - Pos Kota, April 1976.
 - Pos Sore, April 1976.
 - Publisistik, nomor 2 dan 3, tahun 1975.
 - Sinar Harapan, Februari 1976.
 - Sinar Pagi, April 1976.
 - Soenting Melajoe, 1912.
 - Soerat Chabar Bahasa Melajoe, 1856.
 - Suara Karya, April 1976.
 - Suara Merdeka, April 1976.
 - Waspada, April 1976.
 - Angkatan Bersenjata, Oktober 1978.
 - Berita Buana, Oktober 1978.
 - Buana Minggu, 1983.

PEMANFAATAN POTENSI UNGKAPAN BAHASA DAERAH DALAM RANGKA PEMANTAPAN FUNGSI BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI MASSA

Suwito

Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret

Pendahuluan

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahasa daerah yang dipakai sebagai alat perhubungan dan dipelihara oleh masyarakat pemakainya dipelihara juga oleh negara sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup. Dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Tap MPR No. II/MPR/1983) menggariskan bahwa pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu identitas nasional. Mengingat pula putusan-putusan Kongres Bahasa Indonesia yang terdahulu dan rumusan beberapa kali Seminar Bahasa Indonesia yang pernah diadakan yang hampir selalu menyebut peranan bahasa daerah, sudah selaknyalah kiranya kita memperhitungkan potensi bahasa daerah sebagai salah satu sarana mengembangkan bahasa Indonesia.

Di dalam makalah ini akan dicoba memberikan uraian sedikit tentang potensi ungkapan bahasa daerah Jawa, terutama dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi massa.

a. Penyerapan Kata-kata Daerah ke dalam Bahasa Indonesia.

Pada waktu ini tidak sedikit kata-kata daerah Jawa yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan demikian ada yang sekedar sebagai penambahan bentuk dengan sedikit perluasan makna yang sebenarnya telah ada padanannya di dalam bahasa Indonesia sendiri, tetapi ada pula yang merupakan konsep baru yang memang belum ada "wadah"-nya di dalam kosa kata bahasa Indonesia. Kata-kata seperti: *gampang*, *rampung*, *ngomong*, *empuk*, *enteng*, *joget*, *bareng* dan sebagainya me-

rupakan beberapa contoh kategori pertama. Sebab di dalam bahasa Indonesia telah terdapat kata-kata padanannya seperti: *mudah, selesai, bicara, lunak, ringan, tari, serta*, dan sebagainya yang mempunyai arti lebih kurang sama. Tetapi kata-kata seperti: *pamrih, ampuh, betah, krasan, tangguh, tanggon, trengginas, ces pleng* dan sebagainya mungkin termasuk kategori kedua. Kata-kata tersebut belum ada padanannya di dalam bahasa Indonesia, sehingga munculnya kata-kata seperti itu merupakan perbendaharaan baru dalam khasanah kosa kata bahasa Indonesia.

Di antara kata-kata yang termasuk kategori kedua terdapat kata-kata dengan arti sebenarnya (referensial), dan ada pula yang bermakna kias (metaforik). Kata-kata yang mengandung makna kias di samping makna sebenarnya dapat merupakan salah satu jenis ungkapan.

b. Pengertian dan Beberapa Jenis Ungkapan Bahasa Daerah

Ungkapan ialah kata atau kelompok kata yang khusus untuk menyatakan sesuatu maksud dengan arti kiasan (Poerwadarminta, 1976: 1129). Batasan itu menegaskan bahwa berdasarkan jumlah unsurnya ungkapan dapat dibedakan menjadi dua macam yakni: (a) berujud kata dan (b) berujud kelompok kata. Sedangkan syarat semantik yang harus dipenuhi ialah adanya makna kias.

1) Ungkapan Bahasa Daerah yang Berujud Kata

kiprah : 1. (makna referensial): tari gagasan yang penuh gerak dinamik.

2. (makna metaforik) : gerak dinamik

Contoh : Dalam mengikuti kiprahnya pembangunan setiap warga masyarakat hendaknya turut berperan serta.

gandrung : 1. jatuh cinta.

2. sangat mencintai, sangat menginginkan.

Contoh : Bangsa yang sedang gandrung pembangunan harus sanggup mengenyampingkan kepentingan pribadi dan golongan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

pamong : 1. pengasuh anak.

2. berjiwa pengasuh.

Contoh : Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang di dalam dirinya terdapat jiwa pamong, bukan jiwa otokrat.

angker : 1. tempat yang menakutkan.
2. bersikap menakutkan.

Contoh : Dengan muka angker orang itu menjawab sekenanya.

badut : 1. pelawak murahan
2. usaha murahan untuk mencari untung (yang tidak wajar).

Contoh : Dalam jaman serba sulit biasanya muncul badut-badut politik dan badut-badut ekonomi.

benggol : 1. uang logam pecahan yang paling besar dengan nilai $2\frac{1}{2}$ sen.
2. pimpinan (dalam arti negatif).

Contoh : Setelah benggol-benggolnya tertangkap peristiwa-kejahatan terasa menurun tajam.

mbeber : 1. membentang kain.
2. menguraikan panjang lebar.

Contoh : Ia harus membeberkan segala peroslannya supaya tidak terjadi salah paham.

ajang : 1. tempat makan.
2. tempat terjadinya peristiwa.

Contoh : Kawasan itu sekarang menjadi ajang persengketaan negara-negara raksasa.

antek : 1. budak.
2. pengikut setia (dalam arti negatif).

Contoh : Meskipun pimpinannya telah terbunuh, banyak antek-anteknya yang masih meneruskan tindak kejahatan.

- tuntas* : 1. diperas sampai habis airnya.
2. diselesaikan sampai tidak ada persoalan lagi.

Contoh : Masalah penyelewengan itu akan dilacak campai tuntas.

2) Ungkapan Bahasa Daerah Yang Berujud Kelompok Kata.

a) Berujud Kata Majemuk Yang Mengandung Makna Rangkap (Tembung Seroja)

tedeng aling-aling	iguh pratikel
tumpang tindih	pahit getir
jamak lumrah	tambal sulam
jarah rayah	napak tilas
bobot timbang	sayuk rukun
luwes kewes	solah tingkah
andap asor	sambat sebut
sanak kadang	candak cekel
sangga sengkuyung	bot repot
bagas waras	ewuh pekewuh
ujar kaul	rasa rumangsa
nyampar nyandung	guyub rukun

Beberapa contoh pemakaian "tembung seroja" tersebut di dalam bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. *Tanpa tedeng aling-aling* ia mengemukakan maksudnya itu kepada yang hadir dalam rapat itu (*secara terang-terangan*).
2. Sudah *jamak lumrahnya* setiap perjuangan mintaj pengorbanan (*selayaknya*).
3. Perilakunya sangat menyenangkan. Sopan santun dan selalu *andap asor* terhadap yang lebih tua (*hormat, rendah hati*).
4. Kami sebagai orang tua hanya mendoakan, *bobot timbang* terserah kepadamu (*pertimbangan akhir*).
5. Pembangunan yang hanya bersifat *tambal sulam* tidak be-

gitu bermanfaat bagi rakyat (*tidak mendasar dan tidak terencana*).

6. Sebagai akhir kegiatan diadakan acara *napak tilas* perjalanan gerilya Panglima Besar Sudirman (*menelusuri kembali*).
7. Orang tua itu telah banyak mengalami *pahit getirnya* perjuangan menentang penjajahan (*susah dan beratnya*).
8. Gerombolan itu kemudian melakukan perampokan dan *menjarah rayah* segala milik penduduk (*merampas beramai-ramai dengan paksa*).

b) **Berujud Kata Majemuk dengan Unsur Unit (Tembung Camboran Wutuh)**

cekak aos	gantung kepuh
tepa selira	jaga baya
tapa brata	mas picis
tadah udan	pala wija
gaga rancah	tumpang sari
nunggak semi	sandal pancing
sandang pangan	uba rampe, dan sebagainya.

Beberapa contoh pemakaian "tembung camboran wutuh" di dalam bahasa Indonesia misalnya:

1. Pada dasarnya kita lebih menyukai keterangan yang *cekas aos* dan *tegas lugas*, bukan keterangan yang berbelit-belit dan bertele-tele. (*singkat berisi dan mengenai sasaran per-soalannya*).
2. Segala *uba rampe* telah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya, sehingga pelaksanaan upacara itu tidak banyak mengalami kesulitan. (*peralatan yang diperlukan*).
3. Salah satu cara pengalaman Pancasila tercermin dalam sikap *tepa selira* dan selalu *mawas diri*. (*tidak melakukan sesuatu karena apabila perlakuan itu ditujukan kepada dirinya ia juga tidak mau*).

4. Masyarakat yang rukun, tenteram dan ingin maju ialah masyarakat yang di antara warganya terhadap sikap *silih asih, silih asah, dan silih asuh* (*saling mengasihi, saling mendidik dan saling tenggang rasa*).
5. Koperasi dengan sistem *candak kulak* dimaksudkan untuk membantu pengusaha kecil yang modalnya masih sangat lemah (memberikan pinjaman dengan *bunga rendah* dan mengembalikannya dengan cara *mengangsur*, dengan barang *tanggungan seringan-ringannya*).

c) **Berujud sejenis pepatah atau kata-kata arif (bebasan)**

Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.
 Sepi ing pamrih rame ing gawe
 Ing ngarsa sung tulada
 Ing madya mangun karsa
 Tutu wuri handayani
 Adigang adigung adiguna
 Suru dira jayaningrat lebur dening pangastuti
 Rumangsa melu handarbeni
 Bisaa rumangsa lan aja rumangsa bisa.

Beberapa contoh pemakaian "bebasan" dalam bahasa Indonesia misalnya :

1. Setiap pejuang selalu menyadari bahwa apa yang dilakukannya penuh hambatan dan rintangan. Oleh sebab itu semboyan "*rawe-rawe rantas, malang-malang putung*" harus selalu tertanam dalam jiwanya (segala hambatan dan rintangan akan dihadapi dan diselesaikan dengan segala kemampuan).
2. Hanya dengan rasa pengabdian yang tinggi dan sikap *sepi ing pamrih rame ing gawe* pekerjaan besar itu akan berhasil baik (bekerja keras dengan tidak mengutamakan keuntungan pribadi).
3. Ki Hajar Dewantara melukiskan pamong yang baik ialah pamong yang dalam perilakunya menunjukkan sifat-sifat

"ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani" (jika di depan ia memberi contoh yang baik, jika di tengah sanggup mendorong kemauan dan selalu mengawasi asuhannya dari belakang dengan penuh kebijaksanaan).

4. Hendaknya kita selalu menghindari sikap *"adigang, adigung, adiguna"* apabila kita menghendaki keserasian hidup di dalam masyarakat (merasa dirinya lebih berkuasa, lebih tinggi dan lebih berguna dari orang lain).
5. Bangsa yang mempunyai keyakinan *"sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti"* tidak pernah berputus asa dalam mengusahakan perdamaian. (betapa pun hebatnya pertentangan akan dapat diselesaikan dengan cara pendekatan yang tepat dan bijaksana).
6. Ketahanan nasional hanya akan berhasil apabila setiap warga negara benar-benar telah *"rumangsa melu hendar-beni"* negeri ini (merasa turut memiliki secara sadar).
7. Orang yang *"bisa rumangsa"* biasanya lebih bijaksana daripada orang yang *"rumangsa bisa"* (dapat merasakan kekurangannya, tidak merasa pandai).

d). **Komunikasi Massa dan Faktor-faktor Yang Perlu Diperhitungkan/**

Komunikasi massa merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menitikberatkan perhatiannya kepada orang banyak. Dengan demikian maka komunikasi massa termasuk salah satu jenis komunikasi sosial. Sesuai dengan sifat sosialnya, komunikasi massa bertujuan menyampaikan pikiran, harapan dan pengalaman kepada orang banyak dan mengharapkan apa yang disampaikan itu diterima oleh mereka dan kemudian tumbuh menjadi milik bersama (Susanto, 1976:135). Tujuan akhir komunikasi massa ialah untuk mengubah sikap dan perilaku massa sebagai komunikan sesuai dengan pikiran, harapan dan pengalaman komunikator. Jadi arti komunikasi massa terletak justru pada akibat yang terjadi setelah komunikasi itu dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya komunikasi massa dapat dilakukan dengan dua cara yakni: langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung terjadi apabila komunikator berhadapan langsung dengan massa sebagai komunikan. Antara kedua pihak dapat saling berinteraksi dan berdialog, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Sedangkan komunikasi taklangsung terjadi apabila antara komunikator dan komunikan tidak dapat langsung berhadapan tetapi dilakukan dengan perantara atau media (misalnya media massa: surat kabar, majalah, radio, teve dan sebagainya). Komunikasi taklangsung lebih cenderung bersifat satu arah.

Baik dilaksanakan secara langsung maupun taklangsung, massa sebagai komunikan dapat *menerima* dan dapat pula *menolak* terhadap apa yang dikomunikasikan oleh komunikator. Apakah massa menerima atau menolaknya, tidak dapat dipaksakan. Yang dapat dilakukan oleh komunikator hanyalah mencari cara yang sebaik-baiknya agar apa yang disampaikan itu dapat diterima oleh massa. Satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam hubungan ini ialah usaha agar pesan yang disampaikan itu *dapat dimengerti* oleh mereka. Untuk tujuan itu maka beberapa faktor perlu diperhitungkan antara lain ialah:

- (1) norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang melatarbelakangi kehidupan masyarakatnya;
- (2) momen-momen situasional ketika komunikasi itu berlangsung;
- (3) pemilihan bahasa sesuai dengan faktor (1) dan (2).

e) **Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi Massa**

Bahasa Indonesia dipakai di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari daerah-daerah yang mempunyai latar belakang sosial, budaya dan kebahasaan yang berbeda-beda. Latar belakang demikian akan turut menentukan taraf daya-tangkap dan daya-reaksi massa terhadap apa yang dikomunikasikan di daerah itu. Keadaan semacam itu menuntut setiap sarana komunikasi yang dipergunakan di daerah-daerah mampu melengkapi diri dengan unsur-unsur kebahasaan yang hidup di daerah itu agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan ditanggapi secara baik.

Sebagai sarana komunikasi massa, bahasa Indonesia tidak luput dari "tuntutan melengkapi diri" semacam itu. Sebab dalam kenyataannya belum semua konsep yang ada di dalam bahasa-bahasa daerah dapat tertampung secara tepat di dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Pemanfaatan potensi unsur-unsur bahasa daerah untuk melengkapi bahasa Indonesia merupakan ujud nyata peranan bahasa daerah dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia seperti dimaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Tap MPR No. II/MPR/1983). Unsur-unsur semacam itu mungkin berujud kata, mungkin kelompok kata, baik yang merupakan kata lugas maupun yang mempunyai makna kias.

Pada waktu ini kata-kata daerah seperti : *sandang, prihatin, manunggal, tedeng aling-aling, tambal sulam, napak tilas, tum-pang tindih; tata krama, uba rampe, tepa selira* dan sebagainya pemakaiannya tidak lagi terbatas di daerah dan oleh penutur bahasa Jawa, tetapi telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kata-kata itu telah menjadi milik bersama dan merupakan sebagian dari khasanah perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai salah satu (ciri) identitas nasional.

Dipergunakannya perbendaharaan bahasa daerah di dalam bahasa Indonesia terasa sangat diperlukan apabila kalimat itu menghendaki hadirnya *nilai rasa* yang pengungkapannya belum ada padanannya yang tepat di dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata *sreg* "sesuai" dalam kalimat seperti "Peraturan itu masih dirasakan kurang *sreg* oleh penduduk", nilai rasanya tidak sama dengan kalimat "peraturan itu masih dirasakan kurang *sesuai* oleh penduduk", meskipun arti kedua kata itu lebih kurang sama. Demikian pula pemakaian kata *cekak aos* "singkat berisi" dan *ces pleng* "tepat mengena" dalam kalimat "Jawabnya *cekak aos* tetapi benar-benar *ces pleng* atau kata *gentayangan* "berkelana" dalam kalimat "Meskipun telah dinyatakan terlarang, anggota organisasi itu masih ada yang *gentayangan* mencari pengaruh", nilai rasanya berbeda dengan kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata padanannya dalam bahasa Indonesia.

f) **Pemanfaatan Potensi Ungkapan Bahasa Daerah di dalam Bahasa Indonesia.**

Pemanfaatan potensi ungkapan bahasa daerah untuk memperoleh daya komunikasi yang lebih efektif dan nilai rasa yang lebih mengena, mungkin dapat dirasakan dalam beberapa contoh pasangan kalimat sebagai berikut :

**KALIMAT BERISI
UNGKAPAN/KATA
BAHASA DAERAH**

**KALIMAT BERISI
PADANANNYA DALAM
BAHASA INDONESIA**

1) **Kata**

Dandanannya sangat menyolok sehingga menarik perhatian banyak orang.

Cara berpakaian dan cara berhiasnya, sangat menyolok sehingga menarik banyak orang.

Kemanunggalan ABRI-Rakyat merupakan faktor penting dalam menciptakan stabilitas nasional.

Kesatuan jiwa ABRI-Rakyat merupakan faktor penting dalam menciptakan stabilitas nasional.

Ia harus *membeberkan* segala persoalannya untuk menghindari salah paham.

Ia harus *menguraikan dengan panjang lebar* segala persoalannya untuk menghindari salah paham.

Keadaan kesehatan rakyat di daerah itu masih *memprihatinkan*.

Keadaan kesehatan rakyat di daerah itu masih *perlu mendapat perhatian*.

Sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan pokok rakyat selalu mendapat perhatian pemerintah.

Pakaian, makanan dan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan pokok rakyat selalu mendapat perhatian pemerintah.

Seorang kepala daerah ha-

Seorang kepala daerah harus

rus cepat *tanggap* terhadap gejala masyarakat di daerahnya.

cepat *menerima* dan *memberi jawaban* terhadap gejala masyarakat di daerahnya.

Akan minta lagi sudah
Akan minta lagi sudah
sungkan karena telah banyak bantuan yang diberikannya.

Akan minta lagi sudah
Akan minta lagi sudah *berat rasanya* karena telah banyak bantuan yang diberikannya.

2) Tembung Saroja

Sudah *jamak lumrahnya* orang tua menanggung akibat kenakalan anaknya.

Sudah *merupakan suatu yang semestinya* orang tua menanggung akibat kenakalan anaknya.

Tanpa tedeng aling-aling ia mengemukakan hal itu kepada isterinya.

Dengan terang-terangan ia mengemukakan hal itu kepada isterinya.

Penggunaan kata "nggodhog wedang" (merebus minuman) merupakan penggunaan yang sudah *salah kaprah* dalam bahasa Jawa.

Penggunaan kata "nggodhog wedang" (merebus minuman) merupakan penggunaan yang *sebenarnya salah tetapi umum dipakai* dalam bahasa Jawa.

Pembangunan hendaknya tidak dilakukan hanya dengan *tambal sulam*, tetapi harus terencana dan menyeluruh.

Pembangunan hendaknya tidak dilakukan hanya dengan *mengganti yang telah rusak dan tidak merata*, tetapi harus terencana dan menyeluruh.

Napak tilas medan perjuangan pendahulu-pendahulu kita sangat berguna untuk pembinaan generasi muda.

Menelusuri kembali medan perjuangan pendahulu-pendahulu kita sangat berguna untuk pembinaan generasi muda.

Pemakaian istilah itu masih terasa adanya *tumpang tindih*.

Kita mempunyai cukup banyak peninggal budaya yang *adi luhung*.

Pemakaian istilah itu masih terasa *belum ada kepastian*.

Kita mempunyai cukup banyak peninggalan budaya yang *indah dan tinggi nilainya*.

3) Tembung Camboran Wutuh.

Segala *uba rampe* untuk keperluan itu telah siap semuanya, tinggal menunggu saat pelaksanaannya.

Di kampung itu ia ditunjuk sebagai *jaga baya*.

Sikap *tepa selira* merupakan salah satu ujud pengamalan Pancasila.

Pada musim kemarau para petani dianjurkan menanam *pala wija*.

Sebagian besar lahan di daerah itu merupakan sawah *tadah hujan*.

Negara kita sering digambarkan sebagai negara yang *gemah ripah, loh jinawi, tata tentrem, karta raharja*.

Segala *peralatan yang diperlukan* untuk keperluan itu telah siap semuanya, tinggal menunggu saat pelaksanaannya.

Di kampung itu ia ditunjuk sebagai *petugas keamanan*.

Sikap *mengukur dengan diri sendiri* merupakan salah satu ujud pengamalan Pancasila.

Pada musim kemarau para petani dianjurkan menanam *tanaman yang tidak membutuhkan banyak air*.

Sebagian besar lahan di daerah itu merupakan sawah yang *hanya dapat ditanami pada musim hujan*.

Negara kita sering digambarkan sebagai negara yang *subur, makmur, aman dan sejahtera*.

Sebagai *tumpang sari* tanaman tembakau biasanya ditanam cabe.

Sebagai *selingan* di antara tanaman tembakau biasanya ditanam cabe.

Pakaiannya tinggal *gantung kepuh* karena yang lain tidak sempat diselamatkan dari kobaran api.

Pakaiannya tinggal *satu-satunya yang dipakai* karena yang lain tidak sempat diselamatkan dari kobaran api.

4) Bebasan

Setiap perjuangan menuntut pengorbanan. Memang *jer basuki mawa beya*.

Setiap perjuangan menuntut pengorbanan. Memang *untuk kemuliaan diperlukan biaya*.

Dalam jaman yang serba cepat seperti sekarang ini bukan waktunya lagi kita bekerja *alon-alon waton kelakon*.

Dalam jaman yang serba cepat seperti sekarang ini bukan waktunya lagi kita bekerja *biar lambat asal selamat (dapat tercapai maksudnya)*.

Pekerjaan ini tidak akan selesai andaikata tidak ada kegotongroyongan masyarakat. Sebenarnya *rukun agawe santosa*.

Pekerjaan ini tidak akan selesai andaikata tidak ada kegotongroyongan masyarakat. Sebenarnya *persatuan dan kesatuan itu pangkal kekuatan*.

Selama ini ia selalu *sluman slumun slamet*.

Selama ini ia selalu terlepas dari *bahaya yang mengancamnya*.

Jiwa pejuang pembangunan haruslah jiwa yang *sepi ing pamrih rame ing gawe*.

Jiwa pejuang pembangunan haruslah jiwa yang *suka bekerja keras tanpa mengindahkan imbalan yang tidak semestinya*.

Tandangnya seperti banteng *Sepak terjangnya seperti banteng*
ketaton setelah diketahui *terluka setelah diketa-*
 salah seorang anak buahnya hui salah seorang anak buah-
 tertembak. nya tertembak.

g) **Penutup**

Bahasa terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat pemakainya. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan bahasa tidak secepat perkembangan masyarakat. Akibat langsung dari kenyataan itu ialah tidak semua konsep baru yang timbul sebagai hasil perkembangan masyarakat dapat tertampung di dalam bahasa. Menghadapi kenyataan demikian telah banyak usaha dilakukan untuk mengatasinya. Sebagian ada yang cenderung mengambil unsur-unsur bahasa asing sebagai jalan pintas. Namun kesulitan baru segera muncul, karena tidak semua perbendaharaan bahasa asing mampu menampung konsep-konsep yang diperlukan oleh sesuatu bahasa tertentu, sebab latar belakang sosio-kulturalnya kadang-kadang jauh berbeda. Dalam keadaan seperti itu maka alternatif lain yang dapat ditempuh ialah memanfaatkan unsur-unsur bahasa daerah, yang sebagai bagian dari milik budaya sendiri tidak terlampaui asing dan diperkirakan lebih cocok sebagai sarana penunjang pengembangan bahasa.

Bahasa Indonesia tidak luput dari keadaan seperti itu, terutama dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi massa. Sebab fungsi semacam itu menuntut bahasa Indonesia dapat menjangkau sebanyak-banyaknya massa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Sejalan dengan fungsi dan misi yang dibawanya, maka salah satu cara yang dapat ditempuh untuk "berbenah diri" ialah dengan memanfaatkan potensi unsur-unsur bahasa daerah (termasuk ungkapan-ungkapannya) yang relevan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi massa. Dengan pembenahan diri demikian diharapkan pesan yang disampaikan akan dapat diterima dan difahami lebih baik sehingga tujuan akhir dari komunikasi itu dapat tercapai.

Namun perlu disarankan bahwa pemanfaatan unsur-unsur bahasa daerah itu harus tidak berhenti dan terbatas di sesuatu daerah tertentu saja. Unsur-unsur yang ternyata potensial dan

daerah tertentu saja. Unsur-unsur yang ternyata potensial dan relevan dengan fungsinya sebagai penunjang sarana komunikasi massa hendaknya dipat disebarluaskan, sehingga akhirnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi milik bersama dan dapat difahami secara baik di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hubungan ini peranan media massa benar-benar sangat menentukan. Tanpa bantuan media massa hampir tidak mungkin unsur-unsur semacam itu dapat memasyarakat.

Dalam makalah ini hanya dikemukakan kemungkinan pemanfaatan potensi ungkapan bahasa daerah Jawa dalam menunjang usaha pemantapan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi massa. Namun kami percaya bahwa bahasa-bahasa daerah lain pun cukup mempunyai bahan yang telah, sedang dan akan dapat disumbangkan untuk keperluan itu. Dan apabila semuanya telah tersebar luas dan menjadi milik kita bersama, maka tidak mustahil bahasa Indonesia dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi massa akan lebih mantap dan dapat mencapai hasil seperti yang kita harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abukusno, *Pepak Basa Jawa*, Penerbit Ekspres, Surabaya, cet. kelima, 1983.
- Harmoko, *Menghadapi Kongres Bahasa Indonesia IV*, Kompas, 5 Agustus, 1983.
- Perwadarmenta, WJS, *Baoesastra Djawa*, J.B. Wolters, Groningen – Batavia, 1939.
- Susanto, Dr. Phil. A.S., *Filsafat Komunikasi*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1976.
- Suwito, *Pengantar Awal Sociolinguistik, Teori dan Problema*, Henery Offset, edisi kedua, 1983.
- , *Senepan, sebagai Bahan Pengajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar*, dalam Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Yogyakarta, 1983.
- Tim Pembinaan Penataran P4 Pegawai Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, 1980.
- , *Garis-garis Besar Haluan Negara*, Jakarta, 1983.

KEPUTUSAN KONGRES BAHASA IV

Pendahuluan

Kongres Bahasa Indonesia IV berlangsung dari hari Senin tanggal 21 November 1983 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 November 1983 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dan diikuti oleh tokoh-tokoh lembaga pemerintahan, departemen dan nondepartemen, organisasi profesi, guru, mahasiswa, para ilmuwan yang mewakili pelbagai bidang ilmu dan teknologi, serta peminat lain dari dalam dan luar negeri. Dengan memperhatikan pidato pengarahan dalam peresmian pembukaan Kongres Bahasa Indonesia IV oleh Menteri Nugroho Notosusanto, pada tanggal 21 November 1983, serta setelah mendengarkan makalah-makalah yang disajikan dan dibahas secara seksama baik di dalam sidang-sidang lengkap maupun di dalam sidang-sidang kelompok, Kongres Bahasa Indonesia IV mengambil keputusan yang berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah-masalah dalam bidang bahasa, pengajaran bahasa, dan pembinaan bahasa dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, yaitu :

1. sarana komunikasi pemerintahan dan kemasyarakatan;
2. sarana pengembangan kebudayaan;
3. sarana pendidikan dan pengajaran, termasuk wajib belajar; serta
4. sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut.

A. Bidang Bahasa

1. Kesimpulan Umum

Apabila dilihat dari saat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada tahun 1928 sampai dengan saat perkembangannya dewasa ini, bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dan kemajuan yang pesat. Fungsi bahasa Indonesia telah makin mantap, tidak hanya sebagai alat komunikasi sosial dan administratif tetapi juga sebagai alat komunikasi ilmu dan keagamaan. Ini berarti bahwa

bahasa Indonesia telah memiliki poros inti yang cukup besar dan cukup terpadu, yang memungkinkan manusia dari satu latar belakang bahasa di Tanah Air berkomunikasi dengan manusia dari latar belakang bahasa yang lain. Sebagai alat penyebar ilmu, bahasa Indonesia telah dapat pula menjalankan fungsinya dengan baik, yang terbukti dengan makin banyaknya buku ilmu pengetahuan tingkat tinggi yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagai alat pengungkap rasa dan ilmu yang tumbuh dan terus berkembang, bahasa Indonesia tentu saja tidak terhindar dari sentuhan dan pengaruh masyarakat yang memahaminya, baik berupa perubahan nilai dan struktur maupun berupa tingkah laku sosial lainnya. Pada satu pihak, hubungan timbal balik antara bahasa sebagai alat pengungkap dengan alam sekitar dan fenomena sosial sebagai isinya menambah kekayaan linguistik bahasa Indonesia yang merupakan milik kita bersama. Pada pihak lain, persentuhan ini menimbulkan pula keanekaragaman. Tanpa pembinaan yang hati-hati dan seksama, tidak mustahil sebagian ragam-ragam itu menyimpang terlalu jauh dari poros inti bahasa kita.

Selaras dengan ragam yang menyimpang itu, terdapatlah cukup banyak pemakai bahasa Indonesia yang belum dapat mempergunakan bahasa itu dengan baik dan benar. Termasuk di antara mereka adalah para mahasiswa dan pengajar di perguruan tinggi, para cendekiawan, dan para pemimpin yang menduduki jabatan yang berpengaruh. Hal ini tampak, antara lain, pada :

1. pemakaian kalimat, tanda baca, dan pengelompokkan wacana yang tidak mengungkapkan jalan pikiran yang jernih, logis, dan sistematis;
2. pemakaian istilah asing untuk menggantikan kosa kata yang telah ada, yang memiliki ciri-ciri semantik yang sama, dan yang telah umum dipakai;
3. pemakaian istilah teknis yang tidak seragam dalam ilmu pengetahuan;
4. pengucapan kata yang menyimpang dari kaidah yang dianggap baku;
5. pengejaan kata atau frase yang tidak taat asas.

2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

1. Perlu segera disusun tata bahasa baku bahasa Indonesia sebagai tata bahasa acuan yang lengkap dengan memperhatikan berbagai ragam bahasa Indonesia, baik ragam tulis maupun ragam lisan.
2. Perlu segera disusun kamus besar bahasa Indonesia yang memuat tidak hanya bentuk-bentuk leksikon tetapi juga lafal yang dianggap baku, kategori sintaktik setiap kata, dan batasan serta contoh pemakaian yang lebih lengkap. Jika mungkin, kamus ini perlu dilengkapi dengan gambar dan keterangan mengenai asal kata.
3. Perlu dipergiat penulisan kamus bahasa daerah yang merupakan sumber untuk memperkaya bahasa nasional.
4. Perlu digiatkan penulisan dan penerjemahan buku-buku yang bermanfaat bagi pelbagai bidang.
5. Lembaga-lembaga pemerintah (departemen dan nondepartemen) dan instansi-instansi swasta yang berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan dihimbau agar mengadakan kerja sama untuk menyeragamkan istilah-istilah ilmu pengetahuan. Pembentukan dan penyeragaman istilah serta tata nama hendaknya dibuat dengan kerangka pemerian bahwa istilah-istilah itu perlu memenuhi selera naluri para pemakainya sehingga dapat benar-benar diterima dan dipakai. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditugaskan mengkoordinasikan kerja sama itu dan menyebarkan hasilnya.
6. Sikap hati-hati dalam memilih unsur-unsur dari bahasa lain, terutama bahasa asing, perlu ditingkatkan.
7. Semua mahasiswa harus mendapat latihan keterampilan menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia.
8. Perlu ditetapkan pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam huruf Latin bahasa Indonesia.

B. Pengajaran Bahasa

1. Kesimpulan Umum

Tujuan umum pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan adalah memantapkan kedudukan

dan fungsi bahasa Indonesia. Jikaditinjau dari sudut penutur bahasa Indonesia, tujuan umum pengajaran bahasa Indonesia adalah :

1. tercapainya pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi, yaitu pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
2. Tercapainya pemilikan keterampilan yang baik dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan pengetahuan yang sah;
3. Tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap yang erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab, yang tampak dari perilaku sehari-hari.

Sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia serta sesuai dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional ialah (1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, (2) sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang lembaga pendidikan, (3) sebagai bahasa penalaran, dan (4) sebagai bahasa pengungkap pengembangan diri hasil pendidikan.

Sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, bahasa Indonesia yang diajarkan adalah :

1. bahasa dengan ciri serta syarat ragam bahasa baku, baik ragam lisan maupun ragam tulis;
2. bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa kebudayaan, yang berfungsi sebagai bahasa modern.

Sebagai bahasa pengantar, penalaran, dan pengungkap pengembangan diri, bahasa Indonesia yang dipakai di lembaga pendidikan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. mempunyai kemampuan menjalankan tugas sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien, yaitu mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara tepat dengan berbagai konotasi;
2. mempunyai bentuk estetik;
3. mempunyai keluwesan sehingga dapat dipergunakan untuk mengekspresikan makna-makna baru;
4. mempunyai ragam yang sesuai dengan jenjang lembaga pendidikan.

Keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat majemuk dengan adanya bahasa-bahasa daerah yang banyak, yang tersebar di seluruh tanah air, belum dimanfaatkan dalam pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia.

Dalam pengajaran bahasa Indonesia belum diperhatikan sifat komunikatif bahasa dengan memanfaatkan berbagai komponen komunikasi, baik sebagai bahasa yang dipakai dalam proses pengajaran maupun sebagai hasil pengajaran itu sendiri.

Pengajaran sastra di sekolah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran bahasa belum mencapai tujuan yang sesuai dengan fungsinya sebagai pengembang wawasan nilai kehidupan dan kebudayaan.

Pola kebijaksanaan nasional mengenai pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran pada dasarnya adalah sebuah strategi yang memandu pendidik bahasa Indonesia di dalam mengembangkan tindakan yang mendasar dalam memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran.

2. Tindakan Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

1. Dengan memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia III, diusulkan agar mutu pengajaran bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang pendidikan ditingkatkan dengan berbagai macam upaya, seperti (a) peningkatan kemampuan guru bahasa Indonesia, (b) pengembangan bahan pelajaran yang sesuai dengan fungsi komunikatif dan integratif bahasa, kebudayaan, serta penalaran, dan (c) pemberian pengalaman belajar kepada siswa untuk memperoleh keterampilan dalam proses belajar bahasa Indonesia.
2. Dengan tujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran, pola kebijaksanaan nasional kebahasaan harus disusun. Dengan pola ini perlu dilakukan berbagai tindakan taktis yang terdiri dari (a) penentuan strategi pengajaran guna membentuk keterampilan berbahasa yang secara berangsur-angsur diikuti dengan sajian pengetahuan kebahasaan pada tingkat-tingkat lanjut pada pendidikan dasar dan menengah, (b) pengembangan tata bahasa panutan,

(c) penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar, (d) pemantapan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai persyaratan untuk berbagai macam kenaikan tingkat/pangkat, dan (e) pemanfaatan media massa sebagai model penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

3. Pengajaran sastra Indonesia harus lebih ditekankan agar dapat membantu terlaksananya unsur humaniora dalam kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan.
4. Bahan pelajaran bahasa Indonesia perlu mencakup latihan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam rangka mengimbangi laju perkembangan karya ilmiah, pengajaran membaca cepat perlu dikembangkan secara khusus.
5. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia hendaklah memanfaatkan organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan pada tingkat pedesaan dengan tujuan agar (a) pembangunan nasional di bidang kebudayaan, khususnya sektor kebahasaan, berlangsung secara efektif dan efisien dan (b) kemampuan warga masyarakat dalam bidang kebahasaan dapat meningkat.
6. Pembinaan apresiasi sastra perlu dilaksanakan sedini mungkin mulai dari tingkat prasekolah sampai ke perguruan tinggi dan di lingkungan keluarga.
7. Di samping pengajaran bahasa Indonesia yang ditujukan kepada kemampuan berbahasa secara umum di sekolah dasar dan menengah, perlu dikembangkan bahasa pengajaran bahasa yang diperlukan bagi bidang-bidang khusus.
8. Pendidikan dalam suasana kedwibahasaan yang strateginya bertujuan menjamin hak hidup bahasa dan kebudayaan daerah hendaknya mempunyai nilai positif.
9. Di dalam kurikulum lembaga pendidikan tinggi hendaknya dimasukkan program pendidikan bahasa Indonesia.
10. Hasil penelitian kebahasaan dan pengajaran bahasa hendaklah disebarluaskan dan dimanfaatkan.
11. Pelaksanaan wajib belajar perlu dimanfaatkan untuk menyuksekkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

C. Pembinaan Bahasa

1. Kesimpulan Umum

Pembangunan nasional kita pada hakikatnya adalah usaha mengadakan perubahan dalam segala segi kehidupan bangsa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan nasional itu akan banyak tergantung pada kemampuan bahasa Indonesia memenuhi fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di samping kemampuan bangsa kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kenyataan yang dihadapi oleh para pembina bahasa ialah pemakaian bahasa Indonesia di dalam masyarakat, khususnya di lembaga-lembaga, badan-badan, dan organisasi-organisasi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara, belum mengembirakan.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam ilmu, seperti ilmu hukum dan ilmu administrasi, banyak yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Karena bahasa keilmuan itu harus bermakna tunggal, pemakaian bahasa Indonesia harus terus diperbaiki dan usaha pembakuannya ditingkatkan.

Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa mempunyai pengaruh yang luas di dalam masyarakat. Kenyataan juga menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun secara lisan, masih memiliki kelemahan. Kecenderungan menghilangkan kata-kata dalam media cetak, misalnya, sering mengakibatkan makna kalimat menyimpang atau hilang sama sekali. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih ada pemakaian unsur-unsur bahasa daerah atau bahasa asing yang tidak perlu.

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sehari-hari oleh masyarakat menunjukkan peningkatan yang pesat dan jumlah orang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama semakin meningkat. Namun, tingkat kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar masih perlu mendapat perhatian para pendidik dan pemakai bahasa Indonesia.

2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan bahasa Indonesia dalam semua bidang, terutama bidang hukum dan perundang-undangan, perlu segera digarap secara sungguh-sungguh, bertahap, dan terpadu karena hukum yang dimengerti oleh setiap anggota masyarakat akan lebih menjamin terlaksananya pembangunan nasional secara mantap, lancar, dan tertib.
2. Semua aparatur pemerintah, terutama yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan hukum, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang memadai sehingga hukum/undang-undang yang dihasilkan dan yang harus dilaksanakan itu mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.
3. Semua petugas pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti lurah, guru, juru penerangan, penyiar RRI/TVRI, dan staf redaksi media cetak, harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu cara yang perlu segera ditempuh ialah bahwa setiap departemen, lembaga nondepartemen, dan organisasi swasta merencanakan kegiatan kebahasaan sedemikian rupa sehingga setiap petugas atau anggota dalam badan itu sekurang-kurangnya memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kebutuhannya dalam melaksanakan tugas pembangunan.
4. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah yang memungkinkan terciptanya suasana atau iklim kebahasaan sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi utama di negara Republik Indonesia. Kata atau istilah asing yang tidak perlu, terutama dalam bidang dunia usaha (nama badan usaha, iklan, dan papan pengumuman untuk masyarakat luas), harus segera diusahakan penggantianannya dengan kata/atau istilah bahasa Indonesia. Dalam kaitan itu, kerja sama yang terpadu antara berbagai instansi (Departemen Kehakiman, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan

Keamanan, dan departemen lain, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga masyarakat) sangat diperlukan.

5. Generasi muda perlu dibekali dengan sikap dan disiplin berbahasa yang dapat dibanggakan.
6. Guna menunjang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan oleh berbagai instansi, baik Pemerintah maupun swasta, perlu direncanakan penugasan para ahli bahasa atau pemanfaatan ahli bahasa secara maksimum pada berbagai sektor pembangunan.
7. Usaha pembinaan bahasa Indonesia secara lebih intensif perlu dilakukan dan diberi prioritas pertama di daerah-daerah yang tingkat keahliannya berbahasa Indonesia masih rendah.
8. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa perlu dimantapkan. Salah satu cara yang mudah ialah menghindari, sekurang-kurangnya mengurangi, pemakaian kata-kata asing dan bahasa daerah dalam hal atau peristiwa yang bersifat nasional.
9. Kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu ditingkatkan terus, terutama dalam Bulan Bahasa (bulan Oktober setiap tahun).
10. Kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia para guru, terutama guru bahasa Indonesia, perlu ditingkatkan terus, di samping usaha meningkatkan mutu pengajaran bahasa Indonesia.
11. Buku-buku yang diterbitkan – baik yang asli maupun yang terjemahan –, surat kabar dan majalah yang diedarkan, serta bahan koleksi perpustakaan hendaklah diusahakan agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
12. Usaha pembinaan bahasa Indonesia perlu direncanakan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga sikap dinamika dan disiplin berbahasa yang baik serta keterampilan berbahasa Indonesia para pemakai bahasa dari seluruh lapisan masyarakat dapat ditingkatkan secara mantap. Guna memungkinkan tercapainya tujuan itu, jalur-jalur formal, nonformal, dan informal perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, usaha memasyarakatkan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, dan kamus bahasa Indonesia baku perlu dilakukan dengan cara yang lebih baik agar buku-buku pedoman dan buku-buku acuan itu dapat

mencapai dan dijangkau masyarakat luas.

13. Unsur-unsur bahasa daerah merupakan potensi yang penting dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini, pemanfaatan unsur-unsur bahasa daerah yang dimaksudkan untuk memperkaya bahasa Indonesia itu hendaknya dilakukan secara lebih cermat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri maupun terhadap perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keampuhan bahasa Indonesia sebagai lambang pemersatu bangsa harus tetap terjamin dan ketahanan nasional tidak boleh terganggu karena banyaknya unsur bahasa daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia.
14. Hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia yang telah dicapai oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditunjang dengan instruksi pelaksanaan pada setiap departemen, lembaga, dan organisasi.
15. Kongres Bahasa Indonesia IV memperkuat keputusan Kongres Bahasa Indonesia III agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga non-departemen supaya wibawa dan ruang geraknya dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia lebih berdaya guna.
16. Kongres mengusulkan agar bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam konsep Wawasan Nusantara karena bahasa Indonesia merupakan unsur utama kebudayaan nasional dan sekaligus berfungsi sebagai sarana komunikasi utama dan pemersatu dalam kehidupan bangsa dan negara.
17. Dalam sensus penduduk Indonesia yang akan datang perlu diperoleh data kebahasaan yang sahih dan lengkap. Data yang demikian diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.
18. Kongres menugaskan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk memonitor pelaksanaan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia IV dan melaporkan hasilnya kepada Kongres Bahasa Indonesia V yang akan datang.
19. Ketentuan mengenai lalu lintas buku dan barang cetakan lain yang tertulis dalam bahasa Indonesia, terutama di kawasan ASEAN, perlu ditinjau kembali.

**SAMBUTAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN
OLAHRAHA PADA UPACARA PENUTUPAN
KONGERS BAHASA INDONESIA IV DI
JAKARTA PADA TANGGAL 26 NOPEMBER 1983**

Saudara Ketua Panitia Penyelenggara Kongres,
Para peserta Kongres,
Hadirin yang saya hormati,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya Kongres Bahasa Indonesia IV ini telah berlangsung dengan lancar dan menghasilkan kesimpulan, usul, dan saran mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Menurut pandangan saya, kesimpulan, usul, dan saran itu memperlihatkan bahwa tujuan Kongres ini telah tercapai sesuai dengan harapan kita bersama.

Hasil yang telah dicapai itu merupakan bahan ramuan bagi pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa pesatuan atau bahasa nasional komunikasi nasional maupun sebagai sarana perjuangan. Tentu saja, bahan ramuan itu perlu diolah lebih lanjut melalui saluran kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan sedemikian rupa sehingga kesimpulan, usul, dan saran itu menjadi program tindak lanjut yang operasional dalam bentuk rancangan dan program kerja yang sejalan dan serasi dengan garis kebijaksanaan pembangunan kita, sesuai Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. II/MPR/1983). Di dalam pengolahan bahan ramuan itu berbagai faktor seperti faktor politik, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor ekonomi harus diperhitungkan. Di samping itu, tentu saja berbagai segi kebahasaan Indonesia itu sendiri dan keadaan kebahasaan di Indonesia dapat dikembangkan dengan menyerap, apabila perlu, unsur-unsur bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Tugas kita, terutama tugas para peserta Kongres Bahasa Indonesia IV ini, tidak berakhir dengan berakhirnya Kongres ini. Di samping mengolah

kesimpulan, usul dan saran Kongres itu melalui saluran kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan — seperti saya kemukakan tadi —, kita sendiri-sendiri, sebagai pribadi, sebagai guru, sebagai manusia profesional, dan sebagai anggota organisasi profesi berkewajiban pula melaksanakan isi kesimpulan, usul, dan saran itu di dalam lingkungan kita masing-masing. Kita masing-masing harus melakukan berbagai usaha sesuai dengan kemampuan dan gaya kita sendiri-sendiri. Sebagai ayah atau ibu, kita berkewajiban berusaha membina bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunaannya di lingkungan keluarga kita, di lingkungan pergaulan kita, dan di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Sebagai guru, pengarang, dokter, atau apa pun profesi kita, kita berkewajiban melakukan berbagai usaha demi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di kalangan teman seprofesi dan orang lain yang berhubungan dengan profesi kita. Guru, misalnya, melaksanakan usaha itu di kalangan guru dan murid, dokter melaksanakannya di kalangan dokter sendiri dan pasiennya, dan pengarang membina bahasa Indonesia di kalangan pembaca karyanya dan di kalangan pengarang sendiri. Sebagai anggota organisasi profesi, pembinaan bahasa Indonesia kita lakukan melalui saluran yang terdapat di dalam organisasi kita. Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia kita lakukan melalui saluran formal, saluran nonformal, dan saluran informal. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di dalam segenap lapisan masyarakat dan oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita bekerja keras, berusaha dengan kesungguhan hati, dan berjuang tanpa mengenal lelah demi pengejawantahan ikrar yang ketiga Sumpah Pemuda 1928, yaitu "MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA".

Hasil yang Saudara-saudara capai di dalam Kongres ini merupakan bahan masukan yang amat berharga bagi Pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bahasa Indonesia harus menjadi sarana komunikasi nasional dan sarana pembangunan yang mantap supaya pelaksanaan pembangunan kita dalam segala bidang menjadi mantap pula. Dengan pelaksanaan pembangunan nasional kita secara mantap selama Repelita IV, yang akan mulai pada tahun depan, dan Repelita V, kita benar-benar dapat mengharapkan kesiapan kita bertolak landas dalam masa Repelita VI dan kita bergerak ke arah masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti saya kemukakan di dalam penyajian makalah saya pada hari

Selasa yang lalu, pemuda dengan jiwa dan semangat kepeloporannya perlu dan harus kita ikut sertakan secara penuh di dalam usaha kita membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa hasil Kongres ini harus pula diolah sebagai bahan masukan bagi penyusunan program kepemudaan, kemahasiswaan, kesiswaan, dan kepramukaan. Bahkan masukan itu harus diolah sedemikian rupa sehingga ia memungkinkan tersusunnya program yang sesuai dengan tingkat perkembangan, umur, dan perhatian generasi muda, mulai dari tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi.

Kesimpulan, usul, dan saran yang dihasilkan di dalam Kongres ini juga merupakan bahan masukan yang amat berharga bagi Kongres Pemuda yang insya Allah akan diselenggarakan pada tahun depan. Kongres Pemuda itu akan membahas berbagai masalah penting yang tidak hanya menyangkut kepentingan pemuda tetapi juga mencakup kepentingan berbagai segi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya – termasuk masalah bahasa nasional kita–, dan ketahanan nasional. Masalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, bahasa kenegaraan, dan bahasa komunikasi pembangunan nasional kita akan dibahas dalam hubungannya dengan berbagai segi pembangunan nasional kita itu. Oleh karena itu, hasil Kongres Bahasa Indonesia IV ini berkaitan erat sekali dengan hasil yang diharapkan dari Kongres Pemuda itu.

Para peserta Kongres Bahasa Indonesia IV,
 Hadirin yang saya hormati,

Atas nama Pemerintah, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara-saudara atas segala sumbangan pemikiran yang telah Saudara-saudara berikan kepada negara dan bangsa kita melalui keikutsertaan Saudara-saudar di dalam Kongres Bahasa Indonesia IV ini. Saya juga menyatakan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Penyelenggara dan semua pihak yang telah memungkinkan Kongres ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan usaha kita selanjutnya diberkahi oleh Allah Yang Mahakuasa dan kita diberi-Nya kekuatan lahir dan batin serta petunjuk di dalam pelaksanaan usaha kita membina dan mengembangkan bahasa Indone-

sia selanjutnya sesuai dengan harapan Kongres Bahasa Indonesia IV ini.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya nyatakan bahwa Kongres Bahasa Indonesia IV ini ditutup dengan resmi.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga,
Dr. Abdul Gafur

**KONGRES BAHASA INDONESIA IV
JAKARTA, 21 – 26 NOVEMBER 1983**

SUSUNAN PANITIA

I. Pengarah

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Penerangan
3. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

II. Penasihat

Prof. Dr. Haryati Soebadio,
Direktur Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

III. Penyelenggara

Ketua : Prof. Dr. Amran Halim,
Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Wakil Ketua : A. Latief, M.A.,
Kepala Bidang Pengembangan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Sekretaris : I. Maman Sumantri,
Kepala Bagian Tata Usaha
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

II. Dra. Sri Sukes Adiwinarta,
Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

III. Ny. S. Wahyudin,
Kepala Subbagian Urusan Dalam pada
Bagian Tata Usaha
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Bendaharawan: Jusnan Junus,
Bendaharawan Proyek Pengembangan Bahasa dan
Sastra Indonesia dan Daerah

- Anggota** : 1. Drs. S. Effendi,
Kepala Bidang Bahasa
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
(Persidangan)
2. Dra. Sri Timur Suratman,
Kepala Bidang Sastra
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
(Akomodasi)
3. Drs. Hans Lapoliwa, M.Phil.,
Bidang Pengembangan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
(Pendaftaran Peserta)
- 4; Dra. Yayah B. Lumintaintang,
Bidang Bahasa
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
(Kertas Kerja)
5. Drs. Lukman Hakim,
Bidang Pengembangan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
(Humas dan Protokol)
6. Dra. Ipon Sukarsih Purawijaya,
Bidang Pengembangan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
(Pameran)
7. Drs. Koentamadi,
Bidang Bahasa
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
(Dokumentasi)

8. Drs. Hasjmi Dini,
Kepala Subbagian Kepegawaian pada
Bagian Tata Usaha
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
(Logistik)

Jakarta, 5 September 1983
Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,

Prof. Dr. Amran Halim

KONGRES BAHASA INDONESIA IV

Jakarta, 21 — 26 Nopember 1983

SEKSI—SEKSI PANITIA PENYELENGGARA KBI IV

I. Kertas Kerja

1. Prof. Dr. Amran Halim
2. Drs. S. Effendi
3. Dra. Sri Timur Suratman
4. Dra. Sri Sukesri Adiwimarta
5. Sdr. A. Latief, MA.
6. Dra. Yayah B. Lumintintang
7. Drs. Koentamadi
8. Drs. Farid Hadi
9. Drs. Hans Lapoliwa, M. Phil.
10. Drs. Hasan Alwi
11. Drs. Lukman Hakim
12. Drs. Nafron Hasjim
13. Drs. Adi Sunaryo

II. Pendaftaran Peserta

1. Drs. Hans Lapoliwa, M. Phil.
2. Suhadi

III. Persidangan

Drs. S. Effendi

IV. Akomodasi

Dra. Sri Timur Suratman

V. Humas dan Protokol

1. Drs. Lukman Hakim
2. Dra. Djoemariam

VI. Pameran

1. Dra. Ipon Sukarsih Purawidjaja
2. Dra. Udiati Widiastuti

VII. Dokumentasi

1. Drs. Koentamadi
2. Suprpto

VIII. Logistik

1. Drs. Hasjmi Dini
2. Arman

Jakarta, 19 September 1983

**KONGRES BAHASA INDONESIA IV
JAKARTA, 21 – 26 Nopember 1983**

**SEKRETARIAT
PANITIA PENYELENGGARA**

A. Koordinator :

1. Maman Sumantri (Sekretaris I)
2. Dra. Sri Sukesri Adiwimarta (Sekretaris II)
3. Ny. S. Wahyudin (Sekretaris III)

B. Urusan-urusan

I. Surat-menyurat, Edaran, dan Undangan

1. Dra. Hariyanti E.Y.
2. Ny. Kasmini
3. Samiyati
4. Siti Sapurah
5. Radi bin Sabiin
6. Achmad Lesteluhu
7. Cipto Digiarto
8. Setiowati Djuwitaningsih
9. Rukijo
10. Dedeh Ipah Syaripah

II. Pengetikan dan Penggandaan (Reproduksi)

1. M. Nurhanadi
2. Suwanda
3. Sulasdi
4. Djamari
5. Suprpto
6. Kartiyah
7. Warku

8. Erwin Subagio
9. Sunarto Rudy

III. Perlengkapan dan Angkutan

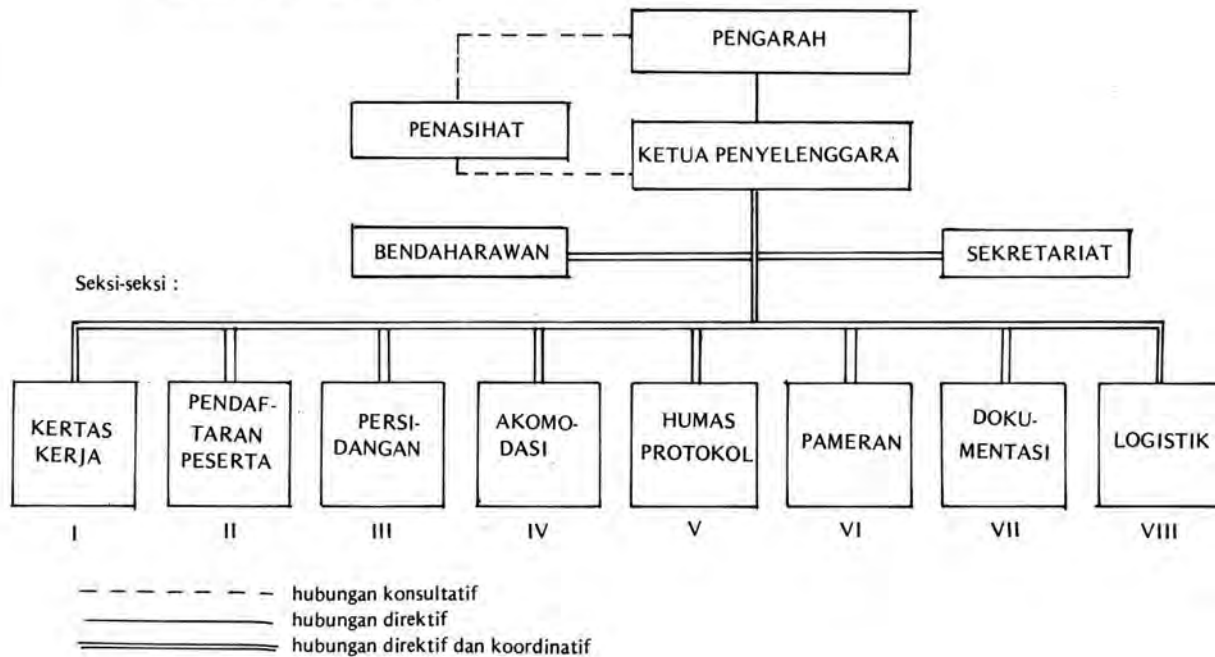
1. Drs. E. Asmad
2. Sartono
3. Suyitno

IV. Dokumentasi dan Laporan

1. Warkim Harnaedi
2. Nasim
3. Sumiyati H.S.
4. Ibrahim Abubakar

Jakarta, 19 September 1983

**BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI PANITIA
KONGRES BAHASA INDONESIA IV
Jakarta, 21 – 26 Nopember 1983**



DAFTAR PESERTA KONGRES BAHASA INDONESIA IV

No.	N a m a	A l a m a t
	A	
1.	Dra. A.A. Kalangie	Ketua Bidang Pendidikan PB IPI Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta Timur
2.	Aaltje Tallei	Mahasiswa FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
3.	A. A. Ngurah Iswana	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
4.	Drs. A. Agoes Sriyono	Public Relation Wisma Metropolitan Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman 29 Jakarta Selatan
5.	A.A. Putra	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
6.	Drs. A. Banta	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
7.	Drs. Achmad Nuryani	Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Pengarang RI Jalan Tembok 27A Menteng Raya Jakarta Pusat

No.	N a m a	A l a m a t
8.	Abdul Aziz	Guru SMA Negeri 7 Jalan Merdeka Timur 14 Jakarta Pusat
9.	Drs. Abdul Aziz	Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
10.	Drs. Abdul Chaer	Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
11.	Drs. Abdul Gaffar Ruskhan	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
12.	Abdul Hadi W.M.	Balai Pustaka Jalan Dr. Wahidin 1 Jakarta Pusat
13.	Drs. Abdulhayi	Dosen FPBS IKIP Yogyakarta Karangmalang Yogyakarta
14.	Drs. Abdullah Hasanah	Kepala Seksi Evaluasi Bidang Pengendalian Program PPPG Bahasa Jalan Gardu Srengseng Sawah, Pasar Minggu Jakarta Selatan
15.	Abdullah Nordin	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia

No.	N a m a	A l a m a t
16.	Drs. Abdullah Payapo	FPBS IKIP Surabaya Jalan Ketintang Surabaya
17.	Abdullah Sani Yahaya	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
18.	Abdul Madjid Afandi Notosewoyo	Dosen/Pembantu Dekan I FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
19.	Drs. Abdul Razak Zaidan	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
20.	Ab. Rahman Ismail	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
21.	Drs. Abud Prawirasumantri	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
22.	Adi Sautini	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
23.	Drs. A. Djunaidi, M.Sc.	Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
24.	Dra. Adwityani	Balai Pustaka Jalan Dr. Wahidin 1 Jakarta Pusat
25.	Ny. Agoes Soenarso	Supervisor PPIA Jalan Pramuka 30 Jakarta Timur
26.	Agung Artini Mataram	Staf Pengajar FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
27.	Drs. Agus Suriamiharja	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
28.	Dr. Agustiar Syahnur, M.A.	FPBS IKIP Padang Air Tawar Padang
29.	Ahmad Ab. Hamid	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
30.	Ahmad Garantjang	Fakultas Keguruan Universitas Tadulako Kampus Bumi Bahari Palu
31.	Drs. Ahmad HP	Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
32.	Ahmad Nurdin, S.H.	Ahli Peneliti Madya Jalan Veteran 7 Jakarta

No.	N a m a	A l a m a t
33.	Ahmad Razali	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
34.	Ainon Mohamad	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
35.	Sdr. Akhlan Husen	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
36.	Drs. Alam Sutawijaya	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
37.	AleI Adam	Kepala Bagian Tata Usaha PPPG Jalan Gardu Srengseng Sawah, Pasar Minggu Jakarta Selatan
38.	Drs. Alexander Subekti Hakim	Ketua YPTM Jalan Awab No. 4 Jatinegara Jakarta Timur
39.	Alit Saputra	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
40.	Dra. Alma Evita Almanar	Asisten Redaktur ILDEP Jalan Tebet Barat Dalam III/24 Jakarta Selatan

No.	N a m a	A l a m a t
41.	Dr. Alwi Dahlan M.	Asisten Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jalan Merdeka Barat 15 Jakarta Pusat
42.	Drs. A. Marzuki	Dosen Fakultas Sastra Universitas Pajajaran Jalan Dipati Ukur 35 Bandung
43.	Prof. Dr. A. Mattulada	Rektor Universitas Tadulako Kampus Bumi Bahari P a l u
44.	Alimuddin	Dosen FPBS IKIP Malang Jalan Semarang 5 Malang
45.	Drs. Amir Fuady	Kampus Pabelan Makamhaji Kotak Pos 82 Surakarta
46.	Amir Hamzah, B.A.	Pensiunan Dosen B5 Australia Kompleks Thayyitah Srengseng, Kebun Jeruk Jakarta Barat.
47.	Drs. A. Murad	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
48.	Anak Agung Putu jene	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
49.	Dra. Anita K. Rustapa	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
50.	Anne-Marie Hussein	Jalan Teuku Umar 50 Jakarta Pusat
51.	Anwar Ali Akbar	Ketua HPBI DKI Jakarta Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan
52.	dr. A. Prayitno	Rumah Sakit TNI AL Jalan Bendungan Hilir Jakarta Selatan
53.	Arbak Othman, M.A.	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
54.	Arfan Abdullah	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
55.	Arfissalam	Guru SMA 55 Jalan Minyak Raya Duren Tiga Jakarta Selatan

No.	N a m a	A l a m a t
56.	Drs. Ariani Isnamurti	Penerbit Bhratara Karya Aksara Jalan Rawabali II/5 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur
57.	Arifin Said	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
58.	Ariyanto	Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta
59.	Aryo	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
60.	Drs. A. Sardju S.M.	FKIP Universitas Negeri Sebelas Maret Makamhaji Kotak Pos 82 Surakarta
61.	Prof. Dr. A.S. Broto	FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
62.	Drs. Asdi S. Dipodjojo	Dosen FPBS IKIP Yogyakarta Karangmalang Yogyakarta
63.	Ashah Samah	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia

No.	N a m a	A l a m a t
64.	Dra. Asni Ayub	FPBS IKIP Padang Air Tawar Padang
65.	Asraf H. Wahab	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
66.	Drs. A.T. Effendi	Guru SMA Perguruan Ksatria Jalan Percetakan Negara D232 Jakarta Pusat
67.	Dra. Atidjah Hamid	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
68.	Dra. Atika Sya'rani	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
69.	Awang Sariyan	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
70.	Ir. St. A. Wartono	Ketua Umum BAKOM PKB Jakarta
71.	H. Azkarmin Zaini	Wartawan Kompas Jalan Palmerah Selatan 26 Jakarta Barat
72.	Dr. Azhar M. Simin	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia

No.	N a m a	A l a m a t
73.	Azimah Saidar	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
	B	
74.	H. Bachtiar S. Yamil	Pegawai Departemen Luar Negeri Jalan Taman Pejambon 6 Jakarta Pusat
75.	Drs. Badri Nawar	Universitas Lampung Lampung
76.	Bahrin Samad	Jalan Pertanian III/54 Pasar Minggu Jakarta Selatan
77.	Bagiasa	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
78.	Bambang Rismadi Hartono	Pimpinan Inter Mission Language Center Hegarmanah 36 Bandung
79.	Bambang S.P.	Wartawan Kompas Jalan Palmerah Selatan 26 Jakarta Barat
80.	Drs. Basuki Suhardi, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia Rawamangun, Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
81.	Berthold Damshauser, M.A.	Jalan Kalibata Utara 15 Pasar Minggu
82.	Berthy D.S. Toreh	Mahasiswa FPBS IKIP Manado Kampus IKIP Manado
83.	Dra. Betty S. Poernomo Soetowo	Laboratorium Bahasa Pusdiklatbangtel Jalan Gegerkalong Hilir Bandung
84.	Binny Buchari	Reporter Harian The Jakarta Post Jalan Palmerah Selatan No. 15 Jakarta Barat
85.	Dr. Bistok A. Siahaan	Lektor Kepala IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
86.	B.N. Marbun, S.H.	Kepala Bagian Publikasi LPPM Jalan Menteng Raya 9 Jakarta Pusat
87.	Drs. B. Rahmanto	Dosen IKIP Sanata Dharma Mrican Tromolpos 29 Yogyakarta
88.	Drs. Buchari Mudahar	Staf Pengajar pada Fakultas Sastra Universitas Andalas Jalan Situjuh 1 Padang

No.	N a m a	A l a m a t
89.	Budiasa	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
90.	Dra. Ny. Busnewan Jasin	Dosen Bahasa Indonesia IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
91.	Drs. Bustaman Hamid M.P.	FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
92.	Drs. Bustaman Mustafa C	Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
93.	Drs. Caca Sudarsa	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
94.	Cit Romlah Mohamad	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur Malaysia
95.	Dra. Cormentya S. D	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
96.	Dadiarta	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar

No.	N a m a	A l a m a t
97.	Dameria Nainggolan	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
98.	Dandan Supratman	Mahasiswa FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
99.	Drs. Dasuki A. Gani	Dekan FKSS IKIP Muhammadiyah Jalan Limau II Blok B Kebayoran Baru Jakarta Selatan
100.	Datin Azizah Mokhzani	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur Malaysia
101.	Drs. Dendy Sugono	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
102.	Dewaki Kramadibrata	Staf Pengajar FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
103.	Dr. D.F. Walker	Institut Theologie Alkitabiah Hangtuah 8, Medan
104.	Dian Pertiwi	HPBI Jalan Cisadane No. 44 Cikini Jakarta Pusat

No.	N a m a	A l a m a t
105.	Dien Kasim	Guru SMA Negeri 21 Jalan Kelurahan Kayu Putih Pulo Mas Jakarta Timur
106.	Drs. Djantera Kawi	Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat Jalan Veteran 268 Banjarmasin
107.	Djoko Kentjono, M.A.	Pengajar FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
108.	Djumingan Kusumo Prayitno, B.A. .	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Bina PPPG Jalan Gardu Srengseng Sawah, Pasar Minggu Jakarta Selatan
109.	Drs. Dominicus Doko Wadu E	Dosen Fakultas Non gelar Teknologi Universitas Palangkaraya Jalan Tanjung Nyahu Palangkaraya
110.	Dr. Edmund A. Anderson	Staf Pengajar Regional Language Center (RELC) 30 Orange Grove Road Singapore 1025 Singapore
111.	Dra. Edwina Satmoko	Pengajar SMEA Budhaya Jalan Matraman Raya 119 Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
112.	Ellin Sjamsuri	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
113.	En. Zainal Abidin Abu B.	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur Malaysia
114.	Drs. E. Toto Supradjorto D.S.	Guru SMA Kanisius Jalan Menteng Raya 64 – 68 Jakarta Pusat
115.	E.W. Silangen S. F	Peserta S3 Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta Timur
116.	Dra. Farida Dahlan	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
117.	Prof. Dr. Farid M. Onn	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur Malaysia
118.	Dra. Felicia N. Utorodewo	Pengajar FSUI Rawamangun, Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
	G	
119.	Sdr. Gatot Susilo Sumowijoyo	Taman Dewi Sartika 9 Ketintang Surabaya
120.	Dr. Geraldine Y.P. Manoppo W.	Jalan Setiabudi I/Jln. E No. 14 Jakarta Selatan
121.	Ny. Gloria C. Kismadi	Dean of Studies PPIA Jalan Pramuka 30 Jakarta Timur
122.	Goenawan Mohamad	Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo Pusat Perdagangan Senen Blok II Lantai III Jakarta Pusat
123.	Gunarta	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
124.	Dr. Gorys Keraf	Dosen FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
125.	Gusti Made Puja	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar

No.	N a m a	A l a m a t
	H	
126.	Drs. Halipami Rasyad	Dosen FPBS IKIP Padang Air Tawar Padang
127.	Tuan Haji Hamdan A. Rahman	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur Malaysia
128.	Hargo Saputro	Wakil Pimpinan Redaksi Majalah Korpri Jalan Kramat IV No. 4, 6 Jakarta
129.	Drs. Hari Mulyono	FPBS IKIP Semarang Jalan Kelud Utara III Semarang
130.	Drs. Harimurti Kridalaksana	Dosen FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
131.	H. Haris, S.H.	Ketua Pengkajian Bahasa Hukum Departemen Kehakiman Jalan Mayjen Sutoyo Cililitan Jakarta Timur
132.	Dra. Hartini Supadi	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
133.	Hj. Hasan Ali	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia

No.	N a m a	A l a m a t
134.	Dra. Henny Th. L. Ticoalu	Dosen Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi Kleak Manado
135.	Henri Chambert Loir	EFEO Gudang Peluru ASS, Jakarta
136.	Ir. Herman Johannes	Guru Besar Universitas Gajah Mada Yogyakarta
137.	Drs. Herman Y. Waluyo M.P.	Kompleks Makam Haji Kotak Pos 82 Surakarta
138.	Ny. Hetty A. Wahid, S.H.	Sekretaris Pengkajian Bahasa Hukum, Departemen Kehakiman Jalan Mayjen Soetoyo Cililitan Jakarta Timur
139.	H.I.Q. Galelano	PP HSBI Wartawan Harian Pelita Tebet Timur Dalam VIII S No. 9 Rt. 005 Rw. 09 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan
140.	Dra. H.I. Roeswoto	Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Direktorat Pendidikan Masyarakat Kepala Seksi Pengembangan Jalan Kramat Raya No. 114 Jakarta Pusat

No.	N a m a	A l a m a t
141.	H.M. Victor Matondang	Kompleks MPR Jalan Kamboja A 162 Cilandak, Jakarta Selatan
142.	Ny. H. Hurip I	Pengajar PPIA Jalan Pramuka 30 Jakarta Timur
143.	I Andri Hartono	Penerjemah/Dokter Puskesmas Patuk Gunung Kidul Yogyakarta
144.	Ida Ayu Putu Kartini	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
145.	Ida Bagus Dharma Palgane'	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
146.	Ida Bagus Anom Putra	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
147.	Ida Gede Seneng	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar

No.	N a m a	A l a m a t
148.	Drs. Idrus	Siaran Luar Negeri RRI Jalan Merdeka Barat 4 - 5 Jakarta Pusat
149.	I.G.A. Wiadnyana	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
150.	IGMK Putrayasa	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
151.	I.G.N. Ardana	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
152.	I Guru Ayu Anam Sri Bhagawati	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
153.	I Gusti Ayu Sundari	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
154.	I Gusti Ketut Adyana	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar

No.	N a m a	A l a m a t
155.	I Gusti Purnawati	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
156.	I Gusti Ngurah Bagus	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
157.	I Gusti Ngurah Bagus	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
158.	I Ketut Asa K	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
159.	I Ketut Pangan Wijana	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
160.	I Ketut Budiawan	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
161.	I Komang Bagiana	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar

No.	N a m a	A l a m a t
161.	Ilyas Effendi	HPBI Jakarta Jalan Cikini Raya 73 Jakarta Pusat
162.	I Made Sumendra	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
163.	I Made Sumendra	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
164.	I Made Tekek	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
165.	Dra. Imas Siti Masitoh	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
166.	Im Young Ho	Jalan Bantu ZV/4 Jakarta
167.	I Nengah Sukartha	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar

No.	N a m a	A l a m a t
168.	Dra. Inny Chikmatin Haryono	FSUI Rawamangun Jakarta Timur
169.	I. Nyoman Peteg	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
170.	I Nyoman Suaka	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
171.	Ny. Irene Siregar	Guru PPIA Jalan Pramuka 30 Jakarta Timur
172.	H. Ismail Daulay	Kepala Bagian Penerbitan PT. Mutiara Jalan Pulo Kambing Pulo Gadung Jakarta Timur
173.	Ismail B. Said	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803, Kuala Lumpur Malaysia
174.	Isti Penny Koentamadi	Guru SMA Santa Ursula I Jalan Pos 2 Jakarta Pusat

No.	N a m a	A l a m a t
175.	I Wayan Lemesnawa	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
176.	I Wayan Sulaga	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
177.	I Wayan Witra	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
178.	I Wayan Bawa	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
179.	I Wayan Pathisme	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
180.	I Wayan Sakra	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
181.	I Wayan Suda	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar

No.	N a m a	A l a m a t
182.	Drs. Iyo Mulyono	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
183.	Drs. Jabrohim Jafar Haruna	IKIP Muhammadiyah Jalan Kapas No. 6 Yogyakarta Guru SMA Negeri I Jalan G. Bawakaraeng 35 Ujung Pandang
184.	Drs. Jamaluddin Hmy.	Dekan STIA Lampung Jalan Gajah Mada Kotabaru Bandar Lampung Tanjung Karang
185.	Janto Arnold Lamentik	Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat
186.	Jasmin Hayati	Guru SMP 136 Jakarta Pusat
187.	Sdr. Jazamuddin B.	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia

No.	N a m a	A l a m a t
188.	Drs. Jazir Burhan	Kepala Pusat Pengembangan PPPG Jalan Gardu Srengseng Sawah, Pasar Minggu Jakarta Selatan
189.	Dra. Jenny T. Hardjatno	Staf Pengajar FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
190.	Johamar	Guru Bahasa Inggris/Indonesia Jalan Pramuka 30 Jakarta Timur
191.	Drs. Johanes F. Pattiasina, M.Sc.	Kepala Balai Penelitian Bahasa Kompleks Benteng Ujung Pandang
192.	Drs. Johannes Kalamper	Pengurus KNPI Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Jalan Cilik Riwut Km 1 Palangkaraya
193.	John M. McGlynn	Penerjemah Jalan Danau Maninjau Bendungan Hilir
194.	Josefina Mantik Kumaat	Staf Pengajar FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
195.	Dr. J.S. Badudu	Dekan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur 37 Bandung

No.	N a m a	A l a m a t
196.	Juana Sadeli	Guru SMA Perguruan Rakyat Jalan Jenderal Sudirman (belakang Rumah Sakit Jakarta) Jakarta Selatan
197	Dra. Juliana A.S.	Dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Sebelas Maret Jalan Urip Sumodiharjo 122 Surakarta
198.	Junayah H.M.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
199.	Dra. Juniar Z. Adji M.P.	Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
200.	Drs. Juwarlan Purwodijoyo	Dosen FKS IKIP Veteran Sukoharjo Solo
201.	Drs. J. Tamalla K	Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku
202.	K. Ahmad B.A.	Kepala Bidang Pengendalian PPPG Jalan Gardu Srengseng Sawah, Pasar Minggu Jakarta Selatan

No.	N a m a	A l a m a t
203.	Kaharudin	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
204.	Kailani Hasan	Mahasiswa FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
205.	Ny. Karmadevi Christian	Dosen Universitas Lampung Gedong Meneng Bandar Lampung
206.	Drs. Karna Yudibrata	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
207.	Karyana	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
208.	Drs. H. Kasim Kardana	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Dr. Setiabudi 209 Bandung
209.	Ketut Linggih	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
210.	Khalid M. Hussain	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia

No.	N a m a	A l a m a t
211.	Dr. Khulijah Salleh	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803, Kuala Lumpur Malaysia
212.	K. Londo	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
213.	Koesnadi Hardjosumantri	Sesmeneg PPLH Jalan Merdeka Barat 15 Jakarta
214.	Koesto Wongsodidjojo	Pensiunan Pejabat Dinas Luar Negeri Jalan Iskandarsyah Raya Flat Deplu Apt. 413 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
215.	Koshiro Kitagawa	Jalan Matraman Raya 6 Jakarta
216.	K.T. Soedarto	President Director Matahari Advertising Jalan Letjen S. Parman 78 Slipi, Jakarta Barat
217.	Dra. Kun Zachrun Istanti	Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, Bulaksumur Yogyakarta
218.	Kusumo Trinerwati	Mahasiswa Indah C2 Jatiwaringin Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
	L	
219.	Laniwati Budisana	Mahasiswa
		Jalan Balai Pustaka Timur 6
		Rawamangun, Jakarta Timur
220.	Letkol Inf. Dr. L.	Kabag III/Khusus
	Arif Budhiman	Sekretariat Umum Hankam
		Departemen Hankam
		Merdeka Barat
		Jakarta Pusat
221.	Leo A. Apituley	Dosen FPBS IKIP Manado
		Kampus IKIP
		Kleak
		Manado
222.	Leonardus Mardiarsito	Pensiunan Dosen
		Jalan Cisadane No. 41
		Jakarta Pusat
223.	Drs. Lesmanesya	Fakultas Sastra
		Universitas Padjadjaran
		Jalan Dipati Ukur 35
		Bandung
224.	Dr. Liaw Yook Fang	Universitas Nasional
		Singapura, Kent Ridge
		Singapura 0511
		Sungapura
225.	Drs. Liberty P.	Dosen FSUI
	Sihombing, M.A.	Rawamangun, Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
226.	Dra. Liska Prasetya S. Djajadinata	Dosen Akademi .Anatesi Departemen Kesehatan RI Jalan Kimia No. 22 – 24 Jakarta Pusat
227.	Lita Pamela Kawira	Pengajar FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
228.	Drs. Livain Lubis	Kepala Pusat Pengembangan Wilayah - LPPM—UNPAD Dosen UNPAD Jalan Dipati Ukur 35 Bandung
229.	Drs. L. Sihotang	Dosen Universitas Advent Indonesia Pos Cipaganti Bandung
230.	Lucy R. Montolalu M	Pengajar FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
231.	Made Astiti Maram	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
232.	Prof. Madya Abdul Hamid Mahmood	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
233.	Prof. Madya Hj. Amat Jahari Muain	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia

No.	N a m a	A l a m a t
234.	Prof. Madya Dr. Nik Safiah Karim	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur Malaysia
235.	Magdalena F. Kadir	Guru PPIA Jalan Pramuka 30 Jakarta Timur
236.	Prof. Mahadi, S.H.	Sekretaris Pembakuan Istilah Hukum Batinkumas Departemen Kehakiman Jalan Mayjen Sutoyo Cililitan Jakarta Timur
237.	Majalah <i>Gadis</i>	Staf Redaksi Majalah Gadis Jalan H. Rasuna Said Blok B Kav. 32 – 33 Jakarta Selatan
238.	Mansoer Pateda	Sekretaris Program D FKIP Universitas Sam Ratulangi Kompleks Jambura Gorontalo
239.	Drs. Marah Rusmali	Dosen FPBS IKIP Padang Air Tawar, Padang
240.	Marcus Purwadi, B.A.	Guru SMA Don Bosco Jalan Mangga Besar 135 Jakarta Pusat
241.	Mardi	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar

No.	N a m a	A l a m a t
242.	Drs. Maria Indra Rukmi	Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Indonesia Rawamangun, Jakarta Timur
243.	Maria Matildis Banda	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
244.	Maria Theresia Rika	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
245.	Mariamah, B.A.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
246.	Dra. Marida L. Siregar	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
247.	Drs. Marjusman Maksan	Dosen FPBS IKIP Padang Air Tawar Padang
248.	Martha E. Siswanto	Mahasiswa FSUI Rawamangun, Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
249.	Drs. Marwoto M.S.	FKIP Universitas Negeri Sebelas Maret Makamhaji Kotak Pos 82 Surakarta
250.	Masao Yamaguchi	Mahasiswa Universitas Gajah Mada
251.	Drs. M. Asfandi Adul	Dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat Jalan Veteran 268 Banjarmasin
252.	Mas Haryadi	FPBS IKIP Surabaya Ketintang Timur Surabaya
253.	Prof. Dr. Maurits M. Simatupang	Dosen FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
254.	Drs. Mbiyo Saleh	FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
255.	Drs. M. Djasmin Nasution	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
256.	Melani Hardjosudiro	Asisten Redaktur ILDEP Jalan Tebet Barat Dalam III/21 Jakarta Selatan

No	N a m a	A l a m a t
257.	Drs. M.E. Suhendar, Dip.	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
258.	Meyuki Maeda	Atase Embassy of Japan Jalan M.H. Thamrin 24 Jakarta
259.	Dr. M. Fakri Gaffar	FIP IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
260.	Dra. Minto Rahayu	Staf Edukatif PEDC Jalan Gegerkalong Hilir Kotak Pos 365 Bandung
261.	Miss Petrina Williams	Jalan Deresan 3 Yogyakarta
262.	M. Lamsari	Ketua Satuan Tugas Koordinasi Pembinaan Perpustakaan Sekolah Propinsi Sumatra Selatan Jalan Kapten A. Rivai Palembang
263.	Dra. Moeharti S. Moeiman	Asisten Redaktur ILDEP Jalan Tebet Barat Dalam III/21 Jakarta Selatan
264.	Drs. Mohamad Daud B. Mohamad	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia

No.	N a m a	A l a m a t
265.	Mohammad Maloto	Guru SMA 38 Jalan Raya Depok Pasar Minggu, Jakarta Selatan
266.	Mohamad Noor Ishak	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
267.	Mohamad Waluyo	Mahasiswa FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
268.	Drs. H. Mohammad Zaid	Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Muhammadiyah Jalan Limau II, Blok B Jakarta Selatan
269.	Mokhtar H. Omar	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
270.	Prof. Drs. M. Ramlan	Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta
271.	M. Sali Haji Taha	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
272.	Dra. Mubasiroh Julistyowati	Dosen Universitas Wijayakusuma Jalan Dukuh Kupang XXV Surabaya

No.	N a m a	A l a m a t
273.	Dr. Muhadjir	Dosen FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
274.	Muh. Aslan	Dekan Fakultas Sastra Universitas Muhammadiyah Jalan Kapas No. 6 Semaki, Yogyakarta
275.	Drs. Mujiyono W.	Fakultas Keguruan Universitas Jambi Jalan Diponegoro 16 Jambi
276.	Mukti U.S.	Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
277.	Muliadi	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
278.	Dra. Multamia, M.A.	Dosen FSUI Rawamangun, Jakarta P Jakarta Timur
279.	Drs. Munadi Padmadiwiria	Pengajar FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
280.	Drs. Mursal Esten	Dosen FPBS IKIP Padang/ Kepala Taman Budaya Padang Kompleks Air Tawar Padang

No.	N a m a	A l a m a t
281.	Murtini S. Pendit	Yayasan Idhayi Jalan A. Rahman Saleh 26 Jakarta Pusat
282.	Muslim Nurdin	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
283.	M. Toyib Usman	Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
284.	Ny. M. Yamilah N	Dosen IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
285.	Drs. Nanang Sunardi	Dosen IKIP Rawamangun Jakarta Timur
286.	Nangsari Ahmad	Dosen FKIP UNSRI Jalan Sri Jayanegara Bukit Besar Palembang
287.	Nani Kustiani	Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta
288.	Naning Pranoto	Redaktur Pelaksana Majalah Halo Jalan Setiabudi Tengah No. 21 Jakarta Selatan

No.	N a m a	A l a m a t
289.	Naraini Ab. Hamid	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
290.	Drs. Nasir Ahmad	Kepala SMA 32 Jalan Kompleks Sekretariat Negara Cidodol Baru Jakarta Selatan
291.	Naziaton Harun	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
292.	Negiwiti	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
293.	Dra. Nelly Hassan	Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadiwipayana Jatiwaringin Jakarta Timur
294.	Prof. Dr. Ngurah Bagus	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
295.	Dr. Nik Abdul Aziz	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia

No.	N a m a	A l a m a t
296.	Ni. Ketut Sukiani	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
297.	Ni. Putu N. Widarsini	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
298.	Ni Wayan Loh	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
299.	Prof. Drs. Noer Toegiman	IKIP Karangmalang Yogyakarta
300.	Dra. Noerzisri A. Nazar	UPPU ITB Lembang Bandung
301.	Drs. Noor Indones	Tutor Belajar Jarak Jauh Program Diploma II Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai Palembang
302.	Drs. M. Rasjid Mulkan	FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
303.	Drs. Nurbaiti Jamalus	Guru SPGN I Jalan Setiabudi Jakarta Selatan

No.	N a m a	A l a m a t
304.	Ir. Nurcahya Darma K.	Staf Perencanaan Diklat Bina Marga Jalan Wijaya 1/63 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
305.	Nurdin B.B.A.	Guru SMPN 30 Jalan Anggrek Jakarta Utara
306.	Nur Faris Lc.	Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
307.	Ny. Nurlela Adnan, M.A.	Dosen IKIP Jakarta FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
308.	Nurlena Basiir	Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
309.	Nyoman Astawa	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
310.	Nyoman Darma Putra	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
311.	H. Oesman Rahman	Manggala BP-7 Taman Pejambon 2 Jakarta Pusat

No.	N a m a	A l a m a t
312.	Oka Tulis	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
313.	Olbers E. Ch. Wuwungan	Pendeta Merdeka Timur 10 Jakarta Pusat
314.	Drs. Osra M. Akbar	Sektor Selatan A-11/48 Darussalam Banda Aceh
315.	Letkol Laut Otiah Nahraeni	Kepala Mimbar Bahasa Indonesia Lems Hankam Farmasi Bendungan Hilir Jakarta Selatan
	P	
316.	Pamusuk Eneste	Editor PT. Gramedia Jalan Palmerah Selatan 22 Lantai IV Jakarta Barat
317.	Dra. Partini Sardjono	Dosen Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur 35 Bandung
318.	Drs. Paul Permadi P.	Kepala Bidang Pengelolaan Teknis dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta Pusat

No.	N a m a	A l a m a t
319.	Drs. Paulus Yos Adi Riyadi	Dosen Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias 13 Denpasar Bali
320.	P. Basuki Cokrodiyo	Guru Percetakan Negara VII No. 6 Jakarta Pusat
321.	Dra. Peraturen Sukapiring	Dosen Fakultas Keguruan Universitas Sumatera Utara Jalan Universitas 19 Medan
322.	Phillipus Ateng Winarno	Wartawan Suara Karya Jalan Bangka II No. 2 Jakarta Selatan
323.	Pius Caro	Wartawan Kompas Jalan Palmerah Selatan 26 Jakarta Barat
324.	Drs. Poerwadi	Dosen FKIP Universitas Sebelas Maret Makamhaji Kotak Pos 82 Surakarta
325.	Priyana	Dosen FMIPA Universitas Gadjah Mada Sekip Unit III Yogyakarta
326.	Pudentia Tetty Karnadi	Pengajar SPG Budhaya Jalan Matraman Raya 119 Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
327.	Pujiarta	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
328.	Purana	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
329.	Purwa	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
330.	Putra Anayana	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
331.	Putri Sri	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
332.	Putu Sri Hindrawati	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
333.	R Drs. Rachmat Hamam	Dosen IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur .

No.	N a m a	A l a m a t
334.	Rahayu Sudiarti	Mahasiswa FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
335.	Ir. Rahayu Yusuf	Lektor Kepala Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bukit Dago Utara Bandung
336.	Rai Teges	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
337.	Ny. Raminah Baribin	Dosen FPBS IKIP Semarang Jalan Kelud Utara III Semarang
338.	R.M. Darmawan	Kepala Bidang Penyelenggara PPPG Jalan Gardu Srengseng Sawah, Pasar Minggu Jakarta Selatan
339.	Rasina Ramli, B.A.	Dosen Lembaga Bahasa IAIN Jakarta Ciputat Raya, Jakarta Selatan
346.	Ir. Ratna Sri Hudioetomo	Staf Pengajar IPB Fakultas MIPA Jalan Raya Pajajaran Bogor
347.	Dra. Ratna Indriani H.	Pembantu Pimpinan Balai Penelitian Bahasa Jalan I Dewa Nyoman Oka 34 Yogyakarta

No.	N a m a	A l a m a t
348.	R. Azhari	Asrenjian/Kabag Taksa Sesko ABRI Bagian Laut Kebayoran Lama Jakarta Selatan
349.	Drs. M. Ridwan Ismail	Dosen Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh
340.	Hjh. Ridzuan	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
341.	Dra. Rishad Masjhur Tamimi S.	Staf Pengajar Universitas Nasional Jalan Sawo Manila, Pejaten Jakarta Selatan
342.	Rita Sri Hastuti	Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta Timur
343.	Drs. R.M. Arif	FKIP UNSRI Jalan Sri Jayanegara Bukit Besar Palembang
344.	Dra. Romlah Suhadi	Guru SMAN II Cirebon d.a. Sukamulus 44 Cibenying Bandung

No.	N a m a	A l a m a t
345.	Rosa J. Mamangkey	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
346.	Dra. Rosmid Rosa	Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
347.	Ruth Bachtum	Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta Timur
348.	Dr. Rustam Amir Effendi, M.A.	Dosen Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Jalan Universitas 19 Medan
349.	Rusni Zulharman	Guru SMA Negeri 7 Jalan Medan Merdeka Timur 14 Jakarta Pusat
350.	Ruwiyanto S	Alumni IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
351.	Dr. Sabarti Akhadiah	Dosen IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
352.	Drs. H. Sabaruddin Ahmad	Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Jalan Gedung Arca No. 53 Medan

No.	N a m a	A l a m a t
353.	Drs. Safari	Pusat Pengujian Balitbangdikbud Jalan Jenderal Sudirman Kotak Pos 297 Senayan Jakarta
354.	Drs. Said Mursalin	Dosen FPBS IKIP Ujung Pandang Gunungsari Baru Ujung Pandang
355.	Saksono Priyanto B.A.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
356.	Dra. Ny. Sakura R.	Dosen IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
357.	Salverda R.	Dosen Seksi Belanda Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta Timur
358.	Drs. Sanawi Latief	Kepala Seksi Ketenagaan PPPG Jalan Gardu Srengseng Sawah, Pasar Minggu Jakarta Selatan
359.	Puan Saodah Abdullah	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
360.	Dra. Saodah Nasution Elgersma	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
361.	Saputra	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
362.	Sariamin Ismail	Jalan Cempedak Rumah HOP No. 1 Pekanbaru
363.	Dra. Sari Nadjamuddin	Dosen IKIP Manado Jalan Santo Yusuf No. 21 Manado
364.	Dra. Sartini	Universitas Sebelas Maret Jalan Urip Sumoharjo 122 Surakarta
365.	Savitri Elias	Staf Pengajar Fakultas Sastra UI PO Box 001 Jatinegara, Jakarta Timur
366.	Prof. S. Baroroh Baried	Dosen Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Bulaksumur Yogyakarta
367.	Ny. S. Chotimah Widodo Santodipuro	Anggota HPI d.a. Cisadane IIB Jakarta Pusat
368.	Seriwati	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar

No.	N a m a	A l a m a t
369.	Dra. Setyawati Supadnomo	Penerjemah Jalan Dwijaya III/1A Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan
370.	En. Shaari Abdullah	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
371.	Shri Krishna Siregar	Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kebayoran Baru Jakarta Selatan
372.	Sibagia	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
373.	Simpen	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
374.	Dra. Siti Aisyah Sunjari	Dosen ASMI Jalan Pacuan Kuda 1 – 5 Pulo Mas, Jakarta Timur
375.	Siti Chamdiah S.	Jalan Kusen Raya No. 1 Kampung Ambon Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
376.	Dra. Siti Salamah Arifin	Fakultas Keguruan Universitas Sriwijaya Jalan Sri Jayanegara Bukit Besar Palembang
377.	Dra. Siti Sundari Tjitrosubono	Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Bulaksumur Yogyakarta
378.	Siti Wantini, B.A.	Kasi Kurikulum PPPG Tertulis Jalan dr. Cipto No. 9 Bandung
379.	Dra. Siti Zahra Yundiafi	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
380.	Dr. Siti Zaharah S.	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
381.	Sjafrill Salim	Staf Asisten Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hi- dup Jalan Medan Merdeka Barat 15 Jakarta Pusat
382.	Drs. Sjamsul Bahri	Kepala Subbagian Urusan Dalam PPPG Srengseng Sawah, Pasar Minggu Jakarta Selatan

No.	N a m a	A l a m a t
383.	Drs. Slamet Riyadi Ali	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
384.	Slamet Sukirnantanto	Sekretaris Umum BAKOM PKB DKI Jakarta
385.	Drs. Soediro Sutoto	Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret Jalan Urip Sumoharjo 122 Surakarta
386.	Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja	Rektor Universitas Tujuh Belas Agustus Jalan Teuku Cik Ditiro Jakarta Pusat
387.	Drs. Soegianto	Dosen Fakultas Sastra Universitas Jember Kampus Tegalboto Jember
388.	Dra. Ny. Soemarto D. M.E.	Direktur Laboratorium Bahasa Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 6 C Surabaya
389.	Drs. Soemarto, M. Sc.	PRI/Dosen IKIP Semarang Jalan Kelud Utara III Semarang

No.	N a m a	A l a m a t
390.	Drs. Soemartono	Kepala Subdirektorat Pembantu Media Pendidikan Direktorat Sarana Pendidikan Jalan Hang Lekir II/16 Jakarta Selatan
391.	Drs. Soenarko	Dosen IKIP Jakarta Rawamangun Jakarta Timur
392.	Soeprapto S.	Reporter/Penyiar Suara Amerika d.a. USIS Jalan Medan Merdeka Selatan 4 Jakarta Pusat
393.	Drs. Soeppyadi	Lektor Kepala/Dosen FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
394.	Drs. S.R.H. Sitanggang	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
395.	Dra. Sofia Manan	Dosen Bahasa Indonesia FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
396.	Sofyan Hadi	IAIN Sjarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta Selatan
397.	Srie Redjeki	Pondok Kopi Blok F II/6, Klender Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
398.	Dra. Sri Nardiati	Balai Penelitian Bahasa Jalan/I Dewa Nyoman Oka 34 Yogyakarta
399.	Sriharti	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
400.	Sri Sayekti	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
401.	Sri Suhita	Guru STM 3 Jalan Kebon Sereh VII Jatinegara Jakarta Timur
402.	Ny. Sri Utami Soewarno	Guru SMA Kanisius Jalan Menteng Raya 64 – 68 Jakarta Pusat
403.	Sri Wirati	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
404.	Dr. Sri Wulan Rujianti Mulyadi	Kepala Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin d.a. Taman Ismail Marzuki Jalan Cikini Raya 73 Jakarta Pusat

No.	N a m a	A l a m a t
405.	Drs. S.S. Nasution	Sekretaris HPI Jalan Cikini Raya 73 Jakarta Pusat
406.	Stephanus Erman Bala	Pengajar SPG Budhaya Jalan Matraman Raya 119 Jakarta Timur
407.	St. Sularto	Wartawan Harian <i>Kompas</i> Jalan Palmerah Selatan 26 Jakarta Barat
408.	Subagio S. Waluyo	Mahasiswa IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
409.	Drs. Subantari Rachmat Aziz	Dosen IAIN Bandung
410.	Suciati	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
411.	Dr. Sudaryono	Dosen Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Bulaksumur Yogyakarta
412.	Sudiari	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
413.	Dra. Ny. H. Suhartini Hartono	Dosen IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
413.	Dra. Sukamti Suratidjo	Dosen Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Bulaksumur Yogyakarta
414.	Sukanadi	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
415.	Prof. Dr. Sulastin Sutrisno	Dekan Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Bulaksumur Yogyakarta
416.	Sunarti	Dosen FPBS IKIP Semarang Jalan Kelud Utara III Semarang
417.	Dra. Sunarti	Pengawas pada Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jalan S. Parman 16 Banjarmasin.
418.	Sunihati	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar

No.	N a m a	A l a m a t
419.	Suparsa	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
420.	Suparto H.S.	Wartawan Jalan Tanah Abang II/35 Jakarta Pusat
421.	Suparwa	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
422.	Sutarto	Guru SMP 67 Jalan Minangkabau Dalam Jakarta Selatan
423. ✦	Drs. Sutoko	Dosen Fakultas Sastra Universitas Jember Jember
424.	Sutrimah	Guru SMA 10 Jakarta Jalan Mangga Besar XIII Jakarta Pusat
425.	Suryati Syam, B.A.	Pusat Pembinaan dan Bahasa Pengembangan, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur
426.	Suyadi	Dosen IKIP Jakarta Jalan Danau Hijau Daun W/21 Cawang Kaveling Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
427.	Suyati Suwarso	Dosen FSUI Rawamangun, Jakarta Timur
428.	Drs. Suyitno	FKIP Universitas Negeri Sebelas Maret Makamhaji Kotak Pos 82 Surakarta
429.	Dr. Syahrudin Kaseng	IKIP Ujung Pandang Gunungsari Baru Ujung Pandang
430.	Syahrul R.	FPBS IKIP Padang Air Tawar Padang Padang
431.	Drs. Syamsuddin Udin	FPBS IKIP Padang Air Tawar Padang
432.	Syukur A. Ghazali	Dosen FPBS IKIP Jalan Semarang 5 Malang
433.	Drs. Swandono	FKIP Universitas Sebelas Maret Makamhaji Kotak Pos 82 Surakarta

No.	N a m a	A l a m a t
	T	
434.	Sdr. Tajuddin H. Abdul Rahman	Persatuan Lingustik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
435.	Tama	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
436.	Prof. Dr. T.A. Ridwan	Dekan Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Jalan Universitas 19 Medan.
437.	Ny. T. Efida Arifudin	Suri Rumah Tangga KS Tubun IIB/8 Jakarta Barat
438.	Dra. T. Fatimah Djajasudarma	Dosen Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur 35 Bandung
439.	Thodos Th. Siahaan, S.H.	Sekretaris Pembakuan Istilah Hukum Batinkumas Departemen Kehakiman Jalan Mayjen Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur
440.	Dra. Threes Y. Kumanireng	Dosen FKIP Universitas Nusa Cendana Jalan Diponegoro Ende, Flores

No.	N a m a	A l a m a t
441.	Tito Wasito	Dosen Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta Timur
442.	Dra. Tjut Rahma M.A. Gani	Dosen IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
443.	Tjut Zahara Idris	Wakil SMEA I Pelita III Jalan By Pass Kav. 98 Jakarta Timur
444.	Ton Ibrahim	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur, Malaysia
445.	Tri Warti	Guru SMA Negeri 10 Jalan Mangga Besar XIII Jakarta Pusat
446.	T.R. Tinambunan	Dosen FPBS IKIP Jalan Merbau No. 38A Medan.
	U	
447.	Ucu Wahyu	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setibudi 229 Bandung
448.	Drs. Ukun Suryaman	Jalan Bukit Dago Selatan 52 Bandung
449.	Drs. H. Undang Misdan	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi No. 229 Bandung

No.	N a m a	A l a m a t
	V	
450.	V.J. Hartono	Guru Jalan Mangga Besar 135 Jakarta Pusat
451.	Dr. W.A.	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
	W	
452.	Dr. W.A.L. Stokhof	Co-Manager/Wakil KITLV d.a. Jalan Tebet Barat Dalam III/21, Jakarta Selatan
453.	Dr. Walter B. Sidjabat	Editor in Chief Penerbit Sinar Harapan Dewi Sartika 36D Jakarta Timur
453.	Wayan Sudana	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
454.	Dra. Wedhawati	Balai Penelitian Bahasa Jalan I Dewa Nyoman Oka 34 Yogyakarta
455.	dr. Widyanto	Staf RSPAD Jalan Abdul Rahman Saleh No. 2 Jakarta Pusat
456.	Widyawati	Harian SINAR HARAPAN Jalan Dewi Sartika 154D Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
457.	Drs. Widjono HS.	Guru/Dosen SLK IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
458.	Drs. Winarno Hami	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
459.	Willie Koen	Editor Kepala Penerbit TIRA PUSTAKA Jalan Cemara Raya Kav. 10D Jakapermai, Bekasi
460.	Drs. Winarno Hami Seno	Kepala Subdirektorat Monitor dan Penyesuaian Pelaksana Teknis Pendidikan Menengah Umum Direktorat Pendidikan Menengah Umum Jalan Hanglekir II/16 Jakarta Selatan
461.	Wirawan	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
462.	Wisaksono Noeradi	Ketua Dewan Eksekutif (Perhumas) Jalan Kebon Sirih 52 Jakarta Pusat
463.	Wuryaningsih Suhadi	STPN Jalan Teuku Umar 4 A Jakarta

No.	N a m a	A l a m a t
	Y	
464.	Yasnur Asri	FPBŞ IKIP Padang Air Tawar Padang
465.	Yetty Kusniyati Hadish	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
466.	Yeni Suciani	Mahasiswa Universitas Nasional d.a. Jalan Utan Kayu No. 29 Gang Jeruk Rt. 0011/006 Jakarta Timur
467.	Drs. Y. Karmin	Dosen IKIP Sanata Dharma Yogyakarta
468.	Yoshihiro Sihata	Mahasiswa UNAS
469.	Drs. Yoyo Mulyana	Dosen FPBS IKIP Bandung Jalan Setiabudi 229 Bandung
470.	Drs. Yudiono K.S., S.U.	Dosen Universitas Diponegoro Jalan Hayam Wuruk 4 Semarang
471.	Yusnidar Effendy	Mahasiswa IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
472.	Yusuf A. Puar	Pengarang Jalan Merpati VI No. 21 Jakarta Selatan

No.	N a m a	A l a m a t
472.	Dra. Yuslina Kasim	FPBS IKIP Padang Air Tawar Padang
473.	Yusta	Fakultas Sastra Universitas Udayana Jalan Nias No. 13 Denpasar
474.	Yusof Abdullah Z	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803, Kuala Lumpur Malaysia
475.	Zainal Abidin Bakar	Persatuan Linguistik Malaysia Peti Surat 803, Kuala Lumpur Malaysia
476.	Drs. Zainal Abidin Gaffar	Dosen FKIP UNSRI Jalan Sri Jayanegara Bukit Besar Palembang
477.	Drs. Zainal Abidin Gani	Dosen FKIP UNSRI Jalan Sri Jayanegara Bukit Besar Palembang
478.	Drs. Zainal Arifin	Pusat Pembinaan dan Pengembangan 'Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur

No.	N a m a	A l a m a t
479.	Zainatoen Djnoeriay Enna-T	Staf Pengajar Universitas Nasional Jalan Sawo Manila Pejaten, Jakarta Selatan
480.	Drs. Zainuddin Amir	Dosen FPBS IKIP Ujung Pandang
481.	Zainuddin Taha	Dosen FPBS IKIP Ujung Pandang Gunungsari Baru Ujungpandang
482.	Dra. Zaniar Rahman	Dosen IKIP Jakarta FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
483.	Zulfahnur Z. Firdaus	Dosen IKIP Jakarta FPBS IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur
484.	Drs. Zulkarnain	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur

No.	Nama	Alamat
472	Lester D. Doster, Engg.	Jl. P. 100, 1000 University Blvd. Hill, Tex. 75450 Hill, Tex. 75450
473	The American Book	1000 University Blvd. Hill, Tex. 75450
474	Lester D. Doster, Engg.	Jl. P. 100, 1000 University Blvd. Hill, Tex. 75450 Hill, Tex. 75450
475	The American Book	1000 University Blvd. Hill, Tex. 75450 Hill, Tex. 75450
476	Lester D. Doster, Engg.	Jl. P. 100, 1000 University Blvd. Hill, Tex. 75450 Hill, Tex. 75450
477	The American Book	1000 University Blvd. Hill, Tex. 75450 Hill, Tex. 75450

Pencetak : CV. Karya Sejahtera
Jakarta